



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang diamanahkan berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Sistematika penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat transparan dan akuntabel. Selain itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya "*good governance*", yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas di masa datang. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka Barat. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

Melalui laporan ini diharapkan Pemerintah Pusat Laporan menjadikan LPPD sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah. Dengan adanya evaluasi dari pemerintah, maka Pemerintah Daerah akan mengetahui tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan selama satu tahun anggaran atau periode tertentu, serta dapat mengetahui pencapaian dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan demikian LPPD ini disamping menjadi gambaran capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, juga menjadi bahan yang sangat berharga dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan pembangunan daerah tahun berikutnya. Harapan kami, pelaporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk mengetahui efektifitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2021 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bangka Barat, meskipun pada Tahun 2021 ini masih tetap berproses untuk adaptasi kebiasaan baru dengan adanya Bencana Non Alam Pandemi COVID-19. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia dan Indonesia. Refocusing anggaran untuk menghadapi dampak Pandemi Covid-19 merupakan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menentukan skala prioritas kegiatan untuk dapat seoptimal mungkin mencapai target kinerja yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna baik secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu, kami tetap mengharapkan berbagai kritik saran sebagai masukan yang membangun bagi pemerintah daerah untuk lebih menyempurnakan laporan ini di masa mendatang. Patut disadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Bangka Barat yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam membangun Bangka Barat dan kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka Barat.

Semoga Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa mendatang akan lebih baik lagi dan membawa dampak pada kemajuan pembangunan daerah yang nantinya akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Bangka Barat.

Muntok, Maret 2022
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUHERMAN, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR DIAGRAM	
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1. Latar Belakang.....	I.1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	I.1
a. Dasar Hukum.....	I.1
b. Data Geografis Wilayah.....	I.2
c. Jumlah Penduduk (Data Demografi).....	I.5
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	I.6
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Dan Pegawai Pemerintah	I.7
f. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	I.9
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I.15
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I.15
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I.16
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I.19
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I. 39
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	I.273
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN DAERAH	II.1
1. Capaian Kinerja Makro.....	II.1
2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II.1
2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II.2
2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	II.37
2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II.51
3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II.53
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
DAN PENUGASAN	III.1
1. Capaian Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III.1

2. Capaian Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III.6
3. Permasalahan dan Kendala	III.6
4. Saran dan Tindak Lanjut.....	III.6

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL.....	IV.1
A. Urusan Pendidikan	IV.1
B. Urusan Kesehatan	IV.9
C. Urusan Pekerjaan Umum	IV.25
D. Urusan Perumahan Rakyat.....	IV.32
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat.....	IV.37
F. Urusan Sosial.....	IV.45
G. Program dan Kegiatan	IV.51

BAB V PENUTUP	V.1
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Tipe dan Jumlah Pegawai per Perangkat Daerah Tahun 2021.....	I.8
Tabel I.2	LAPORAN REALISASI ANGGARAN per 31 Desember 2021	I.13
Tabel I.3	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas	I.20
Tabel I.4	Misi 2: Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi.....	I.24
Tabel I.5	Misi 3: Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas	I.33
Tabel I.6	Misi 4 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	I.35
Tabel I.7	Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat.....	I.40
Tabel I.8	MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Untuk Pelayanan Publik Yang Berkualitas.....	I.279
Tabel II.1	Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dan 2021.....	II.1
Tabel II.2	Capaian Indikator Kinerja Keluaran (Output) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2020	II.2
Tabel II.3	Capaian Indikator Kinerja Hasil (Outcome) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2020	II.37
Tabel II.4	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penunjang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2020	II.51
Tabel II.5	Penilaian Capaian Tahunan	II.54
Tabel II.6	Sasaran terhadap Target Akhir RPJMD	II.54
Tabel II.7	Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	II.55
Tabel II.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah Tahun 2021	II.56
Tabel II.9	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021 (persentase).....	II.57
Tabel II.10	Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021 ..	II.62
Tabel II.11	Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 serta perbandingan dengan Provinsi dan Nasional	62

Tabel II.12	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016 – 2021.....	II.63
Tabel II.13	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 – 2021.....	II.64
Tabel II.14	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2021	II.65
Tabel II.15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.67
Tabel II.16	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif Tahun 2021.....	II.71
Tabel II.17	Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2021	II.71
Tabel II.18	Hasil evaluasi Instansi Leading Sektor 2020-2021	II.72
Tabel II.19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD.....	II.74
Tabel II.20	Analisis Program Yang Mendukung Sasaran.....	II.75
Tabel II.21	Efisiensi Penggunaan Sumber daya	II.76
Tabel II.21	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2021 Terhadap Perjanjian Kinerja	II.76
Tabel II.22	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2021 Terhadap Tahun Sebelumnya.....	II.76
Tabel II.23	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD.....	II.77
Tabel II.24	Analisis Program Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2021.....	II.78
Tabel II.25	Efisiensi Penggunaan Sumber daya Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2021	II.78
Tabel II.26	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2021	II.79
Tabel II.27	Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021....	II.79

Tabel II.28	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020-2021	II.80
Tabel II.29	Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2021	II.81
Tabel II.30	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2021 T erhadap Target Akhir RPJMD	II.82
Tabel II.31	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2021 terhadap Perjanjian Kerja	II.84
Tabel II.32	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap NILAI SAKIP Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II.84
Tabel II.33	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2021 Terhadap Tahun Sebelumnya	II.84
Tabel II.34	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD	II.85
Tabel II.35	Analisis Program Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2021	II.87
Tabel II.36	Efisiensi Penggunaan Sumber daya Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2021	II.87
Tabel II.37	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2021 Terhadap Perjanjian Kinerja	II.87
Tabel II.38	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2021 Terhadap Tahun Sebelumnya	II.88
Tabel II.39	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 - 2021 Kabupaten Bangka Barat	II.88
Tabel II.40	Kualifikasi ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021	II.89
Tabel II.41	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.90
Tabel II.42	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2021 terhadap Realisasi Nasional/ Standar Nasional (jika ada)	II.92
Tabel II.43	Analisis Program Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2021	II.92

Tabel II.44	Efisiensi Penggunaan Sumber daya Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2021	II.93
Tabel II.45	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2021	II.93
Tabel II.46	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Capaian Tahun 2020	II.94
Tabel II.47	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Dibandingkan Dengan Target Nasional	II.94
Tabel II.48	Data Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Bangka Barat	II.97
Tabel II.49	Data Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Bangka Barat	II.99
Tabel II.50	Data Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Bangka Barat	II.101
Tabel II.51	Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat	II.101
Tabel II.51	Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Menurut Kategori Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat.....	II.102
Tabel II.52	Data Capaian SPM Urusan Perumahan Tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Bangka Barat	II.103
Tabel II.53	Data penerima Bantuan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.....	II.104
Tabel II.54	Data Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Bangka Barat	II.105
Tabel II.55	Data Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Bangka Barat.....	II.106
Tabel II.56	Data Jumlah Warga Negara Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat.....	II.107
Tabel II.57	Capaian Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD.....	II.107
Tabel II.58	Capaian Indikator Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Terhadap Capaian Tahun 2020.....	II.108

Tabel II.59	Capaian Kinerja Indikator Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.109
Tabel II.60	Realisasi Program dalam Pencapaian Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	II.110
Tabel II.61	Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2021	II.112
Tabel II.62	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2021 terhadap Perjanjian Kerja	II.112
Tabel II.63	Laporan Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.....	1II.13
Tabel II.64	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2021 Terhadap Tahun Sebelumnya....	II.113
Tabel II.65	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD	II.114
Tabel II.66	Analisis Program sasaran Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2021 ...	II.115
Tabel II.67	Efisiensi Penggunaan Sumber daya Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2021 ...	II.115
Tabel II.68	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2021 Terhadap Perjanjian Kinerja	II.116
Tabel II.69	Tanaman Menghasilkan, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021.....	II.116
Tabel II.70	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2021 Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2020)	II.117
Tabel II.71	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.119
Tabel II.72	Analisis Program Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2021	II.119

Tabel II.73	Efisiensi Penggunaan Sumber daya Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2021.....	II.119
Tabel II.74	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2021 Terhadap Perjanjian Kinerja	II.120
Tabel II.75	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2021 Terhadap Tahun Sebelumnya.....	II.120
Tabel II.76	Perhitungan Indeks Pencemaran Air Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.....	II.121
Tabel II.77	Hasil Pengukuran NO₂ Udara dan SO₂ Udara Ambien Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.....	II.123
Tabel II.78	Indeks Standar Pencemaran Udara.....	II.123
Tabel II.79	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.124
Tabel II.80	Analisis Program Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2021	II.125
Tabel II.81	Efisiensi Penggunaan Sumber daya Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2021	II.125
TABEL IV.1	Tabel Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.....	IV.2
TABEL IV.2	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Tahun 2020	IV.3
TABEL IV.3	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	IV.6
TABEL IV.4	Dukungan Personil dalam mendukung Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.....	IV.8
TABEL IV.5	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan.....	IV.10
TABEL IV.6	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Tahun 2020□	IV.12
TABEL IV.7	Data persalinan yang dilakukan pada dukun beranak.....	IV.15

TABEL IV.8	Data kematian ibu menurut penyebab per Puskesmas Tahun 2021	IV.16
TABEL IV.9	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	IV.20
TABEL IV.10	Dukungan Personil dalam mendukung Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.....	IV.23
TABEL IV.11	Dukungan Tenaga Medis Per Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.....	IV.24
TABEL IV.12	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	IV.26
TABEL IV.13	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Tahun 2020.....	IV.27
TABEL IV.14	Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat	IV.29
TABEL IV.15	Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Menurut Kategori Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat	IV.30
TABEL IV.16	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.....	IV.31
TABEL IV.17	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	IV.33
TABEL IV.18	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Tahun 2020	IV.34
TABEL IV.19	Data penerima Bantuan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.....	IV.35
TABEL IV.20	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	IV.36
TABEL IV.21	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas	IV.38
TABEL IV.22	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Tahun 2020.....	IV.39
TABEL IV.23	Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat yang ditegakkan Tahun 2021	IV.41

TABEL IV.24	Jumlah Evakuasi Kejadian Bencana di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.....	IV.42
TABEL IV.25	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	IV.43
TABEL IV.26	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV.46
TABEL IV.27	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Tahun 2020	IV.47
TABEL IV.28	Data Jumlah Warga Negara Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat.....	IV.48
TABEL IV.29	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.....	IV.49
TABEL IV.30	Alokasi Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.....	IV.51

DAFTAR DIAGRAM

Diagram I.1	Jumlah dan Sebaran Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 20210.....	I.5
Diagram I.2	Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	I.6
Diagram I.3	Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat Usia Produktif (15-64 tahun) dengan Usia Non Produktif Tahun 2021	I.6
Diagram I.4	Luas dan Sebaran Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)	I.7
Diagram I.5	PNS Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021.....	I.9
Diagram I.6	Persentase Kontribusi Jenis-jenis Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah (Realisasi) Tahun Anggaran 2021	I.10
Diagram I.7	Persentase Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	I.11
Diagram I.8	Persentase Kontribusi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	I.11
Diagram II.1	Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014-2021	II.109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

b. Data Geografis Wilayah

Sesuai dengan namanya, wilayah Kabupaten Bangka Barat berada di ujung barat Pulau Bangka. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bangka Barat berbatasan dengan laut, hal tersebut menjadikan setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat memiliki garis pantai dan laut (gambar 1).

Gambar I.1
Letak Geografis Kabupaten Bangka Barat



Sumber: www.wikipedia.org

Kabupaten yang dikenal juga dengan “Negeri Sejiran Setason” ini memiliki posisi yang strategis sebagai jembatan menuju pusat-pusat ekonomi regional Asia Tenggara seperti Singapura, Johor dan Kuala Lumpur (Malaysia), serta Bangkok (Thailand). Dengan memanfaatkan posisi yang strategis ini dan telah ditetapkannya Kota Muntok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maka peluang kerjasama jasa dan perdagangan (intra-regional) dengan Palembang, Batam, Jakarta, dan Pontianak terbuka lebar. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Bangka Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam penciptaan pusat pertumbuhan wilayah, baik pada skala regional maupun nasional.

Secara geografis posisi Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi antara 105000’–106000’ BT, 01000’–02010’ LS dan terletak di ujung barat Pulau Bangka yang membentuk semenanjung dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bangka;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bangka;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat sekitar 284.886,05 ha. Kabupaten Bangka Barat juga memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan $\pm 214,85$ ha dan

sebagian dari pulau-pulau tersebut belum berpenghuni. Kabupaten Bangka Barat juga memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai yang dimiliki adalah 297,38 km.

Gambar I.2
Peta Geografis Kabupaten Bangka Barat



Wilayah daratan Kabupaten Bangka Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka. Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa-desanya di Kabupaten Bangka Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Tuik Kecamatan Kelapa yang berbatasan dengan Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- 2) Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa yang berbatasan dengan Desa Banyuasin Kecamatan Riau Silip dan Desa Maras Senang Kabupaten Bangka;
- 3) Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;
- 4) Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Desa Neknang Kecamatan Bakam dan Desa Saing Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- 5) Desa Sangku Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- 6) Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Dusun Sungai Dua Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

Iklim di Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam iklim tropis dan basah, yaitu daerah dengan bulan basah selama 7–9 bulan dan bulan kering selama 3 bulan per tahun pada keadaan normal. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Bangka Barat berkisar > 2.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan tahunan rata-rata > 200 hari/tahun. Variasi curah hujan berkisar antara 84,5 mm–406,1 mm setiap bulannya dengan curah hujan terendah pada bulan Februari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata bervariasi antara 19,0%–57,3% dengan tekanan udara antara 1008,9–1011,1 mbs. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 1,8 sampai 3,7 jam per hari pada musim hujan dan 3,8 sampai 6,7 jam per hari pada musim kemarau dengan kecepatan angin rata-rata antara 1,6 sampai 4,4 knots tiap bulannya. Arah angin terbanyak terjadi di bulan Desember dan Januari dari arah Utara, pada bulan April dari arah Barat kemudian pada bulan berikutnya bergeser ke arah Selatan, Tenggara dan Timur dan pada bulan Nopember kembali ke arah Barat. Suhu udara per bulannya rata-rata antara 26,20°C sampai 27,80°C dengan suhu minimum rata-rata 23,50°C dan suhu maksimum rata-rata 31,10°C serta tingkat kelembaban rata-rata berkisar 80% - 87%.

Topografi Kabupaten Bangka Barat relatif bervariasi yaitu dengan kemiringan lereng antara 0–40%. Secara umum topografi Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 4% berbukit, 51% berombak dan bergelombang, 20% datar dan 25% nya adalah rawa-rawa.

Sungai–sungai di Kabupaten Bangka Barat berjumlah 470 sungai dan tersebar di seluruh kecamatan. Sungai Kampak, Sungai Antan, Sungai Penyampak, Sungai Kayu Arang, Sungai Muntok, Sungai Menduyung, Sungai Sukal dan Sungai Pelanggar adalah sungai-sungai besar yang ada di Bangka Barat. Namun sungai–sungai tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk sektor lain, terutama karena sungai-sungai tersebut sudah mulai berkurang debit airnya dan kualitas air yang menurun disebabkan masalah lingkungan dan dampak dari penambangan timah rakyat. Kabupaten Bangka Barat memiliki 87 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan luas keseluruhan DAS mencapai 96.513 ha, dengan DAS terluas adalah DAS Mancung (59.844 ha)

Di kawasan hutan wilayah Bangka Barat masih banyak terdapat jenis binatang liar, seperti rusa, lutung, beruk, monyet, babi, trenggiling, napuh, musang. Di kawasan hutan wilayah Bangka Barat juga masih dapat ditemukan jenis burung dan unggas liar seperti beberapa jenis murai, tekukur, pipit, kalong, elang, ayam hutan dan lain-lain. Selain itu, seperti lazimnya daerah beriklim tropis, hutan di wilayah ini juga dihuni oleh berbagai jenis ular-ular besar, salah satunya adalah beberapa jenis ular phyton, jenis ular-ular berbisa seperti ular sendok/kobra, ular tepung ari dan beberapa jenis buaya. Walaupun

berada dalam tataran Kepulauan Sumatera, kawasan hutan Bangka Barat tidak dihuni oleh jenis binatang-binatang seperti gajah, harimau dan lainnya.

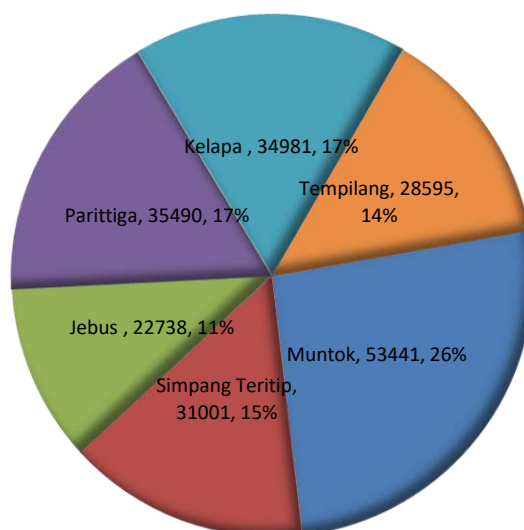
Jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan hutan wilayah Bangka Barat terdiri dari berbagai macam kayu dan bunga seperti ramin, meranti, kapak, jelutung, pulai, gelam, bilangor, meranti rawa, cempedak air, mahang, bakau, anggrek hutan, ketakung (kantong semar) dan lain sebagainya. Jenis kayu khas yang hanya terdapat di Pulau Bangka adalah Pohon Pelawan (ipoa mangarawan).

c. Jumlah Penduduk (Data Demografi)

Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai etnis seperti Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku lainnya dari daratan Pulau Sumatera. Mayoritas penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah pemeluk agama Islam.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat per Semester II tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah 206.246 jiwa yang terdiri dari 106.205 jiwa laki-laki (51,52%) dan 100.041 jiwa perempuan (48,48%). Jumlah tersebut meningkat 1.719 jiwa atau 0,84% dari jumlah penduduk tahun 2020 yang sebesar 204.527 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dikarenakan berbagai faktor seperti adanya kenaikan angka kelahiran, rendahnya angka kematian serta dampak dari migrasi masuk di Kabupaten Bangka Barat.

Diagram I.1
Jumlah dan Sebaran Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021



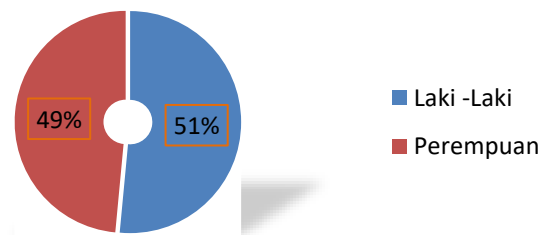
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Dalam diagram 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dan sebaran penduduk terbanyak masih didominasi oleh Kecamatan Muntok. Hal

tersebut disebabkan karena Kecamatan Muntok adalah kecamatan yang menjadi ibukota Kabupaten yang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan.

Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki- laki, namun dengan persentase yang tidak terlalu besar (perbandingan persentase dimaksud dapat dilihat pada diagram 2).

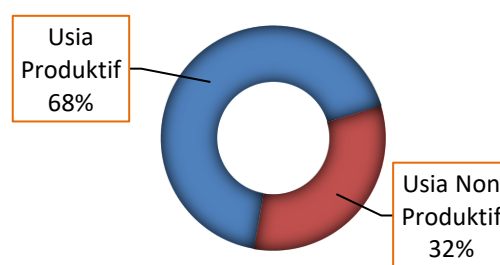
Diagram I.2
Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Sedangkan untuk komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia, jumlah kelompok usia produktif yaitu usia 15 - 64 tahun masih mendominasi dengan jumlah 139.415 jiwa atau 67,60% dari total jumlah penduduk. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram I.3
Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat Usia Produktif (15-64 tahun) dengan Usia Non Produktif Tahun 2021



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

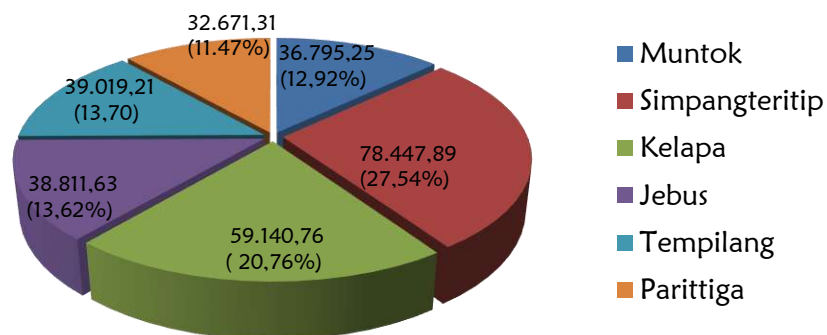
Secara administratif, wilayah di Kabupaten Bangka Barat dibagi menjadi 6 (enam) kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Muntok memiliki 5 kelurahan dan 4 desa;
- 2) Kecamatan Simpang Teritip memiliki 13 desa;
- 3) Kecamatan Jebus memiliki 11 desa;
- 4) Kecamatan Kelapa memiliki 1 kelurahan dan 13 desa;

- 5) Kecamatan Tempilang memiliki 9 desa; dan
- 6) Kecamatan Parittiga memiliki 10 desa.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 – 2034, Kecamatan Simpangteritip dan Kecamatan Kelapa merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

Diagram I.4
Luas dan Sebaran Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)



Sumber data : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034

Jarak Kota Muntok (ibukota Kabupaten Bangka Barat) ke Kota Pangkalpinang (ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) adalah 138 km. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh dengan Kota Muntok adalah Kecamatan Tempilang (108 km) dan kecamatan terdekat adalah Kecamatan Simpang Teritip (54 km).

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 nomor 23 menyebutkan bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Pasal 208 ayat (1) bahwa kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas (1) sekretariat daerah; (2) sekretariat DPRD; (3) inspektorat; (4) dinas; (5) badan; dan (6) kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat memiliki perangkat daerah yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. 16 dinas;
- e. 6 (empat) badan; dan
- f. 6 (enam) kecamatan.

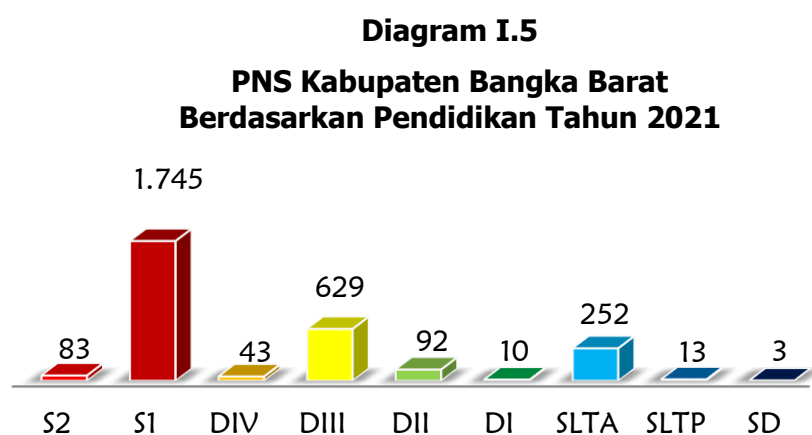
Dalam tabel di bawah ini, disajikan rincian perangkat daerah, tipe perangkat daerah dan jumlah pegawai (Pegawai Negeri Sipil) per perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat :

Tabel I.1
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Tipe dan Jumlah Pegawai per Perangkat Daerah Tahun 2020

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	TIBE PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI (PNS)
1	Sekretariat Daerah	A	58
2	Sekretariat DPRD	C	17
3	Inspektorat	B	29
A	Dinas		
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	A	1.357
2	Dinas Kesehatan	A	540
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	35
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	B	33
5	Dinas Pertanian dan Pangan	A	95
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A	26
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	18
8	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A	31
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	21
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	19
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	16
12	Dinas Lingkungan Hidup	A	22
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	B	24
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A	22
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	B	20
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	C	13
B	Badan		
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	B	28
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	B	31
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	B	25
4	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	A	26
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		15
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		13
C	Kecamatan		
1	Kecamatan Muntok	A	12
	a. Kelurahan Sungaibaru		5
	b. Kelurahan Sungaidaeng		5
	c. Kelurahan Tanjung		8

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	TIPE PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI (PNS)
	d. Kelurahan Menjelang		3
	e. Kelurahan Keranggan		8
2	Kecamatan Simpang Teritip	A	17
3	Kecamatan Jebus	A	24
4	Kecamatan Kelapa	A	16
	▪ Kelurahan Kelapa		9
5	Kecamatan Tempilang	A	21
6	Kecamatan Parittiga	A	18
	Unit Organisasi Bersifat Khusus		
1	Rumah Sakit Umum Daerah	C	185

Pada tahun 2021, pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat berjumlah 2.870 orang. Jumlah PNS dengan lulusan strata 1 (S1) merupakan jumlah PNS terbanyak di Kabupaten Bangka Barat tahun 2021, yaitu 1.745 orang atau 60,80%. Berikut adalah diagram PNS Kabupaten Bangka Barat berdasarkan pendidikan :



Sumber : BKPSDM Kabupaten Bangka Barat

PNS berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan PNS yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu berjumlah 1.759 orang dibandingkan 1.111 orang. Sedangkan rasio pegawai negeri sipil (PNS) dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1,39 persen, dimana setiap 100 orang penduduk dilayani oleh 1 atau 2 orang PNS.

f. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021. Sedangkan penjabarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.

Wabah COVID-19 telah mempengaruhi daerah bahkan negara untuk melakukan perubahan terhadap struktur APBN dan APBD. Untuk mengantisipasi dinamika kondisi yang terjadi pada tahun berjalan, terutama

untuk menanggulangi wabah COVID-19, maka dilakukan mekanisme perubahan terhadap APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Perubahan tersebut meliputi semua komponen APBD baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

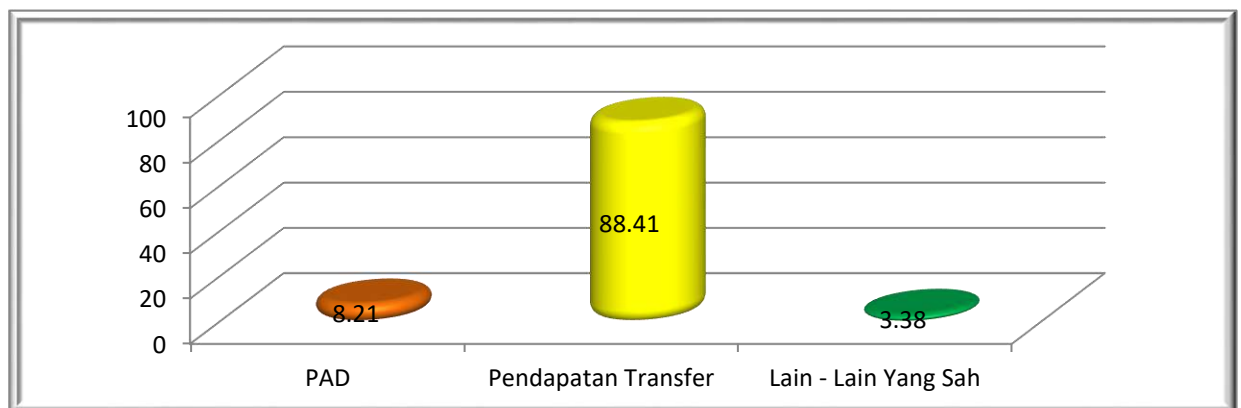
1) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan dalam APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bangka Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Total target Pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 935.591.946.581,77 dengan realisasi sebesar Rp 879.865.299.394,06 atau 94,03%, yang meliputi :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); target PAD pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 76.804.641.199,77 dengan realisasi sebesar Rp 59.693.536.555,86 atau sebesar 77,57%.
- b) Pendapatan Transfer; target yang ditetapkan untuk Pendapatan Transfer tahun anggaran 2021 sebesar Rp 827.130.058.409,00 dan terealisasi sebesar Rp 790.652.328.838,20 atau 95,59%.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 31.657.246.973,00 dan terealisasi sebesar Rp 29.519.434,00 atau sebesar 93,25%.

Berikut adalah diagram kontribusi (target) masing-masing jenis pendapatan terhadap Pendapatan Daerah :

Diagram I.6
Persentase Kontribusi Jenis-jenis Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah (Realisasi) Tahun Anggaran 2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat

Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa Dana Pendapatan Transfer dalam struktur APBD Kabupaten Bangka Barat masih menjadi

penyangga utama terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar 88,41%.

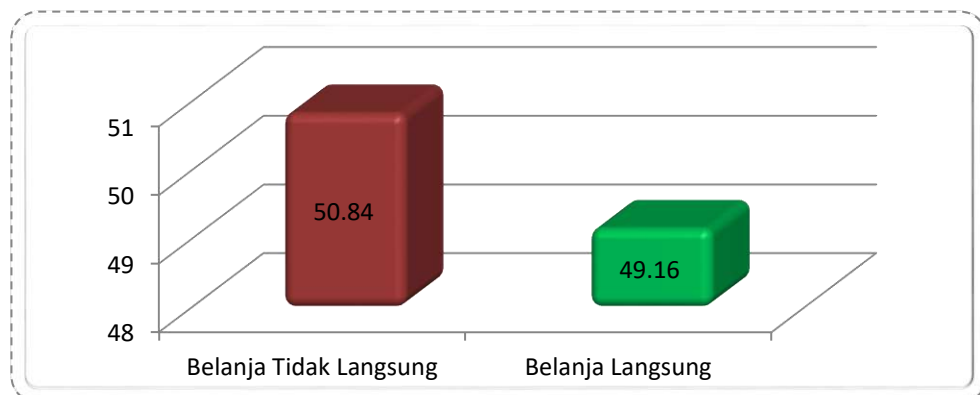
2) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah menurut jenis belanja terdiri dari 2 jenis belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dalam APBD Perubahan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021, jumlah total Belanja Daerah adalah sebesar Rp 947.015.149.144,24 dengan realisasi sebesar Rp 876.775.909.433,38 (92,58%), yang meliputi :

- a) Belanja Tidak Langsung; anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 481.495.032.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 461.071.000.135,98 atau sebesar 95,76%.
- b) Belanja Langsung : anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 465.520.116.743,84 dengan realisasi Rp 415.704.909.297,40 atau sebesar 89,30%.

Diagram I.7

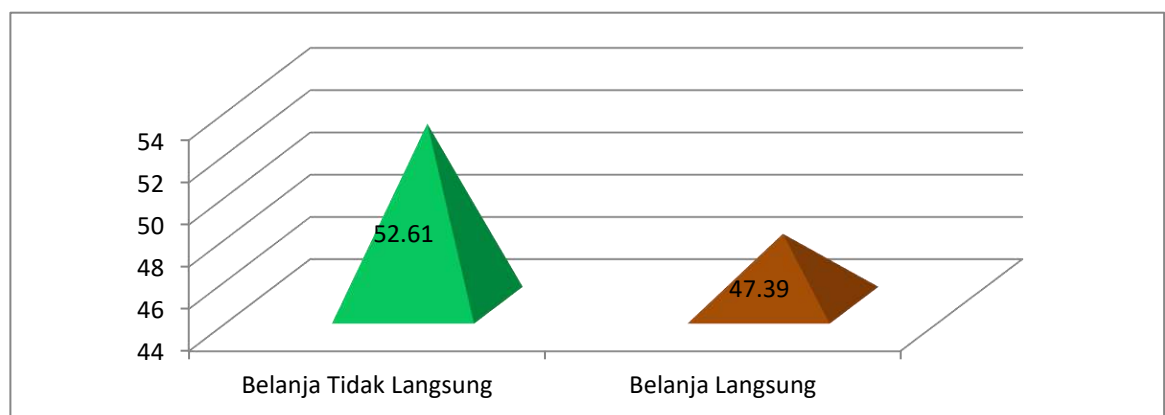
Persentase Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Diagram I.8

Persentase Kontribusi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

3) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- a) Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 ditargetkan Rp 11.423.202.562,47 dan terealisasi Rp **11.494.231.582,47** atau 100,62%. Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan ***Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya***, yaitu sebesar Rp 11.323.202.562,47 dengan realisasi sebesar Rp 11.323.202.562,47 (100,00%) dan ***Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman*** yang ditargetkan sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp **171.029.020,00** atau 171,03%.
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang merupakan ***Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah***, pada tahun 2021 tidak dianggarkan ***Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah***.

Rincian anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

per 31 Desember 2021

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
4.	PENDAPATAN DAERAH	935.591.946.581,77	879.865.299.394,06	(55.726.647.187,71)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.804.641.199,77	59.693.536.555,86	(17.111.104.643,91)
4.1.1	Pajak Daerah	27.797.500.000,00	20.041.982.581,75	(7.755.517.418,25)
4.1.2	Retribusi Daerah	6.680.334.224,00	4.430.974.655,25	(2.249.359.568,75)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	4.856.440.070,26	4.856.440.070,26	0,00
4.1.4	Lain – lain PAD yang Sah	37.470.366.905,51	30.364.139.248,60	(7.106.227.656,91)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	827.130.058.409,00	790.652.328.838,20	(36.477.729.570,80)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	756.241.316.839,00	738.276.085.176,00	(17.965.231.663,00)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.888.741.570,00	52.376.243.662,20	(18.512.497.907,80)
4.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31.657.246.973,00	29.519.434.000,00	(2.137.812.973,00)
4.3.3	Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	31.657.246.973,00	29.519.434.000,00	(2.137.812.973,00)
5	BELANJA DAERAH	947.015.149.144,24	876.775.909.433,38	(70.239.239.710,86)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	481.495.032.400,40	461.071.000.135,98	(20.424.032.264,42)
5.1.1	Belanja Pegawai	343.497.229.390,00	331.320.839.369,00	(12.176.390.021,00)
5.1.4	Belanja Hibah	17.677.242.308,00	12.966.037.865,00	(4.711.204.443,00)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.519.552.500,00	2.381.477.274,00	(138.075.226,00)
5.1.6	Belanja Tidak Terduga	355.115.400,00	0,00	(355.115.400,00)
5.1.7	Belanja Bagi Hasil	3.446.282.062,40	2.595.710.027,98	(850.572.034,42)
5.1.8	Belanja Bantuan Keuangan	113.999.610.740,00	111.806.935.600,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	465.520.116.743,84	415.704.909.297,40	(49.815.207.446,44)
5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	334.640.306.864,12	296.081.262.711,92	(38.559.044.152,20)

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
5.2.2	Belanja Modal Tanah	5.635.362.650,00	5.498.170.870,00	(137.191.780,00)
5.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.614.107.665,00	28.321.836.534,18	(7.292.271.130,82)
5.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.065.594.640,72	29.153.043.926,36	(912.550.714,36)
5.2.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	56.152.920.228,00	53.165.752.404,94	(2.987.167.823,06)
5.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.411.824.696,00	3.484.842.850,00	73.018.154,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.882.607.095.726,01)	(1.756.641.208.827,44)	125.965.886.898,57
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.423.202.562,47	11.494.231.582,47	71.029.020,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.323.202.562,47	11.323.202.562,47	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	171.029.020,00	71.029.020,00
6.2	PENGELUARAN BIAYA		0,00	0,00
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	11.423.202.562,47	11.494.231.582,47	71.029.020,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	14.583.621.543,15	14.583.621.543,15

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan adalah proses awal untuk merancang suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Perencanaan pembangunan juga merupakan blueprint pelaksanaan kegiatan pembangunan yang mempertimbangkan dan mendayagunakan segala potensi atau sumberdaya yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik, daerah diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Barat telah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan. Dokumen tersebut kemudian dituangkan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat disusun dengan melakukan analisis terhadap perkembangan maupun tren pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik target yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti MDGs yang diperbaharui menjadi SDGs, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat seperti RPJMN dan SPM maupun target-target yang telah ditetapkan oleh dokumen perencanaan pembangunan periode sebelumnya yang belum tercapai. Analisis standar dimaksud tentunya adalah standar pencapaian pembangunan pada saat dokumen perencanaan pembangunan tersebut disusun.

Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021, permasalahan-permasalahan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Permasalahan di bidang ekonomi, yang meliputi :
 - a) semakin menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian daerah;
 - b) terkendalanya perkembangan sektor pertanian dalam arti luas sebagai sektor unggulan di masa yang akan datang;
 - c) belum berkembangnya sektor pariwisata daerah;
 - d) rendahnya kualitas infrastruktur;
 - e) belum kondusifnya iklim investasi daerah; dan
 - f) belum berkembangnya kewirausahaan mikro daerah.

- 2) Permasalahan di bidang lingkungan hidup, meliputi :
 - a) ancaman kerusakan lingkungan pada eks tambang, hutan dan daerah aliran sungai; dan
 - b) belum optimalnya pelayanan di bidang lingkungan hidup.
- 3) Permasalahan di bidang sosial, meliputi :
 - a) rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat, khususnya di bidang pendidikan;
 - b) rendahnya kualitas layanan pendidikan;
 - c) rendahnya layanan kesehatan;
 - d) ancaman degradasi moral, termasuk meningkatnya jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak;
 - e) intervensi program Pemerintah Daerah terkait penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran;
 - f) masih minimnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman lingkungan secara swadaya; dan
 - g) belum optimalnya pembinaan kesenian dan olahraga.
- 4) Permasalahan di bidang tata kelola pemerintahan, yang meliputi :
 - a) belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah;
 - b) kurangnya kemampuan administrasi pelayanan umum Pemerintah Daerah;
 - c) kurang matangnya perencanaan program Pemerintah Daerah;
 - d) tumpang tindihnya pemanfaatan lahan Kabupaten;
 - e) dibatasinya kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah sebagai konsekuensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; dan
 - f) keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka pembangunan daerah yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas untuk 5 (lima) tahun ke depan, Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 04 November 2016.

Berdasarkan RPJMD tersebut, visi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021 adalah **'MENUJU KABUPATEN BANGKA BARAT HEBAT 2021'**. Pernyataan visi di atas bermakna bahwa pada tahun 2021, Kabupaten Bangka Barat adalah kabupaten yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, memiliki daya saing daerah yang tinggi, memiliki masyarakat yang berkualitas

dan pembangunan yang berkesinambungan dengan lingkungan hidup yang lestari.

Visi tersebut telah memperhatikan dan mempertimbangkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 - 2019, yaitu **"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERDASARKAN GOTONG ROYONG"** dan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022, yaitu **"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"**.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021 adalah perencanaan pembangunan tahapan ke 3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 dengan visi **"Bangka Barat Bersih, Mandiri, dan Makmur 2025"**.

Untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021, telah disusun 4 (empat) misi pembangunan yang merupakan komitmen dan rumusan umum dalam pelaksanaan agenda-agenda utama pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas.**

Misi pertama merupakan upaya untuk mencapai pengelolaan aspek pemerintahan yang baik (*good governance*) secara optimal, seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, responsif, ketaatan hukum dan berorientasi kepada pelayanan publik menjadi semangat dalam pengelolaan tata pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat. Penerapan manajerial birokrasi dan semangat *to reform bureaucracy* yang mengarah kepada terwujudnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi hal utama terhadap perubahan cara pandang tata kelola pemerintahan, sehingga pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial budaya dapat maksimal.

2) **Misi 2 : Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumberdaya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi.**

Misi kedua adalah upaya membangun perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi. Beberapa permasalahan di aspek perekonomian daerah seperti komoditi unggulan non tambang yang kurang berdaya saing, konektivitas antar wilayah dan infrastruktur daerah yang belum memadai harus segera dipecahkan dan diantisipasi dengan strategi dan kebijakan

yang tepat. Namun, untuk pertumbuhan sektor non tambang setiap tahun terus mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Pembentukan dan pembangunan kawasan ekonomi cepat tumbuh dan penguatan sektor primer seperti pertanian, perkebunan dan perikanan dengan melibatkan tenaga kerja yang masif serta pemberdayaan, pembinaan sektor ekonomi kreatif seperti pariwisata, kerajinan, dan UKM/IKM memiliki prospek yang tinggi untuk dikembangkan.

Permasalahan lainnya terkait masih rendahnya semangat kewirausahaan, pemasaran dan promosi yang tidak efektif, nilai jual produk yang tidak memiliki nilai tambah dan penerapan teknologi yang belum maksimal untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksi harus segera diatasi. Kabupaten Bangka Barat sudah tidak bisa lagi hanya menggantungkan harapan untuk menaikkan perekonomian daerah kepada industri pengelolaan timah dan non tambang seperti selama ini. Karena selain timah adalah sumberdaya yang tidak bisa diperbaharui dan terus berkurang, kebijakan-kebijakan terkait penambangan sebagian besar masih merupakan domain Pemerintah Pusat dan selalu bersinggungan dengan masalah lingkungan hidup yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah-masalah baru yang terkait. Untuk itu, isu pembangunan yang bersifat inklusif (*pro poor and pro job*) dapat diterapkan apabila konsentrasi pembangunan di desa-desa dilaksanakan secara merata dengan pemetaan yang tepat sesuai kondisi dan potensi desa masing-masing.

3) **Misi 3 : Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas.**

Misi 3 terkait dengan manusia yang menjadi subyek dan obyek dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Masyarakat harus mampu bersaing dalam menghadapi tantangan global. Daerah yang memiliki sumberdaya manusia berdaya saing tinggi, baik dalam aspek ekonomi dan sosial budaya, akan mempercepat proses pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan tenteram.

4) **Misi 4 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan.**

Konsep pembangunan yang berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan, dimana pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia harus diimbangi dengan upaya melestarikan lingkungan hidup. Pada saat ini, lingkungan hidup telah menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional bukan hanya daerah. Untuk itu, pembangunan berkelanjutan di Kabupaten

Bangka Barat harus berlandaskan pemanfaatan sumberdaya kegiatan ekonomi dan pembangunan yang memperhatikan kearifan lokal.

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel di bawah ini akan memberikan gambaran program pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021 :

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Optimalisasi pengelolaan aset daerah				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penunjang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penguatan pengawasan internal				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat	Inspektorat Daerah
		Penguatan kelembagaan Pemerintahan desa				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Inspektorat	Inspektorat Daerah
						Program Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan
						Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2. Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	7,38%	9%	Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Penunjang	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
						Program Optimalisasi PBB & BPHTB	Penunjang	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
	3. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Penerapan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Nilai SAKIP Daerah	57	70	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang	Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi pada perencanaan tingkat daerah				Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penunjang	Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Daerah
						Perencanaan Sosial Budaya	Penunjang	Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Daerah
						Program Perencanaan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Penunjang	Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Daerah
						Program perencanaan Pengembangan Wilayah Setrategis Cepat Tumbuh	Penunjang	Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Daerah
						Program Pengembangan Statistik Daerah	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Penunjang	Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Daerah
	4. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Peningkatan kualitas Manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	82,73	Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	Penunjang	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah Daerah				Program Peningkatan Kompetensi ASN	Penunjang	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						Program pemanfaatan Database ASN dan Layanan Kesejahteraan	Penunjang	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Penguatan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.				Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan	Penunjang	Sekretariat Daerah		
								Program Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan	Penunjang	Sekretariat Daerah
		Peningkatan pengelolaan kearsipan						Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	5. Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar sebagai baseline	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	n/a	80%	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kesehatan	Dinkes		
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Kesehatan	Dinkes		
						Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinkes		
						Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dikpora		
		dasar pemerintah daerah menggunakan berbagai sumber pendanaan				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dikpora		
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PU dan Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
						Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam						Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
						Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
						Program Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi terkait pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	78	85	Program kerjasama informasi dengan massmedia	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Perbaikan Sistem Pelayanan Publik				Program pengembangan komunikasi, informatika dan media massa	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan				Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Penunjang	Sekretariat Daerah
		Peningkatan kinerja Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan				Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Penunjang	Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah	Penunjang	Kecamatan
						Program Penyelenggaraan tugas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah	Penunjang	Kecamatan

Misi 2: Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Mengembangkan agribisnis /agro industri	1. Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas unggulan tanaman pangan secara konsisten guna mencapai produksi yang optimal	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan (dalam juta)	1,1	2	Program peningkatan produksi pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Peningkatan kapabilitas manajemen usaha dan teknologi SDM petani sebagai wirausaha melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan				Program Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi tingkat usaha tani (jaringan tersier)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian				Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian				Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis tanaman pangan				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian)	Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
						Program pemberdayaan penyuluh pertanian Lapangan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
	2. Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas unggulan tanaman perkebunan rakyat secara konsisten guna mencapai produksi yang optimal dan mutu yang lebih baik	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	1.362,76	4.069,20	Program peningkatan produksi Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Peningkatan kapabilitas manajemen usaha dan teknologi SDM petani sebagai wirausaha melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan				Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis tanaman perkebunan Rakyat				Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
						Program pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	3. Meningkatnya nilai produksi perikanan	Peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan dalam usaha perikanan tangkap	Nilai produksi perikanan tangkap	287.000,29	633.268,73	Program pengembangan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan kemampuan dan kapasitas pembudidaya sebagai wirausaha dalam usaha budidaya perikanan AIR TAWAR	Nilai produksi perikanan budidaya AIR TAWAR	3.164,53	7.520,05	Program pengembangan budidaya perikanan air tawar	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan kemampuan dan kapasitas pembudidaya sebagai wirausaha dalam usaha budidaya perikanan AIR LAUT	Nilai produksi perikanan budidaya AIR LAUT	3.042,50	7.982,00	Program pengembangan budidaya perikanan air laut	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis PERIKANAN				Program pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4. Meningkatnya nilai produksi peternakan	Penerapan sistem peternakan dan perkebunan terpadu	Nilai produksi ternak ruminansia	26.509	35.525	Program pengembangan Peternakan Terpadu	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Peningkatan teknologi produksi budidaya peternakan	Nilai produksi ternak unggas	21.930	22.934	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
						Program peningkatan penerapan teknologi Peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
						Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis PETERNAKAN				Program pemberdayaan penyuluh peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Meningkatkan pemasaran hasil produksi ternak ruminansia dan unggas				Program peningkatan pemasaran hasil produksi Peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan usaha peternakan yang terintegrasi dengan pengembangan usaha peternakan rakyat.				Program Pengembangan Usaha Peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
	5. Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	20.000 unit usaha	21.000 unit usaha	Program Studi pengembangan Kawasan Ekonomi Agropolitan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
						Program Studi pengembangan Kawasan Ekonomi Minapolitan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Agropolitan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
						Program pengembangan sentra-sentra industri potensial minapolitan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Program optimalisasi pemasaran produksi pertanian, perkebunan, peternakan	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		Menumbuh-kembangkan usaha peningkatan mutu, penanganan lepas panen dan usaha pengolahan produk yang berbasis komoditas hasil pertanian dalam arti luas.	Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	918,697	1.087,636	Program optimalisasi pengolahan produksi pertanian, perkebunan, peternakan	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
2. Meningkatkan iklim investasi dan usahayang kondusif sebagai bagian	1. Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Pengembangan regulasi dan deregulasi serta promosi yang mengundang dan mendorong	Peningkatan Jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	82 M	100 M	Program Perencanaan Tata Ruang	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		investasi				Program Pemanfaatan Ruang	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kawasan Perhatian Investasi						Program peningkatan & pengembangan pengelolaan perizinan	Penanaman modal	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman modal	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
						Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Kawasan Perdesaan	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
3. Mengembangkan Usaha mikro, industri kecil, dan menengah yang mandiri	1. Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri.	Peningkatan kualitas SDM (kewirausahaan dan keterampilan usaha) bagi pelaku UMi dan Industri Kecil.	Persentase peningkatan unit usaha UMi (%)	22.006	24.782	Program pengembangan kewirausahaan usaha mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
						Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi usaha Mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		Peningkatan akses permodalan bank dan non bank	Persentase peningkatan unit industri kecil dan menengah	2.028	2.718	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Industri Kecil dan menengah	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
						Program pengembangan kewirausahaan industri kecil dan menengah	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
			Peningkatan Skala usaha UMi	1,32%	2,50%	Program Pengembangan permodalan Usaha Bagikoperasi dan usaha mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
			Peningkatan kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan	3.127,18 Ton/Thn	3.152,18 Ton/Thn			
				162,492 Unit/Thn	222,492 Unit/Thn			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2. Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Peningkatan kualitas kelembagaan UMI dan IKM	Jumlah ragam usaha UMI	86	150	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
			Jumlah ragam usaha Industri kecil dan menengah	44	54	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
			Jangkauan pasar produk UMI	DK =100%	DK=98,5%; AK=1,0%; AP = 0,5%	Program Pengembangan sarana dan prasarana Umi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
			Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan menengah	DK =100%	DK=98,0%; AK=1,0%; AP = 1,0%	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
						program pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
			Kontribusi Umi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	8,88%	9,78%	Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Mikro dan Industri Kecil	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	
4. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan	1. Berkembangnya destinasi wisata	Pengembangan industri pariwisata secara komprehensif seluruh sistem kepariwisataan	Kunjungan wisata	44.222	104.000	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,11%	1,80%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
ekonomi			Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	1,2 M	20% 2,1 M	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2. Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	Penguatan upaya pelestarian warisan budaya	Persentase benda, situs, benda, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	25%	42%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Program pengembangn kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi	1. Meningkatnya konektivitas daerah	Peningkatan peran aktif Pemda dalam mendukung program nasional pembangunan	Indeks konektivitas kabupaten	1	1,06	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
		pelabuhan Muntok dan Jembatan Teluk Kelabat menghubungkan Kecamatan Parittiga (Tj Ru) dan Belinyu (Tj Gudang)				Program pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Peningkatan sarana prasarana perhubungan darat					Program pembangunan infrastruktur Perdesaaan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
						Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	2. Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dan perkebunan	Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	0,00 Ha	2.386 Ha	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pembangunan jalan inspeksi irigasi	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi 3: Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Meningkatkan Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Dasar	Peringkat ujian Nasional se- provinsi Bangka Belitung	SD 3, SMP 6	SD 1, SMP 1	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Angka Harapan Lama Sekolah	11,48	13,35	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Wajib Belajar 9 Tahun	Pendidikan	
		Peningkatan kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten	7,43	8,26	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	
				Pengembangan keahlian masyarakat melalui pendidikan kejuruan sesuai potensi daerah			Program Pendidikan Menengah	
	2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan	Perluasan cakupan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin oleh Pemda	Angka Harapan Hidup	69,46	69,61	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	
kesehatan	Pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan				Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinkes	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	Dinkes
		Peningkatan akses pelayanan dan perluasan layanan kesehatan puskesmas kepada masyarakat				Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Kesehatan	Dinkes
						Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
						Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
	3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	38 Kasus	84,85% 33 Kasus	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Dinas Dalduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
						Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Dinas Dalduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
						Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Dinas Dalduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
						Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Dinas Dalduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	4. Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olahraga	Pembinaan olahraga daerah	Prestasi olahraga pendidikan di tingkat Provinsi	Peringkat 7	Kejurda 3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi	Peringkat ke 6	Peringkat ke 4	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		
						Program Penyelenggaraan olahraga daerah		

Misi 4 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/ berwawasan lingkungan	Peningkatan kesadaran dan budaya tentang lingkungan hidup	Persentase desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/kelurahan (%)	N/A	11%	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan peran aktif komunitas masyarakat/ LSM dalam pembinaan dan kontrol kualitas lingkungan hidup	Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/ CSO) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif	7	12			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Peningkatan kontrol dan pembinaan pengelolaan lingkungan pelaku usaha dan atau kegiatan	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan secara baik (%)	30%	70%	Program Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	1. Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Pembangunan sistem pengelolaan persampahan yang berkelanjutan	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara Terpadu	9%	19%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2. Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang sanitasi lingkungan dan peningkatan fasilitas sanitasi masyarakat	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	78,75%	95%	Program pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	3. Terkendalinya bencana banjir	Pembangunan sistem & melakukan pengendalian banjir	Persentase desa/kelurahan/ titik banjir yang dimitigasi thd banjir/genangan air	N/A	100%	Program pengendalian banjir	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1. Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Membangun sistem dan melakukan pemulihan/ revegetasi lahan kritis (diluar kawasan hutan dan bukan lahan izin usaha perusahaan) berbasis masyarakat secara kolaboratif	Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	N/A	2%	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2. Terwujudnya konservasi sumber air	Peningkatan koordinasi dan konservasi air diantara para pihak dan pelaksana Konservasi	Persentase sumber air yang telah di konservasi	26%	28%	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap produk hukum penataan ruang dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup	Menjagadanmen ingkatnya perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang Updating data spasial dan meningkatkan koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	N/A	100%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Melakukan penetapan, penataan dan pengembangan serta pemeliharaan RTH	Persentase ruang terbuka hijau	2%	2,90%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja daerah dan pendanaannya dengan mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD memiliki kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Diantaranya adalah karena RKPD merupakan salah satu elemen penting dalam instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tersebut dapat diketahui sejauh mana target-target capaian kinerja dalam RPJMD telah tercapai karena RKPD merupakan bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.

Dikarenakan adanya ketidaksesuaian perkembangan pembangunan dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, maka dilakukan mekanisme perubahan terhadap RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2021
KABUPATEN BANGKA BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Satuan				
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									584.575.844.949,42	575.746.524.171,92		
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									251.002.636.368,00	251.111.595.525,00		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									251.002.636.368,00	251.111.595.525,00		
		Peningkatan kualitas pembangunan manusia, pelayanan dasar dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peringkat ujian nasional se-Provinsi Bangka Belitung									
				- SD	1								
				- SMP	1								
				Angka Harapan Lama Sekolah	13,35								
			Angka rata rata lama sekolah Kabupaten	8,26									
			Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	80%								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	170.339.075.505,00	170.233.955.505,00	
							Optimalnya disiplin aparatur	100	%			
							Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%			
							Status capaian kinerja keuangan	100	%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									8.000.000,00	8.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	6	jenis	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah dokumen tersusun	2	dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	5	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									167.806.000.000,00	167.806.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersalurnya gaji dan tunjangan ASNDikpora	12	Bulan	167.800.000.000,00	167.800.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah dokumen tersusun	2	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen tersusun	2	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	8.500.000,00		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3	dokumen	8.500.000,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									623.506.505,00	623.506.505,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya alat listrik untuk menunjang kerja kantor	12	Bulan	19.582.200,00	19.582.200,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	5	Jenis	11.457.000,00	11.457.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya makanan dan minuman rapat dan kantor	12	Bulan	67.290.250,00	67.290.250,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12	Bulan	47.806.550,00	47.806.550,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya surat kabar, majalah dan buku-buku peraturan	12	Bulan	13.740.000,00	13.740.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	58.646.705,00	58.646.705,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	Bulan	404.983.800,00	404.983.800,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.681.999.000,00	1.585.379.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya jasa pengiriman	504	OB	1.276.680.000,00	1.213.590.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12	bulan	143.400.000,00	143.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	96	OB	261.919.000,00	228.389.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	211.070.000,00	211.070.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	bulan	206.320.000,00	206.320.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	paket	4.750.000,00	4.750.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									80.663.560.863,00	80.877.640.020,00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									40.891.524.000,00	41.086.154.570,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengadaan Perlengkapan Siswa						Terpenuhinya buku dan alat tulis siswakurang mampu SD	1317	Siswa	196.496.000,00	196.496.000,00	
							Tersedianya Pengadaan Raport SD	7100	Rapot			
							Tersedianya seragam sekolah siswa baruSD/MI	1317	Stell			
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						Terlaksananya pembangunan ruang guru sekolah	3	ruang	752.269.000,00	752.269.000,00	DAK
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						Terlaksananya pembangunan perpustakaan seklah	3	ruang	678.792.000,00	478.792.000,00	DAK
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3	paket	467.233.000,00	467.233.000,00	DAK
	Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas						Terpeliharanya ruang kelas	6	sekolah	1.883.110.000,00	1.583.110.000,00	DAK
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						Terpeliharanya fisik bangunan sekolah	1	sekolah	36.718.000,00	36.718.000,00	DAK
	Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa						Tersedianya Alat Praktik dan peraga Siswa	20	sekolah	2.177.096.000,00	2.177.096.000,00	DAK
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						Tersalurnya dana BOS SD	134	SD	17.961.440.000,00	17.961.440.000,00	
							Tersalurnya hibah bansos pendidikan SD	400	Siswa			
	Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa						Terselenggarany a Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD/MI Dan Festival LombaSeni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI	7	Cabang	75.000.000,00	49.480.570,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						Pembayaran Gaji Bulanan GTT dan PTT Sekolah Dasar	759	Orang	16.470.650.000,00	17.383.520.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4	kegiatan	142.720.000,00		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2	kegiatan	35.000.000,00		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						Terkelolanya Dana BOS Sekolah Dasar	4	triwulan	15.000.000,00		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									20.565.676.640,00	20.855.625.227,00	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa						Terpenuhinya buku dan alat tulis siswa kurang mampu SMP	1000	Siswa	128.717.640,00	128.717.640,00	
							Tersedianya Pengadaan Raport SMP	2800	Buku			
							Tersedianya seragam sekolah siswa baru SMP/MTs	1000	Stel			
	Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						Terpeliharanya ruang kelas sekolah	7	sekolah	4.432.826.000,00	4.432.826.000,00	DAK
	Rehabilitasi sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						Terpeliharanya perpustakaan sekolah	2	sekolah	782.801.000,00	782.801.000,00	DAK
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						Terpeliharanya toilet sekolah	2	sekolah	273.392.000,00	273.392.000,00	DAK
	Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa						Terlaksananya pengadaan alat praktik dan	4	jenis	636.510.000,00	636.510.000,00	DAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							peraga siswa					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						Tersalurnya hibah bansos pendidikan SMP	200	Orang	7.077.280.000,00	7.077.280.000,00	
							Tersedianya dana BOS Sekolah Menengah Pertama	35	Sekolah			
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						Terlaksananya Gala Siswa Indonesia	1	Jenjang	120.000.000,00	85.048.587,00	
							Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP/Mts dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/Mts	7	Cabang			
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Terbayarnya gaji GTT PTT SMP	324	Orang	6.945.650.000,00	7.439.050.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3	kegiatan	135.000.000,00		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2	kegiatan	23.500.000,00		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						Terkelolanya Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4	triwulan	10.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									12.636.370.723,00	12.485.870.723,00	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD						Tersedianya Raport TK	1000	Buku	45.019.600,00	45.019.600,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	6	kecamatan	60.000.000,00		
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						Terlaksananya pembangunan ruang kelas PAUD	2	sekolah	266.085.000,00	266.085.000,00	DAK
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						Terlaksananya pembangunan area bermain dan toilet	7	sekolah	889.258.000,00	889.258.000,00	DAK
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						Terpeliharanya ruang kelas sekolah	2	sekolah	609.072.000,00	609.072.000,00	DAK
	Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa PAUD						Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa	3	paket	63.830.000,00	63.830.000,00	DAK
	Pengelolaan Dana BOP PAUD						Tersedianya dana BOP PAUD	12	bulan	4.243.280.000,00	4.243.280.000,00	DAK
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						Pembayaran Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD	1000	BSiswa	142.586.123,00	142.586.123,00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						Tersedianya insentif pendidik PAUD	450	Orang	6.317.240.000,00	6.226.740.000,00	
							Tersedianya tambahan penghasilan GTT/PTT	210	Orang			
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									6.569.989.500,00	6.449.989.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan						Tersedianya dana BOP kesetaraan	12	bulan	788.400.000,00	788.400.000,00	DAK
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Tersedianya insentif ustad/ustadzah	935	Orang	5.781.589.500,00	5.661.589.500,00	
							Tersedianya insentif tutor kesetaraan	40	orang			
	DINAS KESEHATAN									205.890.020.301,00	199.349.633.854,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									205.890.020.301,00	199.349.633.854,00	
		Peningkatan pembangunan kesehatan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,61							
		Peningkatan kualitas pembangunan manusia, pelayanan dasar dan pelayanan publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	80%							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintahan daerah	100	persen	91.041.933.796,00	91.041.933.796,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100	persen	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan jasa aparatur sipil negara dan terlaksananya administrasi keuangan	100	persen	66.177.000.000,00	66.177.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	66.171.000.000,00	66.171.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	persen	726.309.214,00	726.309.214,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Terpeliharaan rutin / berkala jaringan listrik	8	unit	107.528.870,00	107.528.870,00	
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor							12	bulan				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	1.395.020,00	1.395.020,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya alat tulis kantor dan tersedianya makanan dan minuman rapat	12	bulan	46.745.112,00	46.745.112,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	50.765.825,00	50.765.825,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	5.006.000,00	5.006.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	50.468.387,00	50.468.387,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	bulan	464.400.000,00	464.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemenuhan jasa tenaga administrasi dan penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	2.833.162.520,00	2.833.162.520,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran honorarium PHL	552	OB	1.337.675.000,00	1.337.675.000,00	
							Tersedianya jasa pengiriman	40	paket			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	139.800.000,00	139.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran honorarium PHL	768	OB	1.355.687.520,00	1.355.687.520,00	
							Pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja	12	bulan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						Persentase sarana dan prasarana	100	persen	982.480.000,00	982.480.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Daerah						dalam kondisi baik					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran honorarium PHL	324	OB	982.480.000,00	982.480.000,00	
							Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	12	bulan			
	Peningkatan Pelayanan BLUD						Tercapainya pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	100	persen	20.312.982.062,00	20.312.982.062,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Tersedianya layanan dan pendukung layanan kesehatan (BLUD)	1	RSUD	20.312.982.062,00	20.312.982.062,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Terpeliharanya sarana prasarana kesehatan	100	persen	106.515.531.705,00	99.975.145.258,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100	persen	24.159.004.312,00	23.409.004.312,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						Terlaksananya kegiatan renovasi sarana pelayanan kesehatan	2	unit	545.515.000,00	345.515.000,00	
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Terlaksananya peningkatan sarana pelayanan kesehatan	1	unit	550.000.000,00	-	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						Terlaksananya pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan	1	unit	313.950.000,00	313.950.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						Terlaksananya kegiatan Pembangunan serta peningkatan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	1	RSUD	2.725.961.500,00	2.725.961.500,00	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas/ pustu dan jaringannya	8	Puskesmas	272.985.000,00	272.985.000,00	APBD/DAK
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan`						Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit	1	RSUD	14.951.666.606,00	14.951.666.606,00	APBD/DAK
							Tersedianya alat kesehatan Puskesmas	8	Puskesmas			
	Pengadaan Obat, Vaksin						Terdistribusinya obat esensial, bahan medis habis pakai (BMHP) dan reagen ke Puskesmas	8	Puskesmas	4.609.339.856,00	4.609.339.856,00	APBD/DAK
							Terpenuhinya persediaan obat esensial, bahan medis habis pakai (BMHP) dan reagen	2	paket			
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Terpeliharanya secara berkala alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8	Puskesmas	147.507.150,00	147.507.150,00	DAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Tersedianya pemeliharaan rutin dan berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	1	paket	42.079.200,00	42.079.200,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	100	persen	82.314.071.623,00	76.523.685.176,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Terlaksananya AMP	8	Puskesmas	911.903.000,00	911.903.000,00	APBD/DAK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Pengembangan ruang Puskesmas ramah anak dan terselenggaranya Lomba Balita Sejahtera Indonesia	8	Puskesmas	362.825.000,00	362.825.000,00	APBD/DAK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Pelayanan dan pembinaan anak usia sekolah dasar	34	Sekolah	279.800.960,00	279.800.960,00	APBD/DAK
						Terlayannya masyarakat dalam pelayanan kesehatan	8	Puskesmas				
						Terperiksanya kesehatan anak sekolah	50	sekolah				
						Terpilihnya sekolah sehat sebagai peringkat I ditingkat Provinsi	24	Sekolah				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Terlaksananya skrining kesehatan usia produktif (15 s.d 59 tahun)	23	Sekolah	63.648.270,00	63.648.270,00	APBD/DAK
						Terseleenggaranya pelatihan konselor sebaya dan pembinaan	73	peserta				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Peningkatan pelayanan kesehatan di Posyandu Usila (pertemuan kader) dan pengadaan kartu menuju sehat Usila	2000	buku	319.290.000,00	319.290.000,00	APBD/DAK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						Terseleenggaranya pembinaan dan kegiatan Posbindu	250	peserta	18.749.800,00	18.749.800,00	APBD/DAK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						Terseleenggaranya pembinaan dan pencegahan diabetes melitus	150	peserta	12.749.930,00	12.749.930,00	APBD/DAK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Terseleenggaranya kegiatan kesehatan jiwa dan penanganan gangguan jiwa berat	8	Puskesmas	61.094.930,00	61.094.930,00	APBD/DAK
						Terseleenggaranya kegiatan kesehatan jiwa dan penanganan gangguan jiwa berat	30	peserta				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Tertatalaksananya penderita TB sesuai prosedur DOTS	8	Puskesmas	108.228.150,00	108.228.150,00	APBD/DAK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Tersedianya bahan habis pakai pemeriksaan HIV	1	paket	149.004.800,00	149.004.800,00	APBD/DAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah penanganan kasus gizi buruk	9	kasus	1.021.992.100,00	1.021.992.100,00	APBD/DAK
						Terlaksananya pencegahan dan penanganan stunting	5	Kecamatan				
						Tersedianya PMT penderita TB Paru dan Kusta	75	orang				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Terlaksananya pencegahan dan penanganan stunting	6	Kecamatan	20.284.800,00	20.284.800,00	APBD/DAK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Terselenggaranya kegiatan pemucuan dan verifikasi ODF	17	desa	197.350.000,00	197.350.000,00	APBD/DAK
						Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pembinaan sarana pengolahan limbah pada fasilitas pelayanan kesehatan	8	Puskesmas				
						Terselenggaranya kegiatan verifikasi Pokja pasar sehat dan sekolah	4	pasar				
						Terselenggaranya pemeriksaan kualitas air bersih	128	sampel				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						Pembentukan Posyandu percontohan pemanfaatan TOGA	16	Posyandu	8.779.864,00	8.779.864,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Terdeteksinya kasus KLB penyakit menular dan	175	kasus	670.046.780,00	670.046.780,00	APBD/DAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							penyakit tidak menular					
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus						Terlayannya kesehatan matra (kondisi khusus)	30	kali	288.754.850,00	288.754.850,00	
						Terselenggaranya kegiatan PMI	1	tahun				
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Persentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM	8	Puskesmas	1.372.513.592,00	1.372.513.592,00	APBD/DAK
						Terdeteksinya pasien disemua fasilitas pelayanan kesehatan	100	persen				
						Terdeteksinya penyakit hepatitis disemua fasilitas pelayanan kesehatan	8	Puskesmas				
						Terlaksananya pencegahan dan penganggulangan an penyakit diare	8	Puskesmas				
						Terlayannya seluruh penderita kusta	40	kasus				
						Terselenggaranya desa UCI, sosialisasi bias dan monev imunisasi	64	desa				
						Terselenggaranya kegiatan pengobatan kecacingan	8	Puskesmas				
						Terselenggaranya kegiatan tatalaksana	8	Puskesmas				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Satuan				
							penderita malaria						
							Terselenggaranya pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas)	8		Puskesmas			
							Tertatalaksananya program DBD dan terkendalinya penyakit DBD di Kabupaten Bangka Barat	100		kasus			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil	100		persen	268.640.000,00	268.640.000,00	DAK
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Terjaminnya pelayanan kesehatan masyarakat	97.758		peserta	29.383.367.920,00	26.422.619.920,00	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						Peningkatan tatanan kawasan sehat	7		tatanan/ desa	92.628.000,00	92.628.000,00	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional RSUD	1		paket	26.152.635.166,00	25.365.635.166,00	
						Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor RSUD	1		paket				
						Terpenuhinya obat-obatan rutin di RSUD	1		paket				
						Tersedianya bahan-bahan logistik rumah sakit	12		bulan				
						Tersedianya layanan dan pendukung layanan kesehatan	1		RSUD				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Operasional Pelayanan Puskesmas						Terkelolanya Bantuan Operasional Kesehatan	8	Puskesmas	17.771.589.771,00	15.728.951.324,00	APBD/DAK
							Tersedianya operasional dan pemeliharaan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes	8	Puskesmas			
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						Terlaksananya survei akreditasi	1	RSUD	737.448.940,00	737.448.940,00	APBD/DAK
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Terlaksananya pelayanan kesehatan bayi baru lahir	8	Puskesmas	64.925.000,00	64.925.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	8	Puskesmas	1.806.238.800,00	1.806.238.800,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Terlaksananya pelayanan promosi kesehatan	8	Puskesmas	139.931.200,00	139.931.200,00	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						Terlaksananya investigasi awal kejadian tidak diharapkan (KIPI dan pemberian obat massal)	1	Puskesmas	29.650.000,00	29.650.000,00	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						Persentase penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	100	persen	42.455.770,00	42.455.770,00	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan						Terlaksananya kegiatan pengumpulan, up dating dan analisis data serta penyusunan profil	2	jenis	21.999.940,00	21.999.940,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						Terlaksananya sistem informasi Puskesmas	8	Puskesmas	20.455.830,00	20.455.830,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan sesuai kompetensi	95	persen	7.620.138.500,00	7.620.138.500,00	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Persentase pemenuhan jasa tenaga kesehatan	100	persen	7.308.470.600,00	7.308.470.600,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan	12	bulan	7.308.470.600,00	7.308.470.600,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota	100	persen	311.667.900,00	311.667.900,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	190	orang	311.667.900,00	311.667.900,00	APBD/DAK
						Terlaksananya pelatihan penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatologi dasar PONED	3	tenaga kesehatan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Terlaksananya penilaian bagi pegawai untuk pengusulan angka kredit	120	orang			
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	50	Persen	202.041.050,00	202.041.050,00	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100	Persen	29.434.050,00	29.434.050,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						Tersedianya jumlah sarana kefarmasian yang wajib diawasi	21	sarana	29.434.050,00	29.434.050,00	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						Persentase industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	100	Persen	104.547.000,00	104.547.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						Terselenggaranya kegiatan pengawasan terhadap tempat pengolahan makanan dan minuman	50	sampel	104.547.000,00	104.547.000,00	APBD/DAK
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						Persentase pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga	100	persen	49.273.000,00	49.273.000,00	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						Terlaksananya pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga	100	persen	49.273.000,00	49.273.000,00	DAK
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi	13	Persen	18.787.000,00	18.787.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						Terjaminnya hasil produksi ruma tangga yang berizin	50	penjamah makanan	18.787.000,00	18.787.000,00	
							Terjaminnya hasil produksi ruma tangga yang berizin	60	TPM			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	50	Persen	510.375.250,00	510.375.250,00	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah desa ber PHBS	64	desa	473.746.900,00	473.746.900,00	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						Efektifitas promosi kesehatan melalui media: Radio spot, talk show, iklan koran, banner, gantungan kunci, gelas mug, pin, maskot, stiker, poster, leaflet	8	Puskesmas	473.746.900,00	473.746.900,00	APBD/DAK
						Peningkatan strata desa siaga	32	desa siaga/mandiri				
						Persentase desa ber PHBS	64	desa				
						Terselenggaranya pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	6	Kecamatan				
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase peningkatan strata desa siaga	32	Persen	31.878.350,00	31.878.350,00	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						Terselenggaranya pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	6	Kecamatan	31.878.350,00	31.878.350,00	APBD/DAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase peningkatan strata desa siaga	32	Persen	4.750.000,00	4.750.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Terbinanya Posyandu, pelatihan kader Poskestren dan terbentuknya sakabakti husada	40	Posyandu	4.750.000,00	4.750.000,00	APBD/DAK
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									72.504.049.960,50	72.504.049.960,50	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									72.504.049.960,50	72.504.049.960,50	
			Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	80%							
			Meningkatnya konektivitas daerah	Indeks konektivitas kabupaten	1,06							
			Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	94,76%							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
			Terkendalinya bencana banjir	Persentase desa/ kelurahan/titik banjir yang di mitigasi terhadap banjir/ genangan air	100%							
			Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	100%							
			Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan Jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	100M							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	6.790.361.622,50	6.790.361.622,50	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Cakupan capaian kinerja program Perangkat Daerah	100	%	8.000.000,00	8.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	3	Jenis	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	
							Jumlah dokumen tersusun	4	Dokumen			
							Jumlah dokumen tersusun	4	Dokumen			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Tersedianya Dokumen	3	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Status capaian kinerja keuangan	100	%	4.106.000.000,00	4.106.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah dokumen tersusun	2	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	528.460.940,00	528.460.940,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	12	Bulan	9.997.620,00	9.997.620,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	12	Bulan	2.879.000,00	2.879.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya makanan dan minuman kantor	12	Bulan	18.189.320,00	18.189.320,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12	Bulan	8.500.000,00	8.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	4.895.000,00	4.895.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	34.000.000,00	34.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	Bulan	450.000.000,00	450.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	985.432.682,50	985.432.682,50	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran honorarium PHL	144	OB	433.410.000,00	433.410.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air	12	Bulan	94.340.000,00	94.340.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	8.294.682,50	8.294.682,50	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran honorarium PHL	84	OB	449.388.000,00	449.388.000,00	
							Pembayaran honorarium PHL	96	OB			
							Pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja	12	Bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase kondisi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam keadaan baik	100	%	1.162.468.000,00	1.162.468.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran honorarium PHL	324	OB	1.132.468.000,00	1.132.468.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						terpeliharanya gedung kantor	3	Gedung	30.000.000,00	30.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						Jumlah daerah jaringan irigasi yang dibangun	57,27	%	7.454.554.810,00	7.454.554.810,00	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Data identifikasi, monitoring dan evaluasi rawan banjir/genangan, panjang sungai yang menyebabkan rawan banjir yang dinormalisasi	70	%	441.410.000,00	441.410.000,00	
	Normalisasi/Restorasi Sungai						jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2	Kegiatan	441.410.000,00	441.410.000,00	
							Terlaksananya peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali (meter)	12511	m3			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	100	%	7.013.144.810,00	7.013.144.810,00	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan									6.838.145.110,00	6.838.145.110,00	DAK
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa						peningkatan fungsi jaringan irigasi	1	Kegiatan	174.999.700,00	174.999.700,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						Persentase titik/lokasi/kawasan rawan banjir yang memiliki sistem drainase yang baik	40	%	855.065.000,00	855.065.000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						persentase titik/lokasi/kawasan rawan banjir yang memiliki sistem drainase yang baik	100	%	855.065.000,00	855.065.000,00	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						Panjang Siring yang terbangun	9245	Meter	855.065.000,00	855.065.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						Persentase jalan dan jembatan dengan kondisi baik	74,45	%	56.861.629.648,00	56.861.629.648,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota						Persentase jalan dan jembatan dengankondisi baik	74,45	%	56.861.629.648,00	56.861.629.648,00	
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan						Terlaksananya kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan	1700	meter	5.966.850.900,00	5.966.850.900,00	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						Tersedianya jalan dan jembatan yang memperlancar arus lalu lintas	1	Dokumen	531.274.130,00	531.274.130,00	
	Pembangunan Jalan						Panjang jalan terbangun	3150	meter	3.165.194.900,00	3.165.194.900,00	
	Pembangunan Jembatan							1	keg	1.682.891.350,00	1.682.891.350,00	
	Rekonstruksi Jalan						Panjang jalan yang ditingkatkan	9819	m	32.515.493.368,00	32.515.493.368,00	DAK/apbd
	Pemeliharaan Berkala Jalan						Panjang pemeliharaan jalan	2520	m	10.164.233.000,00	10.164.233.000,00	DAK/apbd
	Pemeliharaan Rutin Jalan						Terpeliharanya jalan secara rutin	10	lokasi	2.835.692.000,00	2.835.692.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						Jumlah kebijakan tata ruang yang ditetapkan	6	kebijakan	542.438.880,00	542.438.880,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota						Jumlah dokumen yang dihasilkan	2	dokumen	269.999.750,00	269.999.750,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota						Dokumen RTRW yang direvisi dan Albmpeta tematik	1	dokumen	119.999.800,00	119.999.800,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota						Dokumen RRTR kawasan perkotaanmuntok kelapa dan jebus yang diMutakhirkan	1	dokumen	149.999.950,00	149.999.950,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen	176.875.130,00	176.875.130,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						Jumlah dokumen yang di susun dan Tersedianya dokumen survey dan PemetaanPemanfaatan Ruang	1	dokumen	176.875.130,00	176.875.130,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Pengajuan ijin usaha sesuai dengan kebijakanpemanfaatan ruang	100	%	95.564.000,00	95.564.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan PenataanRuang						Jumlah Rapat BKPRD / TKPRD yangdilaksanakan dan Jumlah kegiatan yangdilaksanakan dalam pengawasanpemanfaatan ruang	24	kegiatan	95.564.000,00	95.564.000,00	
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN									22.675.056.400,72	22.789.041.400,72	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									22.675.056.400,72	22.789.041.400,72	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						Persentase penduduk yang mendapatkans anitasi yang memadai dan akses aman air	100	%	2.673.933.760,00	2.568.933.760,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan n Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	100	%	2.673.933.760,00	2.568.933.760,00	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						Meningkatnya SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	400	SR	2.274.066.260,00	2.274.066.260,00	DAK
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						Terlaksananya Pembangunan Sarpras Air Bersih Perdesaan	1	Desa	294.867.500,00	294.867.500,00	
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis SPAM						Terlaksananya Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis SPAM	1	dokumen	105.000.000,00		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									4.438.092.500,00	4.283.092.500,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota									4.438.092.500,00	4.283.092.500,00	
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT						Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK	440	unit	4.283.092.500,00	4.283.092.500,00	DAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik						terlaksananya Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	2	unit	50.000.000,00		
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota						Terlaksananya Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	1	dokumen	105.000.000,00		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL									627.767.000,00	627.767.000,00	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota									627.767.000,00	627.767.000,00	
	Pembangunan TPA / TPST / SPA/ TPS-3R / TPS						Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1	unit	627.767.000,00	627.767.000,00	DAK
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%	14.935.263.140,72	15.309.248.140,72	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100	%	14.935.263.140,72	15.309.248.140,72	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota						Terbangunnya Bangunan Gedung Negara	6	Paket	14.935.263.140,72	15.309.248.140,72	
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN									9.286.425.325,00	8.418.176.837,50	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									9.286.425.325,00	8.418.176.837,50	
			Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	80%							
			Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	95%							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	5.865.577.525,00	5.399.079.037,50	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		7.427.000,00	7.427.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Tersusun	3	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	2	Dokumen	3.427.000,00	3.427.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Tersusun	4	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100	%	3.548.500.000,00	3.506.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya Gajii dan Tunjangan ASN	12	bulan	3.542.500.000,00	3.500.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100	%	22.800.000,00	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Tersedianya Pakaian khusus lapangan	45	stel	22.800.000,00	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100%		696.347.125,00	556.338.637,50	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	1.999.900,00	1.999.900,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Makanan dan Minuman Kantor	12	bulan	30.740.000,00	24.359.512,50	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	273.834.225,00	140.206.225,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	12	bulan	4.800.000,00	4.800.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Alat Tulis Kantor	12	bulan	34.000.000,00	34.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah / Dalam	12	bulan	350.973.000,00	350.973.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.348.810.000,00	1.102.530.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran Honorarium PHL	252	ob	552.490.000,00	475.920.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	89.100.000,00	89.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran Honorarium PHL	264	ob	707.220.000,00	537.510.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya a Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	100	%	241.693.400,00	226.783.400,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	12	bulan	236.010.000,00	221.100.000,00	
		Pembayaran Honorairum PHL	43	ob								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	12	bulan	3.865.000,00	3.865.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12	bulan	1.818.400,00	1.818.400,00	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						persentase berkurangnya luasanpermukiman kumuh di kawasan perkotaan	20	%	2.962.314.000,00	2.962.314.000,00	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	100	%	500.000.000,00	500.000.000,00	
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh						Tersusunnya Dokumen Perumahan dan Permukiman	1	dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha									2.462.314.000,00	2.462.314.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat	112	unit	2.462.314.000,00	2.462.314.000,00	DAK
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	20	%	328.533.800,00	56.783.800,00	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan PermukimanK umuh pada Daerah Kab/ Kota	100	%	328.533.800,00	56.783.800,00	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						Terlaksananya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	10	unit	271.750.000,00	-	
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Perumahan Masyarakat (BOP BSPS)	5	kecamatan	56.783.800,00	56.783.800,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	100	persen	130.000.000,00		
	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota									130.000.000,00		
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana						Terlaksananya rehabilitasi rumah bagi korban bencana	5	unit	130.000.000,00		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA									12.263.111.909,20	12.263.111.909,20	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									12.263.111.909,20	12.263.111.909,20	
			Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	80%							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	5.023.602.529,20	5.023.602.529,20	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	7.000.000,00	7.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Tersusun	3	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD, Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Pelaporan LAKIP, LKPJ, TAP KIN, LPPD	4	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	3.806.000.000,00	3.806.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD	2	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	453.703.279,20	453.703.279,20	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah kebutuhan logistik kantor	12	bulan	33.859.070,00	33.859.070,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah kebutuhan kantor	12	bulan	44.943.623,00	44.943.623,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah majalah dan surat kabar	12	bulan	4.979.320,00	4.979.320,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah kebutuhan kantor (ATK)	12	bulan	32.462.666,20	32.462.666,20	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Rata-rata pelaksanaan SPPD	12	bulan	337.458.600,00	337.458.600,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	413.639.750,00	413.639.750,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah phl dan jumlah kebutuhan surat menyurat	60	OB	141.100.000,00	141.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Hubungan komunikasi berjalan lancar dan kelancaran operasional kantor	12	bulan	42.000.000,00	42.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah phl	84	OB	230.539.750,00	230.539.750,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	%	343.259.500,00	343.259.500,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9	unit	330.917.000,00	330.917.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							pembayaran honorarium PHL sopir dan perizinan	48	OB			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah perlengkapan dan peralatan ktr	1	gedung	7.342.500,00	7.342.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah peralatan, Terpeliharanya peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi	5	jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Persentase warga negara yang mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktifitas	100	%	4.238.615.750,00	4.238.615.750,00	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten	12	bulan	4.161.960.260,00	4.161.960.260,00	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						Persentase terciptanya situasi dan kondisi yang tertib, aman dan terkendali	12	kali/tahun	52.215.700,00	52.215.700,00	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						Terlaksananya monitoring pelaksanaan terhadap perda dan Perkada	6	kecamatan	18.014.000,00	18.014.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						Terselenggaranya Gelar Pasukan dalam rangka pemeliharaan tibuntrnmas, linmas, dan kesiap-siagaan dan pemadam kebakaran	16	desa/ kelurahan	152.996.560,00	152.996.560,00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						Persentase tingkat kesadaran anggota satuan polisi pamong praja sebagai abdi negara, Terciptanya Penegakan disiplin anggota piket pos dan BKO, Terlaksananya piket pos pos penjagaan	10	pos/bulan	3.938.734.000,00	3.938.734.000,00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota									76.655.490,00	76.655.490,00	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						Terciptanya penyelesaian pelanggaran secara non yustisi	1	paket	39.478.300,00	39.478.300,00	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						Terciptanya penyelesaian pelanggaran secara yustisi	1	paket	37.177.190,00	37.177.190,00	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						Persentase warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana yang menerima layanan sesuai standar	100	%	2.725.261.950,00	2.725.261.950,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						Terlaksananya Pencegahan dan Penanganan Bencana	100	%	202.610.750,00	202.610.750,00	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah PHL Anggota TRC	84	OB	202.610.750,00	202.610.750,00	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									2.522.651.200,00	2.522.651.200,00	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						Tertanganinya pencegahan penyebaran Covid 19	12	bulan	2.506.458.000,00	2.506.458.000,00	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, Terwujudnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12	kasus	16.193.200,00	16.193.200,00	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						Meningkatnya ketersediaan logistik untuk penanggulangan bencana (item barang)	95	paket	-	-	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						Persentase warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran yang menerima layanan sesuai standar	100	%	275.631.680,00	275.631.680,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan Bahaya Kebakaran	100	%	275.631.680,00	275.631.680,00	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	1	paket	36.561.030,00	36.561.030,00	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah dan Honorarium per kejadian kebakaran	40	kejadian	16.826.250,00	16.826.250,00	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						Jumlah dan Honorarium Piket Jaga, Jumlah PHL Anggota Damkar	84	OB	222.244.400,00	222.244.400,00	
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									10.954.544.685,00	9.310.914.685,00	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									10.954.544.685,00	9.310.914.685,00	
			Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	80%							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	6.427.903.560,00	6.127.903.560,00	
							Persentase sarana dan prasarana aparatur	100	%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							dalam kondisi baik					
							Optimalnya disiplin aparatur	100	%			
							Status capaian kinerja keuangan	100	%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									8.000.000,00	8.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen tersusun	3	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen tersusun	4	dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah laporan evaluasi dokumen perencanaan SKPD	4	laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4.506.000.000,00	4.506.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									477.701.600,00	477.701.600,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	4.957.400,00	4.957.400,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya Makanan Dan Minuman Kantor	12	bulan	34.401.700,00	34.401.700,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan						Tersedianya Barang Cetak dan Peggandaan	12	bulan	25.330.000,00	25.330.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12	bulan	3.020.000,00	3.020.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	9.999.500,00	9.999.500,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12	bulan	399.993.000,00	399.993.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	966.763.760,00	966.763.760,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya jasa surat menyurat dan pembayaran honorarium PHL	132	bulan	302.320.000,00	302.320.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12	bulan	76.730.000,00	76.730.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran honorarium PHL	192	bulan	587.713.760,00	587.713.760,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Pembayaran honorarium PHL kebersihan dan keamanan kantor	36	bulan			
							Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12	bulan			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	%	100.000.000,00		
	Pengadaan Mebel						Tersedianya Mebeleur	3	Jenis	100.000.000,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									369.438.200,00	169.438.200,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	10	mobil dan motor	153.920.000,00	153.920.000,00	
							Pembayaran honorarium PHL	24	bulan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya gedung kantor	1	unit	207.218.200,00	7.218.200,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	bulan	3.300.000,00	3.300.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						Cakupan Lembaga Sosial yang aktif	100	%	505.995.500,00	505.995.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Cakupan Keberhasilan Pemberdayaan Keluarga/ Kelo mpok	50	%			
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota									505.995.500,00	505.995.500,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Tersedianya operasional dan rekrutmen potensi dan sumber kesejahteraan sosial	80	orang	499.997.500,00	499.997.500,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Terbinanya/pengembangan kapasitas karang taruna	15	KT	5.998.000,00	5.998.000,00	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						Persentase Korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar	100	%	2.292.020.625,00	2.270.740.625,00	
							Persentase orang lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	100	%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Persentase orang tuna sosial dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	100	%			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggung Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									2.186.361.750,00	2.165.081.750,00	
	Penyediaan Permakanan						Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan permakanan	342	Orang	2.124.800.000,00	2.124.800.000,00	
						Jumlah Penyandang Disabilitas	164	Orang				
						Jumlah lansia yang diberi bantuan jaminan sosial dan sharing 50 penerima asuh	580	Orang				
	Pemberian Layanan Kedaruratan						Tersedianya operasional/penguatan Rumah Singgah	1	Kegiatan	61.561.750,00	40.281.750,00	
	Rehabilitasi Sosial Penyanggung Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial									105.658.875,00	105.658.875,00	
	Penyediaan Permakanan						Tersedianya kebutuhan dasar bagi keluarga fakir miskin	175	KPM	55.658.875,00	55.658.875,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						Terlaksananya operasional dalam rangka pelaksanaan PKH	12	Kecamatan/ bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						Cakupan Penanganan Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar biasa	100	%	1.728.625.000,00	406.275.000,00	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota									1.506.225.000,00	241.275.000,00	
	Penyediaan Makanan						Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan sosial	1	kegiatan	1.506.225.000,00	241.275.000,00	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota									222.400.000,00	165.000.000,00	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						Pelaksanaan penanggulangan korban bencana alam dan masalah sosial	1	paket keg	222.400.000,00	165.000.000,00	
							Pelaksanaan pemantapan, operasional dan mobilisasi TAGANA	47	orang			
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									72.289.018.729,85	70.480.694.645,85	
	DINAS PENANAMAN MODAL, PPTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									5.480.334.000,00	5.444.334.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									5.480.334.000,00	5.444.334.000,00	
			Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri	Persentase peningkatan unit usaha UMI	2%							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									5.134.885.000,00	5.098.885.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	persen	7.000.000,00	7.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	3	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah dokumen tersusun	5	dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	persen	3.706.000.000,00	3.706.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	persen	441.063.000,00	410.063.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8	unit	31.000.000,00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersediannya makanan dan minuman rapat kegiatan	12	bulan	29.750.000,00	29.750.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	bulan	25.500.000,00	25.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya bahan bacaan kantor	12	bulan	5.040.000,00	5.040.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya ATK	12	bulan	34.000.000,00	34.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	bulan	308.273.000,00	308.273.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	persen	778.782.000,00	778.782.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat dan pembayaran honorarium PHL	120	ob	297.100.000,00	297.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran jasa komunikasi rekening air dan listrik	12	bulan	86.400.000,00	86.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Terlaksananya administrasi keuangan dan pembayaran honorarium PHL	132	ob	395.282.000,00	395.282.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	%	5.000.000,00		
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya						Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	unit	5.000.000,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	persen	197.040.000,00	197.040.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran honorarium PHL terpeliharanya kendaraan dinas operasional	24	ob	142.940.000,00	142.940.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya peralatan kantor	1	gedung	49.100.000,00	49.100.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya peralatan kantor	5	jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			246.384.000,00	246.384.000,00	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75	persen	246.384.000,00	246.384.000,00	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi						Tenaga kerja terampil	45	orang	246.384.000,00	246.384.000,00	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan			14.360.000,00	14.360.000,00	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50	persen	14.360.000,00	14.360.000,00	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						Jenis informasi bursa kerja	5	jenis	9.600.000,00	9.600.000,00	
	Job Fair/Bursa Kerja						Data lowongan kerja diperusahaan-perusahaan	1	dokumen	4.760.000,00	4.760.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						Cakupan penyelesaian kasus ketenagakerjaan			84.705.000,00	84.705.000,00	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						Cakupan penyelesaian kasus ketenagakerjaan	100	persen	84.705.000,00	84.705.000,00	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Presentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	1	dokumen	9.910.000,00	9.910.000,00	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						Laporan jumlah serikat pekerja daerah	1	dokumen	4.835.000,00	4.835.000,00	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						Cakupan perusahaan yang melaksanakan tripartit	1	dokumen	69.960.000,00	69.960.000,00	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									319.063.169,00	319.063.169,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									319.063.169,00	319.063.169,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	84,85%							
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									153.173.240,00	153.173.240,00	
	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota									19.573.750,00	19.573.750,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG						Terlaksananya Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Bangka Barat	30	OPD	19.573.750,00	19.573.750,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota									133.599.490,00	133.599.490,00	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						Terlaksananya DWP Kabupaten dan DWP Kecamatan, Terlaksananya Organisasi GOW Kabupaten	24	bln	133.599.490,00	133.599.490,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									100.668.619,00	100.668.619,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100	%	64.120.963,00	64.120.963,00	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						Terlaksananya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan (Penyajian Data dan Informasi Kasus Kekerasan)	15	kasus	64.120.963,00	64.120.963,00	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100	%	36.547.656,00	36.547.656,00	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Tersedianya dana untuk Operasional Rumah Singgah	12	bln	36.547.656,00	36.547.656,00	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									65.221.310,00	65.221.310,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						Persentase Pemenuhan Hak Anak	80	%	65.221.310,00	65.221.310,00	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						Terselenggaranya Forum Anak Daerah	65	peserta	65.221.310,00	65.221.310,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									12.066.319.662,00	12.078.819.662,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									12.066.319.662,00	12.078.819.662,00	
			Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	2 Juta							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									11.486.105.016,00	11.498.605.016,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	100	%	7.994.390,00	7.994.390,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-Jumlah dok evaluasi PD (Dalev) - Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	2	dokumen	3.994.390,00	3.994.390,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD)	3	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	%	9.106.000.000,00	9.106.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	9.100.000.000,00	9.100.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Jumlah laporan keuangan bulanan	2	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	%	647.777.906,00	647.777.906,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah komponen instalasi listrik	1	Tahun	14.978.050,00	14.978.050,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah jasa peralatan dan pembayaran honorarium	1	Tahun	900.000,00	900.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah peralatan rumah tangga (peralatan dan bahan pembersih)	1	Tahun	14.999.640,00	14.999.640,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah makan dan minum	1	Tahun	70.017.500,00	70.017.500,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah barang cetak	1	Tahun	32.485.350,00	32.485.350,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah bahan bacaan	1	Tahun	4.939.000,00	4.939.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah kelengkapan alat tulis kantor	1	Tahun	59.459.366,00	59.459.366,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah koordinasi dan konsultasi	1	Tahun	449.999.000,00	449.999.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	%	1.519.969.820,00	1.519.969.820,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran Honorarium PHL dan jasa pengiriman	1	Tahun	425.030.000,00	425.030.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah kantor yang tersedia pembayaran listrik, air dan komunikasi	1	Tahun	87.701.620,00	87.701.620,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						-Jumlah pengelola administrasi keuangan -Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor -Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1	Tahun	1.007.238.200,00	1.007.238.200,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	%	204.362.900,00	204.362.900,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-Jumlah kendaraan operasional yang di pelihara -Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	1	Tahun	197.020.400,00	197.020.400,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	7.342.500,00	7.342.500,00	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									402.318.968,00	402.318.968,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses serta ketersediaan pangan daerah	90	%	27.444.628,00	27.444.628,00	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan						Laporan analisis kondisi ketersediaan pangan melalui neraca bahan makanan	5	Laporan	15.299.870,00	15.299.870,00	
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan						Laporan analisis kondisi harga dan pasokan pangan	5	Laporan	12.144.758,00	12.144.758,00	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses serta ketersediaan pangan daerah	90	%	374.874.340,00	374.874.340,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									363.074.540,00	363.074.540,00	DAK
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun						Laporan Analisis Pola konsumsi pangan penduduk dan skor PPH	5	Laporan	11.799.800,00	11.799.800,00	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						Ketercapaian swasembada pangan daerah	25	%	69.673.775,00	69.673.775,00	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						Ketercapaian swasembada pangan daerah	32	%	29.999.800,00	29.999.800,00	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						Laporan peta dan analisis situasi pangan dan gizi kabupaten	5	Laporan	29.999.800,00	29.999.800,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						Ketercapaian swasembada pangan daerah	32	%	39.673.975,00	39.673.975,00	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bangka Barat	15	Ton	39.673.975,00	39.673.975,00	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									108.221.903,00	108.221.903,00	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						Tingkat penguatan cadangan pangan Kabupaten			108.221.903,00	108.221.903,00	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya pembinaan dan pengawasan keamanan pangan lintas sektoral di Kabupaten Bangka Barat	1	Kegiatan	23.015.380,00	23.015.380,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya pengujian mutu dan keamanan pangan terhadap sampel PSAT	50	Sempel	85.206.523,00	85.206.523,00	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									259.524.750,00	249.524.750,00	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									259.524.750,00	249.524.750,00	
			Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	80%							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG						Luasan ketersediaan lahan yang disiapkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah	100	%	134.699.750,00	124.699.750,00	
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	134.699.750,00	124.699.750,00	
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong						jumlah bidang aset tanah pemda yang disertifikasi	41	bidang	134.699.750,00	124.699.750,00	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN									124.825.000,00	124.825.000,00	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									124.825.000,00	124.825.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									124.825.000,00	124.825.000,00	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									11.753.051.222,00	11.943.556.138,00	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									11.753.051.222,00	11.943.556.138,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
			Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/berwawasan lingkungan	Persentase desa/ kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/ kelurahan	11%							
				Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/CSO) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif	12							
				Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan secara baik	70%							
			Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	19,00%							
			Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	2,00%							
			Terwujudnya konservasi sumber air	Persentase sumber air yang telah di konservasi	28,00%							
			Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Persentase ruang terbuka hijau	2,90%							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Status capaian kinerja keuangan	100	%	4.468.679.872,00	4.425.566.372,00	
							Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	%			
							Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%			
							Optimalnya disiplin aparatur	100	%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	7.993.540,00	7.993.540,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	3	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah dokumen tersusun	5	Dokumen	3.993.540,00	3.993.540,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	4	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.606.000.000,00	2.606.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah dokumen tersusun	2	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen tersusun	2	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			399.563.675,00	399.563.675,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	7.763.184,00	7.763.184,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	2.444.310,00	2.444.310,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	12	bulan	30.084.780,00	30.084.780,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	39.999.930,00	39.999.930,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	bulan	4.405.500,00	4.405.500,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	39.999.971,00	39.999.971,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	274.866.000,00	274.866.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	1.211.628.657,00	1.202.028.657,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran Honorarium PHL	156	OB	387.860.000,00	387.860.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	193.200.000,00	183.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Pembayaran Honorarium PHL	96	OB	242.360.000,00	242.360.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran Honorarium PHL	144	OB	388.208.657,00	388.208.657,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	243.494.000,00	209.980.500,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	12	bulan	235.994.000,00	202.480.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya gedung kantor	3	gedung	7.500.000,00	7.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						Tersedianya Dokumen Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Dokumen (Kajian Lingkungan Hidup Strategis / KLHS wajib)	1	dokumen	204.192.850,00	431.811.266,00	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota			204.192.850,00	431.811.266,00	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						Dokumen KLHS	1	dokumen	204.192.850,00	431.811.266,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						Jumlah kelembagaan konservasi sumber air	28	%	403.427.510,00	403.427.510,00	
							Jumlah kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	12	kebijakan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Persentase sumber air yang terjamin kelestariannya	25	%			
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			360.067.810,00	360.067.810,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						Jumlah sumber air yang dipantau	66	titik pantau	108.733.500,00	108.733.500,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						Dokumen emisi GRK	1	dokumen	19.594.850,00	19.594.850,00	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Bahan-bahan operasional laboratorium	5	paket	231.739.460,00	231.739.460,00	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			43.359.700,00	43.359.700,00	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						Jumlah Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang disusun	1	dokumen	43.359.700,00	43.359.700,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola/dike mbangkan	3,5	%	7.800.000,00	7.800.000,00	
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pengelolaan Keaneekaragam an Hayati Kabupaten/Ko ta			7.800.000,00	7.800.000,00	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Pemeliharaan RTH	9,918	ha	7.800.000,00	7.800.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL/UPL; Amdal (Andal,RKL/R PL)	70	%	66.172.900,00	66.172.900,00	
							Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang taat dalam mengelola lingkungan	70	%			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			66.172.900,00	66.172.900,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah perusahaan yang diawasi	63	Perusahaan	66.172.900,00	66.172.900,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						Optimalisasi sumberdaya aparatur dalam bekerja	100	%	-	-	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota			-	-	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan						Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis lingkungan hidup	6	orang	-	-	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						Persentase jumlah desa/kelurahan yang mendapat edukasi dan promosi lingkungan hidup secara efektif dan direpson positif oleh masyarakat	11	%	36.309.900,00	42.309.900,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Persentase perangkat daerah yang memiliki sistem pengelolaan lingkungan di perkantoran	100	%			
							Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan lingkungan kepada anak didik di lingkungan sekolah/luar sekolah	50	%			
							Jumlah komunitas (CSO)/LSM yang ada atau terbentuk dan berperan aktif	12	CSO/LSM			
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			36.309.900,00	42.309.900,00	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata	18	sekolah	36.309.900,00	42.309.900,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						Jumlah kebijakan daerah tentang pengelolaan persampahan	6	kebijakan	6.566.468.190,00	6.566.468.190,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terintegrasi	19	%			
							Jumlah model pendayagunaan sampah yang ekonomis secara berkelanjutan	6	model			
	Pengelolaan Sampah									6.566.468.190,00	6.566.468.190,00	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						Pembayaran Honorarium PHL	1884	OB	6.566.468.190,00	6.566.468.190,00	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									5.533.745.650,00	5.233.813.650,00	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									5.533.745.650,00	5.233.813.650,00	
			Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	85							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	5.255.182.930,00	4.955.250.930,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	27.301.000,00	27.301.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Tersusunnya RKA, Renja, Renstra	3	dok	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Tersusunnya DALEV Dokumen Perencanaan	4	dok	8.771.000,00	8.771.000,00	APBD/DAK
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Tersusunnya LAKIP, LKPJ LPPD dan TAPKIN	4	dok	16.530.000,00	16.530.000,00	APBD/DAK
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	2.106.000.000,00	2.106.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	1	dok	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1	dok	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	18.839.150,00	18.839.150,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan						Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan	1	kali	18.839.150,00	18.839.150,00	DAK
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.150.668.990,00	961.736.990,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan Kantor (SKPD dan UPT)	12	bulan	11.750.260,00	11.750.260,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya alat/ bahan kebutuhan kantor	12	bulan	500.000,00	500.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor						Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	7	jenis	697.349.400,00	508.417.400,00	DAK
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya makan minum rapat koordinasi, tamu dan logistik kantor	12	bulan	34.542.000,00	34.542.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan						Tersedianya Barang Cetak dan Peggandaan (Dinas dan UPT)	12	bulan	47.820.650,00	47.820.650,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya surat kabar, majalah	12	bulan	4.912.000,00	4.912.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya Alat Tulis Kantor (SKPD dan UPT)	12	bulan	116.801.780,00	116.801.780,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Tercapainya Program dan kegiatan Satuan Kerja	12	bulan	236.992.900,00	236.992.900,00	APBD/DAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	1.660.966.540,00	1.660.966.540,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya bahan dan pengiriman serta terbayarnya gaji PHL	276	OB	640.235.000,00	640.235.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Telepon dan listrik Dukcapil (SKPD dan UPT)	12	bulan	75.493.360,00	75.493.360,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Terbayarnya jasa Pemeliharaan dan pembelian suku cadang	12	bulan	4.049.500,00	4.049.500,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Terbayarnya Jasa Pengaman Kantor	12	OB	941.188.680,00	941.188.680,00	APBD/DAK
Terbayarnya Jasa Petugas Kebersihan serta tersedianya alat/ bahan kebersihan							24	OB				
Terbayarnya Jasa PHL							300	OB				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pemerintah Daerah	100	%	36.000.000,00		
	Pengadaan Mebel						Terpenuhinya kebutuhan mebel kantor	1	Jenis	36.000.000,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	255.407.250,00	180.407.250,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Service, BBM dan suku cadang kendaraan	12	bulan	137.945.670,00	137.945.670,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	4	unit	82.500.000,00	7.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya peralatan gedung kantor	2	jenis	34.961.580,00	34.961.580,00	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	87	%	194.485.460,00	194.485.460,00	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						Terlaksananya pelayanan kependudukan secara optimal	100	%	88.923.660,00	88.923.660,00	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						Terlaksananya pendataan penduduk pendatang (Penduduk Non Permanen)	66	des/kel	9.471.660,00	9.471.660,00	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA)	25000	dok	79.452.000,00	79.452.000,00	
	Penataan Pendaftaran Penduduk									9.949.500,00	9.949.500,00	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan						Terbitnya kartu identitas anak	25000	kartu	9.949.500,00	9.949.500,00	APBD/DAK
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									95.612.300,00	95.612.300,00	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam						Terlaksananya Koordinasi terkait Kependudukan	6	bulan	4.112.100,00	4.112.100,00	DAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk											
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk						Terlaksananya pelayanan Kependudukan secara aktif	6	bulan	91.500.200,00	91.500.200,00	DAK
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						Cakupan bayi berakte kelahiran	70	%	57.712.820,00	57.712.820,00	
	Pelayanan Pencatatan Sipil						Terlaksananya pelayanan Pencatatan Sipil secara optimal	100	%	23.510.020,00	23.510.020,00	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						Terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil (Akte Kelahiran, Kematian, Perkawinan dll)	10000	lembar blangko	23.510.020,00	23.510.020,00	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku	100	%	34.202.800,00	34.202.800,00	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil						Terlaksananya pelayanan Pencatatan Sipil secara aktif	9	bulan	14.110.000,00	14.110.000,00	DAK
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam						Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam administrasi pencatatan sipil	60	%	20.092.800,00	20.092.800,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						Cakupan pelaksanaan dan pelayanan kependudukan dengan sistem informasi kependudukan	100	%	7.706.950,00	7.706.950,00	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						Terkumpul dan tersajinya data secara akurat	100	%	5.708.850,00	5.708.850,00	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						Harmonisasi Data OPD untuk pengambilan keputusan	7	SKPD	5.708.850,00	5.708.850,00	
						Tersedianya media Informasi teknologi untuk kependudukan dan pencatatan sipil	1	SIM				
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana	100	%	1.998.100,00	1.998.100,00	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						Terpenuhinya Target Wajib KTP dan KK	12000	orang	1.998.100,00	1.998.100,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan		Peringkat	18.657.490,00	18.657.490,00	
	Penyusunan Profil Kependudukan						Profil Kependudukan tersusun dengan akurat	100	%	18.657.490,00	18.657.490,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota						Terlaksananya Penyusunan Profil kependudukan dan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun	2	dok	18.657.490,00	18.657.490,00	
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									716.914.800,00	716.914.800,00	
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									716.914.800,00	716.914.800,00	
			Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP							
	PROGRAM PENATAAN DESA						Persentase Desa Swadaya	5	%	30.000.000,00	30.000.000,00	
	Penyelenggaraan Penataan Desa									30.000.000,00	30.000.000,00	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa						Percepatan Pilot Project Desa Online	6	desa	30.000.000,00	30.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						Keterlibatan Unsur Masyarakat dalam Membangun Desa	85	%	39.070.000,00	39.070.000,00	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa									39.070.000,00	39.070.000,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						Terbinanya Kelembagaan BKD/BKAD	2	Kawasan Perdesaan	39.070.000,00	39.070.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						Persentase Pelaporan Keuangan Desa Tertib Administrasi dan Tepat Waktu	100	%	94.599.800,00	94.599.800,00	
							Ketersediaan data Profil dan Potensi Desa	1	Dokumen			
							Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	10	Bumdes			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									94.599.800,00	94.599.800,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						Jumlah Desa yang telah didampingi dalam pengelolaan Keuangan Desa	66	Desa/ Kelurahan	18.350.000,00	18.350.000,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa						Jumlah BUMDes yang dibina, didampingi, dimonev, serta di fasilitasi pembentukannya	11	BUMDes	30.000.000,00	30.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						Pemutakhiran data profil desa	60	desa	15.650.000,00	15.650.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						Jumlah Desa yang telah didampingi dalam pengelolaan Aset Desa	66	Desa/ Kelurahan	18.350.000,00	18.350.000,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						Pengisian BPD serentak	8	Desa	12.249.800,00	12.249.800,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						Keterlibatan Unsur Masyarakat dalam Membangun Desa	85	%	553.245.000,00	553.245.000,00	
							TTG yang dimanfaatkan	2	Jenis			
								Desa yang Memanfaatkan TTG	2	Jenis		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota									553.245.000,00	553.245.000,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						Terlaksananya peningkatan kapasitas usaha ekonomi masyarakat dalam sistem manajemen integrasi Bumdes	5	BUMDes	28.245.000,00	28.245.000,00	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						Pelaksanaan Pembinaan Posyantek	1	kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						Terselenggaranya Kegiatan PKK	1	kegiatan	500.000.000,00	500.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									8.166.042.011,00	8.166.042.011,00	
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									8.166.042.011,00	8.166.042.011,00	
			Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	85,00							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah			4.149.163.567,00	4.134.738.567,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									7.998.200,00	7.998.200,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dok	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen yang disusun	4	dok	3.998.200,00	3.998.200,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen yang disusun	3	dok	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.706.000.000,00	2.706.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	bln	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Dokumen yang disusun	1	dok	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah Dokumen yang disusun	2	dok	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen yang disusun	1	dok	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									372.214.147,00	339.014.147,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12	bln	10.368.500,00	10.368.500,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	bln	2.284.600,00	2.284.600,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya Makanan dan Minuman	12	bln	66.569.200,00	39.999.200,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bln	40.000.000,00	34.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	bln	3.097.080,00	2.467.080,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bln	33.995.767,00	33.995.767,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bln	215.899.000,00	215.899.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									759.989.520,00	777.794.520,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran Honorarium PHL	83	OB	214.255.000,00	247.660.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bln	65.902.800,00	50.302.800,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran Honorarium PHL	156	OB	479.831.720,00	479.831.720,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									302.961.700,00	303.931.700,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Service BBM, dan Suku Cadang Kendaraan Dinas	12	bln	283.670.500,00	288.640.500,00	
							Pembayaran Honorarium PHL,	34	OB			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	bln	7.342.500,00	7.342.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor	12	bln	4.948.700,00	4.948.700,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	2	jenis	7.000.000,00	3.000.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									386.375.660,00	386.375.660,00	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									386.375.660,00	386.375.660,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan						Meningkatnya TFR & Unmet Need di Kabupaten Bangka Barat	6	kec	214.500.000,00	214.500.000,00	DAK
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						Tersedianya Publik Adrees	6	unit	125.920.000,00	125.920.000,00	DAK
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						Terlaksananya Pemuktahiran Data Keluarga	66	peserta	45.955.660,00	45.955.660,00	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									3.134.740.420,00	3.149.165.420,00	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal									719.125.250,00	719.125.250,00	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK						Terlaksananya Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	100	%	104.975.000,00	104.975.000,00	DAK
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK						Terlaksananya Operasional dan Sarana Balai Penyuluhan KKBPK	100	%	435.024.000,00	435.024.000,00	DAK
	Pengendalian Program KKBPK						Terlaksananya Program KKBPK	12	bln	137.302.000,00	137.302.000,00	DAK
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						Terlaksananya Pelayanan KIE	6	kecamatan	41.824.250,00	41.824.250,00	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									1.042.026.000,00	1.056.451.000,00	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB						Sarana dan Prasarana Guna Mendukung Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	6	kecamatan	341.775.000,00	341.775.000,00	DAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						Pelaksanaan pembinaan kepada PPKBD/Sub PPKBD	64	kader	321.300.000,00	321.300.000,00	DAK
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						Pembayaran Honorarium PHL	151	OB	378.951.000,00	393.376.000,00	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									313.140.000,00	313.140.000,00	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB						Menurunkan TFR dan Unmeet Need	6	kec	313.140.000,00	313.140.000,00	DAK
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									1.060.449.170,00	1.060.449.170,00	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						Terlaksananya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MQW	80	MOW	181.764.000,00	181.764.000,00	DAK
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	6	paket	400.639.996,00	400.639.996,00	DAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya						Terlaksananya visitasi dan registrasi di Fasilitas kesehatan	9	Faskes	4.950.000,00	4.950.000,00	DAK
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan						Peningkatan promosi dan Advokasi kesehatan reproduksi kepada calon pengantin	100	%	286.690.000,00	286.690.000,00	DAK
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak						Tersedianya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	240	akseptor	81.220.000,00	81.220.000,00	DAK
	Peningkatan Kesertaan KB Pria						Terlaksananya Metode Kontrasepsi Pria MOP	10	MOP	9.610.000,00	9.610.000,00	DAK
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						Terlaksananya pelayanan KB dan TKBK Muyan dalam rangka moment-moment tertentu	6	kecamatan	95.575.174,00	95.575.174,00	APBD/DAK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									495.762.364,00	495.762.364,00	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									460.853.249,00	460.853.249,00	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						Terlaksananya Pembinaan kepada Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PP KS,PIK- R dan UPPKS)	62	poktan	30.878.249,00	30.878.249,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						Tersedianya sarana dan prasarana untuk kelompok kegiatan	5	BKB Kit Stunting	104.975.000,00	104.975.000,00	DAK
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)						Peningkatan pertemuan dan advokasi 1000 HPK	100	%	325.000.000,00	325.000.000,00	DAK
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupat/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									34.909.115,00	34.909.115,00	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja						Tersedianya Dukungan Operasional Harganas	8	lomba	34.909.115,00	34.909.115,00	
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN									1.230.717.500,00	840.717.500,00	
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									1.230.717.500,00	840.717.500,00	
			Meningkatnya konektivitas daerah	Indeks konektivitas kabupaten	1,06							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						Cakupan fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	100	%	1.230.717.500,00	840.717.500,00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	100	%	629.685.000,00	599.685.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						Terpeliharanya LPJU	423	unit	629.685.000,00	599.685.000,00	
							Terpeliharanya APILL	24	unit			
	Pengujian berkala kendaraan bermotor						Terlaksananya Pengujian berkala kendaraan bermotor	100	persen	60.000.000,00		
	Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor						Terlaksananya Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	100	persen	60.000.000,00		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100	%	241.032.500,00	241.032.500,00	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						Terlaksananya Pengendalian dan Pengaman Lalin pada Hari Raya, Natal dan Tahun Baru	3	kegiatan	241.032.500,00	241.032.500,00	
	Pengelolaan terminal penumpang type C						Terlaksananya Pengelolaan terminal penumpang type C	100	persen	300.000.000,00		
	Penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang type C						Terlaksananya Penyusunan rencana	1	dokumen	300.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							pembangunan terminal penumpang type C					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									6.060.575.796,00	5.923.530.796,00	
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									6.060.575.796,00	5.923.530.796,00	
			Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	85							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	3.999.463.396,00	3.862.418.396,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									7.926.500,00	7.926.500,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Tersusun	3	jenis	1.990.000,00	1.990.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						jumlah dokumen tersusun	3	jenis	3.946.500,00	3.946.500,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Tersusun	4	dokumen	1.990.000,00	1.990.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							100	%	2.605.970.000,00	2.605.970.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	1	dokumen	1.990.000,00	1.990.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	2	dokumen	1.990.000,00	1.990.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Tersusun	2	dokumen	1.990.000,00	1.990.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							100	%	485.262.496,00	485.262.496,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya Komponen instalasi listrik dan penerangan	13	alat listrik	7.894.400,00	7.894.400,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya makanan dan minuman	12	bulan	34.815.300,00	34.815.300,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	bulan	25.608.000,00	25.608.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12	bulan	4.966.200,00	4.966.200,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya Alat tulis kantor	12	bulan	29.525.596,00	29.525.596,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah / dalam daerah	12	bulan	382.453.000,00	382.453.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100	%	672.404.400,00	535.359.400,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						pembayaran honorarium phl	147	OB	375.995.000,00	252.060.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran Komunikasi, Sumberdaya Air Listrik	12	bulan	94.500.000,00	94.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran Honorarium PHL	78	OB	201.909.400,00	188.799.400,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100	%	227.900.000,00	227.900.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran Honorarium PHL	24	OB	142.420.000,00	142.420.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya gedung kantor	1	Gedung	7.500.000,00	7.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	45	kali	11.980.000,00	11.980.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya peralatan gedung kantor	7	jenis	66.000.000,00	66.000.000,00	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						Tersebar nya informasi publik secara efektif	60	%	1.099.130.300,00	1.099.130.300,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat	12	bulan	1.099.130.300,00	1.099.130.300,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik						Jumlah Raperaturan tentang Informasi dan Komunikasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat	1	raperbup	73.930.000,00	73.930.000,00	
							Jumlah Raperaturan tentang Informasi dan Komunikasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat	1	raperda			
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						Jumlah Dokumentasi Audiovisual Kabupaten Bangka Barat	50	Audiovisual	49.510.060,00	49.510.060,00	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						Jumlah berita yang di upload pada website Kabupaten Bangka Barat	100	berita	18.760.000,00	18.760.000,00	
	Pelayanan Informasi Publik						Dokumen data informasi publik	1	dokumen	254.802.000,00	254.802.000,00	
							Jumlah media informasi yang terpasang dan mencetak dalam rangka penyebaran informasi pembangunan daerah	10	jenis			
							Jumlah peliputan kegiatan pemerintahan daerah	50	liputan			
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas						Jumlah kerja sama dengan media massa	4	media	702.128.240,00	702.128.240,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Pertukaran dan penyebaran informasi pembangunan	2	kali			
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						Peningkatan masyarakat yang memanfaatkan informasi melalui media online	5	%	961.982.100,00	961.982.100,00	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									33.985.000,00	33.985.000,00	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan jaringan dan peralatan SIM Terpadu	12	bulan	33.985.000,00	33.985.000,00	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									927.997.100,00	927.997.100,00	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah						Peralatan data center	3	item	21.410.000,00	21.410.000,00	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah						Lebar pita (band width) layanan internet	29	OPD	898.238.300,00	898.238.300,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik						Tersedianya Data Sumber daya TIK	1	dokumen	8.348.800,00	8.348.800,00	
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN									6.105.519.470,00	6.093.507.470,00	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									6.105.519.470,00	6.093.507.470,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Satuan				
			Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri	Persentase peningkatan unit usaha UMi	2%								
				Persentase peningkatan unit IKM	5%								
				Peningkatan Skala usaha Umi	2,5%								
				Kapasitas Usaha IKM Unggulan	3152,18 Ton/Thn (industri Makanan), 222.492 Unit/Thn (industri kerajinan)								
			Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Jumlah ragam usaha Umi	150								
				Jumlah ragam usaha Industri kecil dan menengah	54								
				Jangkauan pasar produk UMi	DK=98,5% AK=1,0% AP = 0,5%								
				Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan menengah	DK=98% AK=1% AP = 1%								
				Kontribusi Umi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	9,78%								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Meningkatnya keberhasilan capaian akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian.			4.864.107.670,00	4.852.095.670,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Status capaian kinerja			7.999.700,00	7.999.700,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	dokumen	1.999.900,00	1.999.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	dokumen	1.999.800,00	1.999.800,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Status capaian kinerja keuangan			2.905.998.950,00	2.905.998.950,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN DKUP	12	bulan	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Dokumen yang tersusun	1	dokumen	1.999.350,00	1.999.350,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Dokumen yang tersusun	2	dokumen	1.999.800,00	1.999.800,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen yang tersusun	2	dokumen	1.999.800,00	1.999.800,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Meningkatnya disiplin apartatur dalam berpakaian			12.012.000,00	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk satpam	12	stel	12.012.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			624.434.240,00	624.434.240,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12	bulan	4.997.770,00	4.997.770,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya bahan logistik kantor	12	bulan	4.272.350,00	4.272.350,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya makanan dan minuman rapat dan kegiatan kantor	12	bulan	41.564.200,00	41.564.200,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dan kantor operasional UPT	12	bulan	72.119.500,00	72.119.500,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	4.860.000,00	4.860.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya alat tulis kantor dan operasional UPT	12	bulan	40.280.420,00	40.280.420,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Perjalanan dinas Luar dan dalam daerah	12	bulan	456.340.000,00	456.340.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			1.046.962.880,00	1.046.962.880,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran honorarium PHL dan peningkatan admi nistrasi perkantoran selama 12 bulan	48	OB	128.480.000,00	128.480.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran honorarium PHL dan peningkatan admi nistrasi perkantoran selama 12 bulan	12	bulan	109.646.040,00	109.646.040,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12	bulan	808.836.840,00	808.836.840,00	
Pembayaran honorarium PHL dan peningkatan administrasi keuangan selama 12 bulan							108	OB				
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, penyediaan kebersihan Kantor dan Penyediaan Jasa Pengamanan Pasar 12 bulan							216	OB				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase sarana Transportasi dalam kondisi baik			266.699.900,00	266.699.900,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	12	bulan	78.389.900,00	78.389.900,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran pajak Kendaraan dinas dan perpanjangan STNK.	12	bulan	68.240.000,00	68.240.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Petak toko	50	petak	120.070.000,00	120.070.000,00	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			515.120.000,00	515.120.000,00	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			515.120.000,00	515.120.000,00	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						Tersedianya Tenaga Penyuluh Koperasi	15	orang	487.500.000,00	487.500.000,00	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota						Terlaksananya Rapat Koordinasi	2	kebijakan	27.620.000,00	27.620.000,00	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									167.782.000,00	167.782.000,00	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota									167.782.000,00	167.782.000,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						Terlatihnya pengurus koperasi	50	UMi	167.782.000,00	167.782.000,00	DAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Umi			163.232.000,00	163.232.000,00	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						Pengembangan Sarana dan Prasarana Umi			163.232.000,00	163.232.000,00	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro						Terfasilitasinya usaha mikro dalam memperoleh izin	50	UMi	154.632.000,00	154.632.000,00	DAK
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						Ketersediaan data untuk pengembangan UMKM	1	dokumen	8.600.000,00	8.600.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						Terciptanya Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			395.277.800,00	395.277.800,00	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						Peningkatan Unit Sekala UMI			395.277.800,00	395.277.800,00	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi						Ketersediaan Tenda Ramadan & Fasilitasi Dekranasda	332	UMi	395.277.800,00	395.277.800,00	DAK
	DINAS PENANAMAN MODAL, PPTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									672.671.750,00	708.671.750,00	
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									672.671.750,00	708.671.750,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
			Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan Jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	100M							
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									10.000.000,00	10.000.000,00	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah investasi terkait perizinan	50	milyar	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						Dokumen nilai investasi dan nilai realisasi investasi	1	dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									160.065.000,00	160.065.000,00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah kerjasama dengan investor	7	kerjasama	160.065.000,00	160.065.000,00	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal						Terlaksananya pameran luar daerah	2	kali	160.065.000,00	160.065.000,00	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									145.365.000,00	181.365.000,00	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						Lama waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan izin usaha tertentu atau jenis ijin tertentu	7	hari	145.365.000,00	181.365.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							jenis ijin tertentu					
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						Tersedianya data perizinan	1	dokumen	81.565.000,00	117.565.000,00	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal						Berita acara survey perizinan jumlah pengawasan menara telekomunikasi	150	dokumen	63.800.000,00	63.800.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						Jumlah kerjasama dengan investor			357.241.750,00	357.241.750,00	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah kerjasama dengan investor	7	kerjasama	357.241.750,00	357.241.750,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal						Pengawasan pelaksanaan penanaman modal di daerah untuk PMDN dan UKM	2	laporan	101.400.000,00	101.400.000,00	DAK
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						Dokumen nilai investasi dan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	1	dokumen	190.272.000,00	190.272.000,00	DAK
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal						Pemantauan pelaksanaan penanaman modal di daerah untuk PMDN dan UKM	2	laporan	65.569.750,00	65.569.750,00	DAK
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									2.401.408.533,00	2.301.408.533,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									2.401.408.533,00	2.301.408.533,00	
			Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	Prestasi olah raga pendidikan di tingkat Provinsi	Kejurda 3							
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									751.408.533,00	651.408.533,00	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									751.408.533,00	651.408.533,00	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda						Terlaksananya kegiatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	3	kegiatan	751.408.533,00	651.408.533,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga									1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan						Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	12	Bulan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									150.000.000,00	150.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan									150.000.000,00	150.000.000,00	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan						Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	12	bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									199.622.000,00	199.622.000,00	
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									199.622.000,00	199.622.000,00	
			Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	70							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						Persentase Ketersediaan dan validitas data/ informasi untuk perencanaan	55	%	199.622.000,00	199.622.000,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota									199.622.000,00	199.622.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						Ketersediaan Data Sektoral Untuk Pengambilan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	192.822.000,00	192.822.000,00	
							Terlaksananya Kegiatan IKG	1	buku			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Tersedianya buku indikator kesejahteraan rakyat Bangka Barat	10	buku			
	Membangun Metadata Statistik Sektoral						Pengelolaan dan Updating data SDDKN kab.Bangka Barat	12	bulan	6.800.000,00	6.800.000,00	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									63.908.000,00	63.908.000,00	
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									63.908.000,00	63.908.000,00	
			Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						Persentase Pengguna Layanan Informasi Melalui Peralatan dan Jaringan Telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	90	%	63.908.000,00	63.908.000,00	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota									31.936.000,00	31.936.000,00	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						Pengelolaan dan perlindungan konten informasi milik pemerintah daerah	1	konten	31.936.000,00	31.936.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									31.972.000,00	31.972.000,00	
	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Pelaksanaan Dukungan kegiatan penting pada pemerintah daerah dan sterilisasi Objek Vital	3	objek	31.972.000,00	31.972.000,00	
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									5.685.181.557,00	5.685.181.557,00	
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									5.685.181.557,00	5.685.181.557,00	
			Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	Persentase benda, situs, benda, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintergrasi dengan program pariwisata	42%							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	4.593.079.757,00	4.593.079.757,00	
							Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100	%	8.000.000,00	8.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	3.106.000.000,00	3.106.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	454.596.060,00	454.596.060,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Mengganti, melengkapi dan mencukupi alat listrik kantor	16	item	9.996.600,00	9.996.600,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya Makan Minum Kegiatan, Rapat dan Tamu Kantor	12	bulan	73.550.950,00	73.550.950,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Kebutuhan sarana administrasi kantor mencukupi	12	bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya bahan bacaan dan informasi Kantor	3	item	4.968.000,00	4.968.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya Alat Tulis Kantor	44	jenis	71.115.510,00	71.115.510,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	12	bulan	244.965.000,00	244.965.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	798.766.197,00	798.766.197,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran Gaji PHL Administrasi Perkantoran	144	OB	346.640.000,00	346.640.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran komunikasi, sumber daya air listrik dan internet	4	lokasi	250.356.000,00	250.356.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Terbayarnya honorarium PHL administrasi keuangan	36	OB	201.770.197,00	201.770.197,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	bulan	225.717.500,00	225.717.500,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran PHL Supir, Service, BBM dan Suku cadang Kendaraan Dinas/Operasional	36	OB	213.480.000,00	213.480.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Gedung Kantor terawat dan terpelihara	1	gedung	7.342.500,00	7.342.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Alat kantor yang terawat dan terpelihara	4	jenis	4.895.000,00	4.895.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						jumlah kekayaan budaya lokal daerah yang dilestarikan	39	budaya	386.853.000,00	386.853.000,00	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah acara adat dan tradisi yang dilestarikan	20	event	226.853.250,00	226.853.250,00	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						Jumlah acara adat yang diselenggarakan	16	event	226.853.250,00	226.853.250,00	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Fasilitasi atas pelaku seni yang berprestasi	18	Fasilitasi	79.999.750,00	79.999.750,00	
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan						Fasilitasi penyambutan tamu	18	ceremony	79.999.750,00	79.999.750,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Lembaga Adat yang Dibina	1	Lembaga adat	80.000.000,00	80.000.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat						Terlaksananya Program Kerja Lembaga Adat	1	dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	kali	378.764.600,00	378.764.600,00	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Terbinanya Kesenian Masyarakat Bangka Barat	100	%	378.764.600,00	378.764.600,00	
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan						Bantuan Alat Kesenian Sanggar Seni	10	paket	228.764.800,00	228.764.800,00	
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						Terlaksananya Fasilitasi Dewan Kesenian	1	laporan	149.999.800,00	149.999.800,00	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						jumlah kerjasama pemerintah daerah terkait pengelolaan kekayaan budaya	4	buah	62.054.360,00	62.054.360,00	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Tersampainya informasi kepada Masyarakat	100	%	62.054.360,00	62.054.360,00	
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah						Jumlah fasilitasi, koordinasi terkait pembinaan dan pelestarian sejarah lokal daerah pada tahun bersangkutan	2	laporan	62.054.360,00	62.054.360,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						
							Tolok Ukur	Target	Satuan				
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						jumlah kebijakan tentang budaya lokal daerah yang ditetapkan	29	buah	264.429.840,00	264.429.840,00		
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						Terpeliharanya Cagar Budaya Yang Telah di Tetapkan	100	%	264.429.840,00	264.429.840,00		
	Pelindungan Cagar Budaya						Terbayarnya Honorarium PHL juru pelihara cagar budaya	72	OB	264.429.840,00	264.429.840,00		
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									5.431.106.159,85	4.368.766.159,85		
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									5.431.106.159,85	4.368.766.159,85		
			Meningkatnya kualitas pendidikan	Peringkat ujian nasional se-Provinsi Bangka Belitung									
				SD	1								
				SMP	1								
				Angka Harapan Lama Sekolah	13,35								
				Angka rata rata lama sekolah Kabupaten	8,26								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	5.090.615.519,85	4.028.275.519,85		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	7.844.400,00	7.844.400,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Laporan	1.994.800,00	1.994.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	3.854.800,00	3.854.800,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	1.994.800,00	1.994.800,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	2.705.984.400,00	2.705.984.400,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	1.994.800,00	1.994.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD						Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwula n/Semesteran SKPD	2	Dokumen	1.994.800,00	1.994.800,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	1.994.800,00	1.994.800,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	310.761.369,85	310.761.369,85	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Pengisian Tabung Gas	12	Bulan	4.800.000,00	4.800.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya Makanan dan Minuman	12	Bulan	33.994.815,00	33.994.815,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	38.784.480,00	38.784.480,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Koran dan Majalah)	12	Bulan	2.438.880,00	2.438.880,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya Bahan/Material (ATK)	12	Bulan	50.999.694,85	50.999.694,85	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah)	12	Bulan	179.743.500,00	179.743.500,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pemerintah Daerah	100	%	1.002.340.000,00	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Jenis	526.170.000,00	-	
	Pengadaan Mebel						Terpenuhinya kebutuhan mebel kantor	5	Jenis	205.470.000,00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Jenis	270.700.000,00	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	931.533.120,00	871.533.120,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran Gaji Honorarium PHL	84	OB	591.510.000,00	591.510.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran Gaji Honorarium PHL, Biaya Listrik dan Telepon	12	Bulan	146.772.000,00	86.772.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran Gaji Honorarium PHL	48	OB	193.251.120,00	193.251.120,00	
							Tersedianya Bahan Pembersih	12	Bulan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	132.152.230,00	132.152.230,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran Gaji Honorarium PHL, Biaya Perawatan, BBM	24	OB	124.685.130,00	124.685.130,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	2	Gedung	7.467.100,00	7.467.100,00	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling	45000	pengunjung	340.490.640,00	340.490.640,00	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Keliling	100	%	103.945.140,00	103.945.140,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Perpustakaan	66	Peserta	31.937.660,00	31.937.660,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						Tersedianya Bahan Pustaka yang Memadai	1 10 1500	Paket Klasifikasi Eks	47.359.480,00	47.359.480,00	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Tersedianya Profil Perpustakaan Desa, Sekolah dan Bibliografi Daerah	100	Buku	24.648.000,00	24.648.000,00	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Keliling	100	%	236.545.500,00	236.545.500,00	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat						Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	4	Kegiatan	127.056.100,00	127.056.100,00	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Pemustaka dapat Dijangkau dan Dilayani	24 3000	Kegiatan Pengunjung	109.489.400,00	109.489.400,00	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									143.312.700,00	143.312.700,00	
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									143.312.700,00	143.312.700,00	
			Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	82,73							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						Persentase perangkat daerah/desa yang melakukan pengelolaan arsip secara baku	64,15	%	74.912.950,00	74.912.950,00	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Perangkat Daerah/Desa yang Melakukan Pengelolaan Arsip secara Baku	78,3	%	34.044.950,00	34.044.950,00	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pengawasan Kearsipan	10	OPD	34.044.950,00	34.044.950,00	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						Persentase Perangkat Daerah/Desa yang Melakukan Pengelolaan Arsip Secara Baku	78,3	%	40.868.000,00	40.868.000,00	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN						Terlaksananya Database System Kearsipan	1	Paket	17.640.000,00	17.640.000,00	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						Pengelola Kearsipan OPD Mengerti Tentang Tata Cara Penyusutan Arsip	66	Orang	23.228.000,00	23.228.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						Persentase perangkat daerah/desa yang melakukan Pengelolaan arsip secara baku	35	%	68.399.750,00	68.399.750,00	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun						Dokumen/Arsip Daerah yang Disimpan di Record Center	80	%	68.399.750,00	68.399.750,00	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun						Terlaksananya Pemilahan Arsip dan Pedoman JRA SKPD	100	Boks	68.399.750,00	68.399.750,00	
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									10.288.749.685,00	7.594.634.763,00	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									5.369.938.070,00	3.649.838.220,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									5.369.938.070,00	3.649.838.220,00	
			Meningkatnya nilai produksi perikanan	nilai produksi perikanan tangkap	633.268,73							
				Nilai produksi perikanan budidaya air tawar	7.520,05							
				Nilai produksi perikanan budidaya air laut	7982							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
			Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	1,45%							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	3.011.857.250,00	2.999.857.250,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen yang tersusun dan cakupan kinerja program perangkat daerah			8.000.000,00	8.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen yang tersusun	2	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	4	dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	
							jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD yang tersusun	2	dokumen			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	4	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						jumlah dokumen yang tersusun, status capaian kinerja keuangan			1.706.000.000,00	1.706.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester teran SKPD						jumlah laporan keuangan bulanan semester yang tersusun	2	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									382.488.400,00	382.488.400,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	3.950.000,00	3.950.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	4.600.000,00	4.600.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						tersedianya makan dan minuman rapat	12	bulan	35.982.000,00	35.982.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	bulan	31.500.000,00	31.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						tersedianya surat kabar, majalah dan buku peraturan	12	bulan	4.960.000,00	4.960.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	31.500.000,00	31.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	bulan	269.996.400,00	269.996.400,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						pembayaran honorarium PHL dan persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran			750.447.500,00	750.447.500,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						pembayaran honorarium PHL	12	bulan	55.940.000,00	55.940.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						penyediaan jasa telepon, air dan listrik	12	bulan	101.392.500,00	101.392.500,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						pembayaran honorarium PHL	240	ob	593.115.000,00	593.115.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			164.921.350,00	152.921.350,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						pembayaran honorarium PHL,	12	OB	129.300.000,00	117.300.000,00	
pembayaran STNK kendaraan diinas,							21	Unit				
terpeliharannya kendaran dinas/operasional							15	Unit				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1	paket	27.396.350,00	27.396.350,00	
terpeliharanya gedung kantor							1	gedung				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	bulan	4.988.200,00	4.988.200,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	bulan	3.236.800,00	3.236.800,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	12	%	1.632.481.750,00	24.381.900,00	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						jumlah mesin tempel (mesin 3,5 PK), persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			1.608.099.850,00	-	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						tersedianya mesin 3,5 PK	20	unit	77.950.000,00		DAK
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						tersedainya bubu lipat	500	unit	1.530.149.850,00		DAK
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						pendampingan pinjaman modal bagi nelayan kecil, persentase pengembalian pembiayaan pinjaman bagi nelayan	100	%	24.381.900,00	24.381.900,00	
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						pendampingan pinjaman modal bagi nelayan kecil	15	kelompok	24.381.900,00	24.381.900,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar	15	%	612.462.500,00	512.462.500,00	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan									612.462.500,00	512.462.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						tersedianya pakan ikan	10.100	kg	230.126.200,00	230.126.200,00	
						tersedianya pakan ikan BBI	12	bulan				
						tersedianya benih ikan nila dan lele	75.000	ekor				
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						pengadaan mesin pembuat pakan	1	paket	276.352.600,00	276.352.600,00	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						pengadaan obat-obatan ikan di BBI	12	bulan	5.983.700,00	5.983.700,00	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						Tersedianya Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1	dokumen	100.000.000,00		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									113.136.570,00	113.136.570,00	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil									30.586.620,00	30.586.620,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						lomba masak serba ikan	1	lomba	30.586.620,00	30.586.620,00	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota									82.549.950,00	82.549.950,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						tersedianya alat pemisah tulang (separator bones)	1	unit	82.549.950,00	82.549.950,00	
						tersedianya chest freezer	1	unit				
						tersedianya mesin penggiling ikan dan bumbu	2	unit				
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									2.715.783.795,00	1.739.581.223,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									2.715.783.795,00	1.739.581.223,00	
			Berkembangnya destinasi wisata	Kunjungan wisata	120.000							
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,20%							
				Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	20%							
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						destinasi wisata yang dikelola dan dikemas dengan baik	2	tempat	1.530.639.358,00	1.330.639.358,00	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota						Terfasilitasinya Pengembangan DTW Baru	100	%	56.289.910,00	56.289.910,00	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						Jumlah sarana penunjang kepariwisataan yang dikembangkan	2	unit	56.289.910,00	56.289.910,00	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota						Terpeliharanya Daya Tarik Wisaya yang di Kelola	100	%	1.474.349.448,00	1.274.349.448,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						Terlaksananya pelatihan tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi pariwisata	40	peserta	129.400.428,00	129.400.428,00	DAK
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						Tersedianya dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	dokumen	100.000.000,00		
	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						pendukung di kawasan pariwisata	2	objek	349.999.860,00	249.999.860,00	
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						Pembayaran jasa petugas kawasan wisata	32	PHL	894.949.160,00	894.949.160,00	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						Jumlah paket wisata yang dipasarkan	19	kali	408.941.865,00	408.941.865,00	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota						Jumlah Paket Wisata yang di pasarkan	30	paket	408.941.865,00	408.941.865,00	
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						Bahan Informasi Promosi Wisata	4	media	43.547.030,00	43.547.030,00	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						Fasilitasi Event Wisata Masyarakat/Kom unitas	10	fasilitasi	340.318.615,00	340.318.615,00	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						Terlaksananya Pemuktahiran data kepariwisataan	1	dokumen	17.076.495,00	17.076.495,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						Terlaksananya kerjasama antara Pemkab. Babar dengan stakeholders lainnya di sektor kepariwisataan	1	kerjasama	7.999.725,00	7.999.725,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100	%	776.202.572,00		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	220	peserta	776.202.572,00		
	Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						Terlaksananya pelatihan pemandu wisata alam, pemandu wisata budaya, pemandu wisata buatan, dan digitalisasi branding pemasaran dan penjualan	140	peserta	517.601.716,00		DAK
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata						Terlaksananya pelatihan usahahomestay/p ondok wisata dan desa wisata	80	peserta	258.600.856,00		DAK
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									1.448.495.120,00	1.448.495.120,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									1.448.495.120,00	1.448.495.120,00	
			Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan pangan	2							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
			Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	4.069,20							
			Meningkatnya nilai produksi peternakan	Nilai produksi ternak ruminansia	35,525							
				Nilai produksi ternak unggas	22,934							
			Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	1,45%							
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	0	136.965.840,00	136.965.840,00	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						Produktivitas Padi (ton/ha/thn) dan persentase peningkatan produksi padi (ton) setiap tahun	11000	Ton	91.298.340,00	91.298.340,00	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						-Lausan kebun entres tanaman karet yang terpelihara	1	Ha	91.298.340,00	91.298.340,00	
							Tersedianya sarpras Inseminasi Buatan (IB)	3	Pos IB			
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						Produktivitas Padi (ton/ha/thn) dan persentase peningkatan produksi padi (ton) setiap tahun	11000	Ton	45.667.500,00	45.667.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						Tersedianya kebutuhan pakan tambahan bagi ternak sapi	12	Bulan	45.667.500,00	45.667.500,00	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									14.066.800,00	14.066.800,00	
	Pengembangan Prasarana Pertanian						Produktivitas padi (ton/ha/thn) dan persentase peningkatan produksi padi (ton) setiap tahun	3	Ton per Ha	14.066.800,00	14.066.800,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya						Jumlah Fasilitasi temu pelaku usaha perkebunan	1	Kali	14.066.800,00	14.066.800,00	
						Tersedianya Data/Informasi Update Potensi Perkebunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	6	Buku				
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	100	%	84.070.400,00	84.070.400,00	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase kasus penyakit ternak yang ditangani	100	%	84.070.400,00	84.070.400,00	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis						Alat Kesehatan dan Obat-obatan hewan	23	Jenis	58.388.600,00	58.388.600,00	
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular						Jumlah kasus penyakit hewan yang tertangani	200	Kasus	25.681.800,00	25.681.800,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	20	%	343.580.500,00	343.580.500,00	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						Cakupan fasilitasi/infra struktur pengembangan sentra industri agropolitan	40	%	343.580.500,00	343.580.500,00	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						Jumlah Luas pengendalian serangan OPT perkebunan	115	Hektar	343.580.500,00	343.580.500,00	
							Jumlah Luas pengendalian serangan OPT TPH	180	Hektar			
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	100	%	869.811.580,00	869.811.580,00	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						Persentase penyuluh pertanian yang dibina/diberdayakan	100	%	869.811.580,00	869.811.580,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						Jumlah Monev penyuluhan pertanian lapangan	79	Laporan	799.592.000,00	799.592.000,00	
							Jumlah penilaian DUPAK dan PAK penyuluh pertanian lapangan (ASN)	79	PAK			
							Jumlah PPL ASN/PHL dan THL-TB PP yang di bayarkan BOP	1	Tahun			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Jumlah PPL dan THL-TB PP yang di gaji	1	Tahun			
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						Jumlah fasilitasi pembinaan posluhdes dan P4S	64	desa/kelurahan	42.945.920,00	42.945.920,00	
							Jumlah peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	10	Poktan			
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian						Jumlah demplot PPL di masing-masing BPP	6	BPP	27.273.660,00	27.273.660,00	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									117.250.500,00	119.438.000,00	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									117.250.500,00	119.438.000,00	
			Terwujudnya konservasi sumber air	Persentase sumber air yang telah di konservasi	28%							
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Hutan	3333,2	Ha	117.250.500,00	119.438.000,00	
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota						Terlaksananya Pengelolaan Taman Hutan Raya(TAHURA) Kabupaten/ Kota			117.250.500,00	119.438.000,00	
	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA						Dokumen pengelolaan kawasan Tahura	1	kawasan	117.250.500,00	119.438.000,00	
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN									496.622.200,00	496.622.200,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									496.622.200,00	496.622.200,00	
			Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan menengah	DK=98% AK=1% AP = 1%							
			Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	1,45%							
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						Tercapainya Peningkatan Stabilitas Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			408.996.000,00	408.996.000,00	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota						Peningkatan Stabilitas Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			408.996.000,00	408.996.000,00	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						Dokumen updating harga dan stock kebutuhan pokok masyarakat	1	dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						Terlaksananya paket pasar murah berupa sembako murah dan subsidi daging sapi	7600	paket	390.996.000,00	390.996.000,00	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			87.626.200,00	87.626.200,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			87.626.200,00	87.626.200,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						Terlaksananya sidang tera di pasar dan objek timbang	100	%	87.626.200,00	87.626.200,00	
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN											
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
			Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan menengah	DK=98% AK=1% AP = 1%							
				Jumlah ragam usaha Industri kecil dan menengah	54							
			Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri	Persentase peningkatan unit industri kecil dan menengah	5%							
			Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan Jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	100M							
			Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	4,50%							
	DINAS PENANAMAN MODAL, PPTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									140.660.000,00	140.660.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									140.660.000,00	140.660.000,00	
			Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan pangan	2 Juta							
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						Presentase KK transmigran yang mandiri			27.500.000,00	27.500.000,00	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Presentase KK transmigran yang mandiri	37	persen	27.500.000,00	27.500.000,00	
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran						Terpeliharanya sarpras di kawasan transmigrasi	100	persen	27.500.000,00	27.500.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI									113.160.000,00	113.160.000,00	
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						Presentase KK transmigran yang mandiri	37	persen	113.160.000,00	113.160.000,00	
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman						Tersedianya bantuan sarprodi pertanian (pupuk, kapur, insektisida dan bibit sayuran)	68	kk	113.160.000,00	113.160.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH									32.647.752.155,00	31.341.465.440,00	
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									32.647.752.155,00	31.341.465.440,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
			Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP daerah	70							
			Terpenuhinya pelayanan dasar masyarakat dan kualitas pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	85							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	26.484.327.573,00	25.537.213.158,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	11.582.000,00	11.582.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen yang tersusun	9	Dokumen	2.897.500,00	2.897.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen yang tersusun	11	Dokumen	5.784.500,00	5.784.500,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen yang tersusun	4	Dokumen	2.900.000,00	2.900.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	9.008.700.000,00	9.008.700.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Dokumen yang tersusun	1	Dokumen	2.900.000,00	2.900.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah Dokumen yang tersusun	2	Dokumen	2.900.000,00	2.900.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen yang tersusun	2	Dokumen	2.900.000,00	2.900.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	9.880.200,00	9.880.200,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan Sekda	4	Stel	9.880.200,00	9.880.200,00	
							Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	44	Stel			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	4.014.178.445,00	3.954.178.445,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	64.159.535,00	64.159.535,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya Peralatan rumah tangga	12	Bulan	181.282.350,00	161.282.350,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Terpenuhinya makanan dan minuman	12	Bulan	1.038.422.550,00	1.038.422.550,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	jenis	40.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	164.445.910,00	164.445.910,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	182.991.600,00	182.991.600,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	195.497.500,00	195.497.500,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar Daerah	12	Bulan	2.147.379.000,00	2.147.379.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	2.103.280.000,00	1.953.280.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Tersedianya Mobil Jabatan	3	unit	1.652.680.000,00	1.652.680.000,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	unit	350.000.000,00	200.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	jenis	100.600.000,00	100.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Bulan	5.085.038.160,00	4.994.538.160,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran Honorarium PHL	746	ob	2.231.827.500,00	2.197.387.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran Honorarium PHL	12	ob	1.342.720.000,00	1.342.720.000,00	
							Tersedianya Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12	Bulan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran Honorarium PHL	96	ob	1.510.490.660,00	1.454.430.660,00	
							Pembayaran Honorarium PHL	412	ob			
							Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	12	Bulan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	3.047.895.000,00	2.747.895.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran Honorarium PHL	264	ob	1.366.743.000,00	1.366.743.000,00	
							Pembayaran STNK Kendaraan Dinas/Operasional	150	unit			
							Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan			
							Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	4	unit			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Gedung Kantor	12	Bulan	1.395.280.000,00	1.095.280.000,00	
							Terpeliharanya Mess dan Rumah Dinas	12	Bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Terpeliharanya rumah jabatan	2	jenis			
							Tersedianya operasional Masjid Agung Baiturridho	12	Bulan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Perlengkapan kerja	12	Bulan	200.787.000,00	200.787.000,00	
							Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas	12	Bulan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya peralatan kerja	12	Bulan	85.085.000,00	85.085.000,00	
							Tersedianya operasional Masjid Agung Baiturridho	12	Bulan			
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Persen	809.175.760,00	809.175.760,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	14	Stel	60.875.760,00	60.875.760,00	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Tersedianya Medical Check Up KDH dan WKDH beserta keluarga	12	Bulan	148.300.000,00	148.300.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Tersedianya Suplemen kesehatan KDH dan WKDH	8	Orang			
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Tersedianya Dana Operasional KDH dan WKDH	12	Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	
	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah						Terfasilitasinya Kerumahtangaan Kepala Daerah ,Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100	Persen	578.137.098,00	231.522.683,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						Tersedianya peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas Bupati	3	paket	227.926.332,00	127.926.332,00	
								10	Jenis			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						Tersedianya peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas Wakil Bupati	3	paket	277.087.798,00	80.473.383,00	
								13	Jenis			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						Tersedianya peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	3	paket	73.122.968,00	23.122.968,00	
								6	Jenis			
	Penataan Organisasi						Persentase Perangkat Daerah yang tepat Fungsi dan tepat Ukuran	80	Persen	261.128.550,00	261.128.550,00	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						Tersusunnya dokumen kelembagaan dan analisis jabatan	2	Dokumen	95.928.830,00	95.928.830,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						Tersusunnya Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Dokumen	76.899.750,00	76.899.750,00	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						Tersusunnya Dokumen Reformasi Birokrasi Kabupaten	1	Dokumen	32.239.950,00	32.239.950,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						Tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Pemerintah	100	%	56.060.020,00	56.060.020,00	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						Terselenggaranya protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	Persen	1.555.332.360,00	1.555.332.360,00	
	Fasilitasi Keprotokolan						Penataan acara Pimpinan Daerah di dalam dan Luar Daerah	12	Bulan	44.551.360,00	44.551.360,00	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						Meningkatnya hubungan KDH/WKDH dengan Ormas/pelajar/ Mahasiswa dan tokoh Masyarakat	12	Bulan	1.475.086.000,00	1.475.086.000,00	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						Dokumentasi kegiatan Pimpinan Daerah dalam dan Luar Daerah	12	Bulan	35.695.000,00	35.695.000,00	
							Tersedianya Informasi melalui Website dan pengolahan data elektronik dalam bentuk aplikasi	12	Bulan			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						Cakupan rancangan regulasi Daerah menjadi regulasi Daerah	100	Persen	5.538.947.412,00	5.279.775.112,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Administrasi Tata Pemerintahan						Persentase rumusan kebijakan tata Pemerintahan Daerah yang tersusun	6	Kebijakan Daerah	247.689.012,00	247.689.012,00	
	Penataan Administrasi Pemerintahan						Terlaksananya Rapat Bina Pamong	6	Kali	86.449.960,00	86.449.960,00	
							Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	6	Kali			
							Tersedianya pelayanan PATEN sesuai dengan SOP yang berlaku	6	Kecamatan			
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						Fasilitasi penyelesaian Batas wilayah dan sosialisasi	1	Kali	69.514.732,00	69.514.732,00	
							Tersusunnya dokumen Rupabumi	1	Dokumen			
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						Terlaksananya Penilaian Kecamatan	6	Kecamatan	91.724.320,00	91.724.320,00	
							Tersedianya Dokumen SPM Kabupaten	1	Dokumen			
							Tersusunnya LKPJ Kepala Daerah	1	Dokumen			
							Tersusunnya LPPD Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat	1	Dokumen			
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						Terealisasinya kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100	Persen	4.578.232.300,00	4.319.060.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Fasilitasi Pengelolaan Bina MentalSpiritual						Jumlah Da'i yang melakukan pembinaan di tiap Desa	36	Orang	481.484.000,00	481.484.000,00	
							Terfasilitasinya Kegiatan lembaga keagamaan	6	Organisasi			
							Terlaksananya safari ramadhan	12	Desa			
							Tersedianya Operasional PHBI	6	Hari Besar			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial						Jumlah survey dan monitoring yang dilaksanakan tiap desa	100	proposal	4.058.738.300,00	3.799.566.000,00	
							Tersedianya bantuan sosial pendidikan sekolah menengah atas dan tinggi	35	Siswa/Mahasiswa			
							Tersedianya belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat	45	kelompok/masyarakat			
							Terselenggaranya sosialisasi kepada masyarakat perangkat Desa, lembaga keagamaan	6	Kecamatan			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat						Jumlah Peserta sosialisasi yang dilaksanakan	24	Sekolah	38.010.000,00	38.010.000,00	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						Tersusunnya produk hukum Daerah yang sesuai dengan peraturan	100	Persen	693.256.300,00	693.256.300,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							perundang-undangan					
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						Jumlah produk Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	700	Produk Hukum	142.437.200,00	142.437.200,00	
							Jumlah Raperbup yang tersusun	30	Raperbup			
							Jumlah Raperda yang sesuai dengan instrumen HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	12	Raperda			
							Jumlah Raperda yang tersusun	14	Raperda			
							Jumlah Raperdes/perdes yang dikaji	2	Kali			
							Penyusunan pengelolaan bahan Raperda yang akan dibahas tahun berikutnya	15	Raperda			
	Fasilitasi Bantuan Hukum						Jumlah bantuan terhadap permasalahan peraturan perundang-undangan	1	Kasus	152.318.000,00	152.318.000,00	
							Jumlah Rancangan dan laporan kerja RANHAMDA yang tersusun	2	Laporan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						Jumlah Perda/Raperda dan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru yang disosialisasikan	12	Judul	398.501.100,00	398.501.100,00	
							Jumlah Produk Hukum yang terupdate melalui Website JDH	100	Produk hukum			
							Terlaksananya pengawasan atas Pembangunan Daerah	31	SKPD			
	Fasilitasi Kerjasama Daerah						Terlaksananya kerjasama kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan pihak ketiga	10	Kerjasama/ PKS	19.769.800,00	19.769.800,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						Adanya Kerjasama yang terjalin antar daerah	10	MOU	19.769.800,00	19.769.800,00	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						Pengembangan Kebijakan Pembangunan sesuai dengan perencanaan	100	Persen	624.477.170,00	524.477.170,00	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian yang dikeluarkan	2	Kebijakan	315.943.150,00	215.943.150,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						Terjalinya Kerjasama antara BUMD dengan Masyarakat/Dunia Usaha	2	Pelaku usaha	240.892.500,00	140.892.500,00	
							Terlaksananya Pemilihan Direksi/Dewan Pengawas BUMD	1	Kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Tersusunnya dokumen analisa kebutuhan daerah dan kelayakan usaha BUMD	1	Dokumen			
							Tersedianya dokumen Monitoring dan Evaluasi BUMD per triwulan	4	Dokumen			
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						Tersedianya komponen data Inflasi di Kabupaten Bangka Barat	4	Dokumen	53.015.450,00	53.015.450,00	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil						Tersedianya laporan CSR perusahaan yang ada di Bangka Barat	4	Dokumen	22.035.200,00	22.035.200,00	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						Tingkat Deviasi realisasi fisik dan keuangan Pembangunan Daerah	30	Persen	87.124.800,00	87.124.800,00	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						Terlaksananya Rapat TEPR	12	Bulan	87.124.800,00	87.124.800,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Tingkat Kematangan UKPBJ	level	3	221.409.220,00	221.409.220,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Dokumen Pelaksanaan pengadaan yang ditindaklanjuti	100	%	144.667.120,00	144.667.120,00	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik						Jumlah Aparatur, dan Penyedia yang mengetahui tata cara penggunaan aplikasi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik	150	Paket	76.742.100,00	76.742.100,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	SEKRETARIAT DPRD									43.784.135.757,00	38.072.761.183,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									43.784.135.757,00	38.072.761.183,00	
			Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP daerah	70							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	26.142.342.007,00	22.772.187.433,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	7.046.380,00	7.046.380,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen yang tersusun	3	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen yang tersusun	5	dokumen	3.046.380,00	3.046.380,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen yang tersusun	4	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	3.006.000.000,00	3.006.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan						Tersusunnya laporan keuangan	1	laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Keuangan Akhir Tahun SKPD						akhir tahun					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah laporan yang tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah laporan yang tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.360.826.045,00	1.308.815.725,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	12	bulan	106.184.780,00	106.184.780,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	39.530.400,00	10.830.400,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	159.732.200,00	159.732.200,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya bahan logistik kantor	12	bulan	412.823.990,00	412.823.990,00	
							Tersedianya makanan dan minuman	12	bulan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	300.709.640,00	277.399.320,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	67.200.000,00	67.200.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	174.671.035,00	174.671.035,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah	12	bulan	99.974.000,00	99.974.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	%	48.500.000,00		
	Pengadaan Mebel						Tersedianya mebel	2	jenis	48.500.000,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	bulan	2.088.457.624,00	2.066.607.624,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran Honorarium PHL	382	ob	917.349.995,00	895.499.995,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12	bulan	368.363.999,00	368.363.999,00	
							Terkelolanya website DPRD	12	bulan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran Honorarium PHL	276	ob	802.743.630,00	802.743.630,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	3.895.927.001,00	3.416.517.001,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Terpeliharanya mobil jabatan	1	unit	123.000.000,00	123.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran Honorarium PHL	74	ob	479.170.000,00	492.910.000,00	
							Terpeliharanya kendaraan dinas	9	unit			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terlaksananya rehabilitasi sedang berat rumah Jabatan Pimpinan DPRD	1	Paket	2.420.189.001,00	2.066.189.001,00	
							Terpeliharanya gedung kantor	2	gedung			
								Terpeliharannya rumah jabatan/dinas	3			unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1	unit	110.548.000,00	44.548.000,00	
								Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas	60			unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya peralatan gedung kantor	182	unit	763.020.000,00	689.870.000,00	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	%	14.281.155.254,00	11.512.771.000,00	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						Tersedianya Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	12	Bulan	13.968.384.254,00	11.200.000.000,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						Tersedianya Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	150	Stel	312.771.000,00	312.771.000,00	
	Layanan Administrasi DPRD						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	%	1.454.429.703,00	1.454.429.703,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						Fasilitasi hearing, dialog dan monitoring adanya masukan/ aspirasi masyarakat	4	Kegiatan	698.429.720,00	698.429.720,00	
							Fasilitasi pelantikan/peresmian PAW	2	Kali			
							Fasilitasi rapat-rapat Badan musyawarah	24	Kegiatan			
							Fasilitasi rapat-rapat komisi	12	Kegiatan			
							Fasilitasi rapat-rapat Paripurna	40	Paripurna			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						Fasilitasi Kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	12	Bulan	755.999.983,00	755.999.983,00	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						Cakupan Raperda Menjadi Perda	100	%	17.641.793.750,00	15.300.573.750,00	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	100	%	591.257.870,00	591.257.870,00	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						Fasilitasi Pembahasan Raperda	15	Raperda	514.418.950,00	514.418.950,00	
							Fasilitasi Penyusunan Rancangan Perda Inisiatif	1	Raperda			
	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan						Fasilitasi rapat-rapat badan Legislatif	4	Kegiatan	76.838.920,00	76.838.920,00	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran						Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	%	188.627.320,00	188.627.320,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pembahasan APBD						Fasilitasi rapat-rapat Badan Anggaran	4	Kegiatan	188.627.320,00	188.627.320,00	
	Peningkatan Kapasitas DPRD						Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	100	%	4.177.327.860,00	4.153.327.860,00	
	Bimbingan Teknis DPRD						Fasilitasi pendalaman tugas yang diikuti Pimpinan Anggota DPRD	6	Kali	3.223.000.000,00	3.199.000.000,00	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan						Fasilitasi publikasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	12	Bulan	441.000.000,00	441.000.000,00	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						Fasilitasi jasa konsultasi dan bantuan hukum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	12	Bulan	159.270.000,00	159.270.000,00	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						jumlah tenaga ahli yang tersedia per tahun	60	ob	270.000.000,00	270.000.000,00	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						fasilitasi forum komunikasi DPRD dan Masyarakat	12	kegiatan	84.057.860,00	84.057.860,00	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	%	644.080.700,00	644.080.700,00	
	Pelaksanaan Reses						Fasilitasi kegiatan Reses Anggota DPRD untuk menjangkau aspirasi masyarakat di daerah Dapil masing-masing	3	reses	644.080.700,00	644.080.700,00	
	Fasilitasi Tugas DPRD						Terfasilitasinya pelaksanaan	100	%	12.040.500.000,00	9.723.280.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Tugas DPRD					
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						Fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	95	Berkas	12.040.500.000,00	9.723.280.000,00	
							Fasilitasi perjalanan dinas pimpinan DPRD dalam rangka konsultasi atau koordinasi	132	Kali			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									153.865.070.689,50	152.795.543.889,50	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH									8.119.509.010,00	7.712.754.010,00	
	PERENCANAAN									8.119.509.010,00	7.712.754.010,00	
			Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP daerah	70							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	5.786.800.500,00	5.380.045.500,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						dokumen perencanaan	5	jenis	8.000.000,00	8.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	3	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi						Jumlah dokumen tersusun	5	Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Kinerja SKPD											
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	4	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terkelolanya administrasi keuangan	100	%	3.606.000.000,00	3.606.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen tersusun	2	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	752.491.000,00	752.491.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12	bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	5.700.000,00	5.700.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya makanan dan minuman rapat dan kantor	12	bulan	33.946.700,00	33.946.700,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12	bulan	34.000.000,00	34.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	4.998.000,00	4.998.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	33.960.300,00	33.960.300,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	629.886.000,00	629.886.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	865.287.000,00	808.532.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran honorarium PHL, tersedianya jasa pengiriman	167	OB	410.695.000,00	353.940.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12	bulan	102.000.000,00	102.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran honorarium PHL	60	OB	352.592.000,00	352.592.000,00	
							Pembayaran honorarium PHL dan tersedianya jasa kebersihan kantor	36	OB			
							Pembayaran honorarium PHL Keamanan Kantor	24	OB			
							Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12	bulan			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	150.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengadaan Mebel						Terpenuhinya kebutuhan mebel kantor	1	Paket	100.000.000,00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket	50.000.000,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	405.022.500,00	205.022.500,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						pembayaran Honorarium PHL dan pembayaran STNK kendaraan dinas	36	OB	167.800.000,00	167.800.000,00	
							Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12	bulan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya gedung kantor	2	gedung	207.342.500,00	7.342.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1	gedung	26.610.000,00	26.610.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	bulan	3.270.000,00	3.270.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						Penghargaan Pangripta Tingkat Propinsi	3	peringkat	1.666.578.420,00	1.666.578.420,00	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan	100	persen	1.373.039.750,00	1.373.039.750,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Kabupatenses uai Tata Cara berdasarkan peraturan perundangan					
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						Terselenggaranya pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan RKPD	2	kegiatan	143.651.780,00	143.651.780,00	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						Dokumen RKPD disusun tepat waktu	1	dokumen	1.229.387.970,00	1.229.387.970,00	
							Dokumen Perubahan RKPD	1	dokumen			
							Raperda RPJMD	1	dokumen			
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Terlaksananya Analisis Data dan Informasi pemerintahan DaerahBidang Perencanaan Pembangunan daerah	100	persen	98.858.056,00	98.858.056,00	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						Pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah	2	Sim	98.858.056,00	98.858.056,00	
							Updating Data SIPD Kabupaten Bangka Barat	4	Triwulan			
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi yang dilakukan terhadapdokumen perencanaan daereah	100	persen	194.680.614,00	194.680.614,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						Tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1	dokumen	100.723.600,00	100.723.600,00	
							Tersusunnya dokumen pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	2	dokumen			
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						Tersusunnya dokumen evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah	1	dokumen	93.957.014,00	93.957.014,00	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						Persentase Keberhasilan Indikator Sasaran Daerah	100	%	666.130.090,00	666.130.090,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						Persentase Penjabaran program RPJMD dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	%	274.725.000,00	274.725.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	bulan	115.000.000,00	115.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						Terselenggaranya perencanaan pembangunan Pemerintahan	12	bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	bulan	119.725.000,00	119.725.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						Terselenggaranya perencanaan pembangunan Sosial Budaya I, II dan III	12	bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						Persentase Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	%	190.692.020,00	190.692.020,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	bulan	87.478.580,00	87.478.580,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						Terselenggaranya perencanaan pembangunan bidang persik II	12	bulan	7.867.370,00	7.867.370,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	bulan	87.478.760,00	87.478.760,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						Terselenggaranya perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan III	12	bulan	7.867.310,00	7.867.310,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						Persentase Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%	200.713.070,00	200.713.070,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	bulan	87.488.730,00	87.488.730,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						Terselenggaranya perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan I	12	bulan	7.867.370,00	7.867.370,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)						Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	12	bulan	97.489.600,00	97.489.600,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan	12	bulan	7.867.370,00	7.867.370,00	
							Data perencanaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	dokumen			
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									127.979.852.666,50	127.738.414.166,50	
	KEUANGAN									127.979.852.666,50	127.738.414.166,50	
			Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	5.129.973.306,00	5.119.973.306,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	3	dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen RENSTRA, RKA dan RENJA yang tersusun	3	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah dokumen capaian kinerja dan ihtisar kinerja yang tersusun	1	dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	
		Jumlah dokumen DALEV yang tersusun	3	dokumen								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen LAKIP, LKPJ, TAPKIN dan LPPD yang tersusun	4	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun	3	dokumen	3.506.000.000,00	3.506.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen laporan prognosis yang tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Jumlah penunjang administrasi umum pada BPKAD Kabupaten Bangka Barat	7	jenis	491.683.246,00	481.683.246,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah lampu yang dibeli	12	bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Pengisian Ulang Gas Elpiji Keperluan kantor	12	bulan	2.475.000,00	2.475.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah makanan dan minuman yang dibeli untuk keperluan kegiatan, rapat dan tamu	12	bulan	63.444.546,00	63.444.546,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah cetakan dan penggandaan yang dibayar	12	bulan	31.897.500,00	31.897.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	jenis	10.000.000,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah tagihan koran dan majalah yang dibayar	12	bulan	2.640.000,00	2.640.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya ATK	12	bulan	39.580.200,00	39.580.200,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dibayar	12	bulan	332.646.000,00	332.646.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah pembayaran gaji PHL	3	kegiatan	985.382.060,00	985.382.060,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah PHL yang terbayar : 1 orang (SMA)	12	OB	28.220.000,00	28.220.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Pelaksanaan informasi di website BPKA	12	bulan	108.204.000,00	108.204.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Jumlah tagihan Listrik, Telepon, Air dan Internet yang dibayar	12	bulan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (3 jenis)	12	bulan	848.958.060,00	848.958.060,00	
		Jumlah PHL yang terbayar : 5 orang (SMA)	60	OB								
		Jumlah PHL yang terbayar sebanyak 22 org	264	OB								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	jenis	138.908.000,00	138.908.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan	7	unit	126.410.000,00	126.410.000,00	
		Jumlah PHL yang terbayar 2 orang (SMA)	24	OB								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	3	gedung	7.500.000,00	7.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	2	jenis	4.998.000,00	4.998.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						menurunya temuan atas audit BPK atas LKD Pemda	10	temuan	122.142.406.586,50	121.910.968.086,50	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten Bangka Barat	8	dokumen	1.128.303.708,50	1.128.303.708,50	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						KUA/PPAS APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	1	dokumen	145.929.800,00	145.929.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						KUA / PPAS APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	1	dokumen	149.029.820,00	149.029.820,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	30	DPA	40.449.750,00	40.449.750,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang tersusun	30	DPA	41.239.830,00	41.239.830,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	1	perda	291.729.965,00	291.729.965,00	
Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang APBD Kab. Bangka Barat Tahun 2022							1	perbup				
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab. Bangka Barat Tahun 2021	1	perda	295.456.559,00	295.456.559,00	
Jumlah Rancangan Peraturan KDH Daerah Tentang Perubahan APBD Kab. Bangka Barat Tahun 2021							1	perbup				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						umlah Laporan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	1	dokumen	40.380.289,50	40.380.289,50	
		Jumlah Peraturan dan Kebijakan Pelaksanaan APBD yan tersusun	2	perbup dan SK Bupati								
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	124.087.695,00	124.087.695,00	
							Jumlah Pendampingan Implementasi Program Aplikasi Anggaran Keuangan Daerah	1	aplikasi			
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan yang tersusun	4	dokumen	457.664.940,00	457.664.940,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	43.238.600,00	43.238.600,00	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Transfer Pusat Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	45.969.900,00	45.969.900,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)						Jumlah Pengelolaan Gaji PNS/CPNS pada seluruh OPD Kabupaten Bangka Barat	12	bulan	181.915.680,00	181.915.680,00	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait						Jumlah Pengelolaan Keuangan SKPKD Kabupaten Bangka Barat	12	bulan	186.540.760,00	186.540.760,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						Jumlah Dokumen Keuangan Kabupaten Bangka Barat yang tersusun	3	dokumen	438.260.933,00	206.822.433,00	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	1	perbup	53.334.945,00	53.334.945,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						Jumlah Laporan Akhir Tahun Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	1	laporan	74.704.698,00	74.704.698,00	
							Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	1	laporan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Jumlah Laporan semester Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	1	laporan			
							Jumlah Pendampingan Implementasi Program Aplikasi Belanja dan Pelaporan	1	aplikasi			
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Bangka Barat Tahun 2020	1	perda	78.782.790,00	78.782.790,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						Penyelesaian kasus tuntutan ganti kerugian daerah	1	laporan	102.048.500,00		
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						Jumlah kebijakan dan panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	1	dokumen	63.100.000,00		
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun	1	dokumen	66.290.000,00		
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan						Jumlah Desa yang menerima	60	desa	120.118.177.005,00	120.118.177.005,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Daerah						Bantuan Keuangan Desa					
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa	60	desa	111.906.885.600,00	111.906.885.600,00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						Tersedianya Alokasi Untuk Belanja Tidak terduga	100	%	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota						Terlaksananya Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa	60	desa	3.361.291.405,00	3.361.291.405,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						Menurunnya Temuan atas audit BPK terkait aset/BMD Pemda	5	temua	707.472.774,00	707.472.774,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah						Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD Kabupaten Bangka Barat yang tersusun	8	dokumen	707.472.774,00	707.472.774,00	
	Penyusunan Standar Harga						Jumlah laporan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Harga Satuan Standar Kabupaten Kabupaten Bangka Barat	41	buku	54.865.000,00	54.865.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						Jumlah Dokumen Laporan RKBMD dan RKPBM Kabupaten Kabupaten Bangka Barat	2	dokumen	47.329.870,00	47.329.870,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah						Jumlah Laporan penatausahaan aset daerah	100	buku	183.553.700,00	183.553.700,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
						Kabupaten Bangka Barat						
						Jumlah Pendampingan Implementasi Program Aplikasi BMD	1	aplikasi				
						Jumlah Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1	perbup				
	Pengamanan Barang Milik Daerah					Dokumen Laporan Pemantauan dan Investigasi Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	105.428.020,00	105.428.020,00		
						Jumlah Pengadaan tanda identitas dan plang pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	5	jenis				
	Penilaian Barang Milik Daerah					Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	3	dokumen	75.440.580,00	75.440.580,00		
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					Jumlah Dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	235.588.444,00	235.588.444,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Jumlah Dokumen Pemusnahan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen			
							Jumlah Laporan Hasil penelitian usulan penghapusan barang milik daerah (SK Penghapusan BMD) Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen			
							Jumlah Laporan penilaian dan laporan penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	2	laporan			
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	5.267.160,00	5.267.160,00	
	KEUANGAN											
	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH									9.191.545.500,00	8.559.301.100,00	
	KEUANGAN									9.191.545.500,00	8.559.301.100,00	
			Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	DOFD	9,00%							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	7.959.301.100,00	7.959.301.100,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksanannya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	100	%	8.000.000,00	8.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Tersusunnya Laporan Renstra, Renja, dan RKA SKPD	3	Jenis	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Tersusunnya Laporan DALEV Dokumen Perencanaan SKPD	3	Jenis	4.000.000,00	4.000.000,00	
Tersusunnya Laporan Ikhtisar Capaian Realisasi Kinerja SKPD							1	Dokumen				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja PD (LAKIP, TAPKIN, LKPJ, dan LPPD)	4	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksanannya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	5.706.000.000,00	5.706.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang Tersusun SKPD						Tersusunnya Laporan Keuangan BulananSemesteran yang Tersusun	2	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang Tersusun	1	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terpenuhinya kebutuhan operasional umum perangkat daerah	100	%	584.620.100,00	584.620.100,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	12	Bulan	45.948.000,00	45.948.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	40.524.000,00	40.524.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	4.320.000,00	4.320.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	133.234.000,00	133.234.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12	Bulan	345.594.100,00	345.594.100,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	1.440.134.000,00	1.440.134.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Terlaksananya Pembayaran Honorarium PHL dan Jasa Surat Menyurat	36	OB	221.910.000,00	221.910.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terlaksananya Pembayaran Telepon, Internet, Listrik dan Domain Web Site serta ISP Pelayanan PBB dan BPHTB	12	OB	356.700.000,00	356.700.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Terlaksananya Pembayaran Honorarium PHL	336	OB	861.524.000,00	861.524.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	220.547.000,00	220.547.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran Honorarium PHL	24	Bulan	185.217.000,00	185.217.000,00	
		Pembayaran STNK Kendaraan Dinas	25	Unit								
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	13	Unit								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Kenyaman dan Kondisi Fisik Gedung Kantor Terpelihara	1	Gedung	7.500.000,00	7.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkaoan Gedung Kantor	15	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	24	Unit	22.830.000,00	22.830.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						persentase peningkatan PAD	14	%	1.232.244.400,00	600.000.000,00	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah						Persentase peningkatan PAD	14	%	1.232.244.400,00	600.000.000,00	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.						Data Objek PBB P2	360	OP	166.069.500,00	166.069.500,00	
		Data Subjek dan Objek Pajak PBB P2	1000	OP								
		Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan	9982	Ketetapan								
		Penatausahaan Pengelolaan Pendataan, Penilaian, dan Penetapan yang tertib, rapi dan efektif	10914	Berkas								
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						Adanya Penerbitan SPPT PBB P2 Kab. Babar	47500	SPPT	128.869.000,00	128.869.000,00	
		Aplikasi SISMIOP dapat berjalan dengan baik	1	Aplikasi								
		Terlaksananya Pendampingan Sistem BPHTB	1	Aplikasi								
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	23.728	Berkas	399.745.400,00		
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						Terlaksananya Validasi, Pendataan, Pengukuhan Subjek Pajak Daerah	865	WP	50.597.000,00	50.597.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi						Terlaksananya Pemeriksaan Pajak terhadap	4	Kali	63.513.500,00	63.513.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Daerah						Keberatan WP dan Realisasi Objek Pajak					
							Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	4	Kali			
	Penagihan Pajak Daerah						Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	7.500	WP	232.499.000,00		
							Terlaksananya Penagihan PBB	47.500	WP			
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						Terlaksananya Rekonsiliasi PAD	929	WP	190.951.000,00	190.951.000,00	
							Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi RKUD dan BPHTB	76000	WP			
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH									6.553.727.553,00	6.331.883.653,00	
	KEPEGAWAIAN									6.553.727.553,00	6.331.883.653,00	
			Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	82,73							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	5.405.623.353,00	5.227.344.453,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah	73	%	8.000.000,00	8.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Tersusun	3	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	4	dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Tersusun	4	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Temuan Pemeriksaan Keuangan yang Ditanggapi	100	%	3.406.000.000,00	3.406.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	2	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Disiplin Pegawai	100	%	25.000.000,00	25.000.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Absensi	170	unit	25.000.000,00	25.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	626.399.850,00	626.399.850,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya Komponen-komponen Listrik	12	bulan	70.000.000,00	70.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya Alat-alat Rumah Tangga	8	jenis	10.640.000,00	10.640.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya Makanan dan Minuman	12	bulan	42.500.000,00	42.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	39.525.000,00	39.525.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya Bahan Bacaan surat kabar dan Majalah	12	bulan	4.997.850,00	4.997.850,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	42.500.000,00	42.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12	bulan	416.237.000,00	416.237.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	%	1.175.232.004,00	1.013.232.004,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya Jasa Pegawai Harian Lepas	12	bulan	291.200.000,00	291.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik	12	bulan	344.211.534,00	344.211.534,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	12	bulan	195.960.470,00	33.960.470,00	
								2	jenis			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Tersedianya Jasa Keamanan Kantor dan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan	12	bulan	343.860.000,00	343.860.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	15.000.000,00	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	4	jenis	15.000.000,00	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	bulan	149.991.499,00	148.712.599,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional dan Tersedianya Jasa PHL dan Pembayaran Pajak Kendaraan	12	bulan	142.498.900,00	141.220.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	2	gedung	7.492.599,00	7.492.599,00	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	100	%	1.148.104.200,00	1.104.539.200,00	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi	20	%	449.911.000,00	449.911.000,00	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						Jumlah dokumen penyusunan formasi pegawai	1	dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						Jumlah Pelamar Test Penerimaan CPNS dan Jumlah Pelamar Test Penerimaan P3K	300	orang	218.080.500,00	218.080.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						Jumlah Pensiun PNS	65	orang	15.547.500,00	15.547.500,00	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						Terselenggaranya Kegiatan KORPRI	12	bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						Fasilitasi SAPK BKN	1	tahun	28.575.000,00	28.575.000,00	
	Pengelolaan Data Kepegawaian						Fasilitasi Pengurusan Karis, Karsu, KPE, Cuti dll	300	orang	172.208.000,00	172.208.000,00	
	Mutasi dan Promosi ASN						Persentase Pengisian JPT, Administrator dan Pengawas secara Terbuka dan Kompetitif	70	%	328.495.000,00	289.930.000,00	
	Pengelolaan Mutasi ASN						Jumlah Pelantikan CPNS menjadi PNS dan Jumlah Promosi Mutasi	9	kali	133.565.000,00	95.000.000,00	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						Terlaksananya Proses Kenaikan Pangkat	2	periode	40.000.000,00	40.000.000,00	
	Pengelolaan Promosi ASN						Terlaksananya Seleksi Terbuka JPT	3	jabatan	154.930.000,00	154.930.000,00	
	Pengembangan Kompetensi ASN						Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	20	%	150.000.000,00	145.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						PNS dilingkungan Pemkab. Bangka Barat	140	orang	145.000.000,00	145.000.000,00	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						Jumlah Aparatur yang Menerima Bantuan Beasiswa TUBEL	1	orang	5.000.000,00	-	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						Terlaksananya Penilaian Kinerja ASN yang Objektif dan Terukur	75	%	219.698.200,00	219.698.200,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						Jumlah Pengembangan dan Pembinaan	32	OPD	58.327.200,00	58.327.200,00	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai						Pemberian Karya Satya Lencana	150	orang	21.511.000,00	21.511.000,00	
	Pembinaan Disiplin ASN						Jumlah OPD/Unit Kerja yang di Monitoring	32	OPD	35.000.000,00	35.000.000,00	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	4	kasus	43.479.000,00	43.479.000,00	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						Jumlah Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	12	orang	61.381.000,00	61.381.000,00	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH									1.737.055.070,00	2.169.810.070,00	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									1.737.055.070,00	2.169.810.070,00	
			Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	82,73							
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						Persentase Pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan sesuai kebutuhan	0,2	%	1.737.055.070,00	2.169.810.070,00	
	Pengembangan Kompetensi Teknis						Persentase pegawai asn yang memenuhi kompetensi teknis	1	%	144.859.000,00	144.859.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Diklat ASN	1	dokumen	77.909.000,00	77.909.000,00	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						Jumlah Aparatur yang Terfasilitasi biaya Diklat	21	orang	66.950.000,00	66.950.000,00	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						Persentase pegawai asn yang memenuhi kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	13	%	1.592.196.070,00	2.024.951.070,00	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional						Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan	1	dokumen	27.091.000,00	27.091.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						Jumlah CPNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan/ Latsar, Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PIM, Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Fungsional	304	orang	1.565.105.070,00	1.997.860.070,00	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH									283.380.890,00	283.380.890,00	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									283.380.890,00	283.380.890,00	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						Cakupan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan potensi daerah	100	%	283.380.890,00	283.380.890,00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						Meningkatkan rekomendasi kajian yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di Bidang Sosial dan Kependudukan	100	%	64.161.830,00	64.161.830,00	
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan						Jumlah penelitian dan pengembangan bidang pendidikan yang dilakukan	1	dokumen	64.161.830,00	64.161.830,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						Meningkatkan rekomendasi dan strategi dalam perencanaan dan pengambilan Kebijakan di Bid. Ekonomi dan Pembangunan	100	%	155.719.700,00	155.719.700,00	
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral						Tersedianya data-data pengembangan lokasi dan budidaya sektor unggulan Sumber daya alam di Kabupaten Bangka Barat	100	%	155.719.700,00	155.719.700,00	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						Meningkatnya kualitas dan memaksimalkan hasil kajian/penelitian serta menciptakan sistem informasi Inovasi Teknologi	100	%	63.499.360,00	63.499.360,00	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						Tersedianya data-data dan informasi terkait pengembangan dan teknologi di Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	63.499.360,00	63.499.360,00	
	INSPEKTORAT DAERAH									7.339.741.450,00	7.259.006.450,00	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									7.339.741.450,00	7.259.006.450,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
			Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP							
			Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP daerah	70							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	100	%	4.845.646.450,00	4.845.646.450,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Status Capaian Kinerja Keuangan	100	%	8.000.000,00	8.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Tersusun	3	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	4	Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Tersusun	3	Jenis	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Status Capaian Kinerja Keuangan	100	%	3.706.000.000,00	3.706.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	3	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	1	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi						Jumlah Dokumen Tersusun	1	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Anggaran											
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	477.766.450,00	477.766.450,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12	bulan	6.772.200,00	6.772.200,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya makanan dan minuman	12	bulan	42.500.000,00	42.500.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	51.412.250,00	51.412.250,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	4.800.000,00	4.800.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	97.750.000,00	97.750.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	bulan	274.532.000,00	274.532.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100	%	492.790.000,00	492.790.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran honorarium PHL	96	OB	246.860.000,00	246.860.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	bulan	67.056.000,00	67.056.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran honorarium PHL	12	bulan	178.874.000,00	178.874.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100	%	161.090.000,00	161.090.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	24	ob	148.590.000,00	148.590.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya gedung kantor	1	gedung	7.500.000,00	7.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1	gedung	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	100	%	1.935.835.000,00	1.855.100.000,00	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	100	%	1.719.530.000,00	1.719.530.000,00	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						Evaluasi perencanaan penganggaran responsif gender	1	laporan	220.400.000,00	220.400.000,00	
							jumlah lakip OPD yang dievaluasi	29	OPD			
							jumlah opd yang di evaluasi	30	Objek Evaluasi			
							jumlah unit pelayanan publik (PTSP)	1	Dokumen			
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						Pencapaian PKPT	20	Objek Audit	249.150.000,00	249.150.000,00	
							Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi	29	laporan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Reviu Laporan Kinerja						Entitas pelaporan penyerapan anggaran	1	dokumen	234.100.000,00	234.100.000,00	
		entitas pelaporan penyerapan PBJ	1	dokumen								
		Jumlah dokumen perencanaan yang di reviu	5	Jenis								
		terlaksananya reviu lakip daerah	1	laporan								
	Reviu Laporan Keuangan						terkelolanya SIM Hasil pemeriksaan	12	bulan	117.050.000,00	117.050.000,00	
		tersedianya laporan reviu LKPD	31	Objek reviu								
	Pengawasan Desa						Jumlah Dana Desa	1	Dokumen	581.530.000,00	581.530.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						Jumlah evaluasi / pemantauan	120	paket	317.300.000,00	317.300.000,00	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	100	%	216.305.000,00	135.570.000,00	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						persentase pelimpahan kasus TPTGR	100	%	300.000,00	300.000,00	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						jumlah kasus tertangani	16	kasus	216.005.000,00	135.270.000,00	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	100	%	558.260.000,00	558.260.000,00	
	Pendampingan dan Asistensi						Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut	100	%	558.260.000,00	558.260.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Rekomendasi Hasil Pemeriksaan					
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah aksi pencegahan korupsi	29	Laporan	14.600.000,00	14.600.000,00	
Terlaksananya gelar pengawasan,							1	kali				
Terlaksananya lapor SP4N							1	Laporan				
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						Jumlah asistensi yang dilaksanakan	2	kali	42.300.000,00	42.300.000,00	
Jumlah laporan LHKASN							1	laporan				
Jumlah OPD yang melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi							30	OPD				
Jumlah OPD yang membuat buku register resiko							1	Laporan				
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						Jumlah dokumen laporan RAD PPK	1	dokumen	500.460.000,00	500.460.000,00	
Jumlah laporan pengaduan melalui WBS							1	Laporan				
Terkelolanya gratifikasi ke KPK							1	Laporan				
Tersedianya laporan SABER Pungli							2	Laporan				
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						Jumlah laporan benturan kepentingan per tahun	1	laporan	900.000,00	900.000,00	
Jumlah unit kerja zona integritas							1	dokumen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	UNSUR KEWILAYAHAN									33.320.759.981,00	32.876.429.981,00	
			Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	85							
	KECAMATAN MUNTOK									12.175.049.190,00	11.790.022.190,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintahan Daerah	100	%	7.908.901.930,00	7.531.924.930,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	8.000.000	8.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	3	laporan	2.000.000	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah dokumen tersusun	2	laporan	4.000.000	4.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	4	laporan	2.000.000	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	4.306.000.000,00	4.306.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%	4.300.000.000	4.300.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	laporan	2.000.000	2.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	laporan	2.000.000	2.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen tersusun	1	laporan	2.000.000	2.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.127.792.850,00	1.127.792.850,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	4.851.300	4.851.300	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	2.000.000	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Terpenuhinya administrasi tata usaha dan logistik Kantor Lurah Keranggan	1	kelurahan	999.999.000	999.999.000	
							Terpenuhinya administrasi tata usaha dan logistik Kantor Lurah Menjelang	1	kelurahan			
							Terpenuhinya administrasi tata usaha dan logistik Kantor Lurah Sungai Baru	1	kelurahan			
							Terpenuhinya administrasi tata usaha dan logistik Kantor Lurah Sungai Daeng	1	kelurahan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Terpenuhinya administrasi tata usaha dan logistik Kantor Lurah Tanjung	1	kelurahan			
							Tersedianya makanan dan minuman	12	bulan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	12.742.350	12.742.350	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	12	bulan	4.627.900	4.627.900	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	25.498.300	25.498.300	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12	bulan	78.074.000	78.074.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.836.562.080,00	1.942.152.080,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya honorarium PHL	487	ob	1.156.895.000	1.142.050.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	bulan	94.800.000	94.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Tersedianya honorarium PHL	237	ob	584.867.080	705.302.080	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	282.567.000		
	Pengadaan aset tetap lainnya						Pengadaan aset tetap lainnya	1	Jenis	282.567.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	347.980.000,00	147.980.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4	unit	131.214.000	131.214.000	
						Tersedianya honorarium PHL	24	ob				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya gedung kantor	2	gedung	207.500.000	7.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1	tahun	4.766.000	4.766.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1	tahun	4.500.000	4.500.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									78.356.710,00	78.356.710,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									19.129.710	19.129.710	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan						Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	kelurahan dan desa	19.129.710	19.129.710	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	%	59.227.000,00	59.227.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						Meningkatnya pengetahuan dan pemutakhiran data pelayanan dan penatausahaan administrasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	kegiatan	10.830.000	10.830.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						Terpenuhinya fasilitas pelayanan perizinan yang terpadu sesuai dengan ketentuan	5	perizinan	48.397.000	48.397.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Peningkatan Kualitas Pelayanan	100	%	3.828.737.940,00	3.828.737.940,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	61.621.310,00	61.621.310,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Terlaksananya penguatan kelembagaan di Kecamatan	1	kegiatan	61.621.310	61.621.310	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	100	%	3.173.116.630,00	3.173.116.630,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						Terlaksananya musrenbang kelurahan	5	kelurahan	48.672.130	48.672.130	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung di Kelurahan Keranggan	100	%	3.113.080.000	3.113.080.000	
Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung di Kelurahan Menjelang							100	%				
Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung di Kelurahan Sungai Baru							100	%				
Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung di Kelurahan Sungai Daeng							100	%				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
							Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung di Kelurahan Tanjung	100	%			
							Tersedianya honorarium RT, RW dan LPM	168	orang			
	Evaluasi Kelurahan						Terlaksananya lomba Kelurahan	5	kelurahan	11.364.500	11.364.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM)									594.000.000,00	594.000.000,00	
	Penanganan Covid- di Tingkat Desa dan Kelurahan						Terlaksananya Penanganan Covid- di Tingkat Desa dan Kelurahan	100	%	594.000.000,00	594.000.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terlaksananya koordinasi dalam upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan pihak FORKOPIMKA, Tomas dan Toga	100	%	208.050.000,00	200.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	208.050.000,00	200.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan						terlaksananya Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan	9	bulan	208.050.000,00	200.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	100	%	97.331.100,00	97.331.100,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	97.331.100,00	97.331.100,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Terlaksananya kegiatan HUT RI	1	kelurahan dan desa	65.575.100	65.575.100	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						Terlaksananya forum koordinasi pimpinan tingkat Kecamatan	1	kegiatan	31.756.000	31.756.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						Persentase Desa yang menyusun APBDes tepat waktu	100	%	53.671.510	53.671.510	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100	%	53.671.510	53.671.510	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						Terlaksananya evaluasi RAPBDes	4	desa	13.785.100	13.785.100	
Terlaksananya evaluasi RAPERDES							1	kegiatan				
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Terlaksananya kegiatan pembinaan desa	4	desa	20.851.610	20.851.610	
							Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa dan manajemen desa	1	kegiatan			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa	1	kegiatan	10.904.800	10.904.800	
							Tersusunnya LKPJ dan LPPD desa dengan baik dan benar	4	desa			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Terlaksananya koordinasi pengendalian keamanan lingkungan	5	kelurahan dan desa	8.130.000	8.130.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	KECAMATAN SIMPANGTERITIP									4.033.005.000,00	4.024.955.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	persen	3.656.109.400,00	3.656.109.400,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	persen	8.000.000,00	8.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	3	jenis	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah dokumen tersusun	4	jenis	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	4	jenis	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	persen	2.906.000.000,00	2.906.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah dokumen tersusun	2	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	171.235.400,00	171.235.400,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12	bulan	29.984.800,00	29.984.800,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor	12	bulan	13.096.600,00	13.096.600,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	4.320.000,00	4.320.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	26.405.000,00	26.405.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	bulan	89.429.000,00	89.429.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	448.230.000,00	448.230.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran Honorarium PHL	120	ob	312.850.000,00	312.850.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya, air dan listrik	12	bulan	25.200.000,00	25.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran Honorarium PHL	48	ob	110.180.000,00	110.180.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	122.644.000,00	122.644.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran Honorarium PHL	12	ob	98.348.000,00	98.348.000,00	
							Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	4	unit			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Gedung Kantor	4	unit	15.000.000,00	15.000.000,00	
							Terpeliharanya Rumah Dinas	2	unit			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	4	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	2	unit	4.296.000,00	4.296.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Keterlibatan unsur Masyarakat Dalam Membangun Desa	90	persen	25.866.900,00	25.866.900,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Cakupan tugas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah yang dilakukan secara efektif	90	persen	21.145.900,00	21.145.900,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1	kali	17.445.900,00	17.445.900,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Tersusunnya Data Profil dan Informasi Tentang Kecamatan	1	dokumen	3.700.000,00	3.700.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	persen	4.721.000,00	4.721.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12	bulan	4.721.000,00	4.721.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100	persen	32.703.200,00	32.703.200,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Peningkatan kualitas pelayanan	100	persen	32.703.200,00	32.703.200,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Terlaksananya Penguatan Kelembagaan di Kecamatan	12	bulan	32.703.200,00	32.703.200,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terlaksananya koordinasi dalam upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan pihak FORKOPIMKA, Tomas dan Toga	100	%	208.050.000,00	200.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	208.050.000,00	200.000.000,00	
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan						terlaksananya Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan	9	bulan	208.050.000,00	200.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Cakupan tugas umum pemerintah yang diselenggarakan oleh Kecamatan	100	persen	43.488.400,00	43.488.400,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Terlaksananya peringatan hari besar nasional	100	persen	43.488.400,00	43.488.400,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Peringatan dan Perayaan HUT RI di Kecamatan Simpang Teritip	1	kali	21.226.000,00	21.226.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	4	kali	22.262.400,00	22.262.400,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						Persentase Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu	100	persen	66.787.100,00	66.787.100,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									66.787.100,00	66.787.100,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						Terlaksananya Evaluasi RAPERDES	1	kegiatan	26.954.700,00	26.954.700,00	
							Terlaksananya Evaluasi RAPBDES	2	kali			
	Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa						Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa	12	bulan	21.168.000,00	21.168.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						Tersusunnya LKPJ dan LPPD Desa dengan baik dan benar	26	dokumen	7.386.000,00	7.386.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Keamanan Lingkungan	12	bulan	11.278.400,00	11.278.400,00	
	KECAMATAN JEBUS									3.901.075.900,00	3.873.972.900,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	persen	3.247.590.100,00	3.244.405.100,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	persen	7.606.100,00	7.606.100,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	2	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	3.606.100,00	3.606.100,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	persen	2.406.000.000,00	2.406.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Jumlah dokumen tersusun	2	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	184.999.000,00	184.999.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Kantor	12	bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12	bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12	bulan	104.999.000,00	104.999.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	483.295.000,00	480.110.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran Honorarium PHL	120	ob	293.795.000,00	290.610.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	27.500.000,00	27.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran Honorarium PHL	60	ob	162.000.000,00	162.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	165.690.000,00	165.690.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran Honorarium PHL	12	ob	156.390.000,00	156.390.000,00	
						Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Dinas	15	unit				
						Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	7	unit				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	7	unit	4.900.000,00	4.900.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12	unit	4.400.000,00	4.400.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Cakupan Tugas Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah yang dilakukan secara efektif	100	persen	201.801.800,00	201.801.800,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	persen	18.772.000,00	18.772.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1	kali	14.993.000,00	14.993.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Tersusunnya Data Profil dan Informasi Tentang Kecamatan	1	dokumen	3.779.000,00	3.779.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12	bulan	171.829.800,00	171.829.800,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Pembayaran Honorarium PHL	72	ob	171.829.800,00	171.829.800,00	
						Tersedianya Peralatan Kebersihan	12	bulan				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	persen	11.200.000,00	11.200.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Terpadu	12	bulan	11.200.000,00	11.200.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Peningkatan kualitas pelayanan	100	persen	28.380.000,00	12.512.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	persen	28.380.000,00	12.512.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Terlaksananya Penguatan Kelembagaan di Kecamatan	12	bulan	28.380.000,00	12.512.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terlaksananya koordinasi dalam upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan pihak FORKOPIMKA, Tomas dan Toga	100	%	308.050.000,00	300.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	308.050.000,00	300.000.000,00	
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan						terlaksananya Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan	9	bulan	308.050.000,00	300.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	100	persen	74.176.000,00	74.176.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Terselenggara ya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	100	persen	74.176.000,00	74.176.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Peringatan dan Perayaan HUT RI di Kecamatan Jebus	1	kali	74.176.000,00	74.176.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						Persentase Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu	100	persen	41.078.000,00	41.078.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	persen	41.078.000,00	41.078.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						Evaluasi RAPERDES	1	kali	29.705.000,00	29.705.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						Terlaksananya Evaluasi RABDES	2	kali			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	1	kali	4.615.000,00	4.615.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Tersusunnya LKPJ dan LPPD Desa dengan baik dan benar	22	dokumen			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Keamanan Lingkungan	12	bulan	6.758.000,00	6.758.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	KECAMATAN PARITTIGA									3.468.505.945,00	3.460.455.945,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Tersusun	3	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	4	Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Tersusun	4	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							100	Persen	1.906.000.000,00	1.906.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	1	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Jumlah Dokumen Tersusun	2	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Tersusun	1	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							100	Persen	188.989.745,00	188.989.745,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	4.496.000,00	4.496.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	1.400.000,00	1.400.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	29.997.000,00	29.997.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	12.749.745,00	12.749.745,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12	Bulan	4.992.000,00	4.992.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	25.500.000,00	25.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	12	Bulan	109.855.000,00	109.855.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100	Persen	527.770.000,00	527.770.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran Honorarium PHL	12	bulan	263.280.000,00	263.280.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	35.500.000,00	35.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Pembayaran Honorarium PHL	12	Bulan	228.990.000,00	228.990.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100	Persen	119.480.600,00	119.480.600,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran Honorarium PHL dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Perpanjangan STNK Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12	Bulan	102.050.000,00	102.050.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Gedung Kantor	2	gedung	7.498.400,00	7.498.400,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	2	unit	4.970.000,00	4.970.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	4	unit	4.962.200,00	4.962.200,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							100	Persen	376.792.950,00	376.792.950,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							100	Persen	13.048.750,00	13.048.750,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1	kali	9.838.750,00	9.838.750,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Tersusunnya Data Profil dan Informasi tentang kecamatan	1	Dokumen	3.210.000,00	3.210.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							100	Persen	360.021.000,00	360.021.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Pembayaran Gaji PHL dan Tersedianya Cetak Karcis dan Alat Kebersihan	144	OB	360.021.000,00	360.021.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							100	Persen	3.723.200,00	3.723.200,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						Tersedianya Jasa pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12	Bulan	3.723.200,00	3.723.200,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							100	persen	31.715.800,00	31.715.800,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							100	Persen	31.715.800,00	31.715.800,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan		kali	31.715.800,00	31.715.800,00	
							Terlaksananya Lomba Desa		kali			
							Terlaksananya Penguatan Kelembagaan di Kecamatan	12	Bulan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terlaksananya koordinasi dalam upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan pihak FORKOPIKMA, Tomas dan Toga	100	%	208.050.000,00	200.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	208.050.000,00	200.000.000,00	
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan						terlaksananya Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan	9	bulan	208.050.000,00	200.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							100	Persen	59.053.400,00	59.053.400,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							100	Persen	59.053.400,00	59.053.400,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Peringatan dan Perayaan HUT RI di Kecamatan	1	kali	34.603.400,00	34.603.400,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	12	Bulan	24.450.000,00	24.450.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							100	Persen	42.653.450,00	42.653.450,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							100	Persen	42.653.450,00	42.653.450,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						Terlaksananya Evaluasi RAPERDES	1	kali	15.301.500,00	15.301.500,00	
							Terlaksananya Evaluasi RAPDes	2	kali			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Desa	12	bulan	14.117.500,00	14.117.500,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						Tersusunnya LKPJ dan LPPD Desa dengan Baik dan Benar	20	dokumen	4.975.000,00	4.975.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Keamanan Lingkungan	12	bulan	8.259.450,00	8.259.450,00	
	KECAMATAN KELAPA									6.011.243.840,00	6.003.193.840,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							100	persen	5.020.617.840,00	5.020.617.840,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							100	persen	8.000.000,00	8.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	3	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah dokumen tersusun	5	Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	4	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							100	Persen	3.606.000.000,00	3.606.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							100	Persen	334.481.640,00	334.481.640,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan gedung kantor	12	Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12	Bulan	1.960.000,00	1.960.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya logistik kantor kelurahan	1	Kelurahan	182.071.800,00	182.071.800,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor	12	Bulan	12.749.840,00	12.749.840,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	2.700.000,00	2.700.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	25.500.000,00	25.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	Bulan	94.500.000,00	94.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100	Persen	891.905.000,00	891.905.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran honorarium PHL	192	Ob	475.020.000,00	475.020.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12	Bulan	62.400.000,00	62.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						pembayaran honorarium PHL	144	Ob	354.485.000,00	354.485.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100	Persen	180.231.200,00	180.231.200,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	6	unit	163.150.000,00	163.150.000,00	
							Pembayaran honorarium PHL	36	Ob			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya gedung kantor	1	Gedung	7.500.000,00	7.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	4.909.200,00	4.909.200,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	Bulan	4.672.000,00	4.672.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							100	Persen	26.405.200,00	26.405.200,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							100	Persen	22.560.000,00	22.560.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						Terlaksananya musrenbang kecamatan	1	Kali	22.560.000,00	22.560.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							100	Persen	3.845.200,00	3.845.200,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						Tersedianya jasa pelayanan perizinan administrasi terpadu kecamatan	12	Bulan	3.845.200,00	3.845.200,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							100	Persen	602.650.400,00	602.650.400,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							100	Persen	45.290.400,00	45.290.400,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Terlaksananya Penguatan Kelembagaan di Kecamatan	12	Bulan	45.290.400,00	45.290.400,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							100	persen	435.360.000,00	435.360.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Peningkatan kualitas RT/RW dan LPM	83	Orang	435.360.000,00	435.360.000,00	
							Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung	100	Persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM)									122.000.000,00	122.000.000,00	
	Penanganan Covid- di Tingkat Desa dan Kelurahan									122.000.000,00	122.000.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terlaksananya koordinasi dalam upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan pihak FORKOPIKMA, Tomas dan Toga	100	%	208.050.000,00	200.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	208.050.000,00	200.000.000,00	
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan						terlaksananya Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan	9	bulan	208.050.000,00	200.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							100	Persen	88.019.400,00	88.019.400,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							100	Persen	88.019.400,00	88.019.400,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Lancarnya perayaan dan Peringatan HUT RI	1	Kali	75.000.000,00	75.000.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						Terlaksananya koordinasi pimpinan tingkat kecamatan	12	Bulan	13.019.400,00	13.019.400,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							100	Persen	65.501.000,00	65.501.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							100	Persen	65.501.000,00	65.501.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						Terlaksananya Evaluasi RAPB-Desa	2	Kali	30.799.000,00	30.799.000,00	
							Terlaksananya kegiatan Evaluasi RAPERDES	26	Perdes			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam manajemen pemerintahan desa	1	Kali	27.018.000,00	27.018.000,00	
							Terlaksananya pembinaan desa	12	Bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan	1	Kali	7.684.000,00	7.684.000,00	
							Tersusunnya LKPJ dan LPPD Desa dengan baik dan benar	26	Dokumen			
	KECAMATAN TEMPILANG									3.731.880.106,00	3.723.830.106,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									3.330.358.760,00	3.330.358.760,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									8.000.000,00	8.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen tersusun	4	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen tersusun	4	dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen tersusun	3	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.606.000.000,00	2.606.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Jumlah Dokumen tersusun	2	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									181.071.560,00	181.071.560,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	4.999.600,00	4.999.600,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	12	bulan	29.999.300,00	29.999.300,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor	12	bulan	12.749.745,00	12.749.745,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	4.998.000,00	4.998.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	25.499.915,00	25.499.915,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	bulan	100.325.000,00	100.325.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									411.562.600,00	411.562.600,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Pembayaran Honorarium PHL	72	OB	184.820.000,00	184.820.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	bulan	21.000.000,00	21.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Terlaksananya administrasi keuangan dan pembayaran honorarium PHL	84	OB	205.742.600,00	205.742.600,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									123.724.600,00	123.724.600,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pembayaran Honorarium PHL	12	OB	98.800.600,00	98.800.600,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terpeliharanya gedung kantor dan Rumah Dinas	4	gedung	14.998.500,00	14.998.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	4	unit	4.989.800,00	4.989.800,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	4	unit	4.935.700,00	4.935.700,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									26.461.400,00	26.461.400,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									19.986.900,00	19.986.900,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1	kali	16.287.300,00	16.287.300,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Tersusunnya Data Profil dan Informasi tentang Kecamatan	1	dokumen	3.699.600,00	3.699.600,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									6.474.500,00	6.474.500,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan	12	bulan	6.474.500,00	6.474.500,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									43.367.850,00	43.367.850,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									43.367.850,00	43.367.850,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Terlaksananya penguatan kelembagaan di kecamatan	12	bulan	43.367.850,00	43.367.850,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terlaksananya koordinasi dalam upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan pihak FORKOPIMKA, Tomas dan Toga	100	%	208.050.000,00	200.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	208.050.000,00	200.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan						terlaksananya Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan	9	bulan	208.050.000,00	200.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									55.169.046,00	55.169.046,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									55.169.046,00	55.169.046,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Terlaksananya Kegiatan Peringatan dan perayaan HUT RI di Kecamatan Tempilang	1	kali	32.476.846,00	32.476.846,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						Terlaksananya koordinasi forum pimpinan tingkat Kecamatan	12	bulan	22.692.200,00	22.692.200,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									68.473.050,00	68.473.050,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									68.473.050,00	68.473.050,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						Terlaksananya valuasi RAPBDes dan Tersedia serta tersusunnya Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	bulan	20.294.800,00	20.294.800,00	
	Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa						Terlaksananya kegiatan pembinaan pemerintahan desa	12	bulan	23.385.600,00	23.385.600,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						Tersusunnya LKPJ dan LPPD Desa dengan baik dan benar	18	dokumen	11.845.400,00	11.845.400,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Terlaksananya forum koordinasi pengendalian keamanan lingkungan	12	bulan	12.947.250,00	12.947.250,00	
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									3.191.368.208,00	3.191.368.208,00	
E	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									3.191.368.208,00	3.191.368.208,00	
			Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	80							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	1.799.332.130,00	1.799.332.130,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	3	jenis	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah dokumen tersusun	3	jenis	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	1.206.000.000,00	1.206.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah dokumen tersusun	2	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	148.767.710,00	148.767.710,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Terlaksananya terpenuhinya kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	821.600,00	821.600,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Terlaksananya pembayaran pengisian Tabung LPG dan alat rumah tangga	12	bulan	2.415.000,00	2.415.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Terlaksananya pembayaran makanan dan minuman untuk Rapat dan Tamu	12	bulan	12.020.450,00	12.020.450,00	
	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan						Terlaksananya penyediaan Kertas NCR, Blangko Kwitansi, Blangko SSP dan Spanduk	12	bulan	15.517.760,00	15.517.760,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Terlaksananya pembayaran 2 Surat Kabar lokal	12	bulan	2.640.000,00	2.640.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material						Terlaksananya pembayaran kebutuhan alat tulis kantor	12	bulan	17.061.900,00	17.061.900,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	98.291.000,00	98.291.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	363.395.520,00	363.395.520,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Terlaksananya Pembayaran Honor PHL dan kebutuhan surat menyurat	60	OB	154.600.000,00	154.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terlaksananya hubungan komunikasi berjalan lancar dan kelancaran operasional kantor	12	bulan	30.360.000,00	30.360.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Terlaksananya pembayaran Honor PHL dan kebutuhan administrasi keuangan Peralatan kebersihan serta bahan pembersih	72	OB	178.435.520,00	178.435.520,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						erpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	75.168.900,00	75.168.900,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Terlaksananya kelancaran pelaksanaan operasional kantor	12	bulan	71.344.000,00	71.344.000,00	
							Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas /operasional	2	mobil dan motor			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	bulan	3.824.900,00	3.824.900,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						Terselenggaranya kegiatan lintas agama dan lintas golongan	100	%	262.352.190,00	262.352.190,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	100	%	262.352.190,00	262.352.190,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						Tersantuninya Keluarga Pejuang	26	orang	262.352.190,00	262.352.190,00	
							Terselenggaranya rangkaian kegiatan HUT RI	1	kegiatan			
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik									804.997.558,00	804.997.558,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									804.997.558,00	804.997.558,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah						Terlaksananya penyaluran hibah kepada partai politik	10	parpol	754.370.408,00	754.370.408,00	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						Terlaksananya berkas Parpol yang terverifikasi	10	parpol	27.496.150,00	27.496.150,00	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						Terlaksananya laporan perkembangan politik daerah	4	laporan	23.131.000,00	23.131.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									23.943.400,00	23.943.400,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						Jumlah Pembinaan Ormas/LSM	100	%	23.943.400,00	23.943.400,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						erlaksananya Verifikasi Pendaftaran, Pendataan dan Pemantauan Ormas/LSM Kab. Bangka Barat	100	%	23.943.400,00	23.943.400,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						Terselenggara nya seminar, talk show, diskusi, pentas, festival dan lomba peningkatan wawasan kebangsaan	100	%	105.563.880,00	105.563.880,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						Jumlah Pembinaan Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Toleransi Kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, nilai-nilai religius, sosial dan solidaritas serta Pelestarian nilai- nilai luhur budaya bangsa	100	%	105.563.880,00	105.563.880,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						Terfasilitasinya kegiatan FKUB, FKDM dan FPK serta Terlaksananya penyaluran hibah kepada FKUB	12	bulan	105.563.880,00	105.563.880,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target	Satuan			
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						Persentase pelanggaran administrasi sesuai peraturan perundang-undangan	0	%	195.179.050,00	195.179.050,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	%	195.179.050,00	195.179.050,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						Terlaksananya rapat rapat koordinasi pejabat forum koordinasi pimpinan daerah	4	kali	107.048.100,00	107.048.100,00	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						Terlaksananya pendataan keberadaan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	200	orang asing	88.130.950,00	88.130.950,00	
							Terselenggaranya kegiatan rencana aksi terpadu penanganan gangguan konflik sosial Kabupaten Bangka Barat	3	dokumen			
	TOTAL									941.302.441.604,77	919.358.428.732,27	

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Karena pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar maka hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan *insentif* dan *disinsentif* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam penilaian kinerja perangkat daerah; pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; serta penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan kepada 6 (enam) bidang urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari : 1). Pendidikan; 2). Kesehatan; 3). Pekerjaan Umum; 4). Perumahan Rakyat; 5). Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat 6). Sosial. Keenam urusan wajib Pemerintah Daerah ini telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 yang telah mengamanatkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat sudah dimulai sejak tahun 2017 yang lalu dengan berpedoman kepada regulasi yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang di koordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Namun sejak di ubahnya peraturan tersebut

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di koordinir oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Di Kabupaten Bangka Barat sendiri, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melibatkan lintas instansi yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Bagian Hukum, serta bagian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi.

Sampai dengan tahun 2021, upaya penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat sudah terus dilakukan dalam berbagai macam kegiatan yang tentunya diperuntukkan bagi optimalisasi penerapan Standar pelayanan Minimal di daerah. Adapun berbagai hal yang telah dilakukan dalam upaya Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal setiap tahun;
- b. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah;
- c. Penyusunan Roadmap/ Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
- d. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar pelayanan Minimal dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah secara berkala;
- e. Koordinasi lintas sektor dengan tim Sekretariat Standar Pelayanan Minimal pusat dan Provinsi
- f. Serta hal-hal lain yang bersifat menunjang dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam penerapan SPM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Di Kabupaten Bangka Barat sendiri, tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dilakukan oleh masing bidang urusan SPM, namun masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya penganggaran dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sehingga membuat belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan minimal di Kabupaten Bangka Barat sendiri. Namun Kabupaten Bangka Barat sendiri terus melakukan pembenahan dalam hal penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan berbagai hal yang dinilai dapat mengoptimalkan

penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah yang tentunya dapat mengcover seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dalam pemenuhan pelayanan dasar tersebut.

Adapun untuk dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penerapan Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 58 Tahun 2019 Seri E).

Sedang untuk kebijakan umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) telah tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) serta Rencana Strategis (*Renstra*) yang akan diterjemahkan dalam perencanaan dan penganggaran Daerah.

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai pendanaan jangka menengah Daerah, dan menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (*Renstra*) Perangkat Daerah. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan Daerah berdasarkan strategi yang dipilih untuk mencapai indikator kinerja sasaran, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat, dirumuskan berbagai kebijakan umum dan program pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Kebijakan umum pembangunan Daerah ini memberikan arah pembangunan Daerah selama jangka 2016-2021, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di semua bidang, dengan dukungan pengembangan dan penyempurnaan organisasi sesuai kebutuhan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi, serta profesionalitas aparatur Pemerintah Daerah.

- b) Menyediakan landasan berbagai pelayanan melalui berbagai Peraturan Daerah yang dibutuhkan, meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur Pemerintah Daerah, serta infrastruktur pendukungnya.
- c) Meningkatkan kualitas dan kapasitas Pemerintah Desa, guna memberikan pelayanan yang lebih baik secara langsung kepada masyarakat desa, serta mendorong pembangunan sosial ekonomi di perdesaan.
- d) Memfokuskan dan memprioritaskan pengembangan ekonomi masyarakat atau Daerah kepada sumber daya lokal yang potensial dan berkelanjutan (*renewable*) untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik ekonomi Daerah secara optimal.
- e) Meningkatkan pemberdayaan, partisipasi dan peran masyarakat di dalam pembangunan, di samping diperlukan di dalam upaya mencapai tata kelola Pemerintahan yang baik, juga merupakan perubahan pendekatan (*paradigma*) pembangunan yang meletakkan masyarakat sebagai subyek pembangunan itu sendiri.
- f) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Bangka Barat merupakan prasyarat di dalam mewujudkan pembangunan masyarakat dan Daerah.
- g) Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- h) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sejalan dengan perbaikan dan perlindungan sumber daya alam khususnya lahan dan hutan yang terkait dengan konservasi sumber-sumber air.

MISI 1.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Untuk Pelayanan Publik Yang Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	KONDISI AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2021	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
Menguatkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar sebagai baseline	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	n/a	80%	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kesehatan	Dinkes		
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Kesehatan	Dinkes		
						Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinkes		
						Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dikpora		
						Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dikpora		
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PU dan Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
		Optimalisasi pelayanan dasar Pemerintah Daerah menggunakan berbagai sumber pendanaan						Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
								Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
								Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
								Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	KONDISI AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2021	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						Program Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Di dalam Kebijakan daerah tersebut di atas telah secara jelas disampaikan bahwa untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah tertuang dalam Misi 1 Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021. Di dalam Misi 1 tersebut juga penerapan Standar Pelayanan Minimal kemudian diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan yang salah satunya adalah terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di daerah yang selanjutnya menjadi arah kebijakan daerah. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun Arah kebijakan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan penarapan Standar Pelayanan Minimal dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN ARAH KEBIJAKAN					
			2016	2017	2018	2020	2020	2021
Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar sebagai baseline	Penyusunan basis data terkait pelayanan dasar	V	V				
	Optimalisasi pelayanan dasar Pemerintah Daerah menggunakan berbagai sumber pendanaan	Pencapaian target SPM secara optimal	V	V	V	V	V	V
		Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM pada pelayanan dasar secara berkala	V	V	V	V	V	V

Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal salah satunya melalui optimalisasi ketersediaan data penerima manfaat dalam Standar Pelayanan Minimal Daerah yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Di tahun 2021, untuk alokasi anggaran SPM mengalami peningkatan jika di dibandingkan dengan Tahun 2020 yang lalu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan daerah untuk tetap mempertahankan alokasi penganggaran pemenuhan Standar Pelayanan Minimal walupun dalam kondisi pandemic Covid-19. Ini dilakukan agar pemenuhan kebutuhan minimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat layanan tetap terpenuhi dan menjadi prioritas daerah yang merupakan sebuah kewajiban Pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan minimal tersebut. Sehingga walaupun pandemic Covid -19 sedang terjadi pemenuhan pelayanan minimal di mayarakat harus tetap di optimalkan.

Penerapan SPM di masing-masing daerah juga harus dilakukan dengan baik serta terkendali. Ini dilakukan agar pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Kabupaten

Bangka Barat dapat memenuhi seluruh standar kebutuhan warna negara yang akan menjadi tolok ukur untuk mengukur kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan SPM. Tentunya dalam pelaksanaan penerapan SPM ini harus didasari dengan komitmen yang baik antar para pemangku kepentingan untuk focus dalam pemenuhan pelayan dasar di daerah. Keberhasilan dari penerapan SPM di daerah tidak akan dapat tercapai jika tidak ada kerjasama yang baik antar para pemangku kepentingan yang di mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran serta monitoring evaluasi pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat harus dapat merealisasikan hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar warga Negara Indonesia secara merata.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dasar. pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel II.1

Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dan 2021

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERUBAHAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,08	69,60	0,753
2	Angka Kemiskinan	2,70	2,75	1,852
3	Angka Pengangguran	4,12	3,83	-7,039
4	Pertumbuhan Ekonomi	-5,43	0,21	103.867
5	Pendapatan Per Kapita	61.617.200.000.000,00	74.688.000.000.000,00	13.644
6	Ketimpangan Pendapatan	0,26	0,25	-3.846

2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran.dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel II.1
Capaian Indikator Kinerja Keluaran (*Output*) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2020

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
Pendidikan					
	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	100 lembaga	100 lembaga	
		2 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6181 siswa	SP	
		3 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	789 siswa	SP	
		4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	547 orang	420 orang	
		5 Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	520 orang	714 orang	
		6 Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	191 orang	266 orang	
		7 Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	64 orang	61 orang	
	2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD : 126 SMP : 30	SD : 126 SMP : 30	
		2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	SP	SP	
		3 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	SP	SP	
		4 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2795 orang	4978 orang	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
		5 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1856 orang	1767 orang	
		6 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	906 orang	921 orang	
		7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	317 orang	302 orang	
		8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1411 orang	1397 orang	
		9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	647 orang	620 orang	
		10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	556 orang	556 orang	
		11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	230 orang	230 orang	
		12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	459 orang	452 orang	
		13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	260 orang	255 orang	
		14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1233 orang	1144 orang	
		15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	599 orang	565 orang	
		16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	136 orang	128 orang	
		17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	46 orang	45 orang	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
		18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	205 orang	255 orang	
		19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	123 orang	160 orang	
	3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	1 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD : 126 SMP : 30	SD : 126 SMP : 30	
		2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	SP	SP	
		3 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	SP	SP	
		4 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2795 orang	4978 orang	
		5 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1856 orang	1767 orang	
		6 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	906 orang	921 orang	
		7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	317 orang	302 orang	
		8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1411 orang	1397 orang	
		9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	647 orang	620 orang	
		10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	556 orang	556 orang	
		11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	230 orang	230 orang	
		12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	459 orang	452 orang	
		13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	260 orang	255 orang	
		14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1233 orang	1144 orang	
		15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	599 orang	565 orang	
		16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	136 orang	128 orang	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data		
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	46 orang	45 orang		
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	205 orang	255 orang		
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	123 orang	160 orang		
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	1 satuan	1 satuan	
			2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1058 orang	0	
			3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1058 orang	842 orang	
			4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	53 orang	42 orang	
			5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	48 orang	48 orang	
			6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	39 orang	39 orang	
			7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	TIDAK PERLU DI ISI	TIDAK PERLU DI ISI	
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	TIDAK PERLU DI ISI	TIDAK PERLU DI ISI				
Kesehatan							
	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3 RS	3 RS	
	2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1 RS	1 RS	
	3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3725	3833	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	771 orang	677 orang	
4		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3524	3628		

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	771 orang	677 orang	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3493	3543	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	771 orang	677 orang	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11708	12182	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	803 orang	707 orang	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	37506	36722	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	858 orang	755 orang	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	133183	127449	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	844 orang	745 orang	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16395	16152	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	844 orang	745 orang	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	48094	46182	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	804 orang	712 orang	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3934	3977	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	847 orang	745 orang	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	492	493	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	847 orang	745 orang	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1749	1921	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	871 orang	771 orang	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4862	4622	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	860 orang	759 orang	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data	
Pekerjaan Umum						
	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	24831 ha	24831 ha
			2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	51671 m	51671 m
			3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	38,29 ha	38,29 ha
			4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	38,29 ha	38,29 ha
			5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	3 dok	3 dok
			6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	3 dok	3 dok
			7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	i. Bangunan perkuatan tebing (m) = 8727 m ii. Tanggul sungai (m) = 25.722m iii. Kanal bajir (m) = 80 m iv. Pintu air/bendung pengendali = 2 unit banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan = 0 unit Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) = 0 unit vii. Breakwater (m) = 0 unit viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)= 0 unit	4 jenis

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
	2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	24831 ha	24831 ha	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	51671 m	51671 m	
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	38,29 ha	38,29 ha	
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	38,29 ha	38,29 ha	
		5	Rencana Tata Pengaturan airdantata pengairan/rencanapengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	3 dok	3 dok	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	3 dok	3 dok	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota		i. Bangunan perkuatan tebing (m) = 8727 m ii. Tanggul sungai (m) = 25.722m iii. Kanal bajir (m) = 80 m iv. Pintu air/bendung pengendali = 2 unit banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan = 0 unit Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) = 0 unit vii. Breakwater (m) = 0 unit viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)= 3829 m	4 jenis

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
	3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	93,60%	SP	
		2 Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	93,00%	51,35%	
		3 Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	97,63%	86,18%	
	4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1 Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Ada	
		2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Ada	
		3 Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM	1 BUMD	1 BUMD	
		4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1 BUMD	1 BUMD	
		5 Jumlah kerja sama penyelenggara SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Ada	SP	
	5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	783 RT	46855	
		2 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1057 RT	408	
		3 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	1866 RT	47263	
		4 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	SP	SP	
		5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	SP	SP	
6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		1057 RT	SP		
7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar		93,3%	SP		
8 Kinerja penyediaan pelayanan SPALDS akses aman		SP	SP		
9 Kinerja penyediaan pelayanan SPALDT akses aman		99,44%	92,57%		
10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		1,60%	SP		
11 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	50%	SP			
12 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	48 m3	SP			
13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	99,44%	100,00%			

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
	6 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	SP	SP	
		1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	SP	SP	
		2 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	99	SP	
		3 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Ada	
		4 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	SP	SP	
		5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	24	18	
		6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	SP	SP	
		7 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	202	3369	
		8 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	24	3369	
	7 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	700,92 km	700,921 km	
		2 Panjang jalan yang dibangun	47078 km	15404 km	
		3 Panjang jembatan yg dibangun	1100,1 km	1050 km	
		4 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	18677 km	13739 km	
		5 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	155 km	155 km	
		6 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	103,047 km	99,894 km	
		7 Panjang jembatan yang direhabilitasi	SP	SP	
		8 Panjang jalan yang dipelihara	8543 km	SP	
		9 Panjang jembatan yang dipelihara	66 km	66 km	
	8 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1 Jumlah Pelatihan Tenaga operator teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	3 kali	2	
		2 Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	208 orang	SP	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
		3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	82 orang	186 orang	
		4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	SP	
		5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	SP	SP	
		6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	SP	SP	
		7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	SP	SP	
		8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	SP	SP	
		9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	SP	
		10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	SP	
		11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	SP	
		12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	186	
		13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	SP	SP	
		14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	SP	SP	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
		15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP	
		16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP	
		17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP	
		18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	31 Badan Usaha	12 Badan Usaha	
		19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	SP	20	
		20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	SP	SP	
		21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	SP	SP	
		22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	SP	SP	
		23 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP	
		24 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP	
		25 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP	
	9 Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi				

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
Perumahan Rakyat					
	1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	2 RT	2 RT	
		2 Jumlah rumah yang terkena bencana alam	2 RT	2 RT	
		3 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	2 RT	2 RT	
		4 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	2 RT	2 RT	
		5 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	2 RT	2 RT	
		6 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	SP	SP	
		7 Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	SP	SP	
		8 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	2 RT	2 RT	
		9 Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	SP	SP	
	2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP	
		2 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP	
		3 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP	
		4 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP	
		5 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP	
		6 Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	SP	SP	
	3.	1 Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	9,52 Ha	9,52 Ha	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data		
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1 unit	1 unit			
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	70,42 Ha	70,42 ha			
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1	Jumlah rumah di kab/kota	43255 unit	43255 unit	
			2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	211 unit	721 unit		
			3	Jumlah rumah tidak layak huni	3566 unit	3780 unit		
			4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	SP	SP		
			5	Rasio rumah dan KK	150,72%	147,54%		
			6	Jumlah rumah pembangunan baru	SP	17		
			5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	SP	SP
			2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	SP	SP		
			3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	SP	SP		
			4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	SP	SP		
			5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	SP	SP		
			6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	SP	SP		
			7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	SP	SP		
			8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	SP	SP		
			9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	SP	SP		
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
		1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	65	18	
				2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	129 orang	129	
3				Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5 perda	1		
4				Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1 orang	1		
5				Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SP	SP		
6				Tersedianya sarana prasarana minimal	38 jenis	Ada		
2		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan						
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	SP	SP			

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data	
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	5,42%	5,93%	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	SP	SP	
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	SP	SP	
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	6,63%	5,93%	
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	3,14%	SP	
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	SP	SP	
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	SP	SP	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	SP	
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	SP	100%	
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	10 kebakaran dan 65 non kebakaran	75	
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	SP	
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	8 orang	SP	
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	SP	SP	
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	38 jenis	38 jenis	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data		
		6	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	2 orang	2 orang		
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	SP	SP		
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	8 kegiatan	SP		
	7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran					
SOSIAL							
	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	17948 orang	1443 orang	
			2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	17948 orang	1012 orang	
			3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	47	SP	
			4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	17948 orang	1443 orang	
			5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 buah	3 buah	
			6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1348 orang	1269 orang	
			7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 unit	1 unit	
			8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	8 orang	SP	
			9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	127 orang	45 orang	
			10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	7 buah	1 buah	
			11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	SP	SP	
			12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	SP	SP	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
		13 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	1 orang	SP	
		14 Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	130 orang	132 orang	
		15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	24 orang	6 orang	
		16 Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	SP	6 orang	
		17 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	2 orang	2 orang	
		18 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	17948 orang	5 orang	
		19 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	14 orang	2 orang	
		20 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	4 orang	2 orang	
		21 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	6 orang	6 orang	
	2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1 Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	3317 orang	9026 orang	
		2 Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	83 orang	64 orang	
		3 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	6 unit	SP	
		4 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	17 orang	79 orang	
		5 Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	SP	SP	
		6 Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	130 orang	132 orang	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data	
Ketenagakerjaan						
	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Ada	SP
			2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	SP	SP
			3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	2 perusahaan	SP
	2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%	100%
			2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%	100%
			3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	9%	10%
			4	Persentase LPK yang terakreditasi	11,76%	0,00%
			5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	29,41%	18,75%
			6	Jumlah penganggur yang dilatih	42,06%	30,00%
			7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	100%
			8	Persentase penyerapan lulusan	82%	0%
			9	Lulusan bersertifikat kompetensi	100%	0%
			10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	SP	SP
			11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	SP	SP
	3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	SP	SP
			2	Data tingkat produktivitas total	SP	SP
	4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	36,36%	36,36%
			2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100%	100%
			3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	5	5
4			Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	90,91%	90,91%	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data			
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100,00%	170,83%			
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	5,19%	6,49%			
		7	Jumlah mogok kerja	SP	SP			
		8	Jumlah penutupan perusahaan	SP	SP			
		9	Jumlah perselisihan kepentingan	SP	1			
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	SP	SP			
		11	Jumlah perselisihan PHK	3	2			
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	3	2			
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	2	4			
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Ada			
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	16,67%	SP			
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	13	13	
				2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	107 orang	112 orang	
				3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	5	3	
				4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	SP	SP	
	5			Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1 orang	SP		
	6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	SP	SP				
	7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	46 perusahaan 648 pekerja	916 PKS 5 perusahaan				
	8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	60	SP				
	9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	SP	SP				
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	SP	SP					

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
		11 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	SP	SP	
		12 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	SP	SP	
		13 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	SP	SP	
		14 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	SP	SP	
Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	30 OPD	30 OPD	
		2 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	27 kegiatan	40 program 66 kegiatan	
	2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	1 Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5 jenis	2 jenis	
		2 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 lembaga	SP	
		3 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100,00%	100,00%	
		4 Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 LEMBAGA	SP	
		5 Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	SP	SP	
	3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	8 LSM	SP	
		2 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	48 orang	SP	
		3 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	8 LSM	SP	
		4 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3 lembaga	SP	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
		5 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 kebijakan	SP	
		6 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	3 lembaga	SP	
		7 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	
Pangan					
	1 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1 Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	SP	
		2 Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	SP	Ada	
		3 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	SP	SP	
		4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Ada	
		5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	SP	
		6 Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	SP	
		7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak	SP	
		8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Ada	
Pertanahan					
	1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	3 izin	14	
		2 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	SP	SP	
		3 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	SP	SP	
		4 Dokumen Izin membuka tanah	SP	SP	
		5 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100%	1 dokumen%	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data	
	2	Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum				
	3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal				
	4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				
	5	Tersedianya tanah untuk masyarakat				
	6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi				
Lingkungan Hidup						
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : 1. Indeks kualitas air (IKA)Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks tutupan hutan 2. (ITH) 3. Indeks Tutupan Hutan 4. (ITH)	IKA =65,79; IKU = 89,71; IKL= 37,16	IKA =21,79; IKU = 27,46 ; ITH= 14,83
	2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. 15 unit, 6 unit, 1 amrol 2. 82,4984 ton/ta 3. 38.238,75 ton, total TPST sebanyak 3 unit (Air Limau, Kelapa dan Parittiga)	1. 6 unit 2. 115875 m3/ tahun 3. TPST 1 unit
	3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	SP	82,35%

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	SP	SP	
		3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	SP	SP	
		4 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	SP	SP	
		5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	SP	SP	
		6 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	50%	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	1 Perekaman KTP Elektronik	1 Penerbitan akta perkawinan	51,32%	47,66%	
		2 Penerbitan akta perceraian	64,56%	58,38%	
		3 Penerbitan akta kematian	96,58%	95,78%	
		4 Penyajian data kependudukan	50,00%	50,00%	
	2 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA				
	3 Kepemilikan akta kelahiran				
	4 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	1 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	6 desa	6 desa	
		2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	6 desa	6 desa	
		3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1 lembaga 13 desa	3 lembaga 2 desa	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
		4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	15 desa	12 desa	
	2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	6 desa	6 desa	
		2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	6 desa	6 desa	
		3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1 lembaga 13 desa	3 lembaga 2 desa	
		4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	15 desa	12 desa	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	1 TFR (Angka Kelahiran Total)	1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Ada	
		2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25 tahun	SP	
		3 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	3,24	1,43%	
		4 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	96,85%	SP	
		5 Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25 OPD	25 OPD	
	2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1 Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	100%	
		2 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	80,60%	79,18%	
		3 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	212 pokja (15 yang di kabupaten +197 di desa)	196 kelompok	
		4 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	25,14%	51,13%	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data	
	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	44,12%	SP
			2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	75,70%	2,12%
Perhubungan						
	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	74,07%	74,07%
			2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	27,48%	35,59%
			3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	SP	SP
			4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	SP	100%
	2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	SP	100,00%
Komunikasi dan Informatika						
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00%	100,00%
			2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	54,84%	40,00%
			3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ya	SP
	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	48,65%	43,24%
			2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	51,61%	40,00%
			3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	51,61%	40,00%

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data			
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	12,90%	13,33%			
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	50,00%	25,00%			
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	75,00%	62,50%			
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	12,50%	SP			
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	19,35%	10,00%			
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	19,35%	10,00%			
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	19,35%	0			
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	40%	SP			
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	9,68%	SP			
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	50,00%	62,50%			
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	SP			
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	78,57%	SP	
				2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	66,67%	SP	
				3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	95,00%	SP	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	SP	SP
			2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	SP	SP
			3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5,60%	4,96%
			4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30,91%	18,18%
			5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40,00%	SP
			6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	SP	SP
			7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	SP	SP
			8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	SP	SP
			9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	54,40%	56,20%
			10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	SP	SP
			11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3 KOPERASI	SP

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data		
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	SP		
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,00%			
	2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	29,97%	18,89%	
			2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	15,02%	21,37%	
			3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	2,23%	SP	
			4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,77%	2,66%	
			5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,09%	0,20%	
			6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,28%	0,38%	
			7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0,26%	SP	
	Penanaman Modal						
	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	SP	SP	
			2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	SP	SP	
			3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	SP	SP	
			4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	8 kali	SP	
			5	Kegiatan pameran penanaman modal	SP	SP	
			6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	SP	SP	
			7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	23	3	
			8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2574	2371 (1330 PERIZINAN; 1041 NON PERIZINAN)	
			9	Laporan realisasi penanaman modal	989.379.113.260	417.082.000.000	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data		
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	7 kali	SP		
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	54 kali	8		
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	192,86%	7		
Kepemudaan dan Olahraga							
	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	10 orang	SP	
			2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	10 orang	SP	
	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	16 orang	7 orang	
			2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	1 organisasi	1 organisas	
	3	Peningkatan Prestasi Olahraga	1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	40 orang	40 orang	
			2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	4 event	3 event	
Statistik							
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Ada	
			2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	3 survei	5 survei	
			3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3 jenis	3 jenis	
			4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	3 survei	3 survei	
			5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	3 jenis	3 jenis	
			6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100,00%	100,00%	
			7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100,0%	100,00%	
	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data	
Persandian						
	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	SP	0,00%
			2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	SP	1
			3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0,00	0,00
			4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100,00%	100,00%
Kebudayaan						
	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	11 objek	11 objek
			2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	1 objek	1 objek
			3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	1 objek	1 objek
			4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	SP	SP
			5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	24 CB	24 CB
			6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	24 CB	24 CB
			7	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	SP	SP

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
		8 Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	SP	SP	
		9 Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	SP	SP	
		10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	SP	SP	
		11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	4257 orang	5767 orang	
		12 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	SP	SP	
		13 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	17 orang	17 orang	
		14 Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	5 orang	5 orang	
		15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5 orang	5 orang	
		16 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	6 orang	6 orang	
		17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	SP	SP	
		18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	10 buah	10 orang	
		19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	SP	SP	
Perpustakaan					
	1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1 Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1167,80%	23,54%	
		2 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	50,51%	5,40%	
		3 Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,18%	0,14%	
		4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	79,37%	84,62%	
		5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca dimasyarakat	12 kegiatan	9 kegiatan	
	2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	SP	0,00%	
		2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	SP	0,00%	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data	
		3 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	4094	897 eksemplar 311 judul		
Kearsipan						
	1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1 Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	100%		
		2 Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	100%		
		3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	100%		
		4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	SP	SP		
	2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	SP	SP		
		2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	SP	SP		
		3 Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	SP	SP		
		4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	SP	SP		
		5 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	SP	SP		
		6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	SP	SP		
	Perikanan					
	1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	1 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	4480 RTP nelayan dan 398 RTP Budidaya	4444 RTP nelayan dan 351 RTP Budidaya		
2 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional		0%	16,67%			
3 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan		36 izin	13 izin			

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
		4 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	111 orang	93 orang	
		5 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	4884062 ekor	563000 ekor	
Pariwisata					
	1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1 Jumlah entitas pengelolaan destinasi	37 unit	37 unit	
		2 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	37 unit	37 unit	
		3 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	39	100	
		4 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	6 orang	183 orang	
		5 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	SP	1 event	
		6 Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	SP	SP	
		7 Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	SP	SP	
		8 Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	14,81%	43,94%	
		9 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	100%	
		10 Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	13 lokasi	SP	
	2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota				
	3 Tingkat Hunian Akomodasi				
	4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku				
	5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data	
Pertanian						
	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	prasarana 3172	3172
			2	Prasarana pertanian yang digunakan	3144	3144
			3	Penerbitan izin usaha pertanian	3 kali	SP
			4	Persentase prasarana yang digunakan	99,12%	100,89%
			5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	SP	SP
	2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100,00%	100,00%
Kehutanan						
			1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Ada	
			2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak Ada	
			3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Tidak Ada	
			4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Tidak Ada	
Energi dan Sumber Daya Mineral						
	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		
Perdagangan						
	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a) Pusat perbelanjaan b) Toko swalayan	100%	100,00%
			2	Persentase penerbitan TDG	100%	100,00%
			3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	SP	100%
			4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	SP	SP

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
			5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	SP	SP	
			6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	SP	SP	
			7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	SP	
			8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0,63	SP	
	2	Persentase kinerja realisasi pupuk	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0,0004%	0,0003%	
	3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100,0%	104,2%	
			2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	SP	SP	
	Perindustrian						
	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	SP	SP	
	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	50%	50%	
	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	SP	100%	
	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	SP	SP	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data	
	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota				
	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	100%	50,00%
Transmigrasi						
		1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	3 SKP		
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1 SKP		
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1 SKP		

2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel II.3
Capaian Indikator Kinerja Hasil (*Outcome*) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2020

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA	
Pendidikan						
	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 Tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%	97,83%	95,09%	
	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar / Jumlah anak usia 7 -12 tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%	99,89%	94,08%	
	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama / jumlah anak usia 13–15 tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%	83,34%	87,08%	
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan / Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan x 100%	5,50%	21,28%	
Kesehatan						
	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan / Jumlah penduduk di Kabupaten/kota	0,084%	0,085%	
	2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi / Jumlah RS di kabupaten/kota x100%	100%	100%	
	3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota x100%	92,86%	95,25%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA	
	4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan / Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota x100%	95,01%	96,61%	
	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x100%	95,73%	99,38%	
	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / jumlah balita di kabupaten/kota x100%	93,36%	93,34%	
	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota x100%	98,36%	97,81%	
	8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota x100%	83,65%	70,23%	
	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota x100%	83,90%	78,32%	
	10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota x100%	87,97%	84,99%	
	11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita DM di kabupaten/kota x100%	103,71%	105,30%	
	12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota x100%	100,00%	100,00%	
	13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota x100%	61,58%	71,68%	
	14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota x100%	107,96%	105,38%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA
Pekerjaan Umum					
	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/kota (ha) / Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/kota(ha) x100%	42,54%	42,54%
	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) / Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten /kota (m) x100%	30,63%	30,63%
	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun(ha), ditingkatkan(ha), direhabilitasi(ha), dioperasikan dan pelihara(ha) / Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota x100%	38,43%	38,43%
	4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota / Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut x100%	92,48%	91,78%
	5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di kabupaten kota x100%	54,99%	94,61%
	6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya / Jumlah IMB yang berlaku x100%	100%	100%
	7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap / Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten kota x100%	81,6%	81,38%

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA	
	8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis / Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	219 orang	186 orang	
	9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi / Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x100%	SP	SP	
Perumahan Rakyat						
	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x100%	100%	100%	
	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian Hak atas penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah tangga penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima penyediaan Rumah Layak Huni / Jumlah total rumah terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi Kriteria penerima pelayanan x100%	SP	SP	
	3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) / Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x100%	SP	0	
	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah kabupaten/kota x100%	8,24%	8,74%	
	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / Jumlah unit rumah kab/kota x100%	SP	SP	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x100%	100%	100%	
	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x100%	13,5%	100%	
	3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	148 orang	164 orang	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA	
	4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	190 orang	164 orang	
	5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	7042 orang	522 orang	
	6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pmeadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah / Jumlah Kejadian kebakaran di kabupaten/kota x100%	60%	99,69%	
	7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	10 menit	20,88 menit	
SOSIAL						
	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti / populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x100%	100,00%	100%	
	2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran / populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota x100%	100%	100%	
Ketenagakerjaan						
	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x100%	100%	0%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA
	2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah tenaga kerja keseluruhan x100%	0,46%	SP
	3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / Jumlah tenaga Kerja x100%	10303558%	10509%
	4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah Perusahaan x100%	28,57%	54,55%
	5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan / Jumlah pencaker yang terdaftar x100%	56,07%	31,25%
Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung di APBD x100%	2,92%	2,57%
	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten kota yang didampingi / Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 Tahun) x100%	0,02%	0,03%
	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah penduduk perempuan x100%	4,99%	0,01%
Pangan					
	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Cadangan pangan / Jumlah kebutuhan pangan x100%	127,63%	129,94%
Pertanahan					
	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi / seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi x100%	100%	100%

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA	
	2	Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum / Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x100%	100%	89,09%	
	3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi / Luas izin lokasi yang diterbitkan x100%	100%	98,00%	
	4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha / Jumlah penerima tanah obyek landreform x100%	SP	SP	
	5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah / Luas izin membuka tanah yang diterbitkan x100%	SP	SP	
	6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x100%	SP	1	
Lingkungan Hidup						
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	69,21	63,29	
	2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani / total volume timbunan sampah kabupaten/kota x100%	101,33%	18,37%	
	3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kota / Usaha atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x100%	17,46%	52,73%	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	1	Perekaman KTP Elektronik		99,25%	98,57%	
	2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) jari yang sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 Tahun x100%	45,88%	42,89%	
	3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / jumlah anak usia 0-18 Tahun x100%	94,55%	92,80%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA	
	4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama / Jumlah OPD x100%	16,13%	16,67%	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun / Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x100%	0	1	
	2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks membangun per tahun / Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x100%	5,13%	4,55%	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur ($i=1$ untuk kelompok umur 15-19, $i=2$ utk kelompok umur)	2,38	2,38	
	2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern / Jumlah pasangan usia subur x100%	80,60%	14,46%	
	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		19,40%	8,65%	
Perhubungan						
	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) 	3,5	3,5	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA
		<p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) § Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP § Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</p> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas: a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>			
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,55	0,55	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA
Komunikasi dan Informatika					
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah OPD x100%	100,00%	100,00%
	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik x100%	18,92%	18,92%
	3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten atau kota / Jumlah Penduduk x100%	72,58%	72,09%
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	jumlah koperasi yang meningkat berdasarkan kualitasnya RAT, Volume usaha dan aset / Jumlah seluruh koperasi x100%	45,60%	51,24%
	2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan x100%	2,64%	8,65%
Penanaman Modal					
	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	(Jumlah investasi tahun n - Jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota x100%	137,21%	-99,94%
					-64,94%
Kepemudaan dan Olahraga					
	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	(Jumlah pemuda(16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota / Jumlah pemuda (umur 16 - 30 tahun) di kabupaten/kota x100%	0,44%	0,0022%
	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota / Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota x100%	0,002	0,20%
	3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	23 buah	0

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA
Statistik					
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah OPD x100%	100%	100%
	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah OPD x100%	100%	100%
Persandian					
	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian x100%	100,00%	100,00%
Kebudayaan					
	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya yang terdata x100%	79,17%	75,00%
Perpustakaan					
	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	SP	SP
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =	35,48	25,44
Kearsipan					
	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75,00	25,00

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA	
	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	16,6	0	
Perikanan						
	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	29505,6 ton	20280,02 ton	
Pariwisata						
	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1 / Jumlah wisatawan tahun n-1 x100%	-96,72%	36,57%	
	2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 / Jumlah wisatawan tahun n-1 x100%	29,43%	-50,30%	
	3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar terjual / Jumlah kamar tersedia x100%	61,33%	100,00%	
	4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,32%	1,40%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA	
	5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,50%	0,29%	
Pertanian						
	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produk pertanian pangan per hektar per tahun / Luas Panen x100%	319,42%	3,24%	
	2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian atau kasus hewan menular tahun sebelumnya / Jumlah kejadian atau kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x100%	100	-72,36%	
Kehutanan						
Energi dan Sumber Daya Mineral						
	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin / Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi x100%			
Perdagangan						
	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten atau kota x100%	1,40%	1,52%	
	2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi / RDKK x100%	24,26%	19,96%	
	3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan / Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab atau Kota x100%	88%	104%	
Perindustrian						
	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-Jumlah industri kecil dan menengah n-1 / Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x100%	5,69%	5,27%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	SUMBER DATA	
	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$ Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$ Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	50	50	
	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan $\times 100\%$	100%	100%	
	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan $\times 100\%$	SP	SP	
	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan $\times 100\%$	SP	SP	
	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	100	100	
Transmigrasi						
			3 SKP	95,27%		

2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II.4
Capaian Indikator Kinerja Hasil (Outcome) Fungsi Penunjang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2020

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan) Kabupaten/Kota					
	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah Belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan / Jumlah APBD	10,76%	15,16%
	2	Rasio PAD	Jumlah PAD / Jumlah PDRB Non Migas x100%	0,38%	0,48%
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 22
	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2
	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures / Jumlah belanja APBD x100%	71,55%	49,74%
	6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP*	WTP
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota					
	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n / Jumlah kontrak keseluruhan tahun n x100%	SP	0
	2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif x100%	6,41%	1,85%
	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan / Total belanja langsung x100%	92,06%	91,77%
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota					
	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas / Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah x100%	90,66%	86,11%

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020	Sumber Data
	2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) / Seluruh jumlah pegawai pemerintahan (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x100%	24,40%	16,17%	
	3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi / Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x100%	53,63%	95,27%	
Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota					
	1 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	(Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi /total belanja APBD) -1 x100%	7,41%	0,93	
	2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	(Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi /total PAD dalam APBD) -1 x100%	22,27%	0,85	
	3 Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	YA	YA	
	4 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA /Total belanja anggaran tahun sebelumnya x100%	1,15%	0,12	
Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota					
	1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda/realisasi belanja unit pelayanan dapat diakses di website pemda x100%	95,16%	99,15%	
	2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda /Total jumlah dokumen yang telah dirinci x100%	100%	100%	

3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sesuai dengan kondisi serta sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Selanjutnya untuk menilai kinerja yang telah dicapai, dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya serta dilakukan analisa atas pencapaian kinerja dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sasaran kinerja berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Metode perbandingan capaian kinerja tersebut dilakukan antara rencana dengan realisasi kinerja (*performance plan*) yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*). Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun kerangka pengukuran kinerja berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, dalam penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 digunakan 2 (dua) skala penilaian yaitu :

1. Pengukuran Capaian Tahunan

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian tahunan menggunakan 4 (empat) kategori yaitu "**Baik Sekali**", "**Baik**", "**Cukup**" dan "**Kurang**". Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator kinerja dilakukan dengan membuat rata-rata atas capaian indikator kinerja. Kategori ini digunakan untuk memperlihatkan secara jelas ketercapaian dan keberhasilan masing-masing indikator kinerja sehingga dapat menjadi peringatan dan perhatian selanjutnya untuk dapat menjadi perbaikan kedepan dalam rangka mencapai target indikator dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel II.5
Penilaian Capaian Tahunan

Nilai Capaian (%)	Kategori
≥ 100	Baik Sekali
80 s.d. < 100	Baik
60 s.d. < 80	Cukup
< 60	Kurang

2. Pengukuran Capaian Akhir RPJMD

Untuk pengukuran capaian akhir RPJMD, dilakukan pengukuran terhadap **capaian indikator kinerja sasaran** yang dibagi menjadi 2 (dua) skala dengan 2 (dua) kategori yaitu "**Tercapai**", "**Tidak Tercapai**".

Tabel II.6
Sasaran terhadap Target Akhir RPJMD

Nilai Capaian (%)	Kategori
≥ 100	Tercapai
< 100	Tidak tercapai

3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, telah ditetapkan 10 Sasaran yang harus dicapai di Tahun 2020 dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel II.7

Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,91 – 7, 44	0,21	2,82
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,27 – 69,42	69,60	100,26
		Angka Kemiskinan	%	2,70 – 2,99	2,75	108,02
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,39 – 4,06	3,83	116,74
		PDRB Per Kapita	Ribu rupiah	67.673 – 68.145	74. 688,0	110,36
Rata-rata Capaian						80,02
2.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	46	45,94	99,87
Rata-rata Capaian						-
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100,00
Rata-rata Capaian						100,00
4.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8	6,79	84,87
Rata-rata Capaian						84,87
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	72	69,82	96,97
Rata-rata Capaian						96,97
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70	60,16	85,94
Rata-rata Capaian						85,94
7.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	%	93	81,44	87,57
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Nilai	85	82,07	96,55
Rata-rata Capaian						92,06

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
8.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun	miliar rupiah	100	1.183	1.183
Rata-rata Capaian						1.183
9.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	miliar rupiah	4.069,20	891,04	21,89
Rata-rata Capaian						21,89
10.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,29	69,21	109,35
Rata-rata Capaian						109,35

Berdasarkan target indikator yang telah ditetapkan beserta capaian kinerja masing-masing sasaran dilakukan analisis dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah”

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah terdiri dari 5 indikator yang keseluruhannya merupakan indikator makro pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut.

Tabel II.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan Ekonomi	%	-5,43	6,91 – 7, 44	0,21	2,82	Kurang
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,08	69,27 – 69,42	69,60	100,26	Baik Sekali
Angka Kemiskinan	%	2,70	2.70 – 2.99	2,75	98,18	Baik
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,12	3.39 – 4.06	3,83	88,51	Baik
PDRB Per Kapita	Rupiah	61.617.200	67.673 – 68.145	74.688.000,00	110,36	Baik Sekali

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah” diukur dari 5 (lima) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB Per Kapita. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2021 ada 2 (dua) indikator Sasaran dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan dengan kategori “Baik Sekali” dan 3 (tiga) indikator belum mencapai target yang terdiri dari 2 (dua) indikator dengan kategori “Baik” dan 1 (satu) indikator dengan

kriteria "Kurang". Rata-rata capaian sasaran sebesar 80,02 persen dengan kategori "Baik". Secara rinci, capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur capaian pembangunan khususnya dibidang ekonomi, salah satu indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK (rill) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 sebesar 0,21 persen. Jika dibandingkan dengan target daerah yang telah disesuaikan dan ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebesar 6,91 – 7,44 persen, maka indikator ini hanya mencapai sebesar 2,82 persen. Kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 dikarenakan oleh strategi pemerintah daerah dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang juga mempengaruhi kondisi perekonomian global, nasional serta regional, dengan berbagai upaya seperti pemberian Bansos dan bantuan lainnya.

Pada Tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana laju pertumbuhan ekonomi sebesar -5,43 persen. dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yaitu sebesar 5,05 persen, maka realisasi di Tahun 2021 masih sangat jauh untuk dicapai. Hal ini sebabkan dengan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 maka tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel II.9

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021 (persentase)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,46	-0,21	1,57	-0,10	3,53	0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	0,65	2,41	0,48	1,39	-13,87	10,22
C	Industri Pengolahan	3,35	6,53	6,97	12,46	-7,00	-4,52

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,11	6,17	8,55	15,06	19,30	8,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,04	7,59	0,01	2,01	7,50	3,97
F	Konstruksi	9,14	7,05	7,23	3,85	-1,46	1,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,80	7,35	4,53	2,55	-6,21	5,94
H	Transportasi dan Pergudangan	6,52	7,85	6,54	3,34	-13,37	8,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,90	5,83	2,80	3,70	-0,65	6,29
J	Informasi dan Komunikasi	9,12	8,43	10,51	12,55	18,44	5,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,38	2,04	6,55	7,14	-0,44	5,36
L	Real Estate	6,05	5,05	7,29	1,57	4,91	4,41
M,N	Jasa Perusahaan	4,21	4,10	4,49	0,37	-9,11	4,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,48	7,80	8,08	6,08	-0,63	4,64
P	Jasa Pendidikan	9,42	9,76	9,12	6,01	-0,76	1,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,08	8,90	7,52	7,37	1,07	9,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,21	7,80	4,13	4,48	-4,69	2,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,80	5,26	5,20	7,06	-5,37	0,21

Keterangan : †) angka revisi

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022

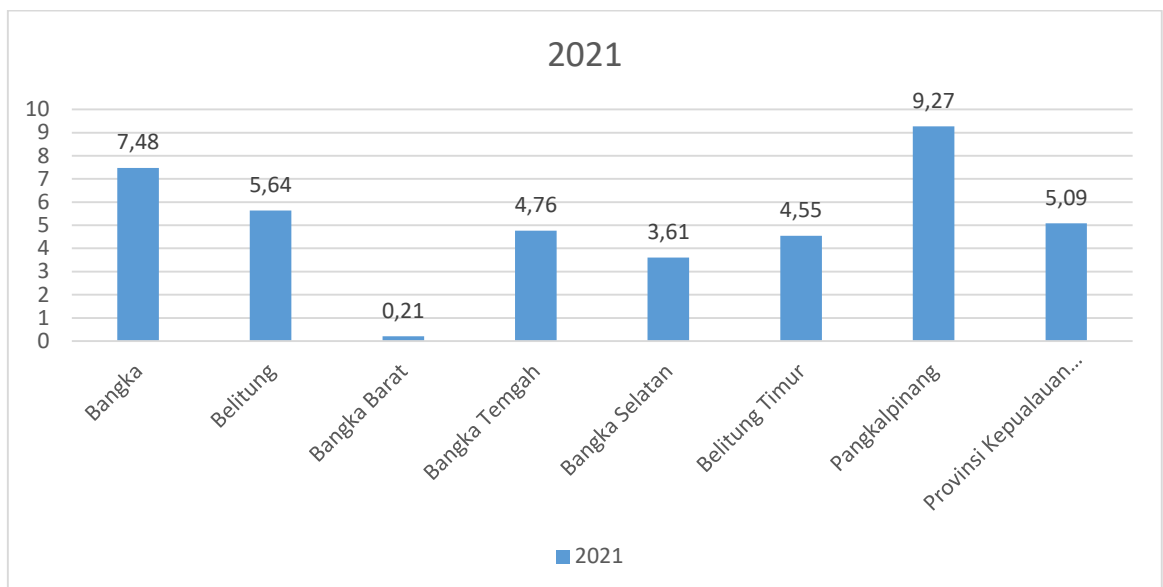
Pada tahun 2021, dari 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB, hanya 11 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, sementara 1 kategori lapangan usaha mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang negatif dan 5 kategori lapangan usaha mengalami penurunan. Tiga kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan penggalian, Pengadaan Listrik dan Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah pada lapangan usaha Industri Pengolahan.

Jika dilihat selama enam tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 merupakan capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi, sementara Tahun 2020 merupakan kondisi terendah dalam perekonomian Kabupaten Bangka Barat.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

berada pada posisi terendah diikuti oleh Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Sementara jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun nasional, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat jauh lebih rendah dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 5,09 persen dan nasional dengan pertumbuhan sebesar 3,69 persen.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

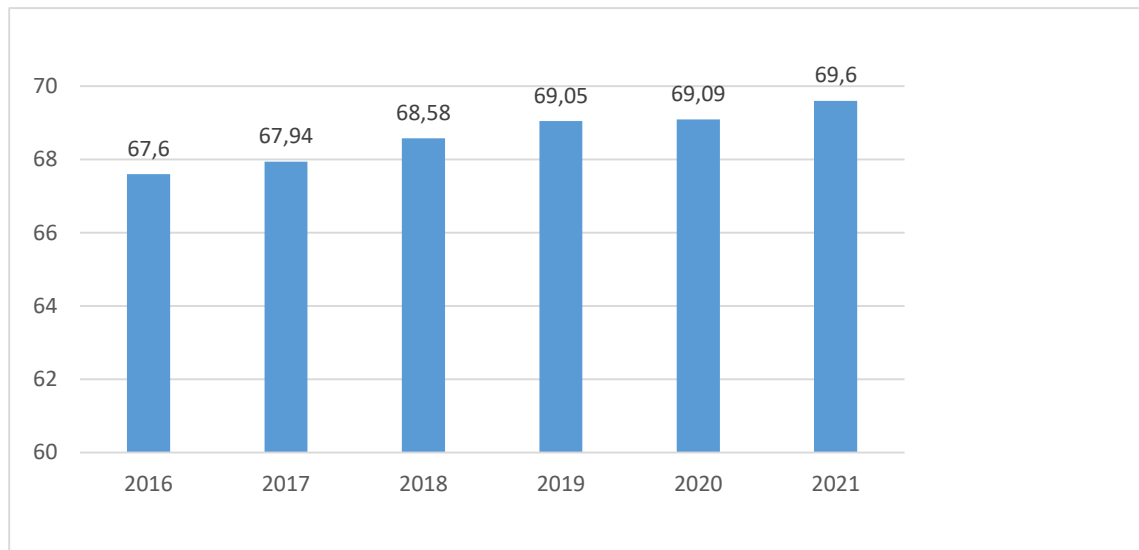
IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.

Nilai IPM Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 sebesar 69,60 dan jika dibandingkan dengan target IPM dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebesar 69,27 – 69,42 , maka melebihi mencapai target dengan capaian sebesar 100,48 persen atau kategori **"Baik Sekali"**.

Jika dilihat dari perkembangan antar waktu selama 6 (enam) tahun terakhir,

nilai IPM Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perkembangan yang positif dan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,75 persen. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dengan nilai 69,09, IPM Kabupaten Bangka Barat hanya meningkat sebesar 0,51 poin. Perkembangan ini secara umum menunjukkan perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Barat meskipun pertumbuhannya cenderung lambat. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dengan nilai sebesar 72,23, maka telah mencapai sebesar 96,35 persen.

Gambar 2.2
IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021



J

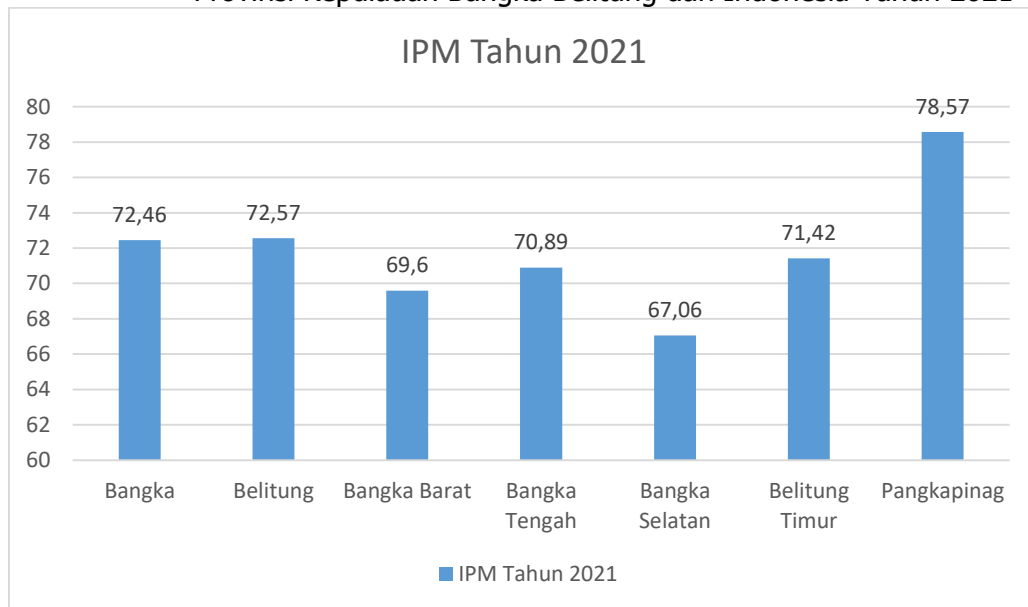
Sumber Data BPS Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dengan nilai sebesar 72,23, maka sampai dengan Tahun 2021 nilai IPM Kabupaten Bangka Barat telah mencapai sebesar 96,35 persen. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Bangka Barat yang tidak mencapai 1 poin setiap tahunnya, maka target akhir RPJMD di Tahun 2021 untuk IPM tidak tercapai.

Dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota lain di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat masih berada di peringkat

ke-6 (enam) atau terendah kedua setelah Kabupaten Bangka Selatan. Sementara dibandingkan dengan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan IPM Nasional, IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 cukup jauh tertinggal dengan perbedaan 2,09 poin dari IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 2,69 poin dari IPM Nasional.

Gambar 2.3
IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Gambar 2.4
IPM Nasional , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berubahnya status pembangunan manusia merupakan indikator untuk melihat perkembangan pembangunan manusia. Status pembangunan manusia berdasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Sampai dengan Tahun 2020, status Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat masih masuk kedalam kelompok sedang ($60 \leq$

IPM ≤ 70), sedangkan status Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional telah masuk di kelompok tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Untuk melihat perkembangan IPM, tidak terlepas dari 3 komponen pembentuknya. Dilihat dari 3 komponen pembentuk IPM di Kabupaten Bangka Barat, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (Umur Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan. Sementara dimensi standar hidup layak (Pengeluaran Per Kapita) selama enam tahun terakhir mengalami penurunan di Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Tahun 2020. Hal ini dikarenakan masih terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian internasional, nasional dan regional turut berdampak.

Tabel II.10

Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021

Komponen IPM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UHH (tahun)	69,52	69,56	69,73	69,99	70,06	70,08
HLS (tahun)	11,49	11,5	11,51	11,52	11,53	11,70
RLS (tahun)	6,89	7,06	7,18	7,21	7,22	7,44
Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	11.303	11.394	12.011	12.275	12.233	11.269
IPM	67,60	67,94	68,68	69,05	69,08	69,60

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Ket : UHH (Umur Harapan Hidup)
HLS (Harapan Lama Sekolah)
RLS (Rata-rata Lama Sekolah)

Sementara jika dibandingkan antara Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, seluruh nilai komponen IPM Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 lebih rendah.

Tabel II.11

Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021
serta perbandingan dengan Provinsi dan Nasional

Komponen IPM	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	IPM
Indonesia	71,57	13,08	8,54	11.156	72,29
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70,73	12,17	8,08	12.819	71,69
Kabupaten Bangka Barat	70,08	11,70	7,44	12.269	69,60

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Ket : UHH (Umur Harapan Hidup)
HLS (Harapan Lama Sekolah)
RLS (Rata-rata Lama Sekolah)

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat, merupakan pihak-pihak memiliki tanggungjawab yang sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat sebesar 2,75 persen dan jika dibandingkan dengan target dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 2,70 – 2,99 persen telah mencapai 98,18 persen. Dilihat dari perkembangan antar waktu, selama 6 (enam) tahun terakhir persentase penduduk miskin Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dengan presentase kemiskinan sebesar 2,70 persen maka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 meningkat 0,05 poin.

Tabel II.12

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016 - 2021

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka	5,52	5,10	5,47	4,92	4,51	4,81
Belitung	7,85	7,77	7,56	6,29	6,27	7,15
Bangka Barat	2,74	2,98	3,05	2,67	2,70	2,75
Bangka Tengah	5,64	6,07	5,81	5,02	4,85	5,13
Bangka Selatan	3,62	3,92	3,70	3,36	3,52	3,69
Belitung Timur	6,99	6,81	7,06	6,60	6,52	7,20
Kota Pangkalpinang	5,02	4,80	4,95	4,25	4,36	4,76
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5,22	5,20	5,25	4,50	4,89	4,90
Nasional	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19	10,14

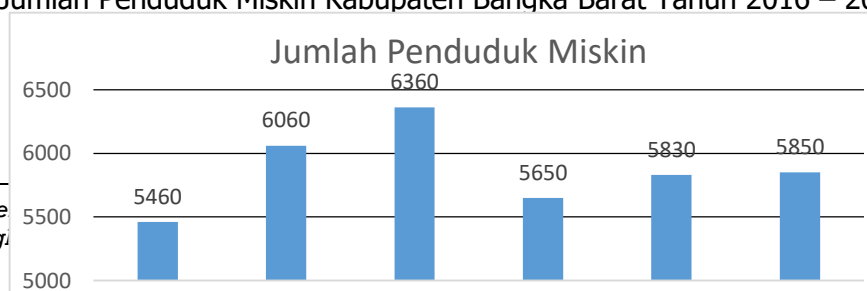
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dilihat dari perkembangan antar wilayah, kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat selama beberapa tahun terakhir berada pada posisi terbaik atau dengan angka kemiskinan terendah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Begitu pula jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di tingkat nasional dan provinsi, angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berada jauh di bawah angka nasional sebesar 10,14 persen dan provinsi sebesar 4,90 persen.

Sejalan dengan persentase kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat juga turut mengalami peningkatan yaitu sebanyak 20 orang atau 0,34 persen dengan total penduduk miskin di Tahun 2020 sebanyak 5.830 jiwa menjadi 5.850 jiwa di Tahun 2021.

Gambar 2.5

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021 (jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Dilihat dari realisasi Tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 sebesar 2,85 persen, maka telah melebihi target yaitu dengan capaian 103,63 persen.

Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat terbilang rendah, namun kemiskinan tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus ditanggulangi. Selanjutnya agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Bangka Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara pengangguran adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan tingkat ekonomi disuatu daerah semakin baik/maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Pada Tahun 2021, realisasi TPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 3,83 persen sehingga jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebesar 3.39 – 4.06 persen, maka telah mencapai 88,51 persen.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dengan tingkat pengangguran sebesar 4,12 persen, maka TPT di Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,29 persen. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021 sebesar 5,65 persen, maka TPT telah mencapai 147,51 persen atau telah melampaui target.

Tabel II.13

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2021

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	91.923	-	65.782	106.408	103.518	-	-
Bekerja	86.480	-	62.668	103.102	100.563	-	-
Pengangguran	5.443	-	3.114	3.306	2.955	-	-
TPAK(Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)	65,47	-	68,17	70,47	66,99	65,76	65,98
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	5,92	-	4,23	3,11	2,85	4,12	3,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Dilihat dari TPT kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat ketiga terendah setelah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan angka 5,03 persen serta nasional dengan angka 6,49 persen, maka TPT Kabupaten Bangka Barat lebih rendah.

Tabel II.14

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2021

No.	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kab. Bangka	8,87	-	4,29	4,12	3,80	5,42	5,97
2.	Kab. Belitung	4,57	-	2,57	2,93	2,90	4,82	3,51
3.	Kab. Bangka Barat	5,92	-	4,23	3,11	2,85	4,12	3,83
4.	Kab. Bangka Tengah	6,58	-	3,38	3,93	4,39	5,59	4,95
5.	Kab. Bangka Selatan	2,01	-	2,74	4,35	3,87	5,42	5,29
6.	Kab. Belitung Timur	2,55	-	2,62	1,50	1,71	3,93	3,78
7.	Kota Pangkalpinang	10,64	-	5,80	4,70	5,01	6,93	6,81
Prov. Kep. Bangka Belitung		6,29	2,60	3,78	3,65	3,39	5,25	5,03
Indonesia		6,18	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07	6,49

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

5. PDRB per kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah yang dibandingkan dengan wilayah lain. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

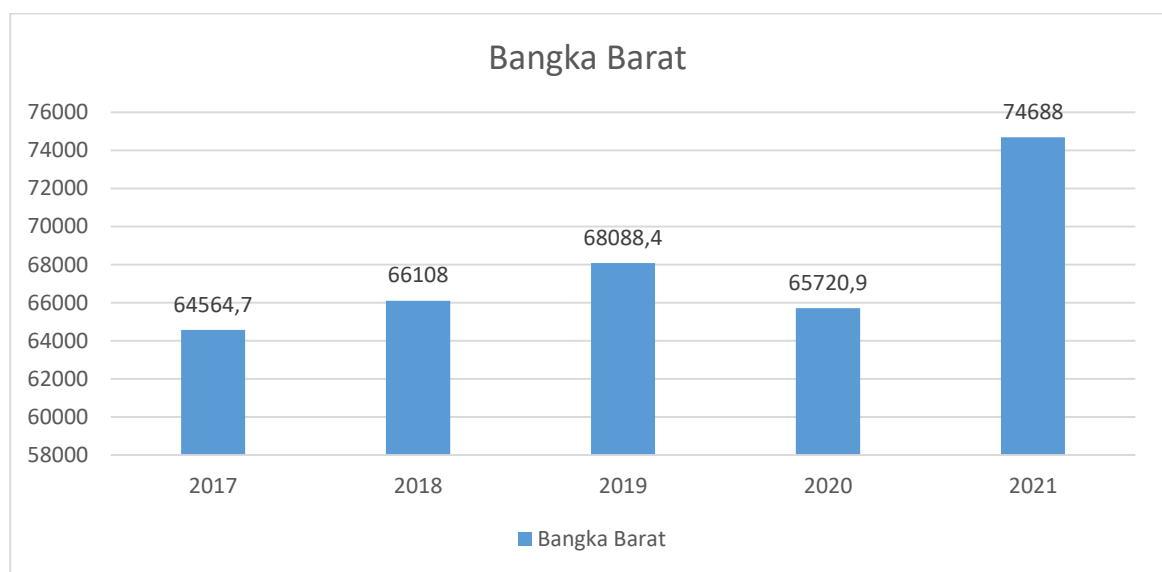
Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Bangka Barat, untuk nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 adalah sebesar

Rp 74.688.000,00. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2021 yang telah diubah sesuai dengan target Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebesar Rp Rp.67.673.000,00 – Rp. 68.145.000,00 maka tercapai sebesar 110,36 persen.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dengan nilai PDRB per kapita sebesar Rp 65,720.900,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 8.967.100,00 di Tahun 2021. Selama 6 (enam) tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perkembangan yang positif atau terus meningkat kecuali di Tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Gambar 2.6

PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)



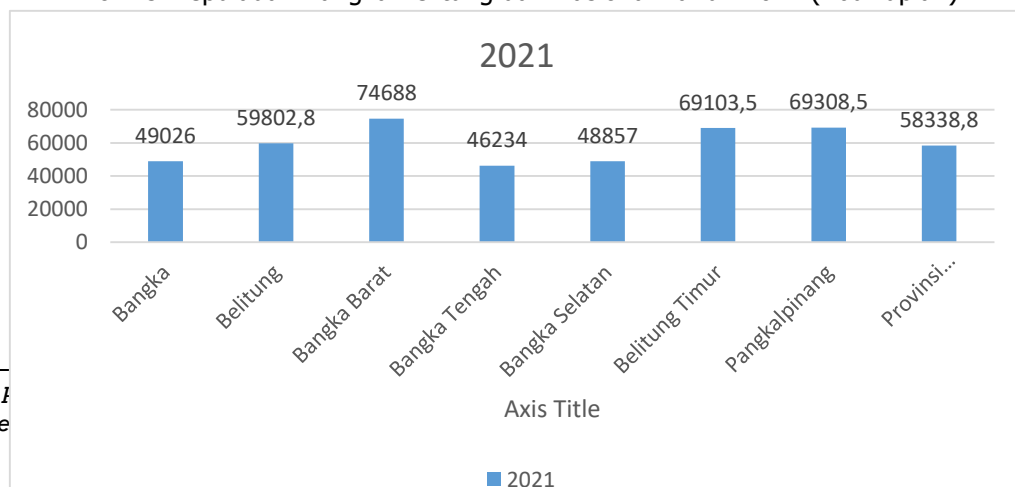
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021 dengan nilai Rp 70.428.000,00, maka PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 mencapai 104,04 persen.

Jika dilihat dari perkembangan antar wilayah, PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 berada pada posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat lebih tinggi.

Gambar 2.7

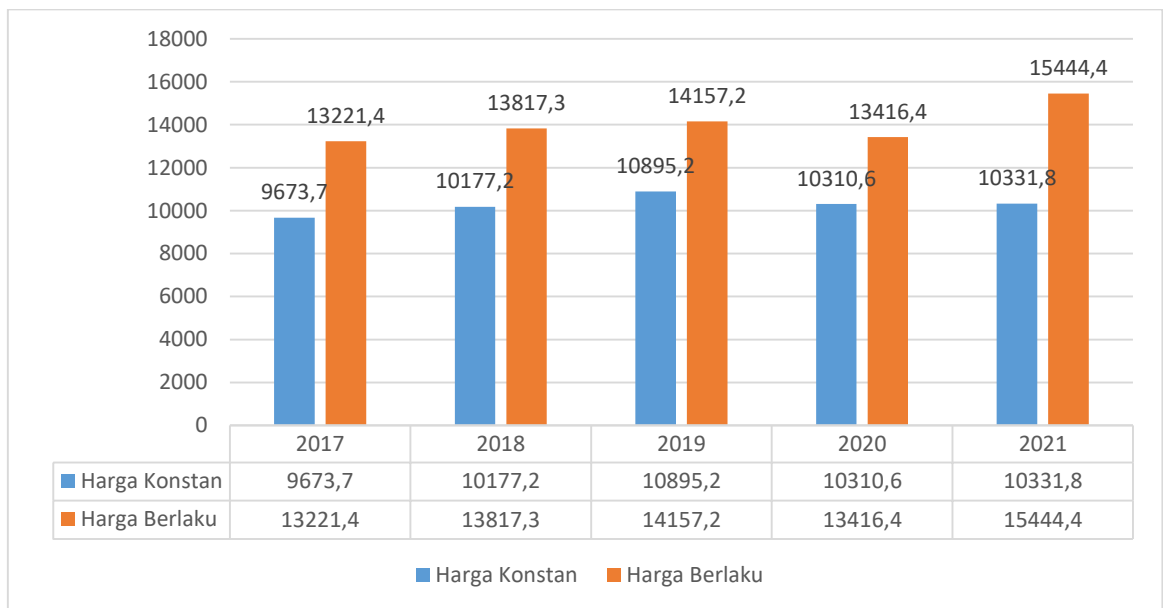
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2021 (ribu rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Secara umum perhitungan nilai PDRB Per Kapita sangat berkaitan dengan nilai PDRB. Pada Tahun 2021 PDRB Kabupaten Bangka Barat berdasarkan harga berlaku sebesar Rp15.444,44 Milyar rupiah dan berdasarkan harga konstan sebesar Rp 10.331,79 Milyar Rupiah.

Gambar 2.8
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat (juta rupiah)
Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah
Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan Ekonomi	%	0,21	5,05	4,15	Tidak Tercapai
IPM	Indeks	69,60	72,23	96,35	Tidak Tercapai
Kemiskinan	%	2,75	2,85	103,63	Tercapai
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,83	5,65	173,62	Tercapai
PDRB Perkapita	Ribu Rupiah	74.688.000	70.428.000	110,36	Tercapai

Dari capaian lima indikator sasaran tersebut jika dibandingkan dengan target

akhir RPJMD, maka sampai dengan Tahun 2021 terdapat tiga indikator yang telah melebihi target dengan kategori tercapai, sementara dua indikator dengan capaian dibawah 100 persen dengan kategori tidak tercapai.

Secara umum untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah di Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19.

Mengingat indikator Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah” adalah indikator makro, maka program pendukung adalah hampir seluruh program yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan pencapaian misi pembangunan daerah khususnya misi kedua yaitu “Membangun perekonomian yang berbasis sumber daya lokal dan berdaya saing tinggi” dan misi ketiga yaitu “Membangun masyarakat yang maju dan berkualitas”.

Program dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yang berkaitan dengan sasaran antara lain :

1. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
4. Program Penyuluhan Pertanian.
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
9. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian.
10. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
12. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
13. Program Penempatan Tenaga Kerja.
14. Program Hubungan Industrial.
15. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
16. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
17. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting.
18. Program Pengembangan UMKM.
19. Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
20. Program Penyelenggaraan Jalan.
21. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
22. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
23. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
24. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
25. Program Pemasaran Pariwisata.
26. Program Pengembangan Kebudayaan.
27. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.

28. Program Pembinaan Sejarah.
29. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
30. Program Pembinaan Perpustakaan.
31. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
32. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
33. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
34. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
35. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
36. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Analisis Program Yang Mendukung Sasaran

No.	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5 = 4/3*100
Meningkatnya kualitas pembangunan daerah		79.287.691.371,00	73.828.705.698,86	93,11
1,1	Program Pengawasan Keamanan Pangan	108.221.903,00	102.677.000,00	94,88
1,2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	402.318.968,00	380.412.450,00	94,55
1,3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	69.673.775,00	50.014.300,00	71,78
1,4	Program Penyuluhan Pertanian	869.811.580,00	837.341.420,00	96,27
1,5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	27.500.000,00	27.459.500,00	99,85
1,6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	113.160.000,00	112.589.375,00	99,50
1,7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.632.481.750,00	1.053.803.469,00	64,55
1,8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	597.462.500,00	548.695.700,00	78,65
1,9	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	14.066.800,00	11.063.050,00	78,65
1,10	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	84.070.400,00	77.871.500,00	92,63
1,11	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	87.626.200,00	57.052.701,00	65,11
1,12	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	246.384.000,00	224.021.500,00	90,92
1,13	Program Penempatan Tenaga Kerja	14.360.000,00	14.360.000,00	100
1,14	Program Hubungan Industrial	84.705.000,00	18.775.000,00	22,17
1,15	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	515.120.000,00	513.380.000,00	99,66
1,16	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	167.782.000,00	147.684.300,00	88,02
1,17	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	408.996.000,00	325.215.000,00	79,52
1,18	Program Pengembangan UMKM	395.277.800,00	220.021.100,00	55,66
1,19	Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	163.232.000,00	140.182.000,00	85,88
1,20	Program Penyelenggaraan Jalan	57.567.256.898,00	55.821.953.761,84	96,97
1,21	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.024.605.000,00	1.016.240.800,00	99,18
1,22	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.420.340.810,00	5.985.210.405,80,02	80,66
1,23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.630.639.358,00	1.608.384.980,00	98,64

No.	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1,24	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	776.202.572,00	679.922.800,00	87,60
1,25	Program Pemasaran Pariwisata	338.545.565,00	230.052.130,00	67,95
1,26	Program Pengembangan Kebudayaan	761.639.350,00	326.230.240,00	42,83
1,27	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	378.764.600,00	365.115.100,00	96,40
1,28	Program Pembinaan Sejarah	62.054.360,00	53.655.000,00	86,46
1,29	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	264.429.840,00	258.545.500,00	97,77
1,30	Program Pembinaan Perpustakaan	340.490.640,00	223.292.230,00	65,58
1,31	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	153.173.240,00	150.792.540,00	98,45
1,32	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100.668.619,00	57.748.797,00	57,37
1,33	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	65.221.310,00	61.408.310,00	94,15
1,34	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	751.408.533,00	477.533.740,00	63,55
1,35	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100
1,36	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000,00	150.000.000,00	100

Efisiensi Penggunaan Sumber daya

No.	Sasaran Strategis	% Rata-Rata Capaian Kinerja Per Sasaran	% Penyerapan Anggaran Per Sasaran	Efisiensi
1	2	3	4	5 = 3-4
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	80,02	93,11	Tidak Efisien

Sasaran Strategis 2 "Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif"

[Reformasi birokrasi](#) merupakan salah satu upaya [pemerintah](#) untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem [penyelenggaraan pemerintahan](#) terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap [sistem penyelenggaraan pemerintah](#) dimana tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan [reformasi birokrasi](#) adalah untuk menciptakan birokrasi [pemerintah](#) yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.16

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	45,24	46	45,94	99,86	Baik

Untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2021 Merupakan hasil penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2020. Target Indeks Reformasi Birokrasi untuk tahun 2021 adalah sebesar 46, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 45,94 maka realisasi tercapai sebesar 99,86 persen dengan kategori **Baik** Berbagai upaya telah dilakukan untuk menaikkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, antara lain :

1. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan tersebut.
2. Melakukan evaluasi kelembagaan guna menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi, namun masih perlu dipastikan kesesuaian struktur organisasi dalam mendukung pencapaian kinerja.
3. Menjadikan kinerja sebagai dasar pemberian TPP yang didukung dengan pengembangan sistem informasi manajemen data pegawai melalui aplikasi *e-kinerja*, namun perlu direviu kembali keselarasan antara kinerja individu dalam mendukung kinerja organisasi.
4. Melakukan Pemetaan terhadap delapan Area Perubahan yang menjadi target Program Reformasi Birokrasi dengan menetapkan OPD yang menjadi pengampu pada masing-masing area perubahan. Program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Tabel II.17Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	10,19

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	3,12
	III. Reform	30,00	4,06
	Total Komponen Pengungkit	60,00	17,38
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,85
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	6,98
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,00
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,74
	Total Komponen Hasil	40,00	28,56
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	45,94

Sumber Kemenpan RB Republik Indonesia

Berikut hasil antara dari masing-masing instansi *leading sector* berdasarkan hasil evaluasi yang telah diterbitkan tahun 2020.

Tabel II.18

Hasil evaluasi Instansi Leading Sektor 2020-2021

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	67,92 (Baik)	Arsipa Nasional Republik Indonesia
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	0 (Kurang)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.	ASN Profesional	0-100	60,4 (Sangat Rendah)	Badan Kepegawaian Negara
4.	Merit System	0-100	22,25 (Buruk)	Komisi Aparatur Sipil Negara
5.	Maturitas SPIP	0-5	Level 2 (Berkembang)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Kapabilitas APIP	0-5	Level 2 (<i>infrastructure</i>)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	0-100	68,36	Ombudsman Republik Indonesia

Sumber Kemenpan RB Republik Indonesia

Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi adalah:

- a. Kualitas penerapan reformasi birokrasi baik pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan pada tingkat Perangkat Daerah belum cukup baik dan merata, sehingga belum mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan;
- b. Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat Pemerintah Kabupaten maupun Perangkat Daerah belum memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif, sehingga belum mampu menunjukkan hasil nyata dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
- c. Monitoring dan Evaluasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan pelaksanaan RB baik tingkat Pemerintah Kabupaten maupun tingkat OPD;

- d. Deregulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja dan pelayanan, sehingga upaya yang dilakukan cenderung administratif, belum serius melakukan revisi-revisi atas regulasi yang menghambat kinerja birokrasi;
- e. Peta proses bisnis yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada kinerja utama baik di tingkat Pemda maupun tingkat OPD, sehingga struktur organisasi yang terbentuk belum sepenuhnya ideal dan belum menunjukkan bentuk penyederhanaan organisasi yang berbasis kinerja;
- f. Penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya terintegrasi mengingat belum adanya *Grand Design* pengembangan aplikasi antar OPD, sehingga belum optimal pemanfaatannya. Salah satu diantaranya adalah penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaporan maupun sebagai sarana penilaian capaian kinerja individu;
- g. Tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s. d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum dilaksanakan secara menyeluruh;
- h. Belum optimalnya penguatan system manajemen SDM antara mengenai tindak lanjut hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum dilakukan menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan pegawai dalam suatu jabatan;
- i. Implementasi system akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga sudah berjalan, namun mengingat bahwa proses bisnis yang ada masih belum berdasarkan kinerja utama maka masih terdapat beberapa tujuan/sasaran serta indikator kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada penjabaran kinerja ke level dibawahnya, dan akan berdampak pada ketidaksesuaian pemberian *rewards and punishment*;
- j. Implementasi kebijakan pengawasan internal juga masih perlu ditingkatkan, tidak hanya sebatas terdapatnya kebijakan akan pengawasan serta sosialisasinya, namun lebih harus ditingkatkan pemanfaatannya dan harus dilakukan monitoring serta evaluasi atas kebijakan tersebut;
- k. Upaya-upaya peningkatan pada pelayanan publik sudah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, mulai dari perbaikan sarana prasarana maupun fasilitas lainnya, termasuk juga menerapkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh sebagian besar OPD. Namun, yang menjadi catatan adalah hasil dari survei tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dijadikan dasar perbaikan untuk menjawab permasalahan yang ada yang diharapkan oleh pengguna layanan.

Tabel II.19
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran
 Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif
 Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	45,94	70	65,62	Tidak Tercapai

Jika dilihat dari target pada indikator indeks reformasi birokrasi di akhir tahun RPJMD Kabupaten Bangka Barat sebesar 70, maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Tahun 2021 tidak mencapai target akhir RPJMD.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, yaitu:

- a. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dengan menetapkan prioritas perbaikan yang diperlukan baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Selanjutnya, menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road Map juga diintegrasikan dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024. Dalam upaya implementasi perubahan yang dicanangkan dalam Road Map tersebut perlu diikuti dengan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- b. Secara berjenjang melakukan internalisasi arah perubahan kepada seluruh pegawai sehingga mereka memahami arah perubahan dan dilibatkan dalam prosesnya. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya berupa pengumpulan dokumentasi semata, namun dititikberatkan pada perubahan budaya kinerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas assessor PMPRB di level Pemerintah Daerah maupun di level Perangkat Daerah dan memastikan bahwa assessor tersebut paham mengenai mekanisme serta implementasi Reformasi Birokrasi. Assessor diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penilai, namun juga mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diperlukan dimasing-masing unit kerja secara spesifik.
- d. Memastikan pembentukan kelembagaan daerah mengacu pada kinerja organisasi guna mewujudkan *performance based organization*.

- e. Melakukan assessment kepada seluruh pegawai dan menetapkan standar kompetensi untuk seluruh jabatan. Hal dari proses ini dijadikan dasar untuk rencana pengembangan kompetensi pegawai.
- f. Menyusun proses bisnis dan memastikan bahwa proses bisnis mengidentifikasi seluruh proses yang diperlukan untuk pencapaian kinerja organisasi. Rencana pengembangan e-gov juga dapat mengintegrasikan pelayanan dan mempercepat alur birokrasi.
- g. Memastikan keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi sehingga dapat mengukur kontribusi dari masing-masing individu dalam pencapaian kinerja organisasi.
- h. Menyusun kebijakan penguatan pengawasan, seperti kebijakan mekanisme penanganan gratifikasi dan WBS. Setelah tersusun diharapkan adanya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi atas kebijakan-kebijakan tersebut.
- i. Melakukan upaya pembangunan Zona Integritas sebagai unit kerja miniatur Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- j. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi-inovasi pelayan dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan di setiap unit pelayanan secara berkala.
- k. Menindaklanjuti hasil survei integritas terhadap jabatan dan organisasi, serta hasil survei pelayanan publik dan persepsi korupsi. Selain itu, pimpinan OPD aktif meningkatkan pemahaman setiap pegawai terhadap kinerja yang akan dicapai serta membangun budaya pelayanan prima dan anti korupsi di unit kerjanya.

Tabel II.20
Analisis Program Yang Mendukung Sasaran

No.	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5 = 4/3*100
	2.Terwujudnya sistem tata kelola pemda yang efektif	441.042.556.722,05	400.383.915.322.01	90,78
2,1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	558.260.000,00	468.058.150,00	83,84
2,2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.440.967.100,00	1.215.543.669,00	84,36
2,3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	199.622.000,00	191.107.400,00	95,73
2,4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	63.908.000,00	63.608.000,00	99,53
2,5	Program Kepegawaian Daerah	930.023.700,00	771.458.207,00	82,95
2,6	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	253.505.240,00	244.022.944,00	96,26
2,7	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	802.363.558,00	802.363.558,00	100
2,8	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	23.943.400,00	23.943.400,00	100
2,9	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	81.701.200,00	78.206.200,00	95,72
2,10	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	178.936.750,00	163.021.000,00	91,11

No.	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
2,11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	436.509.325.774,05	396.362.582.794,01	90,80

Tabel II.21
Efisiensi Penggunaan Sumber daya

No.	Sasaran Strategis	% Rata-Rata Capaian Kinerja Per Sasaran	% Penyerapan Anggaran Per Sasaran	Efektifitas
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya sistem tata kelola pemda yang efektif	99,86	90,78	Efektif

Sasaran Strategis 3 "Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan"

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.22
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2021
Terhadap Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	%	STATUS CAPAIAN
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100,00	Baik Sekali

Pada tahun 2021 untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Tabel II.23
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2021
Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	STATUS CAPAIAN
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	100,00	Tercapai

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada opini BPK terhadap laporan keuangan daerah tercapai. Dalam penyusunan capaian kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah, disepakati jika Opini BPK berupa WTP mendapat capaian 100 persen, jika Opini BPK berupa WDP mendapat Capaian 50 persen, dan jika Opini BPK berupa *disclaimer* mendapat Capaian 0 persen.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah dengan penguatan aparatur Pengelolaan Keuangan (PPK OPD, Bendahara) dan Aparatur Pengelolaan BMD (Pengurus Barang) di OPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan bimtek/ workshop/ sosialisasi/pendampingan/asistensi.
3. Meningkatkan sistem penatausahaan dan pengelolaan aset daerah.
4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

Tabel II.24
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2021
terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WTP	100,00	Tercapai

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang mandiri, didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, dan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;

Upaya-upaya yang akan diterapkan untuk meningkatkan pencapaian sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan” antara lain :

1. Menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam laporan keuangan daerah pada Tahun 2020, khususnya yang masih menjadi catatan pihak BPK;
2. Penguatan SDM yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, khususnya dalam penerapan peraturan terbaru;
3. Peningkatan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah;
4. Peningkatan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat.

Tabel II.25
Analisis Program
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2021

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	122.996.978.557,90	113.070.190.577,98	91,93
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.936.082.000,00	1.865.990.000,00	96,38
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	119.997.270.503,90	110.465.765.227,98	91,77
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.063.626.054,00	738.435.350,00	69,43

Tabel II.26
Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	91,93	100,00	Efektif

Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah”

Sasaran kemandirian finansial daerah ini didukung oleh satu indikator yaitu capaian derajat otonomi fiskal daerah. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan suatu rasio guna mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah khususnya Pemerintah Daerah. Meningkatnya PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Adapun salah satu rasio yang digunakan sebagai

tolok ukur dalam hal ini yaitu dengan membandingkan Total Realisasi PAD dengan Total Pendapatan Daerah.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.27
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8,44	8	6,78	84,75	Baik

Pada Tahun 2021, capaian Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebesar 6,78 persen. Pencapaian ini dibawah dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pemerintah daerah dimana target yang ditetapkan pada Tahun 2021 terkait DOFD sebesar 8 persen. Pencapaian DOFD Kabupaten Bangka Barat sebesar 6,78 persen didapat dari perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 59.693.536.555,86 dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 879.865.299.394,06 Detail perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II.28
Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	KOMPONEN PENDAPATAN	REALISASI	PORSI
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 59.693.536.555,86	6,78
2.	Dana Perimbangan	Rp 790.652.328.838,20	89,86
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 29.519.434.000,00	3,35
TOTAL PENDAPATAN TAHUN 2021		Rp. 879.865.299.394,06	

Sumber : BPPRD, 2022

Berikut dijelaskan secara lebih detail terkait pencapaian PAD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021:

a. Pajak Daerah

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berhasil mendapatkan penerimaan lewat pajak daerah sebesar Rp 20.041.982.581,75 dan berkontribusi sebesar 33,64 persen dari total PAD. Dari 11 sumber pajak daerah, kontribusi tertinggi yaitu pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, serta pajak BPHTB. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah di tahun sebelumnya (2020), realisasi penerimaan pajak di Tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp 568.420.910,05 atau 2,76 persen. Penurunan

penerimaan pajak daerah di Tahun 2021 tentunya sudah dapat diprediksi, penyebabnya adalah wabah virus Covid-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini tidak terkecuali di Kabupaten Bangka Barat. Salah satu jenis pajak yang mengalami penurunan paling signifikan adalah Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 1.439.977.582,00 atau 11,54 persen, hal ini disebabkan adanya perubahan aturan tentang Perubahan tariff Pajak Khusus PPJ (Pajak Penerangan Jalan).

Tabel II.29
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020-2021

NO	URAIAN PAJAK	REALISASI TAHUN 2020 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	63.051.026,00	58.074.135,00
2	Pajak Restoran	2.350.967.382,00	2.499.623.400,00
3	Pajak Hiburan	6.434.000,00	2.036.000,00
4	Pajak Reklame	385.287.548,00	439.140.276,25
5	Pajak Penerangan Jalan	12.370.951.168,00	10.930.973.586,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	769.690.029,80	848.663.554,50
7	Pajak Parkir	4.500.000,00	3.825.000,00
8	Pajak Air Tanah	165.386.115,00	125.247.730,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	244.531.228,00	284.777.575,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	2.907.435.845,00	3.603.904.833,00
11	BPHTB	1.342.169.150,00	1.245.716.492,00
TOTAL		20.610.403.491,80	20.041.982.581,75

Sumber : BPPRD, 2022

b. Retribusi Daerah

Dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berhasil mendapatkan penerimaan lewat retribusi daerah sebesar Rp 4.430.974.655,25 dan berkontribusi sebesar 7,44 persen dari total PAD. Dari sumber-sumber retribusi daerah, kontribusi tertinggi yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 2.337.250.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi daerah di tahun sebelumnya (2020) sebesar Rp 5.346.696.788,00, realisasi penerimaan retribusi di Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 915.722.132,75 atau 17,13 persen, pada retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami penurunan yang signifikan dari sebesar Rp 4.108.907.400,00 menjadi sebesar Rp 2.337.250.500,00 atau sekitar 43,11 persen, hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat sudah mempunyai jaminan kesehatan sehingga masyarakat yang berobat tidak dikenakan biaya lagi.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berhasil mendapatkan penerimaan lewat Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 3.994.903.752,78 dan berkontribusi sebesar 6,21 persen dari total PAD. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan di tahun sebelumnya (2020), realisasi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan di Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 861.536.317,48 atau 21,57 persen.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berhasil mendapatkan penerimaan lewat Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 30.250.418.148,60 dan berkontribusi sebesar 50,77 persen dari total PAD. Dari sumber-sumber lain-lain PAD yang sah, kontribusi tertinggi yaitu pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sejiran Setason sebesar Rp 17.535.361.743,00. Jika dibandingkan dengan realisasi lain-lain PAD yang sah di tahun sebelumnya (2020) sebesar Rp 34.352.322.322,51, realisasi lain-lain PAD yang sah di Tahun 2021 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 4.101.904.173,91 atau 11,94 persen. Hal ini disebabkan penurunan jumlah kunjungan pasien yang berobat ke RSUD dikarenakan oleh rasa kekawatiran akan pandemi covid-19.

Tabel II.30

Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2021

NO	KOMPONEN PAD	REALISASI 2020	%	REALISASI 2021	%
1	Pajak	Rp 20.610.403.491,80	32,05	Rp 20.041.982.581,75	33,64
2	Restibusi	Rp 5.346.696.788,00	8,31	Rp 4.430.974.655,25	7,44
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 3.994.903.752,78	6,21	Rp 4.856.440.070,26	8,15
4	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 34.352.322.322,51	53,42	Rp 30.364.139.248,60	50,77
TOTAL PAD		Rp 64.304.326.355,09		Rp 59.693.536.555,86	

Sumber : BPPRD, 2022

Jika dibandingkan dengan pencapaian DOFD tahun 2020 sebesar 7,77 persen, maka terjadi penurunan realisasi DOFD pada Tahun 2021 sebesar 0,99 persen.

Penurunan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Adanya perubahan aturan tentang perubahan tariff PPJ dan aturan pembebasan BPHTB bagi program PTSL;
2. Metode yang digunakan self Assessment sehingga wajib pajak yang menyetor pajak sering tidak sesuai dengan potensi pajak yang sebenarnya;
3. Tidak adanya PPNS Khusus yang menangani Pajak yang bisa menilai dan mengawasi sanksi terhadap penunggak pajak;
4. Wajib Pajak sarang burung wallet sulit ditemui karena banyak pemilik berdomisili diluar Bangka Barat.

Tabel II.31

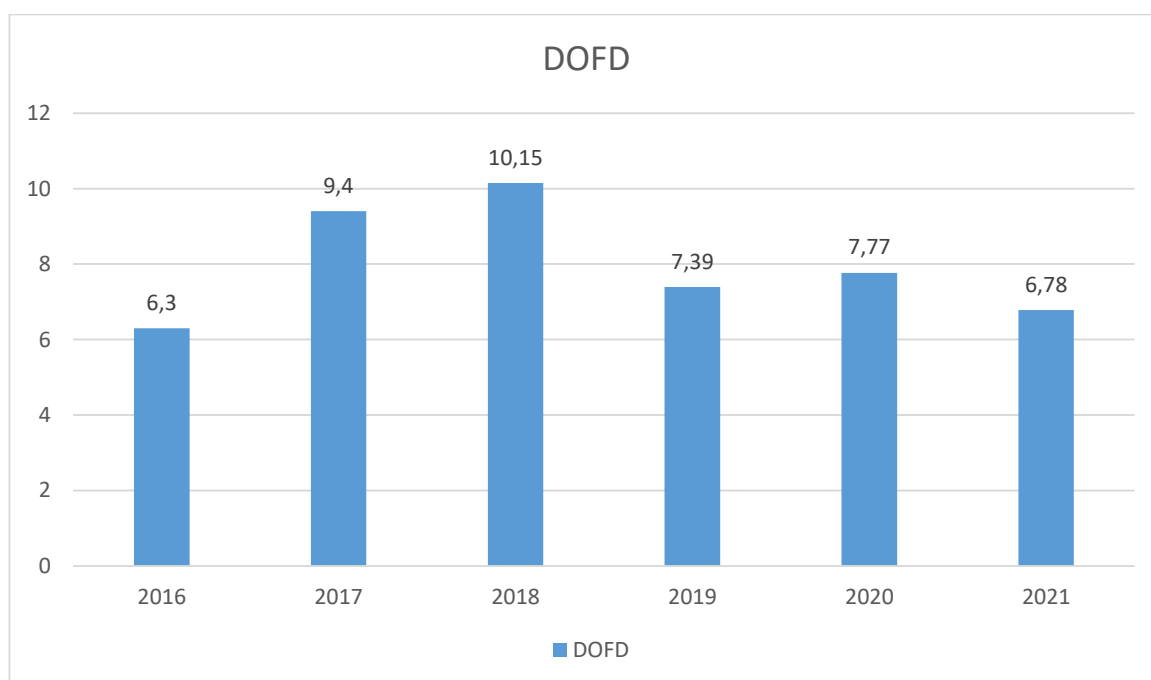
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	6,78	9,00	75,33	Tidak Tercapai

Dari pencapaian DOFD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebesar 6,78 persen, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 9,00 persen maka telah mencapai 75,33 persen sehingga target akhir masa RPJMD tidak tercapai .

Gambar 2.9

Capaian DOFD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021



Sumber : BPPRD, 2022

Dalam hal pencapaian target indikator DOFD, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah harus tetap berupaya untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah khususnya pada komponen pajak dan retribusi daerah. Strategi dan arah kebijakan terkait peningkatan DOFD antara lain melalui intensifikasi serta ekstensifikasi PAD.

Upaya-upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi serta ekstensifikasi antara lain:

- Memberikan surat peringatan kepada pengelola rumah makan/restoran/cafe yang selama ini belum melakukan pembayaran pajak restoran;
- Melakukan relaksasi denda untuk PBB P2;
- Kerjasama dengan operator telekomunikasi terkait SMS *Gateway* kepada wajib

- pajak;
- d. Berkoordinasi dengan BUMN dan swasta terkait potensi pajak yang ada di BUMN dan swasta;
 - e. Melakukan penyempurnaan tarif pajak dan retribusi daerah;
 - f. Melakukan penagihan-penagihan pajak terutang yang timbul;
 - g. Melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan, kejujuran, dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak;
 - h. Melakukan penyusunan *data base* potensi pajak;
 - i. Menyempurnakan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis aplikasi secara optimal;
 - j. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait yaitu kejaksaan sebagai pengacara negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam melakukan penagihan pajak dan piutang pajak;

Analisis Program

Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah			
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.305.234.825,00	1.088.901.725,00	83,42

Efisiensi Penggunaan Sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	83,42	84,87	Tidak Efektif

Sasaran Strategis 5 "Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel"

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam

rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.32
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2021
terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	69,82	72	96,97	Baik

Pada Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat adalah Nilai SAKIP Tahun 2020, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan Nilai **69,82** terhadap Nilai SAKIP Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berharap untuk nilai SAKIP Daerah Tahun 2021 dapat melebihi nilai pada tahun 2020.

Tabel II.33
Hasil Evaluasi Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi terhadap NILAI SAKIP Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun
2020

	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,26	23,55
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,80	16,07
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,14	11,20
d.	Evaluasi Internal	10	7,00	7,12
e.	Capaian Kinerja	20	12,04	11,88
	NILAI HASIL EVALUASI	100	69,24	69,82
	TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		B	B

Berdasarkan Evaluasi yang diberikan oleh Kemenpan RB Nilai SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2019, dan diharapkan target akhir RPJMD dengan Nilai 72 dapat dicapai.

Tabel II.34
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2021
Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	TARGET 2020	TARGET 2021	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	69,24	70	72	69,82	96,97	Belum Tercapai

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada Penilaian Kemenpan RB terhadap Nilai SAKIP Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Belum tercapai. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.

Faktor pendorong terhadap peningkatan capaian indikator nilai evaluasi SAKIP daerah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Melakukan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai arahan Kementerian PAN RB;
- b. Perbaiki komponen perencanaan kinerja melalui penggunaan aplikasi SIMDA perencanaan keluaran BPKP. Dalam penerapan aplikasi SIMDA perencanaan, terdapat 2 (dua) aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi 5 tahun perencanaan (RPJMD dan RENSTRA PD) yang berbasis desktop serta aplikasi tahun perencanaan (RKPD dan RENJA PD) yang berbasis website;
- c. Perbaiki komponen perencanaan kinerja dimana dalam penyusunan dokumen perencanaan selalu disertai dengan pelaksanaan reuiu oleh inspektorat dan pembinaan oleh pihak pemerintah provinsi berupa fasilitasi terkait pengendalian penyusunan dokumen perencanaan;
- d. Melakukan penyusunan perjanjian kinerja mulai dari tingkatan pemerintah daerah sampai dengan tingkat eselon terendah;
- e. Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja perangkat daerah pasca penandatanganan perjanjian kinerja;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menyusun laporan kinerja pemerintah daerah yang lebih komprehensif dan dilakukan reuiu oleh inspektorat terhadap laporan kinerja pemerintah daerah sebelum disampaikan kepada Kementerian PAN RB;
- g. Meningkatkan kualitas capaian kinerja dengan cara melakukan koordinasi rutin terkait pengendalian kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala (per triwulan);
- h. Melakukan evaluasi internal terhadap seluruh laporan kinerja perangkat daerah oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat dan memberikan rekomendasi hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti.

Tabel II.35
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel
Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	69,82	72	96,97	Tidak Tercapai

Capaian kinerja indikator nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target capaian di akhir Tahun RPJMD, masih menyisakan pekerjaan rumah untuk beberapa tahun kedepannya. Beberapa komponen SAKIP masih harus ditingkatkan, agar target akhir RPJMD terkait indikator nilai evaluasi SAKIP dapat tercapai.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat guna meningkatkan pencapaian nilai SAKIP pada tahun mendatang, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PAN RB beberapa alternatif solusi yang harus dilakukan antara lain :

- a. Melakukan reviu perbaikan terhadap perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah seperti : manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan pembangunan (*integrated development plan*) serta mekanisme *casecade* kinerja;
- b. *Casecade down* kinerja sampai level organisasi terendah perlu dibangun guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam RPJMD;
- c. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program, dengan sasaran strategis sehingga dapat meyakinkan bahwa terdapat efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kinerja;
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi pengelolaan program secara berkala dengan berfokus pada ketercapaian hasil program serta keterpaduan lintas perangkat daerah;
- e. Menyempurnakan aplikasi E-SAKIP agar dapat optimal digunakan untuk monitoring dan evaluasi kinerja serta terintegrasi dengan aplikasi lainnya, seperti aplikasi perencanaan dan penganggaran;
- f. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat dengan meningkatkan kapabilitas para evaluator agar mampu memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan
- g. Mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP yang ditunjang dengan pelaksanaan reviu kinerja berjenjang secara berkala di seluruh unit kerja.

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang akuntabel secara umum dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pengawasan internal daerah, serta oleh seluruh perangkat daerah untuk penyusunan perencanaan, perjanjian, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel II.36
Analisis Program
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2021

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	Nilai SAKIP Daerah	2.526.489.400,00	2.163.247.615,00	85,62
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.606.578.420,00	1.412.317.138,00	87,91
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	636.530.090,00	572.151.147,00	89,89
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	283.380.890,00	178.779.330,00	63,09

Tabel II.37
Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	85,62	96,97	Efektif

Sasaran Strategis 6 **“Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif”**

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.38
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2021
Terhadap Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70	60,16	85,94	Baik

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat

digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, dimana Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi **kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin**.

Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 adalah sebesar 60,16. Pencapaian ini dibawah target yang ditetapkan pada saat diperjanjikan yaitu sebesar 70.

Tabel II.39
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2021
Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,17	70	60,16	85,94	Menurun

Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya (tahun 2020) yang memperoleh nilai 64,17.

Perhitungan Indeks profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sehingga pengukuran Indeks Profesional ASN dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan berkesinambungan.

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

- a. **Pegawai ASN** guna sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN;
- b. **Instansi Pemerintah** guna sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional; serta
- c. **Masyarakat** yang dapat digunakan sebagai instrument kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Tabel II.40
Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 - 2021 Kabupaten Bangka Barat

NO	DIMENSI	BOBOT	Tahun 2020		Tahun 2021	
			HASIL	REALISASI	HASIL	REALISASI
1.	Kualifikasi	25	12,86	51,44%	12,83	51,32%
2.	Kompetensi	40	21,20	53%	17,17	42,93%
3.	Kinerja	30	25,13	83,77%	25,17	83,90%
4.	Disiplin	5	4,98	99,60%	4,99	99,80%
TOTAL		100	64,17		60,16	

Sumber : BKPSDM, 2022

Merujuk pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indeks penilaian profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 masih jauh dari target yang telah ditetapkan, terutama dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi penurunan pada dimensi Kualifikasi dan Kompetensi yaitu 0,03 poin dan 4,03 poin.

Salah satu instrumen dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah dimensi kualifikasi yang berdasarkan jenjang pendidikan ASN. Sedangkan indikator yang digunakan dalam pengukuran dimensi kompetensi adalah riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya.

Detail kualifikasi jenjang pendidikan pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.41
Kualifikasi ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Total Pegawai		Persentase %
	2020	2021	
SD	2	3	0.45
SMP Sederajat	19	13	0.45
SMA Sederajat	365	252	8.78
Diploma I	8	10	0.35
Diploma II	124	92	3.21
Diploma III	582	629	21.92
Diploma IV	45	43	1.50
Sarjana/S1	1.560	1745	60.80
Magister/Doktor (S2/S3)	73	83	2.89
Jumlah Total	2.778	2.870	

Sumber : BKPSDM, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Barat didominasi jenjang pendidikan Strata 1 sebanyak 1.745 orang atau 60.80 persen, sedangkan yang paling sedikit adalah jenjang pendidikan SD yang hanya berjumlah 3 orang atau 0,45 persen.

Beberapa faktor pendorong pencapaian Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 sebagai pedoman dalam pengukuran IP ASN yang dilengkapi aplikasi excel dari Badan Kepegawaian Negara.
- b. Rata-rata tingkat kesadaran PNS untuk menyusun SKP sudah sangat tinggi, hal ini didukung dengan adanya Kegiatan Penilaian Kinerja ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDMD dengan memonitoring dan mengevaluasi penyusunan SKP dan DP3 Pegawai secara berkala ke OPD - OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta unit kerja yang berada di Kecamatan - kecamatan.
- c. Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN Kabupaten Bangka Barat. (disandingkan dengan tahun 2020)

Beberapa faktor penghambat pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian beasiswa/bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar pada Tahun 2020 tidak dapat direalisasikan karena Pegawai yang sedang tugas belajar sedang dalam proses hukuman disiplin pegawai.
- b. Belum adanya pemetaan kebutuhan Pegawai dengan spesifikasi pendidikan lanjutan (S1, S2 dan dokter spesialis) yang dapat mendukung tercapainya Sasaran/ Tujuan RPJMD 2016 - 2021.
- c. Kurangnya minat Pegawai untuk meningkatkan kompetensinya melalui Diklat Teknis/ Fungsional, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatannya khususnya dimasa Pandemi Covid-19 ini.

Tabel II.42

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2021
Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	60,16	82,73	72,72	Tidak Tercapai

Melihat realisasi Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 masuk dalam kategori rendah, sementara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada akhir periode RPJMD (di tahun 2021) untuk target

indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah **kategori tinggi** (rentang nilai 80-90). Untuk mencapai target akhir RPJMD, tentunya masih banyak upaya yang harus dilakukan kedepannya.

Beberapa langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

- Melakukan Sosialisasi terkait Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan.
- Melakukan pemetaan kebutuhan Pegawai dengan spesifikasi pendidikan lanjutan (S1, S2 dan dokter spesialis) yang dapat mendukung tercapainya Sasaran/ Tujuan RPJMD 2021 - 2026.
- Memfasilitasi Pegawai Pejabat Eselon II, III dan IV untuk mengikuti Diklat Struktural sesuai dengan Jabatannya.
- Melakukan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu sebagai tindak lanjut diterapkannya Permenpan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
- Menyusun regulasi daerah yang mewajibkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya melalui Diklat Teknis/ Fungsional, Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/sejenisnya yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatannya baik secara Daring/ Online maupun tatap muka minimal 20 JP per tahun sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- Melakukan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemkab. Bangka Barat.
- Melakukan sosialisasi penerapan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.
- Menyusun Peraturan Bupati terkait diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Mensosialisasikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.
- Bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dalam rencana menerapkan Sistem penilaian Presensi Pegawai berbasis Aplikasi Mobile.

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang efektif didukung oleh program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Pengelolaan Kearsipan;
2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
6. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

9. Program Pemberdayaan Sosial;
10. Program Rehabilitas Sosial;
11. Program Penangan Bencana;
12. Program Penataan Desa;
13. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
14. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
15. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Tabel II.43
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
 Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2021
terhadap Realisasi Nasional/ Standar Nasional (jika ada)

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	Standar Nasional	(%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	60,16	77	78,12	Cukup

Tabel II.44
Analisis Program
 Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2021

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	Indeks Profesionalitas ASN	16,618,695,331.00	14,553,333,554.00	87,57
1.	Program Pengelolaan Kearsipan	74,912,950.00	70,911,650.00	94.66
2.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	68,399,750.00	68,399,750.00	100.00
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,217,532,780.00	946,921,450.00	77.77
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	722,681,460.00	712,670,850.00	98.61
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4,527,337,680.00	3,910,794,280.00	86.38
6.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,670,510,680.00	2,170,286,546.00	81.27
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	146,354,846.00	134,845,646.00	92.14
8.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	325,141,760.00	314,897,450.00	96.85
9.	Program Pemberdayaan Sosial	1,693,140,500.00	1,393,061,031.00	82.28
10.	Program Rehabilitas Sosial	2,305,740,625.00	2,288,449,701.00	99.25
11.	Program Penangan Bencana	2,214,900,000.00	1,914,427,700.00	86.43
12.	Program Penataan Desa	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
13.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	39,070,000.00	35,285,000.00	90.31
14.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	94,599,800.00	94,119,800.00	99.49
15.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	488,372,500.00	468,262,700.00	95.88

Tabel II.45
Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif	87,57	60,16	Tidak Efektif

Sasaran Strategis 7 "Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik"

Pengukuran sasaran "Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik" dilakukan melalui dua indikator yaitu Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Pelayanan Publik.

Capaian indikator kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.46
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik
Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	Persen	92,59	93	81,44	87,57	Baik
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Pelayanan Publik	Nilai	80,98	85	82,07	96,55	Baik

A. Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar didapat dari nilai rata-rata capaian SPM yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga dalam hal ini diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta aturan teknisnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun berdasarkan amanat dari peraturan perundang-undangan bahwa terdapat 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yang merupakan bidang pemenuhan Standar pelayanan Minimal adalah Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial.

Di akhir tahun 2021 yang lalu, pihak Kementerian Dalam negeri telah mengeluarkan aturan teknis perubahan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal yang mana dalam aturan tersebut secara otomatis menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal ini dilakukan karena peraturan terdahulu dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan lagi dan masih banyak hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur di dalam aturan tersebut. Namun untuk teknis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sejak tahun 2022 yang merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sampai saat ini oleh masing-masing seluruh daerah masih dalam proses penyesuaian dikarenakan banyak sekali hal-hal yang bersifat teknis yang harus dilaksanakan dan diterapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengampuh SPM yang memerlukan waktu untuk dilakukan penyesuaian.

Pada Tahun 2021, untuk capaian indikator Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar terealisasi sebesar 81,44% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 93% atau dengan tingkat capaian sebesar 87,57%. Jika di lihat dari perbandingan capaian tersebut dengan capaian tahun sebelumnya bahwa capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 11,15%. Adapun penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya wabah pandemic *Covid* -19 yang membuat banyak pelayanan terutama di bidang kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat waktu dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk tetap dilakukan pelayanan serta adanya perubahan definisi operasional cara penghitungan beberapa indicator yang membuat capaian indicator tersebut menjadi lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya.

Untuk detail capaian pada masing masing urusan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II.47

Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Capaian Tahun 2020

No.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2020	REALISASI 2021	STATUS
1	Urusan Pendidikan	62,25%	65,95%	Meningkat
2	Urusan Kesehatan	91,52%	92,01%	Meningkat
3	Urusan Pekerjaan Umum	93,20%	73,74%	Menurun
4	Urusan Perumahan	50%	50,00%	Tetap
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	62,76%	62,46	Menurun

No.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2020	REALISASI 2021	STATUS
6	Urusan Sosial	159,97%	100%	Menurun
CAPAIAN SPM		92,59%	81,44%	Menurun

Sumber : Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Dari 6 (enam) bidang urusan wajib pelayanan dasar terdapat 2 (dua) urusan yang capaiannya mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu urusan pendidikan dan kesehatan. Kemudian terdapat 1 (satu) urusan yang capaiannya tidak mengalami perubahan dari capaian tahun yang lalu yaitu pada urusan perumahan dan sedangkan 3 (tiga) urusan yang lain yaitu Pekerjaan Umum, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial capaiannya mengalami penurunan dari tahun yang lalu.

Dari kondisi di atas menyebutkan bahwa untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat memang belum dapat terlaksana dengan optimal. Tentunya ada banyak sekali factor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya yaitu kondisi yang bersifat situasional yang dalam hal ini bencana yang sangat berdampak dalam pelaksanaan pelayanan SPM di masyarakat. Kemudian memang tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan definisi operasional cara penghitung capaian SPM tahun 2020 dengan tahun 2021 ini mengalami perubahan walaupun tidak pada seluruh urusan pengampuhan SPM. Hal ini tentunya perlu sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyingkapi permasalahan SPM yang ada di daerah. terlebih dengan adanya kebijakan bahwa capaian kinerja pemerintah daerah yang salah satu muatannya adalah capaian penerapan SPM di daerah menjadi parameter dari penghitungan besaran dana transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Untuk itu, penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah harus dijadikan sebagai komitmen dari pemangku kebijakan serta perhatian bersama melalui integrasi SPM dalam proses pembangunan daerah sehingga penerapan SPM dapat terlaksana secara optimal.

Untuk capaian dari masing-masing urusan pengampuhan SPM tahun 2021 jika dibandingkan dengan target nasional dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel II.48
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Dibandingkan Dengan Target Nasional

No.	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET NASIONAL	KET
I	URUSAN PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Usia Dini	97,83%	100%	Tidak Tercapai
2	Pendidikan Dasar	94,53%	100%	Tidak Tercapai
3	Pendidikan Kesetaraan	5,50%	100%	Tidak Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN		65,95%	100%	Tidak Tercapai
II	URUSAN KESEHATAN			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	92,86%	100%	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	95,01%	100%	Tidak Tercapai

No.	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET NASIONAL	KET
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	95,73%	100%	Tidak Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	93,36%	100%	Tidak Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	93,36%	100%	Tidak Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	83,65%	100%	Tidak Tercapai
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	83,90%	100%	Tidak Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	87,97%	100%	Tidak Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	103,71%	100%	Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100%	Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	61,58%	100%	Tidak Tercapai
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	107,96%	100%	Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN		92,01%	100%	Tidak Tercapai
III	URUSAN PEKERJAAN UMUM			
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	92,48%	100%	Tidak Tercapai
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air Limbah Domestik	54,99%	100%	Tidak Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM		73,74%	100%	Tidak Tercapai
IV	URUSAN PERUMAHAN			
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Tercapai
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0%	100%	Tidak Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN		50%	100%	Tidak Tercapai
V	URUSAN SOSIAL			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandang dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL		100%	100%	Tercapai
VI	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tercapai
SUB URUSAN BENCANA DAERAH				
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	5,42%	100%	Tidak Tercapai

No.	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET NASIONAL	KET
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6,87%	100%	Tidak Tercapai
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	Tercapai
SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH				
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		62,46%	100%	Tidak Tercapai

Sumber: Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Dari gambaran di atas dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa penerapan SPM di daerah memerlukan peran serta pemangku kebijakan serta dukungan penganggaran dari lintas sektor. Penerapan SPM tidak dapat hanya dengan mengandalkan kekuatan dari APBD saja, namun pembiayaan dari sektor-sektor lain untuk optimalisasi penerapan SPM sangatlah penting. Seperti peningkatan peran serta pihak Pemerintah desa serta pihak perusahaan melalui forum *Cooperate Social Responsibility* sangatlah penting untuk menentukan keberhasilan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah. Yang mana nantinya tinggal diterjemahkan dalam bentuk kebijakan ataupun regulasi yang mengatur tentang peran serta dari pihak-pihak tersebut dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Adapun untuk penjelasan dari capaian SPM per masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Capaian urusan SPM bidang pendidikan di tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Hal ini dapat terlihat bahwa meningkatnya capaian sasaran SPM pada 2 (dua) indikator SPM bidang pendidikan yaitu Pendidikan Dasar serta Pendidikan PAUD. Namun hal ini terjadi sebaliknya pada indikator Pendidikan kesetaraan yang menurun jika di bandingkan dengan tahun yang lalu.

Tabel II.49

Data Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020 dan 2021
Kabupaten Bangka Barat

NO	INDIKATOR	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
		CAPAIAN	SASARAN		CAPAIAN	SASARAN	
1.	Pendidikan Dasar	31.822	36.731	86,64	35.475	37.527	94,53
2.	Pendidikan Kesetaraan	1.019	4.788	21,28	363	6.604	5,50
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	7.265	7.640	95,09	7.560	7.728	97,83
RATA-RATA CAPAIAN				62,25			65,95

Sumber : Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Untuk capaian indikator Pendidikan Dasar serta Pendidikan PAUD jika dilihat dari segi capaian serta sasaran di tahun 2021 lebih tinggi ketimbang tahun 2020. Hal ini dikarenakan

semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk bersekolah serta peningkatan jumlah Warga Negara yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar maupun PAUD yang jumlahnya berasal dari jumlah anak usia dini yang telah menamatkan pendidikan PAUD. Yang mana untuk pemenuhan indikator SPM ini di prioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu ketimbang bagi masyarakat umum lainnya. Terdapat 28.546 penerima layanan dari total 31.822 siswa yang mendapat pelayanan pendidikan di luar siswa yang kurang mampu. Hal ini juga diperkuat dengan adanya bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang menysasar kepada masyarakat kurang mampu baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Namun cakupan pemenuhan SPM untuk kategori SPM Pendidikan Dasar ini belum ditunjang dengan ketercukupan tenaga pendidik dengan jumlah yang minimal. Sehingga jika dilihat dari segi kemampuan serta ketercukupan SDM dengan kisaran kurang lebih sebesar 50%, masih belum cukup optimal untuk memenuhi mutu Standar Pelayanan Minimal. Di samping itu pula, capaian pada indikator ini belum mengakomodir jumlah siswa yang bersekolah pada pondok pesantren serta di luar Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan di dalam definisi operasional tidak memuat hal tersebut di atas. Sehingga sangat memungkinka sekali jika sebenarnya capaian terhadap Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) ini dapat melebihi angka yang telah tersajikan.

Sedangkan untuk indikator Pendidikan Kesetaraan yang jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran terhadap definisi operasional pada indikator ini sehingga membuat capaian di tahun 2021 lebih rendah dari tahun lalu. Adapun untuk capaian pendidikan kesetaraan dihitung dari sisa Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan di bagi dengan total Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun dengan artian bahwa Warga Negara yang menjadi sasaran pelayanan adalah warga negara yang berada/ masih berusia 7-18 tahun per tahun 2021. Sehingga untuk Warga Negara yang telah ataupun sedang belajar di luar rentang usia tersebut tidak menjadi bagian dari sasaran pemenuhan SPM ini. Terkait dengan permasalahan dari pemenuhan indikator SPM Pendidikan kesetaraan diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana serta terobosan untuk siswa yang putus sekolah yang dapat secara langsung “ditangkap” untuk melanjutkan di pendidikan kesetaraan. Namun pada kenyataannya saat ini untuk kondisi anak yang putus sekolah sangat sulit sekali untuk kembali melanjutkan sekolah, yang mana dalam hal ini didominasi oleh pengaruh lingkungan sekitar yang tidak mendukung anak tersebut untuk bersekolah. Kemudian dengan adanya pandemic Covid-19 sejak tahun 2020 yang lalu membuat kebijakan Pembelajaran Tatap Muka ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran Tatap Maya/*daring* yang sedikit banyak berdampak pada rasa malas anak-anak untuk bersekolah. Kemudian lokasi PKBM yang terbatas jauh dari tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor pendorong masih rendahnya angka kesetaraan.

Namun jika dibandingkan dengan target capaian pemenuhan SPM, dari ketiga indikator bidang pendidikan tidak terdapat satupun indikator yang memenuhi target (100%).

Sehingga dengan kondisi diperlukan kebijakan serta upaya Pemerintah Daerah yang lebih giat lagi untuk mencapai target SPM di tahun berikutnya.

2. Urusan Kesehatan

Dari 12 (dua belas) indikator SPM bidang Kesehatan, terdapat 5 (lima) indikator yang mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun lalu, 6 (enam) indikator yang mengalami peningkatan serta 1 (satu) indikator yang tetap capaiannya.

Tabel II.50

Data Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2020 dan 2021
Kabupaten Bangka Barat

NO	INDIKATOR	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
		CAPAIAN	SASARAN		CAPAIAN	SASARAN	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.651	3.833	95,25	3.459	3.725	92,86
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.505	3.628	96,61	3.348	3.524	95,01
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.521	3.543	99,38	3.344	3.493	95,73
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	11.371	12.182	93,34	10.931	11.708	93,36
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	35.918	36.722	97,81	36.890	37.506	98,36
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	89.508	127.449	70,23	111.404	133.183	83,65
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12.651	16.152	78,32	13.756	16.395	83,90
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	39.249	46.182	84,99	42.316	48.104	87,97
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	3.977	3.777	105,30	4.080	3.934	103,71
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	493	493	100,00	492	492	100,00
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga <i>Tuberculosis</i>	1377	1921	71,68	1.077	1.749	61,58
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	4.622	4.386	105,38	5.249	4.862	107,96
RATA-RATA CAPAIAN				91,52			92,01

Sumber : Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa kondisi pandemic Covid-19 sangat mempengaruhi dalam pencapaian pemenuhan SPM terlebih untuk bidang SPM Kesehatan. Terlebih yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung antara tenaga kesehatan dengan masyarakat. Adanya kekhawatiran masyarakat terhadap tenaga kesehatan di masa pandemic serta rasa takut untuk memeriksakan kesehatannya

dikarenakan adanya kekhawatiran masyarakat akan diagnose yang mengarah kepada Covid-19.

Kemudian untuk capaian SPM bidang kesehatan, jika dilihat dari table di atas bahwa terdapat beberapa indicator yang capaiannya di atas 100% yang mana jika dikaitkan dengan kebijakan dalam penerapan Standar pelayanan Minimal hal ini tidak dapat dibenarkan. Karena untuk tingkat capaian tertinggi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah 100%. Jika terdapat capaian yang berada di atas 100%, maka dapat dimungkinkan bahwa dalam proses penentuan sasaran mengalami kekeliruan. Namun kebijakan ini agak sedikit berbeda dengan yang terjadi pada Bidang Kesehatan, di mana menurut keterangan dari pihak OPD bahwa capaian di atas 100% tersebut memang benar adanya dan sudah berdasarkan data pelayanan yang berasal dari pihak Puskesmas.

Kemudian dari capaian di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 ini terdapat 5 (lima) indicator SPM bidang kesehatan yang mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun lalu yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus serta Pelayanan Kesehatan Orang Terduga *Tuberculosis*.

Kemudian untuk 6 (enam) indicator yang mengalami peningkatan serta 1 (satu) indicator yang tetap terdiri dari Pelayanan Kesehatan Balita; Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar; Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif; Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut; Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi serta Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) dan 1 indikator yang capaiannya tetap dari tahun kemarin adalah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat.

Dari 12 (dua belas) indikator SPM Bidang kesehatan dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang melebihi target, 1 (satu) indikator yang mencapai target dan 9 (sembilan) indikator yang tidak memenuhi target.

3. Urusan Pekerjaan umum

Penerapan Standar pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat. Pelaksanaan SPM urusan Pekerjaan Umum merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari kedua indicator tersebut hanya 1 (satu) indicator yang capaiannya meningkat jika di bandingkan tahun kemarin dan 1 (satu) indicator yang capaiannya lebih rendah dari tahun kemarin.

Tabel II.51

Data Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020 dan 2021
Kabupaten Bangka Barat

NO	INDIKATOR	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
		CAPAIAN	SASARAN		CAPAIAN	SASARAN	
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	183.401	199.823	91,78	184.768	199.784	92,48
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	189.052	199.823	94,61	109.856	199.784	54,99
RATA-RATA				93,20			73,74

Sumber: Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Pada indikator pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari jika dilihat dari capaian pelayanan SPM memang mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun yang lalu namun tidak terjadi pada cakupan sasaran yang mengalami penurunan dari tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan jumlah penduduk yang menjadi sasaran rumah tangga pemeriksaan air bersih oleh Dinas Kesehatan. Cakupan pemenuhan kebutuhan pokok air minum ini berasal dari jalur perpipaan (seperti PDAM, Pamsimas) dan non perpipaan (sumur). Di tahun 2021 yang lalu terdapat program kegiatan pembangunan sarana air bersih di 5 desa (Dendang, Simpang 3, Air Menduyung, Pangek Dan Berang) yang bersumber dari DAK untuk pembangunan pamsimas serta sumber APBD di Desa Pusuk.

Untuk sarana dan prasarana air minum kategori layak untuk kebutuhan air bersih adalah berupa saluran perpipaan atau sumur yang memiliki tutup dengan jarak dengan tanki septik lebih dari 10 meter, dengan kondisi air tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak berasa. Sampai dengan saat ini di Kabupaten Bangka Barat pada kategori pemenuhan air untuk kebutuhan air minum baru pada kategori layak belum mengarah ke akses aman yaitu sebesar 184.768 jiwa (92,48%). Hal ini dikarenakan masih banyak sarana dan prasarana air minum yang ada belum memenuhi syarat akses aman.

Di Kabupaten Bangka Barat sendiri masih ada masyarakat yang menggunakan akses air minum yang tidak layak yang berasal dari sungai dan pemandian sebesar 15.016 jiwa atau sekitar 7,52%. Untuk itu berbagai program pemerintah serta stakeholder lainnya masih sangat di butuhkan untuk memenuhi ketersediaan sumber air bersih di daerah.

Tabel II.52

Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat

No	Kecamatan	TARGET		REALISASI	
		Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani
		(unit Jiwa)	(unit Jiwa)	(unit Jiwa)	(unit Jiwa)
1	2	4	5	6	7
1	MUNTOK	52.056	17.984	30.592	3.480
2	SP TERITIP	29.716	4.760	23.572	1.384
3	JEBUS	21.864	556	20.348	960
4	PARITTIGA	34.476	1.512	31.320	1.644
5	KELAPA	34.096	2.376	27.580	4.140
6	TEMPILANG	27.576	1.124	23.044	3.408
Total		199.784	28.312	156.456	15.016
Persentase Layanan			14,17%	78,31%	7,52%

Kemudian terkait dengan capaian indikator Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang mana capaian di tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika di bandingkan dengan capaian tahun 2020 yang lain. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan cara penghitungan capaian indikator tersebut di mana pada tahun sebelumnya untuk capaiannya dihitung dari rumah tangga yang memiliki jamban layak dianggap sudah masuk kategori mendapat pelayanan SPM air limbah, namun untuk tahun 2021 cara penghitungan bukan menggunakan jamban layak lagi tetapi dilihat dari keberadaan tanki septik kriteria dasar (berupa cubluk di kawasan perdesaaan) dan layak (sesuai SNI). Untuk kawasan perdesaan persyaratan tanki septik hanya pada kriteria dasar saja namun untuk wilayah perkotaan persyaratan tanki septik tidak hanya dilihat dari yang telah memiliki kriteria dasar saja namun juga harus memenuhi kriteria layak.

Tabel II.53

Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Menurut Kategori Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat

No	Kecamatan	Kategori	TARGET	REALISASI				
			Total	Tanpa Akses	Akses Dasar	Akses Layak	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T
			(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)
1	MUNTOK	Perkotaan	10.270	9.093	0	1.177	0	0
		Perdesaan	2.744	69	2.676	0	0	0
2	SP TERITIP	Perkotaan	1.132	1.132	0	0	0	0
		Perdesaan	6.297	642	5.265	390	0	0
3	JEBUS	Perkotaan	1.593	1.588	0	5	0	0
		Perdesaan	3.873	74	3.771	28	0	0
4	PARITTIGA	Perkotaan	4.603	4.603	0	0	0	0
		Perdesaan	4.016	147	3.870	0	0	0
5	KELAPA	Perkotaan	2.108	2.108	0	0	0	0
		Perdesaan	6.416	549	5.747	120	0	0
6	TEMPILANG	Perkotaan	2.069	2.069	0	0	0	0
		Perdesaan	4.825	408	4.297	120	0	0
Total			49.946	22.482	25.625	1.840	0	0

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Jika di lihat dari table di atas, dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 49.946 RT, bahwa terdapat 27.464 RT yang telah terpenuhi pelayanan air limbah domestik yang mana angka ini diperoleh dari 25.625 RT yang telah memiliki akses dasar ditambah dengan 1.840 RT yang telah memiliki akses layak. Sehingga dari data tersebut terlihat bahwa masih terdapat 22.482 RT di Kabupaten Bangka Barat yang sarana pengolahan Air Limbah domestiknya tanpa akses. Perubahan kategori penghitungan inilah yang membuat penurunan capaian pada indikator pelayanan air limbah domestic jika di bandingkan dengan tahun 2020 yang lalu. Di samping itu pula, dari data

di atas dapat terlihat bahwa untuk jumlah tangga yang menjadi target pemenuhan SPM adalah 49.946 rumah tangga atau sekitar 199.784 jiwa dengan asumsi bahwa dalam 1 (satu) rumah tangga terdapat 1 orang Kepala Rumah Tangga beserta 3 orang anggota rumah tangga.

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dari 2 (dua) indikator tersebut keseluruhannya tidak ada yang mencapai target SPM. Sehingga perlu dilakukan percepatan serta peningkatan koordinasi dalam pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum ini.

4. Urusan Perumahan

Untuk capaian SPM bidang Perumahan terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebesar 100% (mencapai target) serta Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 0%. Sehingga untuk rata-rata capaian SPM bidang Perumahan di tahun 2021 adalah sebesar 50%. Untuk capaian SPM bidang perumahan jika di bandingkan dengan capaian tahun lalu tidak mengalami perubahan alias tetap. Hal ini dikarenakan untuk capaian indikator Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten dalam 3 tahun terakhir sebesar 0%. Hal ini dikarenakan belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan relokasi rumah masyarakat ke tempat yang aman, jauh dari tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya misalkan sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah sempadan sungai, daerah rawan bencana serta daerah-daerah lainnya yang masuk dalam kategori daerah yang rawan bahaya.

Tabel II.54

Data Capaian SPM Urusan Perumahan Tahun 2020 dan 2021
Kabupaten Bangka Barat

NO	INDIKATOR	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
		CAPAIAN	SASARAN		CAPAIAN	SASARAN	
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	2	2	100	2	2	100
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
RATA-RATA				50%			50%

Sumber: Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Capaian indikator SPM Perumahan pada Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana di tahun 2021 terealisasi sebesar 100% di mana untuk pemenuhan capaian SPM ini dilakukan kepada pembangunan 2 unit rumah masyarakat pasca bencana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/220.B/Disperkimhub/ 2021 tentang Penetapan penerima bantuan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021. Pembangunan 2 (dua) unit rumah ini dilakukan akibat bencana sambaran petir yang berlokasi di Kecamatan Simpang Teritip dan Tempilang.

Tabel II.55

Data penerima Bantuan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	NAMA	PENYEBAB BENCANA	LOKASI
1.	Sariato	Rumah terbakar akibat kWh PLN disambar petir	RT 02 Dusun I Desa Pangek Kecamatan Simpangteritip
2.	Robiah	Rumah terbakar akibat kWh PLN disambar petir	Jl. Raya Tanjung Niur Padang Bawah RT.002/1 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang

Penerapan SPM bidang Perumahan tidak dapat terlepas dari penerapan SPM bidang trantibumlinmas dimana untuk pemenuhan kedua SPM ini harus didukung dengan ketersediaan dokumen –dokumen penanganan daerah rawan bencana yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kajian resiko bencana, dokumen penanggulangan bencana serta dokumen rencana kontigensi yang mana sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki ketiga dokumen tersebut.

Ketiga dokumen tersebut merupakan dokumen yang sangat penting untuk dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah karena didalamnya termuat diantaranya titik-titik daerah rawan bencana beserta jumlah jiwa yang menjadi pijakan dalam perencanaan SPM khususnya yang berkaitan dengan kejadian bencana. Dengan keberadaan dari dokumen ini juga nantinya akan dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana dalam upaya penanggulangan bencana daerah.

5. Urusan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan SPM bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dilakukan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan 5 (lima) indikator yang terdiri dari:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan indikator:

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator:
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Adapun untuk rata-rata capaian SPM bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian di tahun 2020 yang lalu. Namun tentunya untuk capaian dari masing-masing indikator masing-masing berbeda antara tahun 2020 dengan 2021. Untuk indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di kawasan bencana pada tahun 2021 yang lalu. Sedangkan indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kegiatan kesiapsiagaan bencana yang salah satunya untuk penanganan bencana non alam Covid-19 yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan aparaturnya serta masyarakat. Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator lainnya capaiannya tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun lalu walaupun jika dilihat dari segi sasaran serta layanannya mengalami peningkatan jumlah sasaran Warga Negeranya.

Tabel II.56

Data Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2020 dan 2021
Kabupaten Bangka Barat

NO	INDIKATOR	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
		CAPAIAN	SASARAN		CAPAIAN	SASARAN	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	12	100	567	567	100
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	218	2765	7,88	150	2765	5,42
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	164	2765	5,93	190	2765	6,87
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	522	522	100	7042	7042	100
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	13	13	100	24	24	100
RATA-RATA				62,76			62,46

Rata-rata capaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 adalah 62,46%, di mana dari 5 (lima) indikator terdapat 3 (tiga) indikator yang mendapatkan capaian 100 persen alias memenuhi target. Namun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan di mana

pada tahun 2020 capaian nilai SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar 62,76%.

6. Urusan Sosial

Untuk penerapan SPM bidang Sosial dilakukan melalui 5 (lima) indikator yaitu

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel II.57

Data Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2020 dan 2021
Kabupaten Bangka Barat

NO	INDIKATOR	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
		CAPAIAN	SASARAN		CAPAIAN	SASARAN	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	332	332	100	816	816	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	642	642	100	11164	11164	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	469	269	174,35	5968	5968	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	8	8	100	4	4	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	431	431	100	3317	3.317	100
RATA-RATA				159,97			100

Sumber: Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Pada tahun 2021 capaian untuk masing-masing indikator SPM bidang sosial seluruhnya mencapai target (100%) dengan jumlah sasaran di masing-masing indikator mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan sasaran di tahun 2020 yang lalu. Total seluruh sasaran pada indikator SPM bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial sebanyak 17. 948 jiwa dengan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Tabel II.58

Data Jumlah Warga Negara Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2021

Kabupaten Bangka Barat

NO	JENIS LAYANAN	BANTUAN						TOTAL
		PERMAKAMAN	PKH BPNT	PKH	BPNT	KIP	KIS	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	164	32	7	80	9	524	816
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	342	0	0	0	3.679	7.143	11.164
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	580	217	233	1.399	0	3.539	5.968
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	4	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kementerian Sosial Tahun 2021

Tabel II.59

Capaian Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Persentase Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM	Persen	81,44	80	101,8	Tercapai

Jika melihat capaian kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal di Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sudah memenuhi target di akhir RPJMD. Tentu saja tugas selanjutnya adalah untuk mempertahankan nilai tersebut sampai dengan Tahun 2021, dengan cara memperbaiki komitmen dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal terhadap pelayanan publik yang berhak diperoleh warga negara, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui perangkat daerah melaksanakan urusan wajib yang bersifat dasar akan melakukan upaya penguatan, antara lain:

- Memperbaiki database khususnya terkait indikator yang digunakan dalam Standar Pelayanan Minimal;
- Memastikan penerapan Standar pelayanan Minimal dilaksanakan sesuai dengan pentahapan yang telah ditentukan yang mana harus memperhatikan mutu serta standar layanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Meningkatkan komitmen antar pemangku kepentingan untuk tetap focus dalam pemenuhan pelayanan dasar baik dari segi kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah;
- Penguatan pengendalian serta evaluasi terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat secara berkala oleh masing-masing tingkatan.

B. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau

kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Tabel II.60

Capaian Indikator Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Terhadap Capaian Tahun 2020

No.	Unit Pelayanan	SKM 2020	SKM 2021	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	77,37	84,47	Meningkat
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81,41	63,17	Menurun
3	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	82,1	77,53	Menurun
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86,62	88,49	Meningkat
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87,41	86,92	Menurun
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	82,10	84,85	Meningkat
7	RSUD Sejiran Setason	76,82	82,73	Meningkat
8	Kecamatan Muntok	81,90	81,92	Meningkat
9	Kecamatan Simpang Teritip	85,48	89,39	Meningkat
10	Kecamatan Jebus	81,49	81,34	Menurun
11	Kecamatan Parittiga	80,05	82,25	Meningkat
12	Kecamatan Kelapa	80,75	80,80	Meningkat
13	Puskesmas Muntok	78,42	84,29	Meningkat
14	Puskesmas Simpang Teritip	79,90	79,97	Meningkat
15	Puskesmas Kelapa	82,12	82,40	Meningkat
16	Puskesmas Sekar Biru	81,87	82,23	Meningkat
17	Puskesmas Puput	74,89	82,26	Meningkat
18	Puskesmas Tempilang	80,49	81,04	Meningkat
19	Puskesmas Jebus	83,25	83,87	Meningkat
20	Puskesmas Kundi	75,07	77,08	Meningkat
PEMKAB. BANGKA BARAT		80,98	82,07	Meningkat

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Jika dilihat tren nilai indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2021 cenderung meningkat, walaupun sempat terjadi penurunan pada masa pandemic covid 19 yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Perkembangan nilai indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat digambarkan pada grafik di bawah ini:

Diagram II.1

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014-2021



Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Tabel II.61

Capaian Kinerja Indikator Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik	Persen	82,07	85	96,55	TidakTercapai

Jika melihat capaian kinerja indikator kualitas pelayanan publik di Tahun 2021 sebesar 80,98 persen, jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yaitu sebesar 85 pesen maka baru tercapai 96,55 persen. Berkaca dari hasil survei kepuasan masyarakat pada perangkat daerah/unit perangkat daerah yang berhubungan dengan layanan publik, secara umum unsur layanan yang mendapatkan nilai rendah yaitu unsur sarana dan prasarana dan unsur waktu pelayanan. Dalam pelaksanaan penilaian SKM di Tahun 2021 terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan representatif pada OPD/UPP Pelayanan Publik. Hal ini karena keterbatasan anggaran dalam peningkatan sarana dan prasarana.
- Masih diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, agar dapat konsisten dalam waktu penyelesaian pelayanan.

Pelaksanaan survei masih *full* secara *offline*. Pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan survei (survei *online*) terutama pada masa pandemic *covid-19* ini akan sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2021, didukung program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bangka Barat Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang memiliki urusan pemenuhan bidang Standar Pelayanan Minimal serta pemenuhan pelayanan publik.

Berdasarkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, ditetapkan program pembangunan sebagai pendukung pencapaian sasaran pembangunan Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik sebanyak 29 program yang berada pada (sembilan) OPD yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Realisasi dari masing-masing program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian sasaran Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.62
Realisasi Program dalam Pencapaian Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Pendidikan	92.494.634.780,00	55.095.126.481,38	59,57
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	105.774.822.980,57	80.915.049.433,00	76,50
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	10.478.248.500,00	9.409.021.143,00	89,80
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	202.041.050,00	59.350.011,00	29,38
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	510.375.250,00	324.057.750,00	63,49
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	855.065.000,00	806.150.003,08	94,28
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.673.933.760,00	2.633.726.485,00	98,50
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	186.783.800,00	176.603.000,00	94,55
		Program Pengembangan Perumahan	130.000.000,00	54.948.350,00	42,27
		Program Kawasan Permukiman	2.962.314.000,00	2.917.932.850,00	98,50
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.413.092.500,00	4.360.756.501,00	98,81
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	627.767.000,00	623.054.935,00	99,25
		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	4.229.875.750,00	3.892.134.990,00	92,02
		Program penanggulangan bencana	2.824.066.950,00	2.734.582.550,00	96,83
		Program pencegahan, penanggulangan,	290.926.680,00	287.159.480,00	98,71

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
		penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			
		Program Perekonomian dan Pembangunan	569.975.070,00	485.152.000,00	85,12
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.536.871.012,00	5.913.412.300,00	90,46
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17.709.293.750,00	10.191.675.591,00	57,55
		Pogram pendaftaran penduduk	194.485.460,00	180.414.985,00	92,77
		Program Pencatatan Sipil	54.504.500,00	54.299.300,00	99,62
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.706.950,00	7.666.800,00	99,48
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	18.657.490,00	18.656.125,00	99,99
		Program Pengendalian Penduduk	386.375.660,00	365.386.660,00	94,57
		Program Pembinaan Keluarga Bencana (KB)	3.134.740.420,00	2.809.532.399,00	89,63
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	495.762.364,00	492.600.964,00	99,36
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.119.130.300,00	1.042.090.060,00	93,12
		Program Pemberdayaan Sosial	1.693.140.500,00	1.393.061.031,00	82,28
		Program Rehabilitas Sosial	2.305.740.625,00	2.288.449.701,00	99,25
		Program Penangan Bencana	2.214.900.000,00	1.914.427.700,00	86,43
			258.881.450.976,57	185.850.541.146,46	71,79

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 (diolah)

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pembangunan "Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik" Tahun 2021 telah dianggarkan sebesar Rp 258.881.450.976,57 yang bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021. Dari total anggaran tersebut, realisasi penyerapan anggaran yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk pencapaian sasaran sebesar Rp 185.850.541.146,46 atau 71,79% sehingga terjadi efisiensi penganggaran sebesar Rp 73.030.909.830,11 atau 28,21% yang terlihat pada table di bawah ini:

Tabel II.63

Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2021

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran (%)	Efektivitas
1.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	258.881.450.976,57	185.850.541.146,46	71,79	92,06	Efektif

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 (diolah)

Sasaran Strategis 8 "**Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah**"

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan orang yang melakukan investasi adalah disebut investor atau penanam modal. Begitu juga proses penanaman modal di wilayah Kabupaten Bangka Barat, dimana berdasarkan misi kedua pada RPJMD Periode 2016-2021 yakni **“Membangun perekonomian yang berbasis sumber daya lokal dan berdaya saing tinggi”** dan tujuan **“Meningkatkan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif sebagai bagian Kawasan Perhatian Investasi”** serta sasaran **Meingkatkan jumlah investasi/penanaman modal di daerah yang setiap tahun diukur pencapaian kinerjanya.**

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.64
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2021
terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	Milyar Rupiah	1.183 M	100 M	1.183	Baik Sekali

Pada Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per 31 Desember 2021 nilai realisasi investasi sementara sebesar Rp. 1.183.055.206.415,- laporan realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk Triwulan IV batas waktu untuk menyampaikan laporan tahun 2021 sampai dengan bulan maret tahun berikutnya. Nilai realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan para pelaku usaha rata-rata sudah melaporkan usahanya sehingga pencapaian indikator kinerjanya **“tercapai”** dan dapat dikatakan sangat berhasil.

Tabel II.65
Laporan Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	JENIS USAHA	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	STATUS PERUSAHAAN	CAPAIAN DALAM Milyar RUPIAH
					2021
1	Investasi Sektor Primer	PT. Swarna Nusa Sentosa	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMDN	1.054.363.170
2		PT. Hoki Alam Semesta Jaya	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	PMDN	9.713.000.000
3		PT. BAKIT INDAH MANDIRI	Pembesaran Crustacea Air Payau	PMDN	640.000.000
4		PT. Timah TBK	Pertambangan Bijih Timah	PMDN	17.129.036.841
5		PT. SINAR MUTIARA SEJAHTERA	Pertambangan Bijih Timah	PMDN	5.134.812.217
6		PT. THEP	Perkebunan Kelapa Sawit	PMA	808.592.876
7		PT. GSBL	Perkebunan Kelapa Sawit	PMA	6.186.518.361
8	Investasi Sektor Skunder	PT. Timah TBK	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	PMDN	824.000.021.000

No.	JENIS USAHA	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	STATUS PERUSAHAAN	CAPAIAN DALAM MILYAR RUPIAH
					2021
9		PT. GSBL	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	PMA	245.133.852
10		PT. Bangka Indah Cemerlang	Industri minyak mentah/murni kelapa sawit dan minyak goreng kelapa sawit	PMA	270.944.150.000
11	Investasi Sektor Tersier	PT. Energy Karya Persada	Ketenagalistrikan (Pembangkit Listrik Tenaga uap)	PMDN	33.126.918.655
12		PT. Perusahaan Listrik Negara	Transmisi Tenaga Listrik/PLTD Muntok	PMDN	10.712.659.443
13		PT. Trans Utama Raya	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	PMDN	100.000.000
14		PT. TIARA MARINE JAYA	Transportasi, gudang, komunikasi	PMDN	2.200.000.000
15		CV. DEAS PERSADA	Aktivitas penyewaan dan sewa hak guna usaha	PMDN	1.060.000.000
TOTAL					1.183.055.206.415

Berdasarkan LKPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020.

Tabel II.66
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2021
Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	TARGET 2020	TARGET 2021	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	Milyar Rupiah	417 M	100 M	100 M	1.183 M	1.183	Meningkat

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sudah tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran **sasaran pertama misi 2** pada indikator kinerja tersebut, realisasi capaian Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.765.973.206.415,- Berdasarkan skala capaian kinerja dikategorikan "**sangat berhasil**".

Faktor pendorong terhadap peningkatan capaian indikator Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Membuat peraturan tentang kebijakan penanaman modal, terutama mengenai fasilitas, layanan dan jaminan bagi investor jika melakukan investasi di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Giat pelaku usaha dalam melaporkan perkembangan usaha secara berkala;
- c. Melakukan sub system pengawasan dengan "jemput bola" kepada pelaku usaha yang kurang tertib;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam;

- e. Bekerjasama dengan OPD teknis terkait perbaikan infrastruktur yang menunjang investasi;
- f. Membuat peta investasi yang akan menjadi referensi bagi calon investor untuk dapat menanamkan investasinya di Kabupaten Bangka Barat;
- g. Menetapkan SOP untuk perizinan terkait Penanaman Modal seperti izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, dan izin prinsip penanaman modal.

Tabel II.67
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2021
terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	Milyar Rupiah	1.186 M	600 M	197,17	Tercapai

Capaian kinerja indikator Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 jika dibandingkan dengan target capaian di akhir Tahun RPJMD, sudah dapat dikatakan sangat baik/berhasil.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat guna meningkatkan pencapaian jumlah investasi dalam satu tahun untuk tahun-tahun mendatang, sesuai dengan yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani teknis bahwa:

- a. Menggali lebih banyak potensi daerah di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang belum dikelola dengan baik, sehingga ke depannya dapat menarik para investor;
- b. Mengoptimalkan secara berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam yang ada;
- c. Melengkapi insfrastruktur dan sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam mengambil peluang banyak investasi dari investor di luar Kabupaten Bangka Barat;

Dalam pencapaian sasaran Meningkatkan jumlah investasi/penanaman modal di daerah secara umum dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal di daerah Kabupaten Bangka Barat, serta oleh perangkat daerah lain dalam hal peningkatan sarana penunjang investasi di daerah seperti insfrastruktur. Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;

Tabel II.68

Analisis Program sasaran Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2021

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	1.179.870.630,00	865.161.500,00	73,33
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	542.438.880,00	516.791.750,00	95,27
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	10.000.000,00	9.995.000,00	99,95
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	145.365.000,00	126.875.000,00	63,09
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	357.241.750,00	211.499.750,00	59,20
5.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	124.825.000,00	-	-

Tabel II.69
Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah	73,33	1.183	Efektif

Sasaran Strategis 9 **“Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat”**

Capaian indikator kinerja Sasaran Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.70
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2021 Terhadap Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	STATUS CAPAIAN
Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Miliar Rupiah	4.069,20	891,04	21,89	Kurang

Sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat” ini diukur melalui nilai produksi tiga komoditi unggulan perkebunan rakyat di Kabupaten Bangka Barat meliputi karet, sawit dan lada. Dari data pada Tabel di atas diketahui bahwa target sasaran Meningkatkan Nilai Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat hanya tercapai sebesar 21,90% dari target yang ditetapkan, dengan capaian nilai produksi hanya sebesar 891,04 milyar rupiah.

Persoalan harga di tingkat petani belum sesuai dengan harga yang ditetapkan pada saat penetapan target capaian dan penurunan produksi komoditas utama diidentifikasi sebagai faktor utama yang menjadi penyebab target pencapaian nilai produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 tidak dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat dari data kondisi tanaman dan kontribusi perkebunan rakyat di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 menurut komoditas sebagaimana data yang disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.71
Tanaman Menghasilkan, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021

Komoditas	Tahun						Perubahan Terhadap 2020 (%)
		2017*	2018*	2019*	2020*	2021	
Lada	Tanaman Menghasilkan (Ha)	3.350,99	3.720,67	3.833,93	3.945,73	3.781,91	-4,15%
	Produksi (Ton)	4.905,94 ¹⁾	5.586,09 ²⁾	3.654,18	3.456,92	3.019,78	-12,65%
	Produktivitas (Ton/Ha)	1,46	0,79	0,95	0,88	0,798	-9,32%
	Harga komoditas per Kg (Rp)	68.000	55.293,92	47.719,00	49.236	79.650,23	61,77%
Karet	Tanaman Menghasilkan (Ha)	11.754,65	13.074,43	13.103,59	13270,69	13056,18	-1,62%
	Produksi (Ton)	13.621,54 ¹⁾	17.572,63 ²⁾	11.185,06	12066,14	10847,101	-10,10%
	Produktivitas (Ton/Ha)	1,16	0,70	0,85	0,91	0,83	-8,79%
	Harga Komoditas per Kg (Rp)	5.800	5.656,75	6.026,00	11500	11800	2,61%
Sawit	Tanaman Menghasilkan (Ha)	13.071,83	14.352,60	14.474,10	14983,65	15395,52	2,75%
	Produksi (Ton)	172.927,93 ¹⁾	276.789,88 ²⁾	165.024,89	220512,82	266406,954	20,81%
	Produktivitas (Ton/Ha)	13,23	10,02	11,40	14,72	17,30	14,91%
	Harga komoditas per Kg (Rp)	1.200	899,17	923,00	1287	1961,34	52,40%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021, 2022

Keterangan : * menggunakan data angka sementara; ¹⁾produksi semester 2; ²⁾produksi semester 1 + 2

Berdasarkan data pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa luas areal tanaman menghasilkan untuk komoditi perkebunan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 cenderung turun untuk komoditas lada sebesar 4,15%, komoditas karet sebesar 1,62%, sedangkan pada komoditas Kelapa Sawit mengalami peningkatan sebesar 2,75% bila dibandingkan dengan luas areal tanaman menghasilkan pada Tahun 2020. Dengan turunnya luas areal tanaman yang menghasilkan member dampak pada penurunan produksi komoditas lada sebesar 12,65% dengan diikuti penurunan produktivitas sebesar 9,32% dan penurunan produksi komoditas karet sebesar 10,10% dengan penurunan produktivitas sebesar 8,79%, sedangkan produksi komoditas kelapa sawit mengalami kenaikan sebesar 20,81% dengan diikuti kenaikan produktivitas sebesar 14,91% bila dibandingkan dengan produksi dan produktivitas pada tahun 2020.

Untuk Harga komoditas, untuk komoditas lada, karet dan kelapa sawit pada Tahun 2021 secara umum mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan harga masing-masing komoditas pada tahun 2020, dimana peningkatan harga komoditas lada sebesar 61,77%, Karet meningkat 2,61% dan kelapa sawit meningkat sebesar 52,40%.

Bila dilihat dari uraian di atas, untuk komoditas lada dan karet mengalami penurunan bila dilihat dari luas tanaman yang menghasilkan, produksi dan produktivitas dari dua komoditas tersebut, hal ini dipengaruhi oleh serangan penyakit busuk pangkal batang pada tanaman lada dan penyakit gugur daun pada tanaman karet yang semakin meluas dan sulit dikendalikan, sehingga mempengaruhi produksi dan produktivitas kedua komoditas tersebut.

Bila dilihat pola budidaya tanaman lada dengan sulitnya pengendalian penyakit kuning dan busuk pangkal batang pada tanaman lada. Penurunan produksi pada komoditas lada dan karet ini juga dipengaruhi kondisi iklim yang terjadi dimana sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, intensitas curah hujan cukup tinggi terutama didaerah Sentra perkebunan, tentunya dampak ini akan mempengaruhi dari kondisi tanaman, misalnya pada tanaman lada dengan intensitas curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi proses penyerbukan bunga lada dan kerontokan pada buah lada serta meningkatnya serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman lada.

Pada tanaman karet akibat curah hujan dan kelembaban udara yang tinggi akan memberikan dampak pada terganggunya proses penyadapan karet, meningkatnya serangan penyakit gugur daun yang mempengaruhi pada rendahnya produksi karet yang dihasilkan. Dengan kondisi ini mengakibatkan menurunnya semangat para petani, sehingga dampaknya dapat mempengaruhi dalam pola budidaya tanaman perkebunan yang menyangkut pola perawatan tanaman, pola pemupukan, hingga pola pemanenan. Hal ini berakibat kepada menurunnya produktivitas tanaman dan meningkatnya kehilangan hasil akibat tidak dilakukannya pemanenan hasil.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terjadi peningkatan pada komoditas kelapa sawit, dimana hal ini disebabkan dengan meningkatnya harga TBS kelapa sawit member dampak positif pada pola budidaya tanaman kelapa sawit yang menyangkut perawatan dan

pemupukan tanaman kelapa sawit dalam upaya peningkatan hasil produksi. Peningkatan produksi tanaman kelapa sawit ini juga didorong oleh penggunaan benih unggul ditingkat petani kelapa sawit yang telah memasuki pada fase tanaman yang menghasilkan.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dihadapi tersebut memberi dampak pada penurunan produksi pada beberapa komoditas utama terutama lada dan karet. Walaupun harga dari tiga komoditas utama mengalami kenaikan, tetapi masih belum sesuai dengan penetapan harga pada saat penyusunan target capaian RPJMD Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021, sehingga tidak dapat mencapai angka target yang telah ditetapkan.

Untuk perbandingan capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat tahun 2021 terhadap capaian tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.72

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2021 Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2020)

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	%	STATUS CAPAIAN
Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Miliar Rupiah	592,67	891,04	150,34	Meningkat

Target sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat hanya tercapai sebesar 21,90% dari target yang ditetapkan, dengan capaian nilai produksi hanya sebesar 891,04 milyar rupiah. Apabila dibandingkan dengan capaian nilai produksi pada Tahun 2020, capaian nilai produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat di Tahun 2021, pertumbuhannya mengalami peningkatan sebesar 150,34% atau sebesar 298,37 milyar rupiah.

Tabel II.73

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Miliar Rupiah	891,04	4.069,20	21,89	Tidak Tercapai

Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja nilai produksi komoditas unggulan perkebunan rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, hanya

memberikan kontribusi sebesar 21,90% dari Target Akhir Capaian RPJMD Kabupaten Bangka Barat.

Indikator kinerja sasaran meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat didukung oleh beberapa program yaitu antara lain:

Tabel II.74

Analisis Program Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2021

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1.	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	136.965.840,00	135.210.000,00	98,72
2.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	343.580.500,00	316.912.925,00	92,24
	TOTAL	480.546.340,00	452.122.925,00	95,48

Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari perbandingan realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.75

Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	95,48	21,90	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2021 maka realisasi anggaran sebesar 95,48% disbanding dengan realisasi kinerja sebesar 21,90% menunjukkan kurang adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 73,58%.

Sasaran Strategis 10 "Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan"

Untuk mengukur pencapaian sasaran "Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan" digunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut.

Tabel II.76

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2021 Terhadap Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,29	69,21	109,35	Baik Sekali

Perhitungan IKLH diukur dari 3 (tiga) parameter/indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH) dengan bobot untuk masing-masing parameter sebesar 30 persen untuk IKA, 30 persen untuk IKU dan 40 persen untuk ITH.

Terdapat perubahan nomenklatur parameter terakhir dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Lahan yang pada tahun 2020 indeks ini disebut dengan Indeks Tutupan Hutan (ITH) sedangkan pada tahun 2021 menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebesar 37,16. Jika dibandingkan dengan Indeks Tutupan Hutan tahun Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 sebesar 37,08, ada kenaikan indeks sebesar 0,08 poin.

Berdasarkan ketiga parameter tersebut, maka diperoleh IKLH Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebesar 69,21

Tabel II.77

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2021 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,29	63,29	69,21	109,35	Menurun

Pada Tahun 2021, IKLH Kabupaten Bangka Barat terealisasi sebesar 69,21 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 63,29 persen, maka tercapai 109,35 persen dengan kategori "Tercapai". Jika dibandingkan dengan IKLH Tahun 2020 sebesar 63,29 persen, maka terjadi peningkatan indeks sebesar 46,06 poin.

Pada Tahun 2021, parameter untuk perhitungan IKA yang diuji oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan hasil pengujian didapat nilai indeks kualitas air sebesar 65,79. Jika dibandingkan dengan IKA Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebesar 70,00, Indeks Kualitas Air Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan indeks sebesar 4,21 poin.

Tabel II.78

Perhitungan Indeks Pencemaran Air Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

INDEKS KUALITAS AIR (IKA)
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021

No	Nama Sungai	Bulan	TSS	DO	BOD	COD	Posfat	Fecal Coli	Total Coliform	Pij	Status Mutu Air
1	Kampak Hulu	Maret	6,25	4,23	2,52	17,5	0,14	4,00	6,00	0,75	Memenuhi
2	Kampak Tengah	Maret	7,22	4,03	2,72	20,5	0,174	1,80	1,80	0,80	Memenuhi
3	Kampak Hilir	Maret	8,16	4,03	2,82	21,0	0,194	1,80	1,80	0,81	Memenuhi
4	Kampak Hulu	Juni	7,00	4,34	2,44	13,6	0,0312	49,00	1.600,00	0,72	Memenuhi
5	Kampak Tengah	Juni	6,00	4,16	2,62	14,5	0,0312	31,00	35,90	0,73	Memenuhi
6	Kampak Hilir	Juni	6,00	4,07	2,71	15,0	0,0312	170,00	350,00	0,76	Memenuhi
7	Kampak Hulu	September	4,50	4,51	2,45	13,4	0,189	1,80	1,80	0,71	Memenuhi
8	Kampak Tengah	September	4,50	4,31	2,65	16,2	0,159	1,80	1,80	0,74	Memenuhi
9	Kampak Hilir	September	4,00	4,21	2,55	18,0	0,182	1,80	1,80	0,76	Memenuhi
10	Kampak Hulu	November	11,00	4,4	2,43	14,5	0,0312	1,80	1,80	0,70	Memenuhi
11	Kampak Tengah	November	3,00	4,21	2,62	16,4	0,0312	1,80	1,80	0,72	Memenuhi
12	Kampak Hilir	November	3,00	4,12	2,72	17,1	0,0312	1,80	1,80	0,74	Memenuhi
13	Antan Hulu	Maret	3,50	4,23	2,72	19,8	0,136	7,80	13,00	0,76	Memenuhi
14	Antan Tengah	Maret	6,00	4,03	2,92	19,1	0,153	7,80	11,00	0,80	Memenuhi
15	Antan Hilir	Maret	10,80	4,03	2,82	21,8	0,126	2,00	4,50	0,80	Memenuhi
16	Antan Hulu	Juni	6,00	4,78	2,34	12,9	0,0312	110,00	170,00	0,65	Memenuhi
17	Antan Tengah	Juni	4,50	4,39	2,54	13,8	0,0312	39,00	70,00	0,70	Memenuhi
18	Antan Hilir	Juni	3,00	4,19	2,74	15,5	0,0312	32,00	38,00	0,74	Memenuhi
19	Antan Hulu	September	2,50	4,44	2,47	17,2	0,0534	6,80	9,30	0,70	Memenuhi
20	Antan Tengah	September	2,50	4,34	2,66	17,4	0,0657	1,80	1,80	0,72	Memenuhi
21	Antan Hilir	September	2,50	4,13	2,86	19,5	0,092	1,80	1,80	0,76	Memenuhi
22	Antan Hulu	Oktober	3,00	4,20	2,70	13,8	0,0312	1,80	1,80	0,73	Memenuhi
23	Antan Tengah	Oktober	3,00	4,10	2,80	15,2	0,0312	1,80	4,00	0,75	Memenuhi
24	Antan Hilir	Oktober	3,00	4,00	2,90	18,5	0,0312	9,30	22,00	0,77	Memenuhi
25	Sukal Hulu	April	3,50	4,33	2,21	11,7	0,164	17,00	33,00	0,71	Memenuhi

No	Nama Sungai	Bulan	TSS	DO	BOD	COD	Posfat	Fecal Coli	Total Coliform	Pij	Status Mutu Air
26	Sukal Tengah	April	5,50	4,13	2,42	13,1	0,153	7,00	540,00	0,76	Memenuhi
27	Sukal Hilir	April	11,55	4,03	2,82	19,8	0,145	21,00	1.600,00	0,82	Memenuhi
28	Sukal Hulu	Juni	7,00	4,52	2,62	14,3	0,0312	21,00	79,00	0,68	Memenuhi
29	Sukal Tengah	Juni	8,00	4,43	2,71	15,2	0,0312	31,00	70,00	0,70	Memenuhi
30	Sukal Hilir	Juni	5,00	4,25	2,9	16,0	0,0312	13,00	70,00	0,74	Memenuhi
31	Sukal Hulu	September	3,50	4,21	2,74	17,1	0,177	1,80	1,80	0,75	Memenuhi
32	Sukal Tengah	September	4,00	4,11	2,84	19,8	0,187	1,80	1,80	0,78	Memenuhi
33	Sukal Hilir	September	5,00	4,02	2,87	20,3	0,199	4,00	13,10	0,78	Memenuhi
34	Sukal Hulu	November	4,00	4,10	2,83	11,0	0,0308	29,20	39,00	0,73	Memenuhi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Untuk perhitungan IKU, telah dilakukan pengujian atas kualitas udara di Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan di beberapa titik pantau yaitu transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran dan didapat hasil indeks kualitas udara pada tahun 2021 sebesar 89,71 didapat dari rata-rata hasil pengukuran NO₂ Udara Ambien dan SO₂ udara Ambien. . Jika dibandingkan dengan IKU Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebesar 91,52 , Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan indeks sebesar 1,81 poin.

Tabel II.79
Hasil Pengukuran NO₂ Udara dan SO₂ Udara Ambien
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Indeks Kualitas Udara perencana dalam Kabupaten Bangka Barat

Tahun 2021

NO	Kabupaten	Kecamatan	Peruntukan	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Rata-Rata NO ₂	Rata-Rata SO ₂	Rata-Rata NO ₂	Rata-Rata SO ₂	Indeks AQI	Indeks SMI	Icu	IKU Kabupaten/Bora
				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³				
1	Bangka Barat	Kelapa	Transportasi	5,04	25,78	5,04	25,78	8,75	15,88	0,22	0,79	0,51	77,42
			Industri	8,73	10,60	8,73	10,60						
			Pemukiman	15,10	18,43	15,10	18,43						
			Perkantoran	6,12	8,72	6,12	8,72						
			BLANK	<0,41	<2,57								
2	Bangka Barat	Pant Tiga	Transportasi	13,09	10,03	13,09	10,03	8,61	10,68	0,22	0,53	0,37	84,75
			Industri	12,50	4,93	12,50	4,93						
			Pemukiman	6,33	16,73	6,33	16,73						
			Perkantoran	2,53	11,01	2,53	11,01						
			BLANK	<0,41	<2,57								
3	Bangka Barat	Simpang Teritip	Transportasi	3,94	6,92	3,94	6,92	5,18	4,36	0,13	0,22	0,17	95,90
			Industri	7,43	4,20	7,43	4,20						
			Pemukiman	2,91	2,57	2,91	2,57						
			Perkantoran	6,45	3,75	6,45	3,75						
			BLANK	<0,41	<2,57								

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Tabel II.80

Indeks Standar Pencemaran Udara

SPU	Pencemaran Udara Level	Dampak kesehatan
0 - 50	Baik	tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia atau hewan.
51 - 100	Sedang	tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka.
101 - 199	Tidak Sehat	bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.
200 - 299	Sangat Tidak Sehat	kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.
300 - 500	Berbahaya	kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang

SPU	Pencemaran Udara Level	Dampak kesehatan
		serius pada populasi (misalnya iritasi mata, batuk, dahak dan sakit tenggorokan).

Sumber : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP 45 / MENLH / 1997

Dengan nilai IKU Kabupaten Bangka Barat sebesar 91,52, masuk dalam kategori "Sedang". Meskipun kualitas udara Kabupaten Bangka Barat dikategorikan Sedang, namun kondisi ini tetap harus menjadi perhatian karena semakin banyaknya sumber emisi udara baik dari kendaraan bermotor maupun dari kegiatan usaha.

Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan" pada Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap regulasi dan koordinasi antar instansi dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan;
2. Pelayanan permohonan izin lingkungan;
3. Kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
4. Penanaman ruas jalan dengan pohon perindang dan pembuatan taman/ penyediaan ruang terbuka hijau di tempat strategis;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan air limbah domestik;
6. Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yaitu pada indeks 70, maka dengan nilai IKLH Tahun 2021 69,21 masih belum. Capaian terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 98,87 persen.

Tabel II.81

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	69,21	70,00	98,87	Tidak Terpenuhi

Program dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yang berkaitan dengan sasaran antara lain :

1. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Persampahan;
4. Program Penataan Bangunan Gedung;

5. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
7. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
8. program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)

Tabel II.82

Analisis Program

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2021

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	22,695,634,990.72	22,278,834,407.72	98.16
1.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	36,309,900.00	35,209,900.00	96.97
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	204,192,850.00	171,096,050.00	83.79
3.	Program Pengelolaan Persampahan	6,486,768,190.00	6,275,776,387.00	96.75
4	Program Penataan Bangunan Gedung	15,364,263,140.72	15,271,266,220.72	99.39
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	403,427,510.00	350,884,650.00	86.98
6	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	66,172,900.00	66,172,900.00	100.00
7	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	96,700,500.00	72,184,550.00	74.65
8	program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	37,800,000.00	36,243,750.00	95.88

Tabel II.83

Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	98,16	69,21	Tidak efektif

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

1. CAPAIAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

a. Dasar Hukum

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.08.309168/2021 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 terkait Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

b. Gambaran Umum

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Untuk Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat melalui Bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan menerima tugas pembantuan yang berasal dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total pagu anggaran sebesar Rp 2.609.015.000,00 yang digunakan untuk membiayai 5 kegiatan, antara lain :

1. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
2. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;
4. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;
5. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;

c. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan ini diterima dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk kemudian dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat melalui bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian. Tugas pembantuan yang harus dilaksanakan yakni program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 (lima) buah, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN
1.	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	120.000.000
2.	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	2.236.850.000
3.	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	10.000.000
4.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	142.165.000
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	100.000.000
	TOTAL PAGU KEGIATAN	2.609.015.000

Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

NO.	NAMA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	a) Terehabilitasi dan/atau meningkatnya fungsi jaringan irigasi; b) Meningkatkan luas areal tanam dan/atau indeks pertanaman; c) Memberikan peningkatan terhadap partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapokton terutama dalam pengelolaan jaringan irigasi; d) Terbangunnya sistem irigasi perpompaan sebanyak 1000 unit untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; e) Meningkatkan ketersediaan air sebagai suplai pada lahan pertanian tanaman pangan.
2.	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	a) Meningkatkan indeks pertanaman dan/atau meningkatkan produktivitas; b) Memberikan peningkatan terhadap partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan terkait dengan pengelolaan lahan pertanian rawa
3.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	a) Menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyaluran maupun pembayaran pupuk bersubsidi; b) Tersedianya pupuk bersubsidi kepada petani secara tepat waktu dengan mutu terjamin dan dengan harga eceran sesuai dengan ketetapan pemerintah
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	a) Terselenggaranya tertib administrasi secara efektif dan efisien; b) Tersusunnya pelaporan yang sistematis, transparan dan akuntabel.

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

NO.	NAMA KEGIATAN	REALISASI
1.	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Terealisasinya kegiatan pembangunan embung pertanian untuk kelompok tani Karya Tani di Dusun Taragunung Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip.
2.	Perluasan dan	Terselenggaranya kegiatan Pengolahan Lahan Optimasi

NO.	NAMA KEGIATAN	REALISASI
	Perlindungan Lahan Pertanian	Lahan Rawa untuk Gapoktan Tunas Muda Desa Air Nyatoh Kec.Simter, Gapoktan Tebing Jaya Desa Tebing Kec.Kelapa, Gapoktan Sinar Belawang Desa Mancung Kec.Kelapa, Poktan Temiang Sari I Dusun Belit Desa Dendang Kec.Kelapa, Poktan Prima Tani Dusun Kamat Desa Simpang Yul Kec.Tempilang, Gapoktan Bukit Mempari Sejahtera Desa Pebuar Kec.Jebus
3.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida secara tepat guna dan tepat sasaran untuk kelompok tani; Tersedianya pupuk bersubsidi untuk kelompok tani yang ada di Kabupaten Bangka Barat;
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan sebanyak 1 paket untuk masing-masing kegiatan

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

NO.	NAMA KEGIATAN	REALISASI
1.	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Terealisasinya kegiatan pembangunan embung pertanian untuk kelompok tani Karya Tani di Dusun Taragunung Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip.
2.	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Terselenggaranya kegiatan Pengolahan Lahan Optimalisasi Lahan Rawa untuk Gapoktan Tunas Muda Desa Air Nyatoh Kec.Simter, Gapoktan Tebing Jaya Desa Tebing Kec.Kelapa, Gapoktan Sinar Belawang Desa Mancung Kec.Kelapa, Poktan Temiang Sari I Dusun Belit Desa Dendang Kec.Kelapa, Poktan Prima Tani Dusun Kamat Desa Simpang Yul Kec.Tempilang, Gapoktan Bukit Mempari Sejahtera Desa Pebuar Kec.Jebus
3.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida secara tepat guna dan tepat sasaran untuk kelompok tani; Tersedianya pupuk bersubsidi untuk kelompok tani yang ada di Kabupaten Bangka Barat;
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan sebanyak 1 paket untuk masing-masing kegiatan

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Pertanian RI	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.08.309168/2020	<p>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian</p> <p>Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian</p> <p>Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida</p> <p>Kegiatan Dukungan</p>	Kab.Bangka Barat	Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Bangka Barat	<p>Rp 2.509.015.000,00</p> <p>Rp 120.000.000,00</p> <p>Rp 2.236.850.000,00</p> <p>Rp 10.000.000,00</p> <p>Rp 142.165.000,00</p> <p>Rp. 100.000.000</p>	<p>Rp,1.860.604.000,00</p> <p>Rp 120.000.000,00</p> <p>Rp 1.633.400.000,00</p> <p>Rp 6.400.000,00</p> <p>Rp 100.804.000,00</p> <p>Rp. 72.515.205,00</p>	<p>74,47</p> <p>100,00</p> <p>73,02</p> <p>64,00</p> <p>70,91</p> <p>72,52</p>	<p>Terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian secara optimal</p> <p>Tersedianya irigasi perpompaan di desa-desa yang membutuhkan</p> <p>Terlaksananya perbaikan infrastruktur air dan lahan</p> <p>Terselenggaranya penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi secara tepat sasaran</p> <p>Terselenggaranya penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi secara tepat sasaran</p> <p>Tersedianya laporan yang sistematis dan</p>		

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian						akuntabel untuk keperluan pelaporan		

2. CAPAIAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Untuk tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya dan hanya melaksanakan Tugas Pembantuan yang berasal dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

3. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2021 antara lain :

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, yakni sehubungan dengan tidak adanya dana pendampingan dari APBD, hal ini tentu saja berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan tugas pembantuan yang diberikan tersebut.
2. Perubahan Pedum Kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Tahun 2021 yang awalnya berupa bantuan pemerintah (banpem) beralih ke swakelola tipe II. Peralihan pedum ke swakelola tipe II ini berlangsung dalam tenggat yang lama, sedangkan Kab.Bangka Barat telah melakukan pencairan/realisasi di awal waktu. Oleh karena itu, untuk mengurus perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Dikarenakan perubahan waktu peralihan antara banpem dan swakelola ini, terjadi keterlambatan pelaksanaan di bulan Oktober, kondisi curah hujan meningkat sehingga menyulitkan percepatan pekerjaan.
4. Sulitnya mencari tukang dan tenaga kerja di lahan pertanian dikarenakan masyarakat yang beralih ke mata pencaharian penambang timah dikarenakan naiknya harga timah.

4. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Keberhasilan pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan tentu saja tetap membutuhkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait baik di tingkat daerah maupun pusat. Selain itu kegiatan ini juga memerlukan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam hal pengawalan anggaran dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.

Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya dapat memberikan arahan operasional terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan dan mampu menciptakan koordinasi terhadap pengawasan pupuk dan pestisida.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Adapun untuk tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui :

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)nya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.1

Tabel Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

3. Realisasi

Untuk realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan pada Tahun 2021 dan Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.2

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2020	SASARAN 2020	ANGKA 2020	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	TARGET CAPAIAN
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	31.822	36.731	86,64	35.475	37.527	94,53	100 %
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.019	4.788	21,28	363	6.604	5,50	100 %
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	7.265	7.640	95,09	7.560	7.728	97,83	100 %
RATA-RATA CAPAIAN					62,25			65,95	

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa capaian urusan SPM bidang pendidikan di tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Hal ini dapat terlihat bahwa meningkatnya capaian sasaran SPM pada 2 (dua) indikator SPM bidang pendidikan yaitu Pendidikan Dasar serta Pendidikan PAUD. Namun hal ini terjadi sebaliknya pada indikator Pendidikan kesetaraan yang menurun jika di bandingkan dengan tahun yang lalu. Adapun dari masing-masing indikator di atas, diterjemahkan dalam penjelasan sebagai berikut :

- a. Untuk capaian pendidikan dasar dihitung dari persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan data yang berasal dari masing-masing sekolah (yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar) dibagi dengan jumlah penduduk pada Usia 7-15 Tahun berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian pada indikator ini jika dilihat dari capaian Tahun 2020 dengan realisasi 86,64 % mengalami peningkatan di Tahun 2021 dengan capaian 94,53%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah Warga Negara yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar yang jumlahnya berasal dari jumlah anak usia dini yang telah menamatkan pendidikan PAUD. Yang mana untuk pemenuhan indikator SPM ini di prioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu ketimbang bagi masyarakat umum lainnya. Terdapat 28.546 penerima layanan dari total 31.822 siswa yang mendapat pelayanan pendidikan di luar siswa yang kurang mampu. Hal ini juga diperkuat dengan adanya bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang menasar kepada masyarakat kurang mampu baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Namun cakupan pemenuhan SPM untuk kategori SPM Pendidikan Dasar ini belum ditunjang dengan ketercukupan tenaga pendidik dengan jumlah yang minimal. Sehingga jika dilihat dari segi kemampuan serta ketercukupan SDM dengan kisaran kurang lebih sebesar 50%, masih belum cukup optimal untuk memenuhi mutu Standar Pelayanan Minimal. Di samping itu pula, capaian pada indikator ini belum mengakomodir jumlah siswa yang bersekolah pada pondok pesantren serta di luar Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan di dalam defines operasional tidak memuat hal tersebut di atas. Sehingga sangat memungkinka sekali jika sebenarnya capaian terhadap Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) ini dapat melebihi angka yang telah tersajikan.
- b. Sedangkan untuk capaian pendidikan kesetaraan dihitung dari sisa Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan di bagi dengan total Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan capaian di Tahun 2021 sebesar 5,50 % mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2020 sebesar 21,28 % . Angka ini menunjukkan bahwa dari total jumlah penduduk usia 7-18 Tahun baru terdapat 363 orang yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang

belajar di pendidikan kesetaraan dari total penduduk usia 7-18 tahun sejumlah 6.604 jiwa. Sehingga dari capaian tersebut terdapat selisih sebesar 6.241 jiwa yang belum menempuh pendidikan kesetaraan atau sekitar 94,50 jiwa. Capaian di Tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian dengan Tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan jumlah sasaran di Tahun 2020 lebih sedikit ketimbang sasaran di Tahun 2021, dengan jumlah 4.788 orang di Tahun 2020 dan 6.6.604 orang di Tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan persepsi dalam mengkategorikan penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan yaitu penduduk yang pada tahun 2021 berusia pada rentang 7-18 tahun yang mana pada tahun sebelumnya untuk pengkategorian penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan tidak berdasarkan pada rentang usia yang disebutkan atau dengan kata lain total seluruh penduduk yang telah dan sedang menempuh pendidikan kesetaraan. Terkait dengan permasalahan dari pemenuhan indikator SPM Pendidikan kesetaraan diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana serta terobosan untuk siswa yang putus sekolah yang dapat secara langsung "ditangkap" untuk melanjutkan di pendidikan kesetaraan. Namun pada kenyataannya saat ini untuk kondisi anak yang putus sekolah sangat sulit sekali untuk kembali melanjutkan sekolah, yang mana dalam hal ini didominasi oleh pengaruh lingkungan sekitar yang tidak mendukung anak tersebut untuk bersekolah. Kemudian dengan adanya pandemic Covid-19 sejak tahun 2020 yang lalu membuat kebijakan Pembelajaran Tatap Muka ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran Tatap Maya/daring yang sedikit banyak berdampak pada rasa malas anak-anak untuk bersekolah. Kemudian lokasi PKBM yang terbatas jauh dari tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor pendorong masih rendahnya angka kesetaraan.

- c. Dan untuk capaian pendidikan usia dini diperoleh dari jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini) di bagi dengan total jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2020 sebesar 95,09 % mengalami peningkatan di Tahun 2021 dengan capaian sebesar 97,83 % . Peningkatan ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan Angka Partisipasi Warga Negara dalam Pendidikan PAUD pada kelompok usia 5 – 6 Tahun. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan angka sasarnya jika dibandingkan dari Tahun 2020.

4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2021 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV.3

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peayanan Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	467.233.000,00
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	196.496.000,00
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	23.468.231.000,00
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	62.231.450,00
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	16.470.650.000,00
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	40.000.000,00
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU	752.269.000,00
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	478.792.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.833.110.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	36.718.000,00
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.177.096.000,00
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	128.717.640,00	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9.456.502.000,00	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	97.799.467,00	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.945.650.000,00	

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10.000.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.432.826.000,00
				Rehabilitasi Sedang /Berat Perpustakaan Sekolah	782.801.000,00
				Rehabilitasi Sedang /Berat Sarana Utilitas Sekolah	273.392.000,00
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	636.510.000,00
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	45.019.600,00
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	142.586.123,00
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	8.441.240.000,00
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	60.000.000,00
				Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	266.085.000,00
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	889.258.000,00
				Rehabilitas Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	609.072.000,00
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	63.830.000,00
				Pengelolaan DANA BOP PAUD	4.243.280.000,00
3.	Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.198.839.500,00
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal /Kesetaraan	788.400.000,00
				TOTAL	92.494.634.780,00

5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan yang terlibat secara langsung dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.4

Dukungan Personil dalam mendukung Pelayanan Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pendidikan

NO	INSTANSI/BIDANG	URAIAN
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	47 orang PNS dan 49 orang PHL
2	Tenaga kependidikan	Sekolah Dasar 459 orang Sekolah Menengah Pertama 260 orang
3.	Tenaga Pendidik	PAUD 520 orang yang terdiri dari yang telah memiliki ijazah diploma IV atau S1 sebanyak 191 orang Sekolah Dasar 1.411 orang yang terdiri dari yang telah memiliki ijazah diploma IV atau S1 sebanyak 1.233 orang Sekolah Menengah Pertama 647 orang yang terdiri dari yang telah memiliki ijazah diploma IV atau S1 sebanyak 599 orang
4.	Kepala Sekolah	PAUD 64 orang Sekolah Dasar 136 orang Sekolah Menengah Pertama 46 orang
5.	Tenaga penunjang	Sekolah Dasar 205 orang Sekolah Menengah Pertama 123 orang
6.	Pengawas Sekolah	Pengawas PAUD 1 orang Pengawas SD 4 orang Pengawas SMP 5 orang

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Belum tersedianya data jumlah anak yang putus sekolah secara keseluruhan yang mana data yang tersedia saat ini hanya berupa data anak putus sekolah di masing-masing sekolah sehingga membuat Dinas teknis kesulitan dalam melakukan penghitungan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk anak putus sekolah;
- Masih adanya perbedaan persepsi dalam pengkategorian anak usia sekolah yang telah duduk pada jenjang pendidikan tertentu namun tidak sesuai dengan rentang usia jenjang pendidikan tersebut ;
- Lokasi PKBM yang terbatas jauh dari tempat tinggal serta minimnya dukungan keluarga menjadi salah satu faktor pendorong masih rendahnya angka kesetaraan;

- d. Terbatasnya penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten;
- e. Ketersediaan tenaga pendidikan dari segi status pegawai PNS dan honorer masih menjadi polemik jika di tinjau dari segi pendapatan masih belum sesuai sehingga berdampak pada kinerja tenaga pendidik tersebut.
- f. Penyediaan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kualifikasi walalupun jika dilihat dari segi kompetensi sudah memenuhi kriteria.

Adapun Solusi yang hendaknya dilakukan untuk menanggapi permasalahan di atas dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendataan anak putus sekolah sebagai *baseline* data dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian dengan melibatkan lintas sektor
- b. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan di masyarakat terutama untuk Pendidikan Kesetaraan di usia 7-18 Tahun dengan melakukan berbagai inovasi yang dapat mempermudah keterjangkauan masyarakat dalam menempuh pendidikan kesetaraan;
- c. Perlunya adanya penyamaan persepsi antara Kementerian/ Lembaga terkait yang tergabung ke dalam Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal dalam menyusun definisi operasional indicator SPM;
- d. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan stakeholder lain dalam mendukung pembiayaan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah sehingga penganggaran tidak bergantung pada sumber penganggaran APBD saja.
- e. Dalam penyusunan pengadaan/ rekrutmen pegawai di daerah agar dapat mempertimbangkan ketersediaan pegawai yang ada yang dibandingkan dengan pelayanan yang akan diberikan. Sehingga pengadaan pegawai daerah dapat dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;

- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.5

Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada Tahun 2021 serta Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.6

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2020	SASARAN 2020	ANGKA 2020	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	TARGET CAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	3.651	3.833	95,25	3.459	3.725	92,86	100 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	3.505	3.628	96,61	3.348	3.524	95,01	100 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	3.521	3.543	99,38	3.344	3.493	95,73	100 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	11.371	12.182	93,34	10.931	11.708	93,36	100 %
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	35.918	36.722	97,81	36.890	37.506	98,36	100 %
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	89.508	127.449	70,23	111.404	133.183	83,65	100 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	12.651	16.152	78,32	13.756	16.395	83,90	100 %
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	39.249	46.182	84,99	42.316	48.104	87,97	100 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	3.977	.777	105,30	4.080	3.934	103,71	100 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	493	493	100,00	492	492	100,00	100 %
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	1.377	1.921	71,68	1.077	1.749	61,58	100 %

TABEL IV.6

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2020	SASARAN 2020	ANGKA 2020	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	TARGET CAPAIAN
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	4.622	4.386	105,38	5.249	4.862	107,96	100 %
RATA-RATA CAPAIAN					91,52				92,01

Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa kondisi pandemic *Covid-19* sangat mempengaruhi dalam pencapaian pemenuhan SPM terlebih untuk bidang SPM Kesehatan. Terlebih yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung antara tenaga kesehatan dengan masyarakat. Adanya kekhawatiran masyarakat terhadap tenaga kesehatan di masa pandemic serta rasa takut untuk memeriksakan kesehatannya dikarenakan adanya kekhawatiran masyarakat akan diagnose yang mengarah kepada Covid-19.

Kemudian untuk capaian SPM bidang kesehatan, jika dilihat dari table di atas bahwa terdapat beberapa indicator yang capaiannya di atas 100% yang mana jika dikaitkan dengan kebijakan dalam penerapan Standar pelayanan Minimal hal ini tidak dapat dibenarkan. Karena untuk tingkat capaian tertinggi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah 100%. Jika terdapat capaian yang berada di atas 100%, maka dapat dimungkinkan bahwa dalam proses penentuan sasaran mengalami kekeliruan. Namun kebijakan ini agak sedikit berbeda dengan yang terjadi pada Bidang Kesehatan, di mana menurut keterangan dari pihak OPD bahwa capaian di atas 100% tersebut memang benar adanya dan sudah berdasarkan data pelayanan yang berasal dari pihak Puskesmas.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa dari 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada tahun 2021 ini terdapat 5 (lima) indicator SPM bidang kesehatan yang mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun lalu yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus serta Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis.

Dari ketiga indikator di atas tersebut, terdapat 2 (dua) indikator yang melebihi target yaitu indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus, indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) dan ada 1 (satu) indikator yang sesuai dengan target adalah indikator indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat. Sedangkan ada 9 (sembilan) indikator yang belum mencapai target nasional, yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita an minimal tapi dalam hal ini pelayana yang diberikan belum memenuhi standar Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis.

Adapun untuk analisis dari capaian dari masing – masing indikator jika dibandingkan dari capaian di Tahun 2020 ke Tahun 2021 sebagai berikut:

- a) Capaian ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, di Tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2020 yaitu 92,86%. Menurunnya capaian indicator pelayanan kesehatan ibu hamil dikarenakan tidak optimalnya pelaksanaan kunjungan K1 ibu hamil ke faskes untuk pemeriksaan kesehatan, yang mana terdapat 266 ibu hamil yang pelayanannya tidak memenuhi standar. Namun ke-266 ibu hamil tersebut bukan dalam artian tidak mendapatkan pelayan tahap kehamilan. Kemudian, penurunan ini juga disebabkan pada awal saat terjadinya pandemi *Covid-19*, terdapat pembatasan beberapa kegiatan ibu hamil diantaranya penutupan kelas ibu hamil, pembatasan pertemuan di posyandu.
- b) Capaian pelayanan ibu bersalin di Tahun 2021 menurun sebesar 1,6% jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2020 dengan capaian sebesar 95,01%. Sama halnya dengan penurunan capaian indikator pelayanan ibu hamil, penurunancapaian pelayanan ibu bersalin ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid -19 sehingga membuat banyak ibu hamil yang enggan melakukan persalinan di tenaga kesehatan dan lebih memilih untuk melakukan persalin dengan ditolong oleh dukun beranak yang mana di tahun 2021 ditemukan terdapat 12 kasus ibu melahirkan pada dukun beranak. .

TABEL IV.7

Data persalinan yang dilakukan pada dukun beranak

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KASUS
1.	Muntok	3 kasus
2.	Simpangteritip	4 kasus
3.	Jebus	-
4.	Puput	-
5.	Kelapa	4 kasus
6.	Sekar Biru	-
7.	Tempilang	1 Kasus
8.	Kundi	-

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Kondisi masyarakat yang melahirkan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan dikarenakan adanya sugesti di masyarakat bahwa melahirkan dengan bantuan dukun lebih nyaman ketimbang ditolong oleh tenaga kesehatan. Adapun kejadian ini dikarenakan belum ada *punishment* atas kesepakatan yang telah dilakukan antara dukun, puskesmas, polsek dan pemdes yang telah dibuat beberapa waktu yang lalu sehingga karena kondisi ini masa masih banyak yang tidak patuh pada aturan yang telah disepakati. Oleh karena itu perlu disusun sebuah kebijakan untuk menekan angka persalinan di tolong oleh tenaga non nakes.

Disamping itu pula, pelayanan kesehatan ibu melahirkan tidak lepas dengan kondisi kematian ibu yang mana berdasarkan Profil kesehatan Tahun 2021 angka kematian ibu kebanyakan disebabkan oleh factor diantaranya :

TABEL IV.8

Data kematian ibu menurut penyebab per Puskesmas Tahun 2021

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KASUS
1.	Muntok	1 Hipertensi dan 1 Lain-lain
2.	Simpangteritip	1 Infeksi
3.	Jebus	-
4.	Puput	1 Hipertensi Dalam Kehamilan
5.	Kelapa	1 pendarahan
6.	Sekar Biru	1 lain-lainnya
7.	Tempilang	1 lain-lainnya
8.	Kundi	-
	TOTAL KASUS	7 kasus

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

- c) Kemudian terdapat sekitar 164 persalinan yang tidak dilakukan di faskes yang dalam hal ini adalah Puskesmas namun dilakukan di poskesdes namun berdasarkan definisi operasional pada SPM poskesdes bukan merupakan bagian dari faskes. Saat ini Kabupaten Bangka Barat telah memiliki 69 dukun dan 84 orang bidan yang telah dilengkapi dengan kemampuan masing-masing.
- d) Sama hal dengan capaian pelayanan 2 (dua) indicator sebelumnya, capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir juga mengalami penurunan di tahun 2021 dengan capaian 95,73%. Penurunan capaian ini dikarenakan kunjungan pelayanan kepada bayi baru lahir tidak dilakukan secara lengkap yang mana kunjungan untuk bayi baru lahir yang seharusnya dilakukan 3 kali dalam 24 jam pertama, namun jika bayi tersebut dilahirkan di dukun beranak maka pemeriksaan KN 1 dianggap sudah gugur. Saat ini di Kabupaten Bangka Barat

pada tahun 2021 sudah terdapat 9 angka kematian bayi yang mana kejadiannya disebabkan karena BBLR (bayi berat badan rendah) serta asfiksia.

- e) Terkait dengan ketersediaan SDM sebagai tenaga kesehatan sampai dengan saat ini di Kabupaten Bangka Barat di masing-masing desa telah memiliki 2 nakes yang terdiri dari 1 bidan dan 1 perawat yang akan membantu masyarakat dalam tahapan persalinan.
- f) Capaian pelayanan kesehatan balita di Tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2020 yang lalu dengan capaian sebesar 93,36% atau meningkat sebesar 0,02%. Untuk pemenuhan SPM pada Pelayanan Kesehatan Balita tidak dapat 100% dikarenakan harus dilakukan minimal 8 kali mendapat kunjungan. Di masa pandemi seluruh posyandu balita dilakukan penutupan yang kemudian diikuti dengan pelibatan bidan desa sebagai vaksinator sehingga tidak dapat menggerakkan kader untuk melakukan sweeping di lapangan untuk mendatangi balita yang akan di imunisasi.
- g) Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Tahun 2021 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2020 sebesar 0,55%. Walaupun capaian di tahun 2021 mengalami peningkatan namun pembatasan kegiatan belajar mengajar masih diterapkan oleh pihak Pemerintah karena belum meredanya Pandemi Covid-19. Namun dipertengahan tahun setelah mulai melandainya angka kejadian Covid-19 kegiatan tatap muka mulai perlahan-lahan dilakukan walaupun dengan system shift. Sehingga pada saat ini lah pihak Pemerintah gencar untuk melakukan percepatan screening kepada anak sekolah.
- h) Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang diterima oleh siswa sekolah di Kabupaten Bangka Barat dihadapkan dengan kendala masih terbatasnya tenaga kesehatan (dokter) untuk melakukan penjangkauan terhadap anak sekolah, yang terdiri dari dokter, perawat gigi, gizi, perawat dan pengelola program di puskesmas tersebut. Sehingga jadwal yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan keterbatasan tersebut. Sedangkan untuk anak usia sekolah namun yang tidak bersekolah atau putus sekolah penjangkauan tetap dilakukan penjangkauan oleh pihak kader kesehatan remaja yang di masing-masing desa di bawah binaan Puskesmas
- i) Untuk pelayanan kesehatan pada usia produktif, di Tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2020 dengan capaian

sebesar 83,65% atau meningkat 13,42% dari tahun lalu. Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif dari tahun lalu dikarenakan adanya pelaksanaan vaksinasi di lapangan yang salah satu persyaratannya adalah pelaksanaan skrining kesehatan. Namun perlu menjadi bahan perhatian untuk wilayah kerja Puskesmas Muntok tidak sebanding dengan ketersediaan SDM dengan sasaran yang ada di wilayah Kecamatan Muntok. Jumlah SDM di setiap Puskesmas sama namun yang membedakan adalah sasaran di masing-masing Puskesmas. Di samping itu pula untuk SDM nakes banyak yang dilibatkan di dalam kegiatan vaksinasi, tracing dan tracking dan pengawasan pasien covid

- j) Sedangkan capaian indikator pelayanan kesehatan pada usia lanjut capaian di tahun 2021 lebih tinggi ketimbang Tahun 2020 yang kemarin yaitu 5,58% atau dengan capaian sebesar 83,90%. Sama halnya dengan peningkatan pada pelayanan kesehatan pada usia produktif, peningkatan ini disebabkan oleh adanya kebijakan vaksinasi yang dilakukan kepada para lansia, sehingga secara otomatis banyak lansia harus melakukan vaksinasi yang mana tahapannya terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan, Namun walaupun dari segi capaiannya meningkat jika di bandingkan dengan tahun 2020 masih terdapat lansia dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan aktifitas pemeriksaan kesehatan, kemudian kurangnya dukungan dari pihak keluarga, dan di samping itu masih adanya persepsi di masyarakat yang masih beranggapan anti tenaga kesehatan terutama dari segi pengambilan darah bagi lansia tersebut. Kemudian dengan adanya penutupan posyandu lansia di awal tahun dan kemudian baru mulai di buka kembali di pertengahan tahun membuat capaian tidak dapat memenuhi target 100%.
- k) Capaian Pelayanan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2020 yaitu sebesar 2,98%. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi penduduk yang mana didahulukan dengan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Namun untuk SPM indikator pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi masih ditemukan banyak warga negara yang belum melakukan pemeriksaan ke Puskesmas namun telah mengunjungi klinik2 kesehatan lain yang dalam hal ini klinik-klinik kesehatan swasta tersebut tidak melakukan pelaporan kepada pihak Puskesmas terkait layanan pemeriksaan yang dilakukan sehingga capaian pelayanan SPM

pada indikator ini tidak tercapai. Saat ini Dinas terkait memiliki kebijakan terkait dengan rencana untuk mensyaratkan pengeluaran izin usaha/ praktek dokter harus melibatkan tenaga kesehatan di Puskesmas setempat. Hal ini dilakukan agar klinik-klinik swasta nantinya akan bekerjasama dengan tenaga kesehatan yang ada Puskesmas untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang nantinya akan diikuti dengan tertibnya administrasi pencatatan pelayanan Standar Pelayanan Minimal yang telah dilakukan.

- l) Sedangkan untuk capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus di Tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2020 yaitu sebesar 1,59% dengan capaian sebesar 103,71. Pada indikator pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus dilakukan pemeriksaan secara bersamaan dengan usia produktif. Sehingga ketidaktercapaian indikator pelayanan pada usia produktif tersebut dikarenakan belum mencukupinya ketersediaan SDM yang belum dapat mengcover seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat. Yang mana dalam hal ini Puskesmas Muntok yang memiliki cakupan sasaran lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas lainnya dikarenakan jumlah penduduk yang lebih banyak ketimbang Puskesmas lainnya.
- m) Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat pencapaian sesuai dengan target dikarenakan cakupan pelayanan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sudah menjadi sebuah kewajiban Daerah untuk memenuhi pelayanannya.
- n) Untuk capaian pelayanan penderita Tuberculosis yang mendapat pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis, di Tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2020 yaitu sebesar 10,1%. Hal ini dikarenakan orang yang terduga TBC (suspect) masuk kedalam kelompok sangat rentan tertular penyakit Covid-19 serta adanya stigma di masyarakat bahwa orang yang memiliki penyakit TBC akan mudah tertular dengan penyakit Covid-19. Di samping itu penurunan dikarenakan kondisi Covid-19 dan persepsi di masyarakat yang beranggapan bahwa orang dengan gejala batuk akan di diagnosis sebagai penderita Covid 19.
- o) Untuk capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus), di Tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2020 yaitu 2,58%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan capaian

sasaran dari pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV memiliki target sasaran terdiri dari 3 unsur yaitu ibu hamil, warga binaan serta PSK. Yang mana untuk sasarnya lebih tinggi dari tahun kemarin dan melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2021 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.9

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.508.414.940,00
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	268.640.000,00
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	911.903.000,00
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	64.925.000,00
	Pelayanan Kesehatan Balita			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	362.825.000,00
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	187.756.060,00
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	167.008.270,00
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	215.930.000,00
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	18.749.800,00
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	12.749.930,00

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Melitus			Diabetes Melitus	
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	56.744.930,00
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	92.178.150,00
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	149.004.800,00
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	272.985.000,00
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan`	14.951.666.606,00
				Pengadaan Obat, Vaksin	5.507.339.856,00
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.039.228.300,00
			Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota		
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	891.675.000,00
2.		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	473.746.900,00

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.750.000,00
TOTAL					46.649.806.602,00

5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, sebagai berikut:

TABEL IV.10

Dukungan Personil dalam mendukung Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	TENAGA	SARANA KESEHATAN										TOTAL	KET	
		PUSKESMAS MUNTOK	PUSKESMAS SP. TERITIP	PUSKESMAS KUNDI	PUSKESMAS JEJEBUS	PUSKESMAS PUPUT	PUSKESMAS SEKAR BIRU	PUSKESMAS KELAPA	PUSKESMAS TEMPILANG	RS/KLINIK DI KAB BANGKA BARAT	DINAS KESEHATAN			
1	Dr. SPESIALIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	Tenaga kesehatan yang secara langsung memberikan pelayanan terhadap capaian SPM bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas. Untuk tenaga kesehatan di RSUD Sejiran Setason dan di Dinas Kesehatan sebagai pendukung tercapainya SPM
2	DOKTER	8	2	4	4	2	3	4	7	30	0	64		
3	DOKTER GIGI	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0	11		
4	BIDAN	27	29	15	31	14	23	47	25	68	4	283		
5	PERAWAT	31	22	18	25	14	27	37	29	203	11	417		
6	GIZI	4	4	3	4	3	3	5	3	9	1	39		
7	TENAGA KESMAS	7	3	4	1	2	4	6	6	1	10	44		
8	ANALIS TEKNIK LAB MEDIK	3	2	2	4	2	3	3	3	27	0	49		
9	PENATA RONGENT	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11		
	TOTAL	81	63	47	70	38	64	103	74	362	26	928		

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

TABEL IV.11

Dukungan Tenaga Medis Per Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	INDIKATOR SPM	Dr. SPECIALIS	DOKTER	DOKTER GIGI	BIDAN	PERAWAT	GIZI	TENAGA KESMAS	ANALIS TEKNIK LAB MEDIK	PENATA RONGENT	TOTAL
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7	64		283	417					771
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7	64		283	417					771
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7	64		283	417					771
4	Pelayanan Kesehatan Balita		64		283	417	39				803
5	Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah		64	11	283	417	39	44			858
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		64		283	417	39	44			847
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		64		283	417	39	44			847
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		64		283	417		44			808
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM		64		283	417	39	44			847
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ		64		283	417	39	44			847
11	Pelayanan Kesehatan Penderita TB	3	64		283	417		44	4 9	11	871
12	Pelayanan Kesehatan Penderita HIV	3	64		283	417		44	4 9		860

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, baik permasalahan eksternal maupun internal antara lain yaitu:

- a. Adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dikarenakan pandemic *Covid-19* sehingga untuk pencapaian target sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada beberapa indikator tidak terpenuhi;
- b. Masih terbatas tenaga medis khususnya dokter dalam melakukan pelayanan penjangkauan di masyarakat serta belum sesuai ketersediaan tenaga medis pada Puskesmas dengan intensitas pelayanan kepada masyarakat yang akan dilakukan;
- c. Adanya perubahan stigma dan kekhawatiran di masyarakat untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada petugas kesehatan di tengah kondisi pandemi *Covid-19*;
- d. Masih terbatasnya program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan di masyarakat berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
- e. Masih ada sarana pelayanan kesehatan lainnya yang belum maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan dan juga tidak disertai dengan pelaporan ke Puskesmas.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, antara lain:

- a. Advokasi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kecamatan.
- b. Dalam penyusunan pengadaan/ rekrutmen pegawai di daerah agar dapat mempertimbangkan ketersediaan pegawai yang ada yang dibandingkan dengan pelayanan yang akan diberikan. Sehingga pengadaan pegawai daerah dapat dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan.
- c. Meningkatkan penyuluhan di masyarakat dalam rangka penyampaian informasi terkait dengan SPM baik melalui penyuluhan massa, media informasi dan lainnya.

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.12

Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %	Setiap Tahun

3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum pada Tahun 2021 serta Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.13

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2020	SASARAN 2020	ANGKA 2020	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	TARGET CAPAIAN
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	183.401	199.823	91,78	184.768	199.784	92,48	100 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	189.052	199.823	94,61	109.856	199.784	54,99	100 %
	RATA-RATA				93,20			73,74	

Penerapan Standar pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat. Pelaksanaan SPM urusan Pekerjaan Umum merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari kedua indikator tersebut hanya 1 (satu) indikator yang capaiannya meningkat jika dibandingkan tahun kemarin dan 1 (satu) indikator yang capaiannya lebih rendah dari tahun kemarin. Namun walaupun ada indikator yang mengalami peningkatan di tahun 2021, kedua indikator tersebut tidak ada yang mencapai target 100%.

Pada indikator pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari jika dilihat dari capaian pelayanan SPM memang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun yang lalu namun tidak terjadi pada cakupan sasaran yang mengalami penurunan dari tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan jumlah penduduk yang menjadi sasaran rumah tangga pemeriksaan air bersih oleh Dinas Kesehatan. Cakupan pemenuhan kebutuhan pokok air minum ini berasal dari jalur perpipaan (seperti PDAM, Pamsimas) dan non perpipaan (sumur). Di tahun 2021 yang lalu terdapat program kegiatan pembangunan sarana air bersih di 5 desa (Dendang, Simpang 3, Air Menduyung, Pangek Dan Berang) yang bersumber dari DAK untuk pembangunan pamsimas serta sumber APBD di Desa Pusuk.

Untuk sarana dan prasarana air minum kategori layak untuk kebutuhan air bersih adalah berupa saluran perpipaan atau sumur yang memiliki tutup dengan jarak dengan tanki septik lebih dari 10 meter, dengan kondisi air tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak berasa. Sampai dengan saat ini di Kabupaten Bangka Barat pada kategori pemenuhan air untuk kebutuhan air minum baru pada kategori layak belum mengarah ke akses aman yaitu sebesar 184.768 jiwa (92,48%). Hal ini dikarenakan masih banyak sarana dan prasarana air minum yang ada belum memenuhi syarat akses aman.

Di Kabupaten Bangka Barat sendiri masih ada masyarakat yang menggunakan akses air minum yang tidak layak yang berasal dari sungai dan pemandian sebesar 15.016 jiwa atau sekitar 7,52%. Untuk itu berbagai program pemerintah serta stakeholder lainnya masih sangat di butuhkan untuk memenuhi ketersediaan sumber air bersih di daerah. Beberapa waktu yang lalu Pemerintah Daerah melalui Bappelitbangda pernah melakukan kajian terkait ketersediaan sumber air baku di wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan menggandeng pihak Perguruan Tinggi sebagai tim kajiannya. Dari data tersebut diperoleh bahwa tidak semua tempat di Kabupaten Bangka Barat yang berpotensi sebagai sumber air baku dapat dijadikan sebagai sumber air baku. Hal ini dikarenakan kondisi sumber air tidak memungkinkan untuk dikonsumsi secara langsung sebagai air minum namun harus dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu sampai nantinya dapat dikonsumsi oleh masyarakat sebagai air minum.

Kebutuhan air minum manusia harus ditunjang dengan ketersediaan air yang layak untuk dikonsumsi. Untuk kawasan perdesaan kebutuhan minimal air minum adalah 60 liter/hari per orang dan 80 liter/hari per orang di kawasan perkotaan dengan akses ke sumber air minum yang jarak tempuh tidak lebih dari 30 menit serta jarak sumber air baku (sumur) dengan septitank terdekat lebih dari 10 meter.

TABEL IV.14

Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Tahun 2021
Kabupaten Bangka Barat

No	Kecamatan	TARGET	REALISASI		
		Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani
		(unit Jiwa)	(unit Jiwa)	(unit Jiwa)	(unit Jiwa)
1	2	4	5	6	7
1	MUNTOK	52.056	17.984	30.592	3.480
2	SP TERITIP	29.716	4.760	23.572	1.384
3	JEBUS	21.864	556	20.348	960
4	PARITTIGA	34.476	1.512	31.320	1.644
5	KELAPA	34.096	2.376	27.580	4.140
6	TEMPILANG	27.576	1.124	23.044	3.408
Total		199.784	28.312	156.456	15.016
Persentase Layanan			14,17%	78,31%	7,52%

Sumber data : Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Kemudian terkait dengan capaian indikator Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang mana capaian di tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika di bandingkan dengan capaian tahun 2020 yang lain. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan cara penghitungan capaian indikator tersebut di mana pada tahun sebelumnya untuk capaiannya dihitung dari rumah tangga yang memiliki jamban layak dianggap sudah masuk kategori mendapat pelayanan SPM air limbah, namun untuk tahun 2021 cara penghitungan bukan menggunakan jamban layak lagi tetapi dilihat dari keberadaan tanki septik kriteria dasar (berupa cubluk di kawasan perdesaaan) dan layak (sesuai SNI). Untuk kawasan perdesaan persyaratan tanki septik hanya pada kriteria dasar saja namun untuk wilayah perkotaan persyaratan tanki septik tidak hanya dilihat dari yang telah memiliki kriteria dasar saja namun juga harus memenuhi kriteria layak.

TABEL IV.15

Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Menurut Kategori
Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat

No	Kecamatan	Kategori	TARGET	REALISASI				
			Total	Tanpa Akses	Akses Dasar	Akses Layak	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T
			(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)
1	MUNTOK	Perkotaan	10.270	9.093	0	1.177	0	0
		Perdesaan	2.744	69	2.676	0	0	0
2	SP TERITIP	Perkotaan	1.132	1.132	0	0	0	0
		Perdesaan	6.297	642	5.265	390	0	0
3	JEBUS	Perkotaan	1.593	1.588	0	5	0	0
		Perdesaan	3.873	74	3.771	28	0	0
4	PARITTIGA	Perkotaan	4.603	4.603	0	0	0	0
		Perdesaan	4.016	147	3.870	0	0	0
5	KELAPA	Perkotaan	2.108	2.108	0	0	0	0
		Perdesaan	6.416	549	5.747	120	0	0
6	TEMPILANG	Perkotaan	2.069	2.069	0	0	0	0
		Perdesaan	4.825	408	4.297	120	0	0
Total			49.946	22.482	25.625	1.840	0	0

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Jika di lihat dari table di atas, dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 49.946 RT, bahwa terdapat 27.464 RT yang telah terpenuhi pelayanan air limbah domestik yang mana angka ini diperoleh dari 25.625 RT yang telah memiliki akses dasar ditambah dengan 1.840 RT yang telah memiliki akses layak. Sehingga dari data tersebut terlihat bahwa masih terdapat 22.482 RT di Kabupaten Bangka Barat yang sarana pengolahan Air Limbah domestiknya tanpa akses. Perubahan kategori penghitungan inilah yang membuat penurunan capaian pada indicator pelayanan air limbah domestic jika di dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu. Di samping itu pula, dari data di atas dapat terlihat bahwa untuk jumlah tangga yang menjadi target pemenuhan SPM adalah 49.946 rumah tangga atau sekitar 199.784 jiwa dengan asumsi bahwa dalam 1 (satu) rumah tangga terdapat 1 orang Kepala Rumah Tangga beserta 3 orang anggota rumah tangga.

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dari 2 (dua) indicator tersebut keseluruhannya tidak ada yang mencapai target SPM. Sehingga perlu dilakukan percepatan serta peningkatan koordinasi dalam pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum ini.

4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2021 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.16

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	294.867.500
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.274.066.260
				Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Tekhnis SPAM	105.000.000
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	4.283.092.500
				Opearasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	25.000.000
				Pembangunan Penyusunan Rencana Kebijakan, Stratgei dan Tekhnis Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/ Kota	105.000.000
TOTAL					7.087.026.260

5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat berjumlah PNS 33 Orang dan PHL 55 orang.

Namun yang terlibat secara langsung dalam proses penerapan dan pencapaian SPM berjumlah 5 orang PNS, 4 orang PHL dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat, dan TFL Sanitasi 6 orang dan TFL Pamsimas 3 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya pendataan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berkaitan dengan sasaran pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah sehingga capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2020 pada urusan ini belum dapat merepresentasikan sasaran pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesungguhnya di lapangan;
- b. Belum beroperasinya sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) beserta sumber daya manusia yang nantinya akan menangani pemenuhan pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja;
- c. Masih terbatasnya dukungan penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun solusi yang harus diambil dari permasalahan yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Agar Pemerintah Daerah melakukan pendataan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum dengan merujuk pada indikator pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan data sasaran yang sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat.
- b. Agar sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) tersebut dapat segera dioperasikan dengan berdasarkan prosedur yang ditetapkan.
- c. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan stakeholder lain dalam mendukung pembiayaan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah sehingga penganggaran tidak bergantung pada sumber penganggaran APBD saja.

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)nya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.17

Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana yang Memiliki Rumah Terkena Dampak Bencana	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten.	100 %	Setiap Tahun

3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.18

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN	SASARAN	ANGKA	CAPAIAN	SASARAN	ANGKA	TARGET
			2020	2020	2020	2021	2021	2021	CAPAIAN
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana yang Memiliki Rumah Terkena Dampak Bencana	2	2	100	2	2	100	100 %
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten.	0	0	0	0	0	0	100 %
RATA-RATA					50%			50%	

Untuk capaian SPM bidang Perumahan terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebesar 100% (mencapai target) serta Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 0%. Sehingga untuk rata-rata capaian SPM bidang Perumahan di tahun 2021 adalah sebesar 50%. Untuk capaian SPM bidang perumahan jika di bandingkan dengan capaian tahun lalu tidak mengalami perubahan alias tetap. Hal ini dikarenakan untuk capaian indikator Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten dalam 3 tahun terakhir sebesar 0%. Hal ini dikarenakan belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan relokasi rumah masyarakat ke tempat yang aman, jauh dari tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya misalkan sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah sempadan sungai, daerah rawan bencana serta daerah-daerah lainnya yang masuk dalam kategori daerah yang rawan bahaya.

Adapun untuk penjelasan dari capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- a. Capaian indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana di Kabupaten Bangka Barat untuk Tahun 2020 adalah 100%. Hal ini dikarenakan target capaian dari indikator yang berjumlah 2 (dua) unit rumah layak huni, terealisasi sebanyak 2 (dua) unit yang mana untuk penetapan 2 (dua) unit rumah layak huni korban bencana tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/220.B/ Disperkimhub/ 2021 tentang Penetapan penerima bantuan kegiatan pembnagunan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021. Pembangunan 2 (dua) unit rumah ini dilakukan akibat bencana sambaran petir yang berlokasi di Kecamatan Simpang Teritip dan Tempilang.

TABEL IV.19

Data penerima Bantuan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	NAMA	PENYEBAB BENCANA	LOKASI
1.	Sariato	Rumah terbakar akibat kWh PLN disambar petir	RT 02 Dusun I Desa Pangek Kecamatan Simpangteritip
2.	Robiah	Rumah terbakar akibat kWh PLN disambar petir	Jl. Raya Tanjung Niur Padang Bawah RT.002/1 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang

- b. Untuk Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten belum terealisasi yaitu dengan capaian 0, dikarenakan belum adanya masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah serta belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan relokasi kepada masyarakat dalam 3 (tiga) Tahun ini.

Penerapan SPM bidang Perumahan tidak dapat terlepas dari penerapan SPM bidang trantibumlinmas dimana untuk pemenuhan kedua SPM ini harus didukung dengan ketersediaan dokumen –dokumen penanganan daerah rawan bencana yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kajian resiko bencana, dokumen penanggulangan bencana serta dokumen rencana kontigensi yang mana sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki ketiga dokumen tersebut.

Ketiga dokumen tersebut merupakan dokumen yang sangat penting untuk dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah karena didalamnya termuat diantaranya titik-titik daerah rawan bencana beserta jumlah jiwa yang menjadi pijakan dalam perencanaan SPM khususnya yang berkaitan dengan kejadian bencana. Dengan keberadaan dari dokumen ini juga nantinya akan dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana dalam upaya penanggulangan bencana daerah.

4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2021 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.20

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana yang Memiliki Rumah Terkena Dampak Bencana	Pengembangan Perumahan	Pembnagunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relkasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	130.000.000

5. Dukungan Personil

Secara umum keterlibatan seluruh pegawai dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat berada pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah personil PNS 33 Orang, PHL 55 Orang. Namun yang terlibat secara langsung dalam proses penerapan dan pencapaian SPM terdiri dari 5 Orang PNS dan 2 Orang PHL.

6. Permasalahan dan Solusi

Tentunya dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah, yang diantaranya yaitu :

- a. Tingkat pemahaman dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) di daerah yang belum komprehensif antar *stakeholder*/sektor sehingga membuat belum maksimalnya penerapan Standar pelayanan Minimal di daerah;
- b. Belum tersedianya dokumen –dokumen penanganan daerah rawan bencana yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kajian resiko bencana, dokumen penanggulangan bencana serta dokumen rencana kontigensi dipergunakan dalam identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dan lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
- c. Minimnya alokasi anggaran kegiatan penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun solusi yang harus dilakukan untuk menjawab semua permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya peningkatan komitmen, koordinasi lintas sektor serta penyamaan persepsi antar pihak-pihak yang terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat.
- b. Agar daerah dapat segera dilakukan penyusunan ketiga dokumen tersebut dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan akan dokumen tersebut yang tentunya dengan melibatkan lintas sektor;
- c. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan stakeholder lain dalam mendukung pembiayaan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah sehingga penganggaran tidak bergantung pada sumber penganggaran APBD saja.

E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. penyediaan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.21

Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana atau yang Terdampak Terkena Bencana	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran atau Terdampak Kebakaran	100 %	Setiap Tahun

3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.22

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2020	SASARAN 2020	ANGKA 2020	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	TARGET CAPAIAN
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten	12	12	100	567	567	100	100 %
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	218	2.765	7,88	150	2765	5,42	100 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	164	2.765	5,93	190	2765	6,87	100 %
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana atau yang Terdampak Terkena Bencana	536	536	100	7042	7042	100	100 %
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran atau Terdampak Kebakaran	13	13	100	24	24	100	100 %
	RATA-RATA					62,76		62,46	

Pelaksanaan SPM bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dilakukan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan 5 (lima) indikator yang terdiri dari :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan indikator :
 - Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator :
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Adapun untuk rata-rata capaian SPM bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian di tahun 2020 yang lalu. Namun tentunya untuk capaian dari masing-masing indikator masing-masing berbeda antara tahun 2020 dengan 2021. Rata-rata capaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 adalah 62,46%, di mana dari 5 (lima) indikator terdapat 3 (tiga) indikator yang mendapatkan capaian 100 persen alias memenuhi target. Namun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan di mana pada tahun 2020 capaian nilai SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar 62,76%.

Dari 5 (lima) indikator urusan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdapat 3 (tiga) indikator yang capaiannya mencapai target, yaitu indikator Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum; indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana serta indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Sedangkan 2 (dua) indikator lainnya yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana belum mencapai target.

Adapun untuk penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a) Capaian pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di Tahun 2021 sama halnya dengan capaian di Tahun 2020 yaitu mencapai target. Hal ini dikarenakan seluruh warga yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran mendapatkan pelayanan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait. Namun jika dilihat dari sasaran serta capaian indikator ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan capaian dan sasaran tahun lalu. Hal ini dikarenakan banyaknya dilakukan penegakan terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Bangka Barat diantaranya yaitu :

TABEL IV.23

Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat yang ditegakkan Tahun 2021

NO	NAMA PERDA	JENIS PENEGAKAN
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum	a) Pengawasan Rumah Makan dan Tempat Hiburan b) Pengecekan Lahan Milik Pemda c) Penertiban Tambang Inkonvensional Ilegal d) Penerbitan Tempat Hiburan Malam e) Pengecekan Pemilik Kontraan dan kos-kosan
2.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pengecekan Data Kependudukan Penghuni Kontrakan dan kos-kosan
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	Razia kawasan tanpa rokok
5.	Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Percepatan Pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	Protokol Kesehatan di Sekolah dan Pasar

- b) Sedangkan untuk capaian indikator pelayanan informasi rawan bencana mengalami penurunan dari angka 7,88% di Tahun 2020 menjadi 5,42% di Tahun 2021. Penurunan ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di kawasan bencan pada tahun 2021 yang lalu.
- c) Sedangkan untuk capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga di Tahun 2021 mengalami peningkatan jika di dibandingkan dengan capaian di Tahun 2020. Peningkatan ini juga disebabkan oleh dikarenakan adanya kegiatan kesiapsiagaan bencana yang salah satunya untuk penanganan bencana non

alam Covid-19 yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan aparaturnya serta masyarakat.

- d) Untuk indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Tahun 2021 yang capaiannya sama dengan capaian di Tahun 2020 yaitu sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun jika dilihat dari sasaran yang ada, jumlah capaian sasaran di Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 522 orang di Tahun 2020 menjadi 7042 di Tahun 2021 yang berasal dari kejadian covid. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan korban bencana Covid-19 di tahun 2021 yang lalu yang menjadi tahun puncak kejadian Covid-19 di seluruh wilayah di dunia. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yang mana di Tahun 2019 hanya mencakup bencana alam saja namun di tahun 2020 cakupannya ditambah evakuasi korban bencana wabah Covid-19 dan bencana alam.

Adapun dengan rincian penyelamatan dan evakuasi korban bencana di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL IV.24

Jumlah Evakuasi Kejadian Bencana di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH
1.	Banjir	1.423
2.	Kebakaran Permukiman	33
3.	Angin Kencang	47
4.	SAR	14
5.	Abrasi	60
6.	Covid-19	5.465
	TOTAL	7.042

- e) Sedangkan untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran capaiannya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Ini mengartikan bahwa seluruh kejadian kebakaran mendapatkan penyelamatan dan evakuasi oleh petugas.

Pelaksanaan SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kedepannya diharapkan dapat lebih meningkat, yang mana hal ini dikarenakan pada Tahun 2021 yang lalu adanya pembentukan organisasi perangkat daerah di bidang penanganan bencana yang juga dalam hal ini ditunjang dengan adanya Satuan Tugas Tanggap Bencana sebanyak dari 26 orang serta petugas pemadam kebakaran akan membuat pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencegahan serta penanganan bencana di daerah dapat lebih optimal lagi.

4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2021 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.25

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	14.200.000
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	97.630.500
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	2.357.835.000
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24.275.000
2	Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Penanggulangan Bencana			

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	137.360.000
4	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana atau yang Terdampak Terkena Bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1.410.066.250
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4.572.500
5	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran atau Terdampak Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.561.030
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.875.000
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	156.085.000
TOTAL					4.246.460.280,00

5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut:

- a. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berjumlah 46 orang terdiri dari 31 orang PNS serta 15 orang PHL;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjumlah 21 orang terdiri dari 14 orang PNS serta 7 orang PHL;
- c. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah personil 115 Orang merupakan PHL SatPol PP;
- d. Anggota Tim Reaksi Cepat dengan jumlah personil 20 orang PHL TRC ;dan
- e. Anggota Pemadam Kebakaran berjumlah 8 orang PHL dengan 2 orang yang telah memiliki aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam.

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah, yang diantaranya yaitu;

- a. Masih ada kegiatan yang belum diakomodir untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal dikarenakan keterbatasan anggaran ;
- b. Belum tersedianya dokumen –dokumen penanganan daerah rawan bencana yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kajian resiko bencana, dokumen penanggulangan bencana serta dokumen rencana kontigensi dipergunakan dalam identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dan lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
- c. Masih terbatasnya sarana prasarana dan personil untuk mendukung pencapaian SPM di mana jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di setiap kecamatan harus ada personil Polisi Pamong Praja serta harus ada UPT Kebakaran di setiap kecamatan;
- d. Minimnya alokasi anggaran kegiatan penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun solusi yang harus dilakukan untuk menjawab semua permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan perencanaan OPD teknis pengampuh SPM agar dapat diprioritaskan pada pemenuhan program/ kegiatan/ sub kegiatan Stnadar Pelayanan Minimal;
- b. Agar daerah dapat segera dilakukan penyusunan ketiga dokumen tersebut dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan akan dokumen tersebut yang tentunya dengan melibatkan lintas sektor;
- c. Adanya peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan stakeholder lain dalam mendukung pembiayaan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah sehingga penganggaran tidak bergantung pada sumber penganggaran APBD saja.

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.26

Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam dan diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara sebagai Anak Terlantar di Luar dan di Dalam Panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar di Luar dan di Dalam Panti	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususna Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususna Gelandangan dan Pengemis di Luar dan di Dalam Panti	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang menjadi Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	Setiap Tahun

3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.27

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dengan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2020	SASARAN 2020	ANGKA 2020	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	TARGET CAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti	332	332	100	816	816	100	100 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara sebagai Anak Terlantar di Luar Panti	642	642	100	11164	11164	100	100 %
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	469	269	174,35	5968	5968	100	100 %
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	8	8	100	4	4	100	100 %
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang menjadi Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	431	431	100	3317	3.317	100	100 %
	TOTAL					159,97		100	

Pada tahun 2021 capaian untuk masing-masing indikator SPM bidang sosial seluruhnya mencapai target (100%) dengan jumlah sasaran di masing-masing indikator mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan sasaran di tahun 2020 yang lalu. Total seluruh sasaran pada indikator SPM bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial sebanyak 17. 948 jiwa dengan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

TABEL IV.28

Data Jumlah Warga Negara Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2021
Kabupaten Bangka Barat

NO	JENIS LAYANAN	BANTUAN						TOTAL
		PERMAKANAN	PKH BPNT	PKH	BPNT	KIP	KIS	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	164	32	7	80	9	524	816
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	342	0	0	0	3.679	7.143	11.164
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	580	217	233	1.399	0	3.539	5.968
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	4	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kementerian Sosial Tahun 2021

Untuk penjelasan capaian masing-masing indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Capaian rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti di Tahun 2021 sama halnya dengan capaian Tahun 2020 yang lalu yaitu mencapai target 100%. Di tahun 2021 indikator ini mengalami peningkatan baik dari segi capaian maupun sasaran dimana dari 332 jiwa di tahun 2020 menjadi 816 jiwa di tahun 2021.
- b) Untuk capaian sasaran indikator rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti capaian di Tahun 2021 sama halnya dengan capaian Tahun 2020 yang lalu yaitu mencapai target 100%. Di tahun 2021 indikator ini mengalami peningkatan baik dari segi capaian maupun sasaran dimana dari 642 jiwa di tahun 2020 menjadi 11.164 jiwa di tahun 2021. Ini dikarenakan adanya penambahan cakupan sasaran penerima layanan anak terlantar di luar panti yang disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi data kesejahteraan sosial oleh pekerja sosial. Sehingga dengan adanya penambahan cakupan penerima bantuan tersebut berbanding lurus dengan alokasi anggaran yang telah disediakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sehingga capaian di Tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.
- c) Sama halnya dengan indikator lainnya, untuk indikator rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti untuk cakupan sasaran dan capaian di Tahun 2021

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan cakupan sasaran dan capaian Tahun 2020 yaitu dari 469 jiwa menjadi 5.968 jiwa. Hal ini dikarenakan adanya penambahan cakupan sasaran lanjut usia terlantar yang berasal dari data DTKS yang menyebabkan capaian indikator mengalami peningkatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.

- d) Sedangkan untuk capaian rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti di Tahun 2021 sama seperti capaian 2020 yaitu 100% walaupun dari segi sasaran penerima pelayanan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti mengalami penurunan yaitu dari 8 orang di Tahun 2020 menjadi 4 orang di Tahun 2021.
- e) Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota juga sama seperti capaian tahun 2020 yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan cakupan sasaran yang disebabkan oleh bencana Covid-19 di Kabupaten Bangka Barat.

4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2021 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (*APBD*) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.29

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam dan diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	2.124.800.000
				Pemberian Layanan Kedaruratan	75.281.750
				Penyediaan Permakanan	55.658.875
2	Jumlah Warga Negara sebagai Anak Terlantar di Luar dan di Dalam Panti	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50.000.000
3	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar di Luar dan di Dalam Panti				

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
4	Jumlah Warga Negara yang menjadi Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	1.933.000.000
TOTAL					4.238.740.625,00

5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial terdiri dari pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat yang membidangi urusan sosial dan Rehabilitasi Sosial dengan jumlah personil PNS 8 Orang (1 Pekerja Sosial dan 1 Penyuluh Sosial) serta PHL 10 orang.

Di samping itu dalam pelaksanaan tugas di Bagian Rehabilitasi Sosial juga dibantu oleh 6 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 1 pekerja sosial anak, 1 fungsional pekerja sosial, 74 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan pendamping rehabilitasi sosial 2 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Adapun untuk permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya alokasi anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pemenuhan pelayanan dasar pada pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- b. Belum optimalnya kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikarenakan banyaknya tugas tambahan yang dibebankan kepada mereka di luar tugas fungsi pokoknya;
- c. Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan sosial.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, antara lain:

- a. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan stakeholder lain dalam mendukung pembiayaan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah sehingga penganggaran tidak bergantung pada sumber penganggaran APBD saja.

- b. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan di masyarakat melalui program penanggulangan kemiskinan lintas sektor;
- c. Meningkatkan kuantitas sumber daya manusia sosial/ kader sosial berbasis masyarakat sehingga mampu melaksanakan tugas untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.
- d. Adanya kebijakan untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2021, didukung program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 6 (enam) perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang memiliki urusan pemenuhan bidang Standar Pelayanan Minimal. Secara keseluruhan, penggunaan anggaran untuk mencapai penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 telah dianggarkan sebesar Rp 154.846.668.547,00 yang bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021. Berdasarkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, ditetapkan program pembangunan sebagai pendukung pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Dasar Masyarakat sebanyak 12 program yang berada pada 6 (enam) OPD yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

TABEL IV.30

Alokasi Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1. Urusan Pendidikan				92.494.634.780
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	467.233.000,00
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	196.496.000,00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	23.468.231.000,00
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	62.231.450,00
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	16.470.650.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	40.000.000,00
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU	752.269.000,00
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	478.792.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.833.110.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	36.718.000,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.177.096.000,00
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Siswa	128.717.640,00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9.456.502.000,00
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	97.799.467,00
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.945.650.000,00
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10.000.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.432.826.000,00
			Rehabilitasi Sedang /Berat Perpustakaan Sekolah	782.801.000,00
			Rehabilitasi Sedang /Berat Sarana Untilitas Sekolah	273.392.000,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	636.510.000,00
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	45.019.600,00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	142.586.123,00
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	8.441.240.000,00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	60.000.000,00
			Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	266.085.000,00
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	889.258.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			Rehabilitas Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	609.072.000,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	63.830.000,00
			Pengelolaan DANA BOP PAUD	4.243.280.000,00
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	8.198.839.500,00
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal /Kesetaraan	788.400.000,00
2. Urusan Kesehatan				46.649.806.602,00
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	268.640.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	911.903.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	64.925.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	362.825.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	187.756.060,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	167.008.270,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	215.930.000,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	18.749.800,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.749.930,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	56.744.930,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	92.178.150,00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	149.004.800,00
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	272.985.000,00
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.951.666.606,00
			Pengadaan Obat, Vaksin	5.507.339.856,00
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.039.228.300,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		Daerah Kabupaten/ Kota		
		Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	891.675.000,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	473.746.900,00
		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.750.000,00
3. Urusan Pekerjaan Umum				7.087.026.260
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	294.867.500
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.274.066.260
			Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Tekhnis SPAM	105.000.000
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	4.283.092.500
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	25.000.000
			Pembangunan Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Tekhnis Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/ Kota	105.000.000
4. Urusan Perumahan Rakyat				130.000.000
1	Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	130.000.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
5. Urusan Trantibumlinmas				4.246.460.280
1	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	14.200.000
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	97.630.500
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	2.357.835.000
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24.275.000
2	Penanggulangan Bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	137.360.000
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.410.066.250
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4.572.500
3	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.561.030
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.875.000
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	156.085.000
6. Urusan Sosial				4.238.740.625
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Penyediaan Permakanan	2.124.800.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	75.281.750
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	55.658.875
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50.000.000
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	1.933.000.000
TOTAL				154.846.668.547,00

Dari total anggaran Program/ kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 dapat terlihat bahwa total anggaran di Tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan total anggaran di Tahun 2020 yang lalu yaitu Rp. 132.158.100.144,00 menjadi Rp. 154.846.668.547,00 atau meningkat sekitar 14,65% dari total anggaran tahun sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan penganggaran terutama untuk pembiayaan urusan Kesehatan untuk membiayai *Covid-19* yang berdampak kepada seluruh pelaksanaan program/ kegiatan Pemerintah Daerah serta adanya kebijakan daerah untuk tidak melakukan refocusing terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal di masing-masing OPD pengampuh bidang SPM.

Namun jika dilihat dari jumlah alokasi anggaran per masing-masing urusan, terdapat 2 (dua) urusan yang mengalami penurunan alokasi anggaran jika dibandingkan dengan penganggaran tahun lalu yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pada Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat serta Urusan Sosial.

Dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di atas, dapat diperoleh hasil bahwa dari total jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 29 indikator terdapat 12 indikator yang telah memenuhi target atau dengan persentase sebesar 41,38%. Sedangkan 17 indikator lainnya belum memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ini akan menjadi sebuah gambaran kedepan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menindaklanjutinya dan menyusun strategi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangka Barat dalam arah kebijakan Daerah.

Di samping itu pula, pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2020 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana hal ini dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang menimpa hampir seluruh belahan dunia yang membuat seluruh kebijakan mengalami perubahan sangat drastis. Namun, hal ini

merupakan sebuah tantangan yang harus di hadapi oleh Pemerintah baik di Daerah maupun Pusat untuk dapat melakukan perubahan serta penyesuaian berbagai kebijakan yang dapat tetap mempertahankan kondusifitas di masyarakat pasca pandemi *Covid-19* terjadi. Memang dalam penerapannya tidaklah mudah, dikarenakan hal ini merupakan hal yang tidak biasa dan baru yang harus di hadapi dari semua lini baik dari pihak Pemerintah, industri, hingga masyarakat. Namun berkat sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta kolaborasi yang telah di bangun dengan *stakeholder* dan elemen masyarakat membuat kondisi perlahan mulai bangkit.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) di tingkat Daerah memang masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan masih banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan yang dihadapi diantaranya sumber daya manusia, pengetahuan, komitmen, komunikasi serta ketersediaan anggaran. Namun setidaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat berusaha untuk melakukan pembenahan serta peningkatan kualitas capaian Standar Pelayanan Minimal (*SPM*). Tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan serta peran Pemerintah Pusat dalam upaya optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) di Daerah. Harapan Kami melalui Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) Kabupaten Bangka Barat ini menjadi sebuah pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Daerah dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi warga di Kabupaten Bangka Barat sepenuhnya yang nantinya akan membawa kepada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang seutuhnya.

Berdasarkan hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 di atas, tentunya telah memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah tentang capaian Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) saat ini. Tentunya dari hasil tersebut, akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi dalam arah kebijakan Daerah untuk mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) di Kabupaten Bangka Barat.

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan, penyusunan rencana pemenuhan serta pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
2. Peningkatan koordinasi serta komitmen pemangku kepentingan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) di Daerah mulai dari Kepala Daerah hingga Perangkat Daerah yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (*SPM*);

3. Peningkatan dukungan kebijakan dan sumber penganggaran di luar APBD sebagai bentuk penguatan program dan kegiatan pemenuhan penyelenggaraan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); serta
4. Penguatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah sebagai bentuk pengawalan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah pada Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 pada dasarnya ditujukan untuk mencapai kemajuan yang diindikasikan oleh kemandirian, produktif, inovatif, adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat dalam segala sektor. Kemajuan suatu daerah sejatinya memiliki keterpautan yang erat dengan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah yang maju adalah daerah yang masyarakatnya sejahtera. Upaya pemerintah untuk memajukan daerah adalah juga langkah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, yang dicirikan oleh peningkatan capaian kinerja di berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, kemajuan suatu daerah juga diindikasikan oleh capaian pengembangan inovasi daerah, penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penghargaan yang diterima oleh daerah sebagai wujud pengakuan dari pemerintah dan masyarakat atas kinerja yang telah diwujudkan.

Melalui penyusunan LPPD ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan selama satu tahun anggaran atau periode tertentu, serta dapat mengetahui pencapaian dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejatinya pembangunan daerah di Kabupaten Bangka Barat selalu diorientasikan untuk pembangunan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Upaya tersebut dijabarkan melalui berbagai program dan kegiatan yang ditujukan secara luas dan merata bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi mikro yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan.

Secara menyeluruh penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan prinsip *good governance*, meskipun ada permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang masih tetap melanda hampir di seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Bangka Barat. Sehingga diperlukan berbagai penyesuaian baik dari segi anggaran maupun kebijakan terkait dengan pelaksanaan roda pemerintahan. Namun hal ini tidak membuat birokrasi menjadi terhambat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi tersendat. Semua hal-hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah diupayakan tetap berjalan dengan optimal dan maksimal. Tantangan pandemi Covid-19 juga telah mentransformasi berbagai kegiatan urusan pemerintahan dengan lebih intensif didalam memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini tentu saja menjadi momentum positif didalam peningkatan urusan dan pelayanan pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi bagi seluruh aparat pemerintahan daerah pada tahun kedepan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan senantiasa melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada.

Kami sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021. Buku laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, serta tercipta timbal-balik (*feedback*) sebagai masukan untuk alternatif perbaikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat pada masa yang akan datang. Sesungguhnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang kita capai pada tahun 2021 menjadi kebanggaan kita bersama dan perlu disyukuri. Oleh karena itu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerjasama segenap pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat serta seluruh

lapisan masyarakat atas terciptanya sinergitas dan hubungan harmonis yang terbangun selama ini.

Akhirnya melalui laporan ini kami harapkan menjadi gambaran penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kemudian dilakukan evaluasi dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di masa yang akan datang. Dan perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan daerah di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

The seal of Kabupaten Bangka Barat is circular, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'BUPATI BANGKA BARAT' at the top and 'BANGKA BARAT' at the bottom, with a star on the left side.
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN, SH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat,

Dusun Daya Baru Desa Belo Laut Pal 4

Muntok